



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI
SUMATERA UTARA

PROFIL PERWAKILAN 2023

BPK SUMUT
BERKARISMA

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb.

Salam Sejahtera untuk kita semua.

Pertama-tama, kami panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin dan karunia-Nya, buku Profil Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 dapat diterbitkan.

Buku ini merangkum berbagai capaian dan kegiatan yang dilakukan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2022-2023.

Terkait dengan kinerja yang telah kami capai pada tahun 2022-2023, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berperan dalam pencapaian tersebut.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing setiap langkah – langkah kita dalam mewujudkan BPK RI yang menjunjung tinggi Independensi, Integritas, dan Profesionalisme.

BPK Sumut BERKARISMA!

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Medan, 29 Desember 2023

Kepala Perwakilan,

Eydu Oktain Panjaitan

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR | 1 |
| DAFTAR ISI | 2 |
| PROFIL PIMPINAN BPK | 3 |
| SEJARAH PENDIRIAN | 4 |
| PROFIL PEJABAT STRUKTURAL | 11 |
| PROFIL SUBAUDITORAT DAN SEKRETARIAT PERWAKILAN | 20 |
| KINERJA | 39 |
| PRESTASI - PRESTASI | 41 |
| PROFIL ENTITAS | 43 |

PROFIL PIMPINAN BPK



KETUA BPK

Isma Yatun



WAKIL KETUA BPK

Hendra Susanto



ANGGOTA I BPK

Nyoman Adhi Suryadnyana



ANGGOTA II BPK

Daniel Lumban Tobing



ANGGOTA III BPK

Achsanul Qosasi



ANGGOTA IV BPK

Haerul Saleh



ANGGOTA V BPK

Ahmadi Noor Supit



ANGGOTA VI BPK

Pius Lustrilanang



ANGGOTA VII BPK

Slamet Edy Purnomo

**SEJARAH PENDIRIAN
BPK PERWAKILAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Kelembagaan BPK RI Sejarah BPK RI



Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) berdiri pada tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan sementara di Kota Magelang. Pendirian BPK RI tersebut berdasarkan pada Surat Penetapan Pemerintah No.11/OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan. Pada awal pendiriannya, BPK RI hanya mempunyai 9 orang pegawai dan sebagai ketuanya adalah R. Soerasno. Untuk memulai tugasnya, BPK RI mengumumkan kepada semua

instansi di wilayah Republik Indonesia mengenai tugas dan kewajibannya dalam memeriksa tanggung jawab keuangan negara dengan Surat BPK No.94-1 tanggal 12 April 1947. Landasan pelaksanaan tugas BPK RI saat itu menggunakan Algemene Rekenkamer (Badan Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda), yaitu ICW dan IAR. Dalam Penetapan Pemerintah No.6/1948 tanggal 6 Nopember 1948, tempat kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dipindahkan dari Magelang ke Yogyakarta. Negara Republik Indonesia yang ibukotanya di Yogyakarta tetap mempunyai Badan Pemeriksa Keuangan sesuai Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945; Ketuanya diwakili oleh R. Kasirman yang diangkat berdasarkan SK Presiden RI tanggal 31 Januari 1950 No.13/A/1950 terhitung mulai 1 Agustus 1949.

Untuk lebih memantapkan tugas BPK RI, pada tahun 2001 ketentuan yang mengatur BPK RI dalam UUD 1945 telah diamandemen. Sebelum amandemen, BPK RI hanya diatur dalam satu ayat yaitu Pasal 23 ayat (5). Kemudian dalam Amandemen Ketiga UUD 1945 dikembangkan menjadi satu bab tersendiri (Bab VIII A) dengan tiga pasal (23E, 23F, dan 23G) dan tujuh ayat.

Berdirinya BPK juga dilandasi oleh Undang Undang Dasar 1945, yaitu;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan Sebagai Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Dasar Hukum BPK RI

Republik Indonesia menyadari pentingnya fungsi pemeriksaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan badan yang akan melakukan fungsi pemeriksaan telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar yang dinyatakan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang (Pasal 23 Bab VIII UUD 1945). Pengaturan undang-undang yang pertama kali mengikuti amanat UUD 1945 baru terbit pada tahun 1973. Kedudukan konstitusional BPK RI dinyatakan sebagai "Lembaga Tinggi Negara yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, akan tetapi tidak berdiri diatas pemerintah" (Pasal 1 UU Nomor 5 Tahun 1973). Saat ini, telah ditetapkan UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang baru, dimana undang-undang ini menjadi landasan struktural dan operasional yang kuat bagi BPK RI dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap keuangan negara.

Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban dalam memeriksa tanggung jawab pengelolaan keuangan negara, sejak tanggal 9 November 2001 landasan hukum BPK RI sesuai dengan Amandemen Ketiga

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Bab VIII A Pasal 23 E, Pasal 23 F, dan Pasal 23 G. Dalam rangka menunjang tugasnya, BPK RI didukung dengan seperangkat Undang-Undang di bidang Keuangan Negara, yaitu:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Visi dan Misi BPK RI

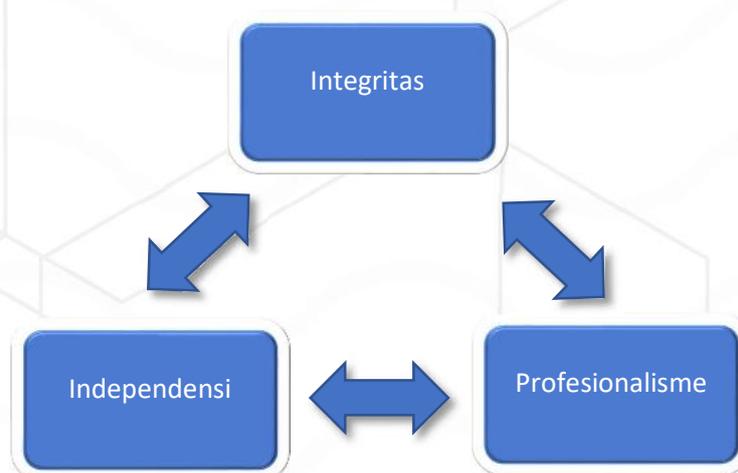
Visi

Menjadi lembaga pemeriksa terpercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara.

Misi

1. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan
2. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara
3. Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya

Nilai-Nilai Dasar BPK RI



Independensi

BPK adalah lembaga negara yang independen di bidang organisasi, legislasi, dan anggaran, serta bebas dari pengaruh lembaga negara lainnya.

Integritas

BPK menjunjung tinggi integritas dengan mewajibkan setiap pemeriksa menjunjung tinggi kode etik pemeriksa dan standar perilaku profesional dalam melaksanakan tugasnya.

Profesionalisme

BPK melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesionalisme pemeriksa keuangan negara, kode etik, dan nilai-nilai kelembagaan organisasi.



Kedudukan Organisasi BPK RI berdasarkan UUD RI 1945

Kedudukan BPK RI sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri dipertegas dalam TAP MPR RI No. X/MPR/2001 tentang laporan pelaksanaan putusan MPR RI oleh lembaga-lembaga tinggi negara pada Sidang Tahunan MPR RI tahun 2001 dan nomor VI/MPR/2002 yang isinya antara lain menegaskan kedudukan BPK RI sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya yang bebas dan mandiri perlu dimantapkan posisinya.

Sejarah BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara



BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu kantor perwakilan yang dibentuk berdasarkan SK Ketua No. 80/SK/K/1982 dan ditetapkan sebagai kantor BPK-RI Wilayah IV berkedudukan di Jl. Imam Bonjol No. 22 Medan dan mulai aktif melaksanakan kegiatannya pada Tahun 1983.

Bangunan Kantor BPK-RI Wilayah IV sebelumnya merupakan Rumah Sakit milik Pertamina yang kemudian dihibahkan kepada BPK-RI. Pada Tahun 1991 dibangun gedung baru dan pada 28 Agustus 1993 gedung baru tersebut diresmikan oleh Ketua BEPEKA, Prof. Dr. J.B. Sumarlin.

1. Pada masa awal berdirinya, Struktur Organisasi BPK-RI Wilayah IV Medan terdiri dari Seorang Pejabat Kepala Perwakilan dibantu oleh Kepala Bagian Tata Usaha, Sub Oditorat Wilayah IV A, Sub Oditorat Wilayah IV B dan Sub Oditorat BUMD Wilayah IV A dan IV B. Bagian Tata Usaha terdiri dari Sub Bagian Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum.



Sub Oditorat Wilayah IV A terdiri dari Seksi Wilayah IV A.1 dan Seksi Wilayah IV A.2.
Sub Oditorat Wilayah IV B terdiri dari Seksi Wilayah IV B.1 dan Seksi Wilayah IV B.2.

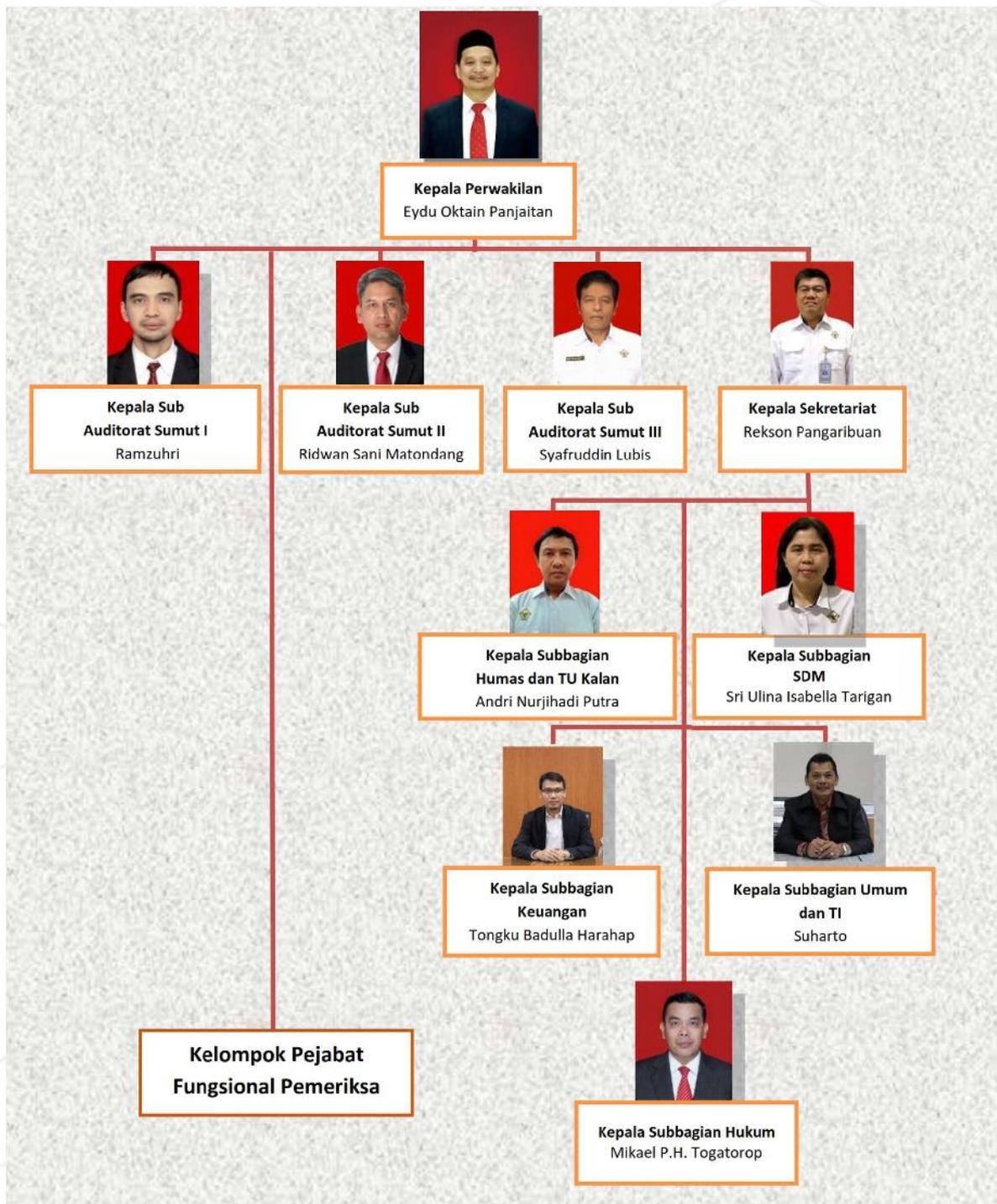
Sub Oditorat BUMD Wilayah IV A dan IV B terdiri dari Seksi BUMD Wilayah IV A dan Seksi BUMD Wilayah IVB. Berdasarkan SK Ketua No. 11/SK/K/1993 tanggal 24 November 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BEPEKA Wilayah IV ditetapkan menjadi BPK Perwakilan I di Medan dengan wilayah kerja:

- Propinsi D.I. Aceh, Propinsi Dati I Sumatera Utara.
- Propinsi Dati I Sumatera Barat, Propinsi Dati I Riau.
- Propinsi Dati I Sumatera Selatan, Propinsi Dati I Bengkulu dan Jambi.

Pada Tahun 1996, Sumatera Selatan terpisah menjadi kantor sendiri menjadi Perwakilan BPK-RI di Palembang dengan wilayah kerja Provinsi Jambi, Bengkulu dan Provinsi Bangka Belitung.

2. Berdasarkan SK Nomor 18/SK/I-VIII.3/6/2002, Perwakilan terdiri dari Kepala Sekretariat, Kepala Sub Auditorat I.A, dan Kepala Sub Auditorat I.B. Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Umum, Sub Bagian Keuangan, dan Sub Bagian Kepegawaian. Sub Auditorat I.A terdiri dari Seksi I.A.1 dan Seksi I.A.2. Sub Auditorat I.B terdiri dari Seksi I.B.1 dan Seksi I.B.2.
3. Berdasarkan SK BPK-RI Nomor 12/SK/I-VIII.3/7/2004 tanggal 23 Juli 2004 tentang Organisasidan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Perwakilan I BPK-RI di Medan terdiri dari Sekretariat Perwakilan I, Sub Auditorat Perwakilan Nanggroe Aceh Darussalam, Sub Auditorat Perwakilan Sumatera Utara dan Riau Kepulauan, serta Sub Auditorat Perwakilan Sumatera Barat dan Riau. Sekretariat Perwakilan I terdiri dari Sub Bagian Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Umum, dan Sub Bagian Diklat. Sub Auditorat Perwakilan Nanggroe Aceh Darussalam terdiri dari Seksi Nanggroe Aceh Darussalam I, Seksi Nanggroe Aceh Darussalam II, dan Seksi Nanggroe Aceh Darussalam III. Sub Auditorat Perwakilan Sumatera Utara dan Riau Kepulauan terdiri dari Seksi Sumatera Utara I, Seksi Sumatera Utara II, dan Seksi Riau Kepulauan. Sub Auditorat Perwakilan Sumatera Barat dan Riau terdiri dari Seksi Sumatera Barat I, Seksi Sumatera Barat II, Seksi Riau I, dan Seksi Riau II.
4. Berdasarkan SK BPK-RI No. 06/SK/I-VIII.3/5/2005 tanggal 2 Mei 2005 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan No. 12/SK/I-VIII.3/7/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Perwakilan I BPK-RI di Medan terdiri dari Sekretariat Perwakilan I, Sub Auditorat Perwakilan Sumatera Utara, dan Sub Auditorat Perwakilan Sumatera Barat. Sekretariat Perwakilan I terdiri dari Sub Bagian Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Umum, dan Sub Bagian Diklat. Sub Auditorat Perwakilan Sumatera Utara terdiri dari Seksi Sumatera Utara I, Seksi Sumatera Utara II, Seksi Sumatera Utara III, dan Seksi Sumatera Utara IV. Sub Auditorat Perwakilan Sumatera Barat terdiri dari Seksi Sumatera Barat I, Seksi Sumatera Barat II, dan Seksi Sumatera Barat III. Sub Auditorat Perwakilan Nanggroe Aceh Darussalam terpisah menjadi perwakilan IX BPK-RI di Banda Aceh (Pada Tahun 2005), Perwakilan X BPK RI di Pekanbaru (Pada tahun 2005) dan Pada Tahun 2007 Sub Auditorat Perwakilan Sumatera Barat menjadi Perwakilan BPK RI di Padang.

Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara



Wilayah Pemeriksaan

| Subauditorat | Pemerintah Daerah | | PDAM | | BPD | | PD Lainnya | |
|---------------------------|-------------------------|----------------|---|-----------|--|-------------------------------|---|-----------|
| | | | | | | | | |
| Subauditorat Sumut I | Provinsi Sumatera Utara | 1 | Perumda Tirtanadi | 1 | PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara | 1 | PD. Aneka Industri dan Jasa Provsu | 1 |
| | | | | | | | PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara | 1 |
| | Kota Pematangsiantar | 1 | Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Uli | 1 | | | Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar | 1 |
| | Kab. Samosir | 1 | | | | | | |
| | Kab. Langkat | 1 | PERUMDA AIR MINUM TIRTA WAMPU LANGKAT | 1 | | | | |
| | Kab. Labuhanbatu | 1 | PUDAM TIRTA BINA | 1 | | | | |
| | Kab. Pakpak Bharat | 1 | PERUMDA PAKPAK AGRO LESTARI | 1 | | | | |
| | Kab. Serdang Begadai | 1 | | | | | | |
| | Kab. Simalungun | 1 | PDAM TIRTA LIHOU KAB. SIMALUNGUN | 1 | | | | |
| | Kab. Karo | 1 | PDAM TIRTA MALEM | 1 | | | | |
| Kab. Labuhanbatu Utara | 1 | | | | | | | |
| Kota Binjai | 1 | PDAM TIRTASARI | 1 | | | PD Pembangunan Kota Binjai | 1 | |
| Subauditorat Sumut II | Kab. Mandailing Natal | 1 | PDAM TIRTA MADINA | 1 | | | | |
| | Kab. Tapanuli Tengah | 1 | PDAM MUAL NAULI KABUPATEN TAPANULI TENGAH | 1 | | | PT. MANSALAR TAPIAN NAULI KABUPATEN TAPANULI TENGAH | 1 |
| | | | | | | | PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah | 1 |
| | Kota Sibolga | 1 | Perumda Air Minum Tirta Nauli | 1 | | | Perusahaan Daerah Sibolga Nauli (PD.SINA) | 1 |
| | Kab. Tapanuli Utara | 1 | PERUMDA MUAL NA TIO | 1 | | | PERUSAHAAN DAERAH PERTANIAN KABUPATEN TAPANULI UTARA | 1 |
| | Kab. Tapanuli Selatan | 1 | | | | | PT. Tapanuli Selatan Membangun | 1 |
| | Kota Padangsidimpuan | 1 | PDAM TIRTA AYUMI | 1 | | | | |
| | Kab. Nias | 1 | PERUMDA Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias | 1 | | | | |
| | Kab. Nias Selatan | 1 | | | | | PT. BUMI NISEL CERLANG | 1 |
| | Kab. Padang Lawas Utara | 1 | | | | | | |
| | Kab Labuhanbatu Selatan | 1 | | | | | | |
| Kota Gunungsitoli | 1 | | | | | | | |
| Subauditorat Sumut III | Kab. Deli Serdang | 1 | PDAM Tirta Deli | 1 | | | PT. BHINEKA PERKASA JAYA | 1 |
| | Kab. Dairi | 1 | Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lae Neiho Kab. Dairi | 1 | | | Perusahaan Daerah Pasar Kab. Dairi | 1 |
| | Kab. Toba | 1 | | | | | | |
| | Kota Tebing Tinggi | 1 | PERUMDA Air Minum Tirta Bulian | 1 | | | | |
| | Kab. Batu Bara | 1 | PDAM TIRTA TANJUNG KABUPATEN BATU BARA | 1 | | | | |
| | Kota Medan | 1 | | | | | Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Kota Medan | 1 |
| | | | | | | | PUD Rumah Potong Hewan Kota Medan | 1 |
| | Kab. Asahan | 1 | PERUMDA TIRTA SILAUPIASA KAB. ASAHAN | 1 | | | | |
| | Kab. Humbang Hasundutan | 1 | | | | | | |
| | Kota Tanjung Balai | 1 | PDAM TIRTA KUALO KOTA TANJUNGBALAI | 1 | | | | |
| | Kab. Padang Lawas | 1 | | | | | | |
| | Kab Nias Barat | 1 | Perumda Aneka Usaha dan Jasa Tanomo | 1 | | | | |
| | Kab Nias Utara | 1 | | | | | | |
| | Jumlah Entitas | 34 | Jumlah PDAM | 21 | Jumlah BPD | 1 | Jumlah Perusda | 14 |

PROFIL PEJABAT STRUKTURAL

KEPALA PERWAKILAN



LAHIR di Pematangsiantar, 01 Oktober 1969, Eydu Oktain Panjaitan telah berkarir di BPK selama 26 tahun. Beliau lulusan Pasca Sarjana Magister Manajemen pada Universitas Gajah Mada ini pernah mengemban berbagai jabatan, diantaranya yaitu Kepala Subauditorat di AKN IV dan Kepala Perwakilan di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal BPK No. 28/K/X-X.3/01/2020/29/01/2020 tanggal 31 Januari 2020, Beliau diangkat menjadi Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

KEPALA SEKRETARIAT PERWAKILAN



LAHIR di Sidulang, Kabupaten Toba, 1 Oktober 1968, beliau memulai karir di BPK sejak bulan Maret tahun 1998 sebagai Administrasi Umum pada Perwakilan BPK RI di Jakarta.

Selama mengabdikan di BPK beliau pernah menjabat sebagai Kepala Seksi di BPK Perwakilan Provinsi Papua. Sejak tanggal 2 September 2021, sesuai SK Sekjen No. 317/K/X-X.3/08/2021 beliau dilantik menjadi Kepala Sekretariat Perwakilan pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

KEPALA SUBAUDITORAT SUMATERA UTARA I



Pria kelahiran Binjai, 29 Maret 1971 ini memulai karir di BPK sejak tahun 1997 sebagai Administrasi Umum pada Perwakilan BPK RI di Medan. Sebelum mengabdikan di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Subauditorat di BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dan juga di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Sejak tanggal 2 September 2018, bapak yang menamatkan S2-nya di Universitas Sumatera Utara ini dilantik menjadi Kepala Subauditorat Sumatera Utara I pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Ridwan Sani Matondang S.T., M.M., ERMAPP, Ak, CSFA

KEPALA SUBAUDITORAT SUMATERA UTARA II



Lahir di Padangsidempuan, Sumatera Utara pada tanggal 14 April 1972 dan bergabung di BPK pada Tahun 2000 sebagai Administrasi Umum pada Perwakilan BPK RI di Medan. Beliau menyelesaikan pendidikan S-1 Teknik Sipil di Institut Sains dan Teknologi Nasional Jakarta pada Tahun 1996 dan S-2 Magister Manajemen Universitas Sumatera Utara pada Tahun 2002. Sejak tanggal 7 Juni 2023 menjabat sebagai Kepala Subauditorat Sumatera Utara II BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

KEPALA SUBAUDITORAT SUMATERA UTARA III



LAHIR di Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, 19 April 1971, Bapak yang pernah mengenyam pendidikan S1 di Universitas Sumatera Utara ini memulai karir di BPK sejak tahun 1997 sebagai administrasi umum pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Sebelum mengabdikan diri di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Subauditorat pada BPK RI Perwakilan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Kemudian terhitung sejak tanggal 6 Januari 2020, sesuai SK Sekjen No. 427/K/X-X.3/12/2019 dilantik menjadi Kepala Subauditorat Sumatera Utara III pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Andri Nurjihadi Putra S.ST., M.Si.

KEPALA SUBBAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KEPALA PERWAKILAN



Lahir di Malang, Jawa Timur pada tanggal 27 Februari 1984 dan bergabung di BPK pada Tahun 2006 sebagai Administrasi Umum pada Inspektorat Utama Perencanaan, Analisa, Evaluasi, dan Pelaporan. Beliau menyelesaikan pendidikan S-1 Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada Tahun 2009 dan S-2 Magister Administrasi Pembangunan di Universitas Lambung Mangkurat pada Tahun 2020. Sejak tanggal 6 Oktober 2023 menjabat sebagai Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Tongku Badulla Harahap S.P., M.M.

KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN



LAHIR di Medan, 29 Desember 1972, ayah dari 3 orang anak ini memulai karir di BPK pada tahun 1999 sebagai Administrasi Umum di Auditorat Keuangan Negara II di Jakarta.

Sebelum ditempatkan di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Bapak yang akrab disapa Pak Tongku ini pernah bertugas sebagai Kepala Subbag Humas dan TU Kalan di BPK Perwakilan Provinsi Jambi, kemudian sesuai dengan SK Sekjen No. 142/K/X-X.3/05/2019/17/05/2019 tanggal 21 Mei 2019 berpindah tugas menjadi Kepala Subbagian SDM BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya, berdasarkan SK Sekjen No 319/K/X-X.3/08/2021 tanggal 2 September 2021, beliau ditetapkan sebagai Kasubag Keuangan di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Sri Ulina Isabella Tarigan S.E., M.Si., Ak., Ak

KEPALA SUBBAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA



LAHIR di Medan, 13 Juli 1969, Ibu dari tiga orang anak ini menyelesaikan pendidikan S2 pada tahun 2002 di Universitas Indonesia.

Memulai karir di BPK pada tahun 1996 sebagai Administrasi Umum di AKN III. Jabatan dan tugas yang diemban sebelum ini adalah sebagai Kepala Sub Bagian SDM pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, dan sesuai SK Sekjen No. 319/K/X-X.3/08/2021 tanggal 2 September 2021, beliau beralih tugas menjadi Kepala Subbagian SDM pada BPK Provinsi Sumatera Utara.

Suharto S.E.

KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN TEKNOLOGI INFORMASI



LAHIR di Medan, 20 Maret 1967, beliau memulai karir di BPK sejak Maret 1987 sebagai Administrasi Umum pada Perwakilan BPK di Medan.

Sebelum mengabdikan diri di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Subbag Umum dan Teknologi Informasi pada BPK Perwakilan Provinsi Riau. Kemudian terhitung sejak tanggal 21 Mei 2019, sesuai SK Sekjen No. 142/K/X-X.3/05/2019/17/05/2019 dilantik menjadi Kepala Subbag Umum dan TI pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

KEPALA SUBBAGIAN HUKUM



LAHIR di Pematang Siantar pada 9 Desember 1971, beliau memperoleh gelar Magister Hukumnya di Universitas Sumatera Utara pada tahun 2006.

Mengabdikan di BPK kurang lebih selama 23 tahun, Pak Mikael memulai karir di BPK sebagai Administrasi Umum di AKN I. Sebelum ditempatkan di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Bapak yang hobi bermusik ini pernah bertugas di BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau sebagai Kasubbag Hukum, kemudian sesuai dengan SK Sekjen No. 319/K/X-X.3/08/2021 tanggal 2 September 2021 beliau berpindah tugas menjadi Kepala Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

**PROFIL SUBAUDITORAT
DAN SEKRETARIAT
PERWAKILAN**

SUBAUDITORAT SUMATERA UTARA I



Unit Kerja Subauditorat Sumatera Utara I melakukan pemeriksaan keuangan negara di lingkup entitas: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kota Pematangsiantar, Kab. Samosir, Kab. Langkat, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Simalungun, Kab. Karo, Kota Binjai, Kab. Labuhanbatu Utara, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas dengan kegiatan:

- a. merumuskan rencana kegiatan;
- b. mengusulkan tim pemeriksa;
- c. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
- d. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
- e. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
- f. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- h. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- i. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- j. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- k. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP.



Unit Kerja Subauditorat Sumatera Utara II melakukan pemeriksaan keuangan negara di lingkup entitas:

Pemerintah Kab. Labuhanbatu, Kab. Mandailing Natal, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Sibolga, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Labuhanbatu Selatan, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Tapanuli Selatan, Kota Padangsidimpuan, Kab. Nias, Kab. Nias Selatan, Kota Gunungsitoli , BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas dengan kegiatan:

- a. merumuskan rencana kegiatan;
- b. mengusulkan tim pemeriksa;
- c. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
- d. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
- e. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
- f. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- h. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- i. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- j. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- k. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP.



Unit Kerja Subauditorat Sumatera Utara III melakukan pemeriksaan keuangan negara di lingkup entitas:

Pemerintah Kota Medan, Kab. Deli Serdang, Kab. Dairi, Kab. Toba Samosir, Kota Tebing Tinggi, Kab. Batuara, Kab. Padang Lawas, Kab. Asahan, Kab. Humbang Hasundutan, Kota Tanjungbalai, Kab. Nias Utara, Kab. Nias Barat, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas dengan kegiatan:

- a. merumuskan rencana kegiatan;
- b. mengusulkan tim pemeriksa;
- c. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
- d. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
- e. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
- f. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- h. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- i. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- j. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- k. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP.

SEKRETARIAT PERWAKILAN

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, keuangan, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
2. Pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
3. Pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
4. Penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
5. Pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
6. Penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara; dan
7. Penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

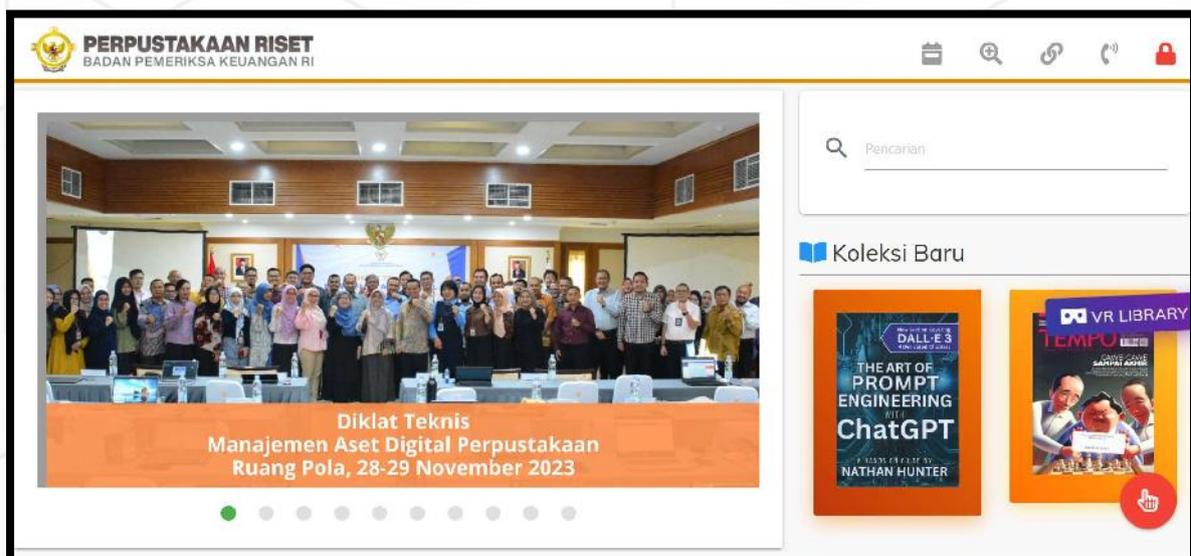
Sekretariat Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terdiri atas:

- Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- Subbagian Sumber Daya Manusia;
- Subbagian Keuangan;
- Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- Subbagian Hukum.

SUBBAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KEPALA PERWAKILAN



Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan Data Profil Entitas pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.



Sejak tahun 2009 Perpustakaan BPK mulai mengembangkan aplikasi berbasis web. Aplikasi ini dikembangkan untuk mendukung otomatisasi perpustakaan dan perpustakaan digital. Selanjutnya, aplikasi ini dinamakan Sipuspa. Aplikasi Sipuspa memiliki fitur-fitur yang dikustomisasi berdasarkan kebutuhan yang ada seperti penelusuran secara online (OPAC/*Online Public Access Catalog*), perpanjangan secara mandiri, pemesanan (bahan pustaka) dan penagihan lewat *e-mail*.

Pada Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melakukan re-branding atas tampilan Perpustakaan, ruang PIK, ruang rapat publik, dan ruang tunggu menjadi suatu ruangan yang terintegrasi yang dinamakan Pojok Berkarisma.





Selain itu BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah meng-*upgrade* website yang digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang BPK dan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada khususnya. Dalam website tersebut disajikan beragam informasi antara lain sejarah BPK, dasar hukum, visi dan misi, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, publikasi dan Peraturan Daerah yang diundangkan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara. Di dalam website ini juga terdapat informasi-informasi hukum yang terangkum dalam Laman UJDIH. Website BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di sumut.bpk.go.id tersebut dikelola oleh Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan serta terafiliasi langsung dengan website BPK Pusat.

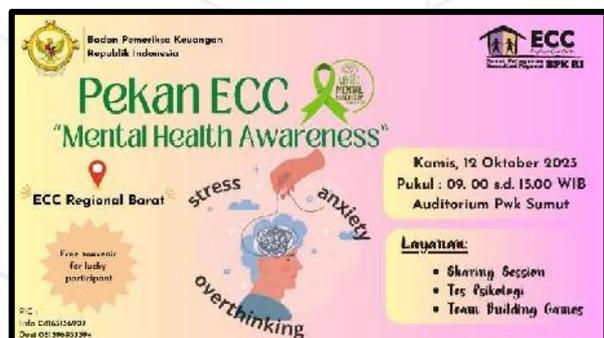
Subbagian Humas TU BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara juga mengelola website e-PPID untuk menerima dan menindaklanjuti permintaan informasi publik dan pengaduan masyarakat.



SUBBAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA

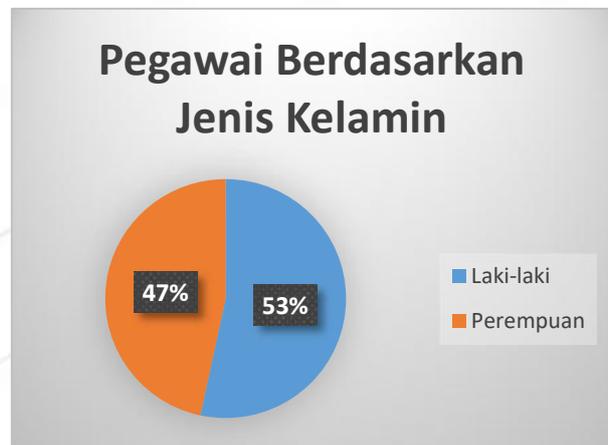


Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan sumber daya manusia (presensi, urusan dokumen dan data pegawai, pengangkatan, kepangkatan, penggajian, pensiun, diklat, dan urusan kesejahteraan pegawai) di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan melaporkan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Sekretariat Perwakilan.



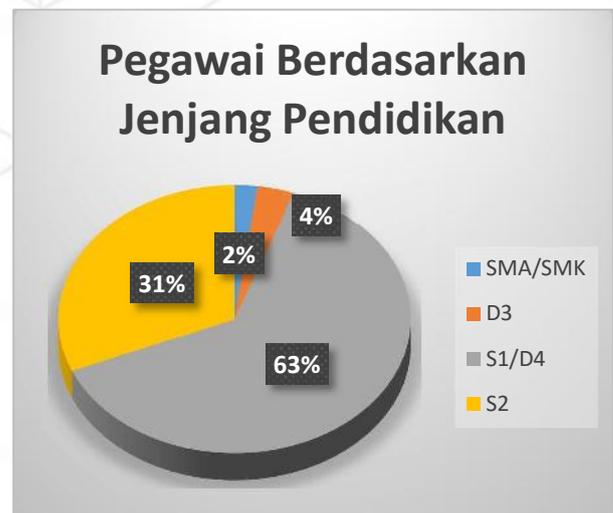
Pada Tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara didukung oleh 236 orang pegawai, meliputi sepuluh personil struktural (eselon II s.d. eselon IV), 185 orang pada jabatan fungsional pemeriksa, enam orang pada jabatan fungsional lainnya, 32 orang pada jabatan pelaksana, serta tiga orang merupakan CPNS.

Berdasarkan jenis kelamin, Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara memiliki pegawai Laki- laki sebanyak 126 orang atau 53% dari keseluruhan pegawai dan pegawai Perempuan sebanyak 110 orang atau 47% dari keseluruhan pegawai.



Berdasarkan pangkat/golongan, jumlah pegawai dengan golongan II sebanyak 9 orang atau 4% dari jumlah keseluruhan pegawai, golongan III sebanyak 200 orang atau 85%, dan golongan IV sebanyak 27 orang atau 11% dari keseluruhan pegawai.

Sedangkan berdasarkan jenjang pendidikan, jumlah pegawai dengan pendidikan SMA/SMK sebanyak 5 orang atau 2% dari jumlah keseluruhan pegawai, pendidikan D3 sebanyak 8 orang atau 4%, pendidikan S1 sebanyak 149 orang atau 63%, serta pendidikan S2 sebanyak 74 orang atau 31% dari keseluruhan pegawai.



SUBBAGIAN KEUANGAN



Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Realisasi belanja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022 adalah sebesar Rp30.865.225.967,00 atau 82,76% dari anggaran yang dialokasikan yaitu sebesar Rp37.294.699.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | % |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| Belanja Pegawai | 13.504.536.000,00 | 12.252.653.582,00 | 90,73% |
| Belanja Barang | 23.655.663.000,00 | 18.584.572.386,00 | 78,56% |
| Belanja Modal | 134.500.000,00 | 27.999.999,00 | 20,82% |
| Total | 37.294.699.000,00 | 30.865.225.967,00 | 82,76% |

Sedangkan realisasi belanja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp45.119.195.921,00 atau 99,22% dari anggaran yang dialokasikan yaitu sebesar Rp45.471.822.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | % |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| Belanja Pegawai | 15.332.918.000,00 | 15.284.571.619,00 | 99,68% |
| Belanja Barang | 29.753.009.000,00 | 29.448.999.622,00 | 99,98% |
| Belanja Modal | 385.895.000,00 | 385.624.680,0 | 99,93% |
| Total | 45.471.822.000,00 | 45.119.195.921,00 | 99,92% |

SUBBAGIAN UMUM DAN TEKNOLOGI INFORMASI



Sub bagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Sarana dan Prasarana

1. Gedung Kantor



Gedung kantor Perwakilan Provinsi Sumatera Utara bertempat di Jalan Imam Bonjol No. 22 Medan yang diresmikan oleh Prof. Dr. J.B. Sumarlin pada tanggal 28 Agustus 1993 tersebut dalam perkembangannya, pada tahun 2012 dan 2013 dilakukan renovasi terhadap ruangan kerja, dengan tujuan untuk menambah kenyamanan kerja.

Fasilitas Gedung Kantor:

Tempat Penitipan Anak (TPA) "Anak Hasian"



Musholla Baitul Hasib BPK Sumut



Ruang Olah Raga dan Fitness



Poliklinik



Pojok Berkarisma (Perpustakaan, Ruang Rapat Publik, Ruang PIK, Ruang Tunggu Tamu)





Ruang *Employee Care Center* (ECC)



Koperasi Berkarisma



Kafe Berkarisma Coffee



2. Rumah Jabatan dan Mess Pegawai

Rumah Dinas Eselon II

Kantor Perwakilan memiliki rumah jabatan yang diperuntukkan untuk pejabat eselon II.



Rumah tersebut diperuntukkan untuk rumah dinas Kepala Perwakilan. Luas bangunan tersebut adalah 120 m² dan bangunan tersebut berdiri diatas lahan seluas 1492 m². Rumah tersebut terletak di Jl. Brigjen Abdul Manaf Lubis No. 16 A, Medan.

Rumah Dinas Eselon III

Kantor Perwakilan memiliki rumah jabatan yang diperuntukkan untuk pejabat eselon III. Rumah tersebut diperuntukkan untuk rumah dinas Para Kepala Subauditorat dan Kepala Sekretariat. Luas bangunan tersebut masing masing adalah 70 m² dengan luas tanah bervariasi. Rumah tersebut terletak di Komplek BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Jl. Taska, Helvetia Medan.



Rumah Dinas Eselon IV

Kantor Perwakilan memiliki rumah jabatan yang diperuntukkan untuk pejabat eselon IV. Rumah tersebut diperuntukkan untuk rumah dinas Para Kepala Subbagian, Para Pengendali Teknis dan KTS. Luas bangunan tersebut masing masing adalah 50 m² dengan luas tanah bervariasi. Rumah tersebut terletak di Komplek BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Jl. Taska, Helvetia Medan.

Mess Pegawai



Kantor Perwakilan memiliki mess yang diperuntukkan untuk para pegawai. Mess tersebut beralamat di Jl Arias, Brigjen Abdul Manaf Lubis, Helvetia Medan. Komplek mess berdiri diatas tanah seluas 2.462 m². Luas Bangunan mess tersebut adalah 1.216 m². Mess tersebut memiliki 6 Kamar untuk PT/KTS dan 18 Kamar untuk staf. Komplek mess tersebut dilengkapi dengan lapangan parkir, tenis meja, dan lapangan tenis bagi para penghuninya.

Fasilitas yang terdapat di lokasi rumah jabatan antara lain adalah;

1. Mushola
2. Gedung Serbaguna

3. Kendaraan Dinas

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara memiliki 13 buah mobil (1 buah sedan, 1 Alphard, 3 Inova Reborn, 3 Inova, 1 Pajero Sport, 1 Rush, dan 3 Avanza) dan 8 buah sepeda motor.

| Nama Barang | NUP | Kondisi | Merk/Tipe |
|--------------|-----|--------------|------------------------------|
| Sedan | 4 | Baik | TOYOTA |
| Mini Bus | 5 | Baik | Toyota |
| Mini Bus | 7 | Baik | TOYOTA |
| Mini Bus | 8 | Baik | TOYOTA |
| Mini Bus | 9 | Baik | KIJANG INNOVA G - THN 2007 |
| Mini Bus | 10 | Baik | TOYOTA |
| Mini Bus | 11 | Baik | TOYOTA |
| Mini Bus | 13 | Baik | TOYOTA |
| Mini Bus | 14 | Baik | TOYOTA |
| Mini Bus | 15 | Baik | TOYOTA |
| Mini Bus | 16 | Baik | Mitsubisi Pajero |
| Mini Bus | 17 | Baik | Toyota Rush |
| Mini Bus | 18 | Rusak Ringan | TOYOTA NEW ALPHARD 2,5 G A/T |
| Sepeda Motor | 8 | Baik | Yamaha |
| Sepeda Motor | 9 | Baik | HONDA |
| Sepeda Motor | 10 | Baik | HONDA |
| Sepeda Motor | 11 | Baik | HONDA |
| Sepeda Motor | 12 | Baik | HONDA |
| Sepeda Motor | 13 | Baik | HONDA |
| Sepeda Motor | 15 | Rusak Ringan | MEGAPRO CW |
| Sepeda Motor | 16 | Baik | Yamaha |

4. Teknologi Informasi

Dukungan teknologi informasi sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dan pemeriksaan. Di gedung Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah terpasang

perangkat wireless sehingga jalur komunikasi dengan BPK Pusat juga terjalin dengan baik sehingga memperlancar pengiriman data secara digital, baik ke kantor pusat maupun ke perwakilan / unit kerja lain untuk mendukung akses jaringan dan layanan TI.

Perwakilan Provinsi Sumut mempunyai ruang server yang dilengkapi dengan berbagai sarana diantaranya server IBM dan Storage Area Network (SAN) untuk menunjang kegiatan operasional perwakilan, IP Phone untuk menunjang kegiatan komunikasi antara LO IT dengan Biro TI. Selain itu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan sub bagian umum di perwakilan provinsi SUMUT memberikan layanan peminjaman laptop, scanner, dan printer.

SUBBAGIAN HUKUM



Sub Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan, dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Ekspose Aparat Penegak Hukum Tahun 2023

| NO | TANGGAL | APH | KASUS |
|----|------------------|---------------------------------|---|
| 1 | 09 Februari 2023 | Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara | Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal TA 2020 |
| 2 | 09 Februari 2023 | Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara | Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalah Gunaan Wewenang pada Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Jalan Muarasoma-Simpang Gambir di Kabupaten Mandailing Natal TA 2020 |
| 3 | 16 Februari 2023 | Kejaksaan Negeri Medan | Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyerobotan Lahan Negara milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) di Medan |
| 4 | 06 Juli 2023 | Kejaksaan Negeri Padang Lawas | Permohonan Tindakan Permintaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pelaksanaan Peningkatan Jalan Sisupak-Latong |

**KINERJA
BPK PERWAKILAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

CAPAIAN IKU TAHUN 2022

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2022 memperoleh skor pencapaian kinerja 100,39. Capaian ini meningkat bila dibandingkan dengan Tahun 2021 dengan skor 99,94.

| No | Sasaran Kegiatan | Anggaran | Indikator Kerja Utama | | Target 2022 | Realisasi 2022 | Skor (%) |
|----|--|--|-----------------------|--|-------------------------|-------------------------|----------|
| 1 | Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi | Anggaran awal sebesar Rp34.763.729.000,00 dan direvisi sebesar Rp37.294.699.000,00 | IKU 1 | Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan | 100% | 91,14% | 91,14 |
| 2 | | | IKU 2 | Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan | 100% | 100% | 100 |
| 3 | | | IKU 3 | Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan | 75% | 78,55% | 104,74 |
| 4 | | | IKU 4 | Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional | 100% | 100,75% | 100,75 |
| 5 | | | IKU 5 | Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan | 100% | 100% | 100 |
| 6 | | | IKU 6 | Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal | 100% | 100,96% | 100,96 |
| 7 | | | IKU 7 | Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK | Sangat Memuaskan (5,00) | Sangat memuaskan (4,70) | 94 |
| 8 | | | IKU 8 | Hasil Evaluasi AKIP | A (88,00) | AA (91,10) | 103,52 |
| 9 | | | IKU 9 | Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi | 97% | 92,99% | 95,86 |
| 10 | | | IKU 10 | Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan | 100% | 103,69% | 103,69 |
| 11 | | | IKU 11 | Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi | Memuaskan(3,80) | Memuaskan(3,93) | 103,42 |
| 12 | | | IKU 12 | Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi | 100% | 100% | 100 |
| 13 | | | IKU 13 | Tingkat Kinerja Anggaran | 88% | 90,78% | 103,16 |

**PRESTASI - PRESTASI
BPK PERWAKILAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**



UJDIH BPK PERWAKILAN ZONA HIJAU TAHUN 2023



TERBAIK KETIGA KATEGORI ADMINISTRASI BMN YANG ANDAL UNTUK WILAYAH KERJA KANWIL DJKN SUMUT TAHUN 2023



JUARA 3 LOMBA TIKTOK "MANFAAT HASIL PEMERIKSAAN BPK" DALAM RANGKA MEMPERINGATI HUT KE-77 BPK RI

**PROFIL ENTITAS
BPK PERWAKILAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2023**

PROFIL ENTITAS PEMERIKSAAN BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Peta Wilayah Provinsi Sumatera Utara



Wilayah Pemeriksaan

Wilayah kerja pemeriksaan perwakilan Provinsi Sumatera Utara meliputi seluruh pemerintah daerah se-Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari satu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, delapan Pemerintah Kota yaitu Kota Medan, Kota Pematang Siantar, Kota Tanjungbalai, Kota Padangsidimpuan, Kota Tebing Tinggi, Kota Binjai, Kota Sibolga dan Kota Gunungsitoli dan dua puluh lima Pemerintah Kabupaten yaitu, Kabupaten Samosir, Kabupaten Langkat, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Karo, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Dairi, Kabupaten Toba, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Batubara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Asahan dan Kabupaten Nias Barat.

Dasar Pembentukan dan Ibukota Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara

| No | Provinsi/Kabupaten/ Kota | Dasar Hukum Pembentukan | Ibu Kota |
|-----|-------------------------------|---|------------------|
| 1. | Provinsi Sumatera Utara | UU No. 10 Thn 1948 | Medan |
| 2. | Kabupaten Langkat | UU RI No. 7/DRT/1956 | Langkat |
| 3. | Kabupaten Deli Serdang | UU RI No. 7/DRT/1956 | Lubukpakam |
| 4. | Kabupaten Karo | UU RI No. 7/DRT/1956 | Kabanjahe |
| 5. | Kabupaten Asahan | UU RI No. 7/DRT/1956 | Kisaran |
| 6. | Kota Tebing Tinggi | UU RI No. 7/DRT/1956 | Tebing Tinggi |
| 7. | Kota Tanjungbalai | UU RI No. 7/DRT/1956 | Tanjung Balai |
| 8. | Kota Sibolga | UU RI No. 7/DRT/1956 | Sibolga |
| 9. | Kota Pematang Siantar | UU RI No. 7/DRT/1956 | Pematang Siantar |
| 10. | Kabupaten Simalungun | UU RI No. 7/DRT/1956 | Pematang Raya |
| 11. | Kabupaten Tapanuli Selatan | UU RI No. 7/DRT/1956 | Padang Sidempuan |
| 12. | Kabupaten Tapanuli Tengah | UU RI No. 7/DRT/1956 | Pandan |
| 13. | Kabupaten Tapanuli Utara | UU RI No. 7/DRT/1956 | Tarutung |
| 14. | Kabupaten Nias | UU RI No. 7/DRT/1956 | Gido |
| 15. | Kota Medan | UU RI No. 8/DRT/1956 | Medan |
| 16. | Kota Binjai | UU RI No. 8/DRT/1956 | Binjai |
| 17. | Kabupaten Dairi | UU RI No 15 Thn 1964 | Sidikalang |
| 18. | Kabupaten Toba | UU RI No .12 Thn 1998 PP No. 14 Tahun 2020 | Balige |
| 19. | Kabupaten Mandailing Natal | UU RI No .12 Thn 1998 | Penyambungan |
| 20. | Kota Padang Sidempuan | UU RI No. 4 Thn 2001 | Padang Sidempuan |
| 21. | Kabupaten Nias Selatan | UU RI No. 9 Thn 2003 | Teluk Dalam |
| 22. | Kabupaten Humbang Hasundutan | UU RI No. 9 Thn 2003 | Dolok Sanggul |
| 23. | Kabupaten Papak Bharat | UU RI No. 9 Thn 2003 | Salak |
| 24. | Kabupaten Samosir | UU RI No. 36 Thn 2003 | Pangururan |
| 25. | Kabupaten Serdang Bedagai | UU RI No. 36 Thn 2003 | Sei Rampah |
| 26. | Kabupaten Batubara | UU RI No. 5 Thn 2007 | Limapuluh |
| 27. | Kabupaten Padang Lawas | UU RI No. 37 Thn 2007 | Sibuhuan |
| 28. | Kabupaten Padang Lawas Utara | UU RI No. 37 Thn 2007 | Gunung Tua |
| 29. | Kabupaten Nias Utara | UU RI No. 45 Thn 2008 | Lotu |
| 30. | Kabupaten Nias Barat | UU RI No. 45 Thn 2008 | Lahomi |
| 31. | Kabupaten Kota Gunung Sitoli | UU RI No. 47 Thn 2008 | Gunungsitoli |
| 32. | Kabupaten Labuhanbatu | UU RI No. 7 Tahun 1956 | Rantauprapat |
| 33. | Kabupaten Labuhanbatu Utara | UU RI No. 23 Thn 2008 | Aek Kanopan |
| 34. | Kabupaten Labuhanbatu Selatan | UU RI No 22 Tahun 2008 | Kota Pinang |

Alamat Kantor dan Alamat Website Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara

| No | Kabupaten/kota | Ibu kota | Alamat | Alamat Website | Kecamatan | Kelurahan/desa |
|----|-------------------------------|---------------|---|---------------------------------|-----------|----------------|
| | Provinsi Sumatera Utara | Medan | Jl. Diponegoro No.30 Medan | www.sumutprov.go.id | | |
| 1 | Kabupaten Asahan | Kisaran | Jl. Jend. Sudirman No.5 Kisaran | www.pembasahan.go.id | 25 | 27/177 |
| 2 | Kabupaten Batu Bara | Limapuluh | Jl.Perintis Kemerdekaan No.164 Lima Puluh | www.batubarakab.go.id | 7 | 10/141 |
| 3 | Kabupaten Dairi | Sidikalang | Jl. Sisingamangaraja No.127 Sidikalang | www.dairikab.go.id | 15 | 8/161 |
| 4 | Kabupaten Deli Serdang | Lubuk Pakam | Jl. Negara No. 11 - Lubuk Pakam | www.deliserdangkab.go.id | 22 | 14/380 |
| 5 | Kabupaten Humbang Hasundutan | Dolok Sanggul | Jl. Kompleks Kantor Bupati Humbang Hasundutan | www.humbanghasundutankab.go.id | 10 | 1/153 |
| 6 | Kabupaten Karo | Kabanjahe | Jl. Jamin Ginting No. 17 | www.karokab.go.id | 17 | 10/259 |
| 7 | Kabupaten Labuhanbatu | Rantau Prapat | Jl.Sisingamangaraja No. 60, Rantau Prapat | www.labuhanbatukab.go.id | 9 | 23/75 |
| 8 | Kabupaten Labuhanbatu Selatan | Kota Pinang | Jl.Prof. Yamin S.H No.03 Kota Pinang | www.labuhanbatuselatankab.go.id | 5 | 2/52 |
| 9 | Kabupaten Labuhanbatu Utara | Aek Kanopan | Jl. Koptu Mahmud Lubis No.4-5 Aek kanopan | www.labuhanbatuutarakab.go.id | 8 | 8/82 |
| 10 | Kabupaten Langkat | Stabat | Jl. T. Amir Hamzah No.1 Stabat | www.langkatkab.go.id | 23 | 37/240 |
| 11 | Kabupaten Mandailing Natal | Panyabungan | Komp. Perkantoran Payolating Panyabungan | www.madina.go.id | 23 | 27/380 |
| 12 | Kabupaten Nias | Gido | Jl. Pancasila No.14 Gunung Sitoli | www.niaskab.go.id | 10 | -/170 |
| 13 | Kabupaten Nias Barat | Lahomi | Jl. Panegoro No 1 Nias Barat | www.niasbaratkab.go.id | 8 | -/105 |
| 14 | Kabupaten Nias Selatan | Teluk Dalam | Jl. Baloho Indah Teluk Dalam | www.niasselatankab.go.id | 35 | 3/457 |

| | | | | | | |
|----|------------------------------|------------------|---|-------------------------------|----|--------|
| 15 | Kabupaten Nias Utara | Lotu | Jl. Gunungsitoli – Lahewa Km 42, Lotu | www.niasutarakab.go.id | 11 | 1/112 |
| 16 | Kabupaten Padang Lawas | Sibuhuan | Jl. Pasir Pangarayan - Kecamatan Barumon | www.padanglawas.kab.go.id | 12 | 1/303 |
| 17 | Kabupaten Padang Lawas Utara | Gunung Tua | Jl. Gunung Tua, Padangsidimpuan Km 3,5, Gunung Tua | Tidak ada | 9 | 2/386 |
| 18 | Kabupaten Pakpak Bharat | Salak | Jl. Kompleks Perkantoran Pemkab Pakpak Bharat, Sindeka, Salak | www.pakpakbharat.kab.go.id | 8 | -/52 |
| 19 | Kabupaten Samosir | Pangururan | Jl. Raya Rianiate KM 5,5 Pangururan | www.samosirkab.go.id | 9 | 6/128 |
| 20 | Kabupaten Serdang Bedagai | Sei Rampah | Jl. Negara. No.300 Sei Rampah | www.serdangbedag.kab.go.id | 17 | 6/237 |
| 21 | Kabupaten Simalungun | Raya | Jl. Sutomo No.1 Pamatang Raya | www.simalungunkab.go.id | 32 | 27/386 |
| 22 | Kabupaten Tapanuli Selatan | Sipirok | Jl. Kenanga No.71 Padang Sidempuan | www.tapselkab.go.id | 14 | 36/212 |
| 23 | Kabupaten Tapanuli Tengah | Pandan | Jl. Imam Bonjol No. 18 Pandan | www.tapteng.go.id | 20 | 56/159 |
| 24 | Kabupaten Tapanuli Utara | Tarutung | Jl. Letjen Suprpto No.1 Tarutung | www.taputkab.go.id | 15 | 11/241 |
| 25 | Kabupaten Toba | Balige | Jl. Mulia Raja No. 26 Balige | www.tobasamosirkab.go.id | 16 | 13/231 |
| 26 | Kota Binjai | Binjai | Jl. Jenderal Sudirman No. 6 Binjai | www.binjaikota.go.id | 5 | 37/- |
| 27 | Kota Gunungsitoli | Gunungsitoli | Jl. Pancasila No.14 Gunungsitoli | www.gunungsitolikota.go.id | 6 | 3/98 |
| 28 | Kota Medan | Medan | Jl. Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan | www.pemkomedan.go.id | 21 | 151/- |
| 29 | Kota Padang Sidempuan | Padang Sidempuan | Jl. Merdeka No.2 | Padangsidimpuankota.go.id | 6 | 37/42 |
| 30 | Kota Pematang Siantar | Pematang Siantar | Jl. Merdeka No.6 Pematang Siantar | www.pematangsiantarkota.go.id | 8 | 53/- |

| | | | | | | |
|----|--------------------------|---------------|--|---------------------------------|---|------|
| 31 | Kota Sibolga | Sibolga | Jl. Dr. Sutomo No. 24A Sibolga | www.sibolgakota .g o.id | 4 | 17/- |
| 32 | Kota Tanjungbalai | Tanjung Balai | Jl. Jend. Sudirman Km 5,5 Tanjung Balai | www.tanjungbala ik ota.go.id | 6 | 31/- |
| 33 | Kota Tebing Tinggi | Tebing Tinggi | Jl. Dr. Sutomo No. 14 | www.tebingtinggi ko ta.go.id | 5 | 35/- |

Perkembangan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018-2022 BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

| ENTITAS | | OPINI LKPD TA 2018 | OPINI LKPD TA 2019 | OPINI LKPD TA 2020 | OPINI LKPD TA 2021 | OPINI LKPD TA 2022 |
|---------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Provinsi Sumatera Utara | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 2 | Kota Binjai | WTP | WTP | WTP | WTP | WDP |
| 3 | Kota Pematangsiantar | WDP | WDP | WDP | WTP | WTP |
| 4 | Kabupaten Serdang Bedagai | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 5 | Kabupaten Karo | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 6 | Kabupaten Simalungun | TMP | WDP | WDP | WDP | WDP |
| 7 | Kabupaten Samosir | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 8 | Kabupaten Labuhanbatu Utara | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 9 | Kabupaten Pakpak Bharat | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP |
| 10 | Kabupaten Langkat | WDP | WTP | WTP | WDP | WDP |
| 11 | Kabupaten Tapanuli Selatan | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 12 | Kabupaten Tapanuli Utara | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 13 | Kabupaten Labuhanbatu | WDP | WDP | WDP | WDP | WTP |
| 14 | Kabupaten Tapanuli Tengah | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP |
| 15 | Kabupaten Mandailing Natal | WDP | WDP | WDP | WDP | WTP |
| 16 | Kota Sibolga | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 17 | Kota Gunungsitoli | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 18 | Kabupaten Labuhanbatu Selatan | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 19 | Kabupaten Padang Lawas Utara | WTP | WTP | WDP | WDP | WTP |
| 20 | Kota Padang Sidempuan | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP |
| 21 | Kabupaten Nias | WDP | WDP | WDP | WTP | WTP |
| 22 | Kabupaten Nias Selatan | WDP | WDP | WDP | WDP | WTP |
| 23 | Kabupaten Asahan | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 24 | Kabupaten Batu Bara | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 25 | Kabupaten Dairi | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 26 | Kabupaten Deli Serdang | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 27 | Kabupaten Humbang Hasundutan | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 28 | Kota Medan | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP |
| 29 | Kota Tebing Tinggi | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 30 | Kabupaten Toba | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 31 | Kabupaten Nias Barat | TMP | WDP | WDP | WTP | WTP |
| 32 | Kabupaten Nias Utara | WDP | WDP | WDP | WDP | WDP |
| 33 | Kabupaten Padang Lawas | WDP | WTP | WTP | WTP | WDP |
| 34 | Kota Tanjungbalai | TMP | WDP | WDP | WDP | WDP |

PROFIL PROVINSI SUMATERA UTARA

Profil dan Kebijakan Teknis

A. Data Umum

1. Sejarah Provinsi Sumatera Utara

Lambang Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:



Gambar 1. Lambang Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Pada zaman pemerintahan Belanda, Sumatera Utara merupakan suatu pemerintahan yang bernama Gouvernement van Sumatera dengan wilayah meliputi seluruh pulau Sumatera, dipimpin oleh seorang Gubernur yang berkedudukan di kota Medan.

Setelah kemerdekaan, dalam sidang pertama Komite Nasional Daerah (KND), Provinsi Sumatera kemudian dibagi menjadi tiga sub provinsi yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Utara sendiri merupakan penggabungan dari tiga daerah administratif yang disebut keresidenan yaitu: Keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatera Timur, dan Keresidenan Tapanuli.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia (R.I.) No. 10 Tahun 1948 pada tanggal 15 April 1948, ditetapkan bahwa Sumatera dibagi menjadi tiga provinsi yang masing-masing berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yaitu: Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah, dan Provinsi Sumatera Selatan. Tanggal 15 April 1948 selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Utara.

Pada awal tahun 1949, dilakukan kembali reorganisasi pemerintahan di Sumatera. Dengan Keputusan Pemerintah Darurat R.I. Nomor 22/Pem/PDRI pada tanggal 17 Mei 1949, jabatan Gubernur Sumatera Utara ditiadakan. Selanjutnya dengan Ketetapan Pemerintah Darurat R.I. pada tanggal 17 Desember 1949, dibentuk Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli/Sumatera Timur. Kemudian, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1950 pada tanggal 14 Agustus 1950, ketetapan tersebut dicabut dan dibentuk kembali Provinsi Sumatera Utara.

Dengan Undang-Undang R.I. No. 24 Tahun 1956 yang diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956, dibentuk Daerah Otonom Provinsi Aceh, sehingga wilayah Provinsi Sumatera Utara sebahagian menjadi wilayah Provinsi Aceh.

2. Kondisi Geografis dan Demografis Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara terletak pada 1° - 4° Lintang Utara dan 98° - 100° Bujur Timur, Luas wilayah Provinsi Sumatera Utara 72.981,23 km².

Sumatera Utara pada dasarnya dapat dibagi atas:

- Pesisir Timur
- Pegunungan Bukit Barisan
- Pesisir Barat
- Kepulauan Nias

Pesisir timur merupakan wilayah di dalam provinsi yang paling pesat perkembangannya karena persyaratan infrastruktur yang relatif lebih lengkap daripada wilayah lainnya. Wilayah pesisir timur juga merupakan wilayah yang relatif padat konsentrasi penduduknya dibandingkan wilayah lainnya. Pada masa kolonial Hindia Belanda, wilayah ini termasuk *residentie Sumatera's Oostkust* bersama provinsi Riau.

Di wilayah tengah provinsi berjajar Pegunungan Bukit Barisan. Di pegunungan ini terdapat beberapa wilayah yang menjadi kantong-kantong konsentrasi penduduk. Daerah di sekitar Danau Toba dan Pulau Samosir, merupakan daerah padat penduduk yang menggantungkan hidupnya kepada danau ini.

Pesisir barat merupakan wilayah yang cukup sempit, dengan komposisi penduduk yang terdiri dari masyarakat Batak, Minangkabau, dan Aceh. Namun secara kultur dan etnolinguistik, wilayah ini masuk ke dalam budaya dan Bahasa Minangkabau.

Batas Wilayah Administrasi:

- Sebelah Utara : Provinsi Aceh dan Selat Malaka
- Sebelah Selatan : Provinsi Riau
- Sebelah Timur : Selat Malaka
- Sebelah barat : Provinsi Aceh dan Samudera Indonesia

Provinsi Sumatera Utara dibagi menjadi beberapa wilayah administrasi, yakni 8 kota dan 25 kabupaten, ibu kota provinsi berada di Kota Medan. Berikut daftar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

| | | |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| • Kota Medan | • Kab Pakpak Bharat | • Kab Tapanuli Tengah |
| • Kota Binjai | • Kab Samosir | • Kab Tapanuli Selatan |
| • Kota Pematang Siantar | • Kab Labuhanbatu Utara | • Kab Deli Serdang |
| • Kota Padang Sidempuan | • Kab Simalungun | • Kab Batu Bara |
| • Kota Sibolga | • Kab Labuhanbatu Selatan | • Kab Humbang Hasundutan |
| • Kota Tanjungbalai | • Kab Labuhanbatu | • Kab Toba |
| • Kota Tebing Tinggi | • Kab Padang Lawas Utara | • Kab Padang Lawas |

| | | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Kota Gunungsitoli • Kab Langkat • Kab Serdang Bedagai • Kab Karo | <ul style="list-style-type: none"> • Kab Mandailing Natal • Kab Nias • Kab Nias Selatan • Kab Tapanuli Utara | <ul style="list-style-type: none"> • Kab Dairi • Kab Asahan • Kab Nias Utara • Kab Nias Barat |
|---|--|---|

Sumatera Utara merupakan provinsi keempat terbesar jumlah penduduknya di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Menurut hasil pencacahan lengkap Sensus Penduduk (SP) 1990, penduduk Sumatera Utara berjumlah 10,81 juta jiwa, dan pada tahun 2010 jumlah penduduk Sumatera Utara telah meningkat menjadi 12,98 juta jiwa. Kepadatan penduduk Sumatera Utara pada tahun 1990 adalah 143 jiwa per km² dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 178 jiwa per km². Dengan Laju Pertumbuhan Penduduk dari tahun 2000-2010 sebesar 1,10 persen. Sensus penduduk tahun 2020, penduduk Sumatera Utara bertambah menjadi 13.937.797 jiwa, dengan kepadatan penduduk 191 jiwa/km². Sensus penduduk pada tahun 2022, penduduk Sumatera Utara berjumlah 15.115.206 jiwa.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sumatera Utara setiap tahunnya tidak tetap. Pada tahun 2000 TPAK di daerah ini sebesar 57,34 persen, tahun 2001 naik menjadi 57,70 persen, tahun 2002 naik lagi menjadi 69,45 persen.

3. Potensi Wilayah Provinsi Sumatera Utara

Energi

Sumatera Utara kaya akan sumber daya alam berupa gas alam di daerah Tandam, Binjai dan minyak bumi di Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat yang telah dieksplorasi sejak zaman Hindia Belanda.

Selain itu di Kuala Tanjung, Kabupaten Batu Bara juga terdapat PT Inalum yang bergerak di bidang penambangan bijih dan peleburan aluminium yang merupakan satu-satunya di Asia Tenggara.

Sungai-sungai yang berhulu di pegunungan sekitar Danau Toba juga merupakan sumber daya alam yang cukup berpotensi untuk dieksploitasi menjadi sumber daya pembangkit listrik tenaga air. PLTA Asahan yang merupakan PLTA terbesar di Sumatera terdapat di Kabupaten Toba Samosir.

Selain itu, di kawasan pegunungan terdapat banyak sekali titik-titik panas geotermal yang sangat berpotensi dikembangkan sebagai sumber energi panas maupun uap yang selanjutnya dapat ditransformasikan menjadi energi listrik.

Pertanian dan Perkebunan



Provinsi ini tersohor karena luas perkebunannya, hingga kini, perkebunan tetap menjadi primadona perekonomian provinsi. Perkebunan tersebut dikelola oleh perusahaan swasta maupun negara. BUMN Perkebunan yang arealnya terdapat di Sumatera Utara, antara lain PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II), PTPN III dan PTPN IV.

Selain itu Sumatera Utara juga tersohor karena luas perkebunannya. Hingga kini, perkebunan tetap menjadi primadona perekonomian provinsi. Perkebunan tersebut dikelola oleh perusahaan swasta maupun negara. Sumatera Utara menghasilkan karet, coklat, teh, kelapa sawit, kopi, cengkih, kelapa, kayu manis, dan tembakau. Perkebunan tersebut tersebar di Deli Serdang, Langkat, Simalungun, Asahan, Labuhanbatu, dan Tapanuli Selatan.

- Luas pertanian padi. Pada tahun 2005 luas areal panen tinggal 807.302 hektare, atau turun sekitar 16.906 hektare dibanding luas tahun 2004 yang mencapai 824.208 hektare. Produktivitas tanaman padi tahun 2005 sudah bisa ditingkatkan menjadi berkisar 43,49 kwintal perhektar dari tahun 2004 yang masih 43,13 kwintal per hektare, dan tanaman padi ladang menjadi 26,26 kwintal dari 24,73 kwintal per hektare. Tahun 2005, surplus beras di Sumatera Utara mencapai 429 ton dari sekitar 2.1.27 juta ton total produksi beras di daerah ini.
- Luas perkebunan karet. Tahun 2002 luas areal tanaman karet di Sumut 489.491 hektare dengan produksi 443.743 ton. Sementara tahun 2005, luas areal karet menurun atau tinggal 477.000 hektare dengan produksi yang juga anjlok menjadi hanya 392.000 ton.
- Irigasi. Luas irigasi teknis seluruhnya di Sumatera Utara seluas 132.254 ha meliputi 174 Daerah Irigasi. Sebanyak 96.823 ha pada 7 Daerah Irigasi mengalami kerusakan sangat kritis.
- Produk Pertanian. Sumatera Utara menghasilkan karet, cokelat, teh, kelapa sawit, kopi, cengkih, kelapa, kayu manis, dan tembakau. Perkebunan tersebut tersebar di Deli Serdang, Langkat, Simalungun, Asahan, Labuhanbatu, dan Tapanuli Selatan. Komoditas tersebut telah diekspor ke berbagai negara dan memberikan sumbangan devisa yang sangat besar bagi Indonesia. Selain komoditas perkebunan, Sumatera Utara juga dikenal sebagai penghasil komoditas hortikultura (sayur-mayur dan buah-buahan); misalnya Jeruk Medan, Jambu Deli, Sayur Kol, Tomat, Kentang, dan Wortel yang dihasilkan oleh Kabupaten Karo, Simalungun dan Tapanuli Utara. Produk hortikultura tersebut telah diekspor ke Malaysia dan Singapura.

Perbankan

Selain bank umum nasional, bank pemerintah serta bank internasional, saat ini di Sumut terdapat 61 unit Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan 7 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Data dari Bank Indonesia menunjukkan, pada Januari 2006, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang diserap BPR mencapai Rp 253.366.627.000 dan kredit mencapai Rp 260.152.445.000. Sedangkan aktiva mencapai Rp 340.880.837.000.

Sarana dan prasarana

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara juga sudah membangun berbagai prasarana dan infrastruktur untuk memperlancar perdagangan baik antar kabupaten maupun antar provinsi. Sektor swasta juga terlibat dengan mendirikan berbagai properti untuk perdagangan, perkantoran, hotel dan lain-lain. Tentu saja sektor lain, seperti koperasi, pertambangan dan energi, industri, pariwisata, pos dan telekomunikasi, transmigrasi, dan sektor sosial kemasyarakatan juga ikut dikembangkan. Untuk memudahkan koordinasi pembangunan, maka Sumatera Utara dibagi ke dalam empat wilayah pembangunan.

Pertambangan

Ada tiga perusahaan tambang terkemuka di Sumatera Utara:

- Agincourt Resources Martabe
- Sorikmas Mining (SMM)
- Dairi Prima Mineral (DPM)

Transportasi



Di Sumatera Utara terdapat 2.098,05 kilometer jalan negara, yang tergolong mantap hanya 1.095,70 kilometer atau 52,22 persen dan 418,60 kilometer atau 19,95 persen dalam keadaan sedang, selebihnya dalam keadaan rusak. Sementara dari 2.752,41 kilometer jalan provinsi, yang dalam keadaan mantap panjangnya 1.237,60 kilometer atau 44,96 persen, sementara yang dalam keadaan sedang 558,46 kilometer atau 20,29 persen. Halnya jalan rusak panjangnya 410,40 kilometer atau 14,91 persen dan yang rusak berat panjangnya 545,95 kilometer atau 19,84 persen.

Dari sisi kendaraan, terdapat lebih 1,38 juta kendaraan roda dua dan empat di Sumatera Utara. Dari jumlah itu, sebanyak 873 ribu lebih berada di Kota Medan. Provinsi Sumatera Utara sudah terhubung dengan tiga jalan tol yang merupakan bagian dari proyek tol Trans-Sumatera yaitu, jalan tol Medan-Tebing Tinggi yang menghubungkan wilayah Mebidangro, kabupaten di pesisir timur dan bandara internasional Kualanamu dan direncanakan menghubungkan ke provinsi Riau, jalan

tol Belawan-Tanjung Morawa yang menghubungkan ke pusat kota Medan dan jalan tol Medan-Binjai yang direncanakan menghubungkan antara Sumatera Utara dan provinsi Aceh.



Di Sumatera Utara, terdapat 7 bandar udara, yang terdiri dari 2 bandar udara berstatus internasional dan 5 bandara domestik, seperti berikut ini:

1. Bandar Udara Internasional Kualanamu
2. Bandar Udara Internasional Silangit
3. Bandar Udara Dr. Ferdinand Lumban Tobing
4. Bandar Udara Aek Godang
5. Bandar Udara Binaka
6. Bandar Udara Lasondre
7. Bandar Udara Sibisa

Perkeretaapian di Sumatera Utara dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional I Sumatera Utara. Jalur yang dilayani meliputi rute Medan–Siantar, Medan–Rantau Prapat, Medan–Tanjungbalai, Medan–Belawan dan Medan–Binjai. Jalur-jalur ini dahulu merupakan bekas jalur rel Deli Spoorweg Maatschappij yang dahulu digunakan untuk pengangkutan komoditas perkebunan. Dalam rangka mewujudkan hubungan Trans-Sumatera via kereta api, dibutuhkan 30 triliun rupiah untuk membangun jalur kereta api lintas tengah Sumatera sebagai bagian dari proyek jalur kereta api Trans-Sumatera yang akan menghubungkan Aceh, Padang, Palembang, hingga Lampung.

Ekspor & impor

Kinerja ekspor Sumatera Utara cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2004 tercatat perolehan devisa mencapai US\$4,24 miliar atau naik 57,72% dari tahun sebelumnya dari sektor ini.

Ekspor kopi dari Sumatera Utara mencapai rekor tertinggi 46.290 ton dengan negara tujuan ekspor utama Jepang selama lima tahun terakhir. Ekspor kopi Sumut juga tercatat sebagai 10 besar produk ekspor tertinggi dengan nilai US\$3,25 juta atau 47.200,8 ton periode Januari hingga Oktober 2005.

Dari sektor garmen, ekspor garmen cenderung turun pada Januari 2006. Hasil industri khusus pakaian jadi turun 42,59 persen dari US\$ 1.066.124 pada tahun 2005, menjadi US\$ 2.053 pada tahun 2006 pada bulan yang sama.

Kinerja ekspor impor beberapa hasil industri menunjukkan penurunan. Yakni furniture turun 22,83 persen dari US\$ 558.363 (2005) menjadi US\$ 202.630 (2006), plywood turun 24,07 persen dari US\$ 19.771 menjadi US\$ 8.237, misteric acid turun 27,89 persen yakni dari US\$ 115.362

menjadi US\$ 291.201, stearic acid turun 27,04 persen dari US\$ 792.910 menjadi US\$ 308.020, dan sabun noodles turun 26 persen dari AS.689.025 menjadi US\$ 248.053.

Kinerja ekspor impor hasil pertanian juga mengalami penurunan yakni minyak asiri turun 18 persen dari US\$ 162.234 menjadi US\$ 773.023, hasil laut/udang, minyak kelapa dan kopi robusta juga mengalami penurunan cukup drastis hingga mencapai 97 persen. Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan (nilai di atas US\$ Juta) adalah biji kakao, hortikultura, kopi arabica, CPO, karet alam, hasil laut (non udang). Untuk hasil industri yakni moulding, ban kendaraan dan sarung tangan karet.

B. Visi dan Misi

Visi

"Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat."

Misi

1. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.
2. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.
3. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.
4. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.
5. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

Gubernur Sumatera Utara bertanggungjawab atas wilayah provinsi Sumatera Utara. Saat ini di penghujung tahun 2023, masa jabatan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah, telah usai, sehingga jabatan gubernur saat ini diemban oleh Hasanuddin sebagai Pj. Gubernur Sumatera Utara.

PROFIL KABUPATEN KARO

Profil dan Kebijakan Teknis

A. Data Umum

1. Sejarah Kabupaten Karo

Lambang Kabupaten Karo sebagai berikut:



Gambar 1. Lambang Pemerintah Kabupaten Karo

Berbicara mengenai Kabupaten Karo, maka tidak lepas dari sejarah asal-usul orang yang mendiami wilayahnya yaitu suku Karo. Suku Karo adalah suku bangsa yang mendiami tanah Karo tentunya dan beberapa daerah lain disekitarnya seperti di Karo Baluren (Kabupaten Dairi), Simalungun, Deli Hulu (Kabupaten Deli Serdang), Langkat, dan beberapa daerah lainnya yang penduduk bersuku Karo tapi tidak terkonsentrasi secara massal diwilayahnya. Suku Karo tidak mau disebut sebagai suku Batak karena menurut mereka asal-usul diri mereka bukanlah dari keturunan Si Raja Batak, melainkan keturunan seorang panglima perang bernama Karo yang berasal dari kerajaan Cola di India selatan. Dikisahkan dulu ada seorang raja yang membawa rombongan besar termasuk sang panglima dan putri raja bernama Miansari untuk mencari wilayah baru agar wilayah kerajaannya menjadi luas. Rombongan ini berlayar dan menemukan pulau yang subur yang sekarang dikenal sebagai pulau Penang di Malaysia. Rombongan terus bergerak mencari wilayah yang lebih luas lagi. Namun diperjalanan terjadi badai besar yang membuat kapal rombongan mereka tercerai berai. Rombongan raja terdampar di pulau lain, dan rombongan panglima beserta Miansari terdampar di pulau yang lebih luas dan subur yang sekarang dikenal sebagai pulau Sumatera. Tempat mereka terdampar sekarang dikenal sebagai daerah Belawan, Medan. Rupanya panglima Karo dan putri Miansari sudah lama saling memendam rasa cinta, hingga mereka sepakat menikah dan disaksikan rombongan yang ikut serta. Setelah menikah mereka terus melanjutkan perjalanan mengikuti aliran sungai menuju pedalaman dan kemudian beristirahat. Daerah tempat peristirahatan pertama mereka sekarang dikenal sebagai daerah Durin Tani yang berada di kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Mereka beristirahat didalam gua yang sekarang dinamakan gua Umang. Karena dianggap belum aman maka mereka mencari tempat lain dengan mengikuti sungai menuju pegunungan dan tiba didaerah yang sekarang dinamakan Sikeben yang masih masuk daerah Sibolangit. Karena ada keinginan mencari tempat tinggal yang indah pemandangannya, maka mereka

terus berjalan hingga menemukan daerah yang sekarang bernama Mulawari, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo dan mendirikan perkampungan disana. Dengan demikian mereka adalah pendiri tanah Karo. Dari pernikahannya, mereka dikaruniai tujuh orang anak dimana anak pertama hingga keenam perempuan dan anak terakhir laki-laki yang bernama : Corah, Unjuk, Tekang, Girik, Pagit, Jile dan akhirnya lahir anak ketujuh seorang laki-laki diberi nama Meherga yang berarti berharga atau mehaga (penting) sebagai penerus. Dari sanalah akhirnya lahir Merga bagi orang Karo yang berasal dari ayah (pathrilineal) sedangkan bagi anak perempuan disebut Beru berasal dari kata diberu yang berarti perempuan. Merga akhirnya kawin dengan anak Tarlon yang bernama Cimata. Tarlon merupakan ipar dari Karo, adik bungsu dari Miansari. Dari Merga dan Cimata kemudian lahir lima orang anak laki-laki yang namanya merupakan lima induk merga etnis Karo, yaitu:

- Karo-Karo
- Ginting
- Sembiring
- Peranginangin
- Tarigan

Keturunan dari lima induk merga Karo ini kemudian mendirikan kerajaan kecil bagi kesatuan wilayah mereka yaitu :

1. Kerajaan Sebayak Lingga (asal mula Marga Karo-Karo Sinulingga)
2. Kerajaan Sebayak Sarinembah (asal mula Marga Sembiring Meliala)
3. Kerajaan Sebayak Suka (asal mula Marga Ginting Suka)
4. Kerajaan Sebayak Barusjahe (asal mula Karo-Karo, Barus)
5. Kerajaan Sebayak Kutabuluh (asal mula Marga Perangin-angin)
6. Kerajaan Sukapiring Seberaja (asal mula marga Karo Sekali)

2. Kondisi Geografis dan Demografis Kabupaten Karo

Kabupaten Karo terletak pada 02°50'-3°16'sampai 03° 19' Lintang Utara dan 97°55' sampai 98°38' Bujur Timur. Kabupaten Karo terletak pada jajaran Bukit Barisan dan sebagian besar wilayahnya merupakan dataran tinggi. Luas wilayah Kabupaten Karo 2.207 km². Dua gunung berapi aktif terletak di wilayah ini sehingga rawan gempa vulkanik.

Batas Wilayah Administrasi:

- Sebelah Utara : Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang
- Sebelah Selatan : Kabupaten Dairi dan Kabupaten Samosir
- Sebelah Timur : Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Simalungun
- Sebelah Barat : Provinsi Nangroe Aceh Darussalam

Hasil Sensus tahun 2010 Penduduk Kabupaten Karo berjumlah 350.960 jiwa. Pada pertengahan tahun 2014, menurut proyeksi penduduk sebesar 382.622 yang mendiami wilayah seluas 2.127,25 Km². Kepadatan penduduk diperkirakan sebesar 180 jiwa/ Km² Laju Pertumbuhan Penduduk Karo Tahun 2010 – 2014 adalah sebesar 2,18 persen per tahun. Tahun 2014 di Kabupaten Karo Penduduk laki-laki lebih sedikit dari Perempuan. Laki-laki berjumlah 189.815 jiwa dan Perempuan berjumlah 192.807 jiwa. *Sex rasionya* sebesar 98,45. Selanjutnya dengan melihat jumlah penduduk yang berusia dibawah 15 tahun dan 65 tahun keatas maka diperoleh rasio ketergantungan sebesar 58,78 yang berarti setiap seratus orang usia produktif menanggung 59 orang dari usia dibawah 15 tahun dan 65 tahun keatas. Beban tanggungan anak bagi usia produktif sebesar 51 dan beban tanggungan lanjut usia bagi penduduk usia produktif sebesar 8. Hasil sensus penduduk pada tahun 2022, penduduk di Kabupaten Karo berjumlah 414.429 jiwa.

3. Potensi Wilayah Kabupaten Karo

Potensi utama Kabupaten Karo ialah di sektor pertanian dan perkebunan

Pada sektor Pariwisata terdapat objek antara lain;

Pagoda Lumbini

Taman Alam Lumbini merupakan Pagoda tertinggi dan terindah di Indonesia. Di dalam taman ini berdiri kuil Buddha yang sangat megah dan merupakan replika dari Pagoda Shwedagon yang ada di Burma (Myanmar). Selain bangunan Pagoda yang megah, kompleks seluas 3 hektar ini juga terhampar taman yang indah dengan mengikuti kontur alam.



Replika Pagoda Shwedagon di taman ini merupakan replika tertinggi kedua setelah Burma dan merupakan Pagoda yang tertinggi di Indonesia sehingga meraih rekor MURI (Museum Rekor Indonesia) dengan kategori Pagoda Tertinggi di Indonesia.

Di dalam bangunan pagoda kita disambut oleh juntaian indah lampion berwarna merah dan juga 30 Rupang Arah, 2.958 Rupang Buddha, serta 108 relik suci yang menghiasi isi bangunan tersebut.

Air Terjun Sipiso-piso

Air Terjun Sipiso-piso. Air terjun ini punya tinggi mencapai 120 meter dan terlihat cantik dari kejauhan. Secara geografis Desa Tongging berada di dataran lebih rendah, sementara Air Terjun Sipiso-piso terletak di perbukitan yang lebih tinggi dari Desa Tongging. Air terjun ini berada di ketinggian lebih kurang 800 meter dari permukaan laut (dpl) dan dikelilingi oleh bukit yang hijau karena ditumbuhi hutan pinus.



Nama air terjun yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karo ini memiliki makna yang khas. Sipiso-piso berasal dari piso yang artinya pisau. Derasnya air-air yang berjatuh dari bukit berketinggian di atas seratus meter ini diperumpamakan layaknya berbilah-bilah pisau yang tajam.

B. Visi dan Misi

Visi

“Mewujudkan Kabupaten Karo yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing Berbasis Pariwisata dan Pertanian Menuju Masyarakat Makmur dan Sejahtera.”

Misi

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui reformasi birokrasi sampai ke tingkat desa, peningkatan sumber daya aparatur dan peningkatan kesejahteraan.
2. Pengembangan sumber daya manusia yang berbasis penerapan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi pertanian, perikanan, peternakan, agroindustri dan penerapan pola sistem pertanian terpadu.
4. Membangun struktur industri pariwisata yang berbasis alam, agrowisata, ekowisata dan adat serta nilai-nilai budaya karo.
5. Mewujudkan generasi muda yang berkualitas dan masyarakat olahraga yang berprestasi.
6. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan kemudahan pelayanan perijinan.
7. Peningkatan pertumbuhan dan peningkatan ekonomi kreatif sehingga mampu menciptakan lapangan usaha dan lapangan kerja baru.
8. Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah dan desa, terutama usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta koperasi. Membangun, mengembangkan pasar bagi produk lokal.
9. Pemerataan dan keseimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam

pemanfaatan sumber daya alam secara rasional, efektif dan efisien.

10. Peningkatan kualitas layanan pendidikan baik pendidikan dasar dan menengah 9 tahun, pendidikan formal maupun non formal.
11. Peningkatan kualitas layanan, kesehatan dasar, dan daya dukung pelayanan kesehatan.
12. Penggalan dan optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kabupaten Karo terdiri dari 17 kecamatan, 10 kelurahan, dan 259 desa dengan luas wilayah mencapai 2.207 km² dan jumlah penduduk sekitar 414.429 jiwa (2022) dengan kepadatan penduduk 194 jiwa/km². Adapun nama kecamatan di kabupaten Karo yaitu:

1. Barus Jahe
2. Berastagi
3. Dolat Rakyat
4. Juhar
5. Kabanjahe
6. Kuta Buluh
7. Laubaleng
8. Mardingding
9. Merdeka
10. Merek
11. Munte
12. Naman Teran
13. Payung
14. Simpang Empat
15. Tiga Binanga
16. Tiganderket
17. Tigapanah

Bupati Karo adalah pemimpin tertinggi di lingkungan pemerintah Kabupaten Karo. Bupati Karo bertanggungjawab kepada Gubernur provinsi Sumatera Utara. Saat ini, bupati atau kepala daerah yang menjabat di Kabupaten Karo ialah Cory Sriwaty Sebayang, dengan wakil bupati Theopilus Ginting. Mereka menang pada Pemilihan umum Bupati Karo tahun 2020. Cory Sebayang merupakan bupati Karo ke-19 setelah kabupaten ini didirikan, dan pada periode sebelumnya ia menjabat sebagai Wakil bupati, bersama bupati Terkelin Brahmana. Cory dan Theopilus dilantik oleh gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, pada 26 April 2021 di Kota Medan.

PROFIL KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Profil dan Kebijakan Teknis

A. Data Umum

1. Sejarah Kabupaten Labuhanbatu Utara

Lambang Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai berikut:



Gambar 1. Lambang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara

Sebutan Labuhanbatu bermula ketika pada tahun 1862 Angkatan Laut Belanda datang ke sebuah kampung di Hulu Labuhanbilik tepatnya di desa Sei Rakyat sekarang. Di desa ini, tentara Belanda membangun tempat pendaratan kapal yang terbuat dari batu beton. Lambat laun, tempat ini berkembang menjadi tempat persinggahan dan pendaratan kapal yang kemudian menjadi kampung besar yang diberi nama "Pelabuhanbatu". Kemudian, masyarakat mempersingkat sebutannya menjadi "Labuhanbatu". Nama Labuhanbatu ini kemudian melekat dan ditetapkan menjadi nama wilayah Kabupaten Labuhanbatu.

Sebelum kemerdekaan Indonesia, di wilayah Kabupaten Labuhanbatu terdapat 4 kesultanan, yaitu:

- Kesultanan Kota Pinang yang berkedudukan di Kota Pinang
- Kesultanan Kualuh berkedudukan di Tanjung Pasisir
- Kesultanan Bilah berkedudukan di Negeri Lama
- Kesultanan Panai berkedudukan di Labuhanbilik

Setelah kemerdekaan Indonesia, keempat kesultanan ini menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Labuhanbatu, sesuai ketetapan komite nasional daerah keresidenan Sumatera Timur tanggal 19 Juni 1946.

Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah pemekaran dari Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2008, tanggal 21 Juli 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Labuhanbatu Utara lahir dari tuntutan aspirasi masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Labuhanbatu Utara.

2. Kondisi Geografis dan Demografis Kabupaten Labuhanbatu Utara

Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai salah satu kabupaten yang berada kawasan Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara yang terletak 99.25.00° – 100.05.00° Bujur Timur dan 01°58'00'' – 02°50'00'' Lintang Utara dengan ketinggian 0 – 2.151 meter di atas permukaan laut. Kabupaten ini memiliki wilayah seluas 354.580 km² dengan batas-batas sebagai berikut Batas Wilayah Administrasi:

- Sebelah Utara : Kabupaten Asahan dan Selat Malaka
- Sebelah Selatan : Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Kabupaten Labuhanbatu
- Sebelah Timur : Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Tapanuli Utara
- Sebelah Barat : Kabupaten Labuhanbatu

3. Potensi Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara

Perkebunan sawit, perikanan laut, dan peternakan kerbau, sapi, ayam ras dan kambing. Pada Sektor Pariwisata Labuhanbatu Utara Pulo wisiki memiliki tempat pemandian wisata alam yang cukup terkenal letaknya berada di Desa Simonis Kecamatan Na IX-X. Tempat pemandian ini merupakan salah satu tempat yang selalu dikunjungi para masyarakat untuk menikmati segarnya air pemandian dan menikmati pemandangan yang asri

Tempat Wisata

- Air Terjun Kilo 7, desa Terang Bulan di Kecamatan Aek Natas
- Air Terjun Mbah Kaslan, Kuala Beringin di Kecamatan Kualuh Hulu
- Air Terjun Tombak Tampayan, Pindoan di Kecamatan Na IX-X
- Air Terjun Padang Nabidang, Pematang di Kecamatan Na IX-X
- Air Terjun Matoga, Meranti Omas di Kecamatan Na IX-X
- Gua Tapak Tilas, Kuala Beringin di Kecamatan Kualuh Hulu
- Puncak Manalese, Aek Buru di Kecamatan Na IX-X
- Pante Monyet, Meranti Omas di Kecamatan Na IX-X
- Hadabuan Hill, Napompar di Kecamatan Na IX-X
- Waterpark Aladin, Londut di Kecamatan Kualuh Hulu
- Gua kaca, Maranti Omas di Kecamatan Na IX-X
- Bukit kapur, Maranti Omas di Kecamatan Na IX-X

B. Visi dan Misi

Visi

“Mewujudkan Kabupaten Labuhanbatu Utara Hebat dengan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sejahtera dan Religius.”

Misi

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Masyarakat Labuhanbatu Utara berbasiskan pada pendidikan dan pelatihan formal maupun non-formal.
2. Melanjutkan reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, partisipatif dan bertanggung jawab berbasis pengembangan teknologi.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur berbasis perencanaan yang sesuai dengan kondisi geografis kewilayahan.
4. Membangun dan mengembangkan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang produktif dan berkelanjutan.
5. Menghadirkan nilai-nilai keagamaan dalam seluruh kegiatan sosial- kemasyarakatan.

Kabupaten Labuhanbatu Utara terdiri dari 8 kecamatan, 8 kelurahan, dan 82 desa dengan luas wilayah mencapai 354.580 km² dan jumlah penduduk sekitar 390.954 jiwa (2022) dengan kepadatan penduduk 110 jiwa/km².

1. Aek Kuo
2. Aek Natas
3. Kualuh Hilir
4. Kualuh Hulu
5. Kualuh Leidong
6. Kualuh Selatan
7. Marbau
8. Na IX-X

Penduduk asli di Labuhanbatu Utara adalah Melayu Kualuh, yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan, terutama di sekitar Sungai Kualuh, seperti di Kecamatan Kualuh Leidong, Kualuh Selatan, Kualuh Hulu, dan Kualuh Hilir. Pada Umumnya yang dimaksud Melayu Kualuh disini adalah orang-orang Batak Muslim, Khususnya Toba dan Mandailing yang berbudayakan Melayu dalam kehidupan sehari-hari. Sebutan dalam bahasa mereka adalah "*Oghang Kampung*".

Sebagian besar penduduk Labuhanbatu Utara adalah Suku Jawa dan Suku Batak, yang umumnya adalah Batak Toba, Batak Mandailing dan Batak Angkola. Selebihnya adalah Melayu, Tionghoa, Aceh, Minang dll.

Bupati Labuhanbatu Utara adalah pemimpin tertinggi di lingkungan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara. Bupati Labuhanbatu Utara bertanggungjawab kepada gubernur provinsi Sumatera Utara. Saat ini, bupati atau kepala daerah yang menjabat di Kabupaten Labuhanbatu Utara ialah Hendri Yanto Sitorus, dengan wakil bupati Samsul Tanjung. Mereka menang pada Pemilihan umum Bupati Labuhanbatu Utara tahun 2020, untuk periode tahun 2021-2024. Hendri merupakan bupati Labuhanbatu Utara ke-2 sejak kabupaten ini didirikan. Hendri dan Samsul dilantik oleh gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, pada 26 April 2021 di Kota Medan.

PROFIL KABUPATEN LANGKAT

Profil dan Kebijakan Teknis

A. Data Umum

1. Sejarah Kabupaten Langkat

Lambang Kabupaten Langkat sebagai berikut:



Gambar 1. Lambang Pemerintah Kabupaten Langkat

Awal 1942, kekuasaan pemerintah Kolonial Belanda beralih ke Pemerintahan Jepang, namun sistem pemerintahan tidak mengalami perubahan, hanya sebutan Keresidenan berubah menjadi SYU, yang dipimpin oleh Syucokan. Afdeling diganti dengan Bunsyu dipimpin oleh Bunsyucu. Kekuasaan Jepang ini berakhir pada saat kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, Sumatera dipimpin oleh seorang Gubernur yaitu Mr. Teuku Muhammad Hasan, sedangkan Kabupaten Langkat tetap dengan status keresidenan dengan asisten residennya atau kepala pemerintahannya dijabat oleh Tengku Amir Hamzah, yang kemudian diganti oleh Adnan Nur Lubis dengan sebutan Bupati.

Pada tahun 1947-1949, terjadi agresi militer Belanda I, dan II, dan Kabupaten Langkat terbagi dua, yaitu Pemerintahan Negara Sumatera Timur (NST) yang berkedudukan di Binjai dengan kepala pemerintahannya Wan Umaruddin dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di Pangkalan Berandan, dipimpin oleh Tengku Ubaidulah. Berdasarkan PP No.7 Tahun 1956 secara administratif Kabupaten Langkat menjadi daerah otonom yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri dengan kepala daerahnya (Bupati) Netap Bukit. Mengingat luas Kabupaten Langkat, maka Kabupaten Langkat dibagi menjadi 3 (tiga) kewedanan yaitu:

- Kewedanan Langkat Hulu berkedudukan di Binjai
- Kewedanan Langkat Hilir berkedudukan di Tanjung Pura
- Kewedanan Teluk Haru berkedudukan di Pangkalan Berandan.

Pada tahun 1963 wilayah kewedanan dihapus sedangkan tugas-tugas administrasi pemerintahan langsung di bawah Bupati serta Assiten Wedana (Camat) sebagai perangkat akhir. Tahun 1965-1966 jabatan Bupati Kdh. Tingkat II Langkat dipegang oleh seorang Caretaker (Wongso) dan selanjutnya oleh Sutikno yang pada waktu itu sebagai Dan Dim 0202 Langkat.

2. Kondisi Geografis dan Demografis Kabupaten Langkat

Kabupaten Langkat berbatasan langsung dengan provinsi Aceh. Adapun batas wilayah Kabupaten berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut:

Batas Wilayah Administrasi

- Sebelah Utara : Selat Malaka dan Provinsi Aceh
- Sebelah Selatan : Kabupaten Karo
- Sebelah Timur : Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang
- Sebelah Barat : Provinsi Aceh

3. Potensi Wilayah Kabupaten Langkat

Kopi Dan Kelapa Sawit menjadi sektor unggulan Kabupaten Langkat di Bidang Pertanian, Pada sektor Pariwisata terdapat objek pariwisata antara lain;

1. Bukit Lawang

Kawasan ini dikenal turis mancanegara sebagai objek wisata alam hutan tropis. Ikon utama dari tempat wisata ini adalah Orang utan serta monyet liar.



2. Tangkahan

Tangkahan merupakan daerah kecil yang berada di Desa Namo Sialang, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara (Sumut). Tangkahan berbatasan langsung dengan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL).



B. Visi dan Misi

Visi

“Menjadikan Langkat Yang Maju, Sejahtera, Dan Religius, Melalui Pengembangan Pariwisata dan Infrastruktur yang Berkelanjutan.”

Misi

1. Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Peningkatan Kesejahteraan dan Pengentasan Permasalahan Sosial.

2. Meningkatkan Pelayanan Kebutuhan Dasar untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Prioritas Pengembangan pada Sektor Pariwisata.
4. Meningkatkan Kinerja Infrastruktur dan Tata Ruang Berkelanjutan.
5. Menciptakan Reformasi Birokrasi dalam Mendukung Penyelenggaraan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih.

Kabupaten Langkat terdiri dari 23 kecamatan, 37 kelurahan, dan 240 desa dengan luas wilayah mencapai 6.263,29 km² dan jumlah penduduk sekitar 1.039.926 jiwa (2022) dengan kepadatan penduduk 165 jiwa/km².

| No. | Kecamatan | No. | Kecamatan |
|-----|-----------------|-----|----------------|
| 1 | Bahorok | 13 | Padang Tualang |
| 2 | Serapit | 14 | Hinai |
| 3 | Salapian | 15 | Secanggang |
| 4 | Kutambaru | 16 | Tanjung Pura |
| 5 | Sei. Bingei | 17 | Gebang |
| 6 | Kuala | 18 | Babalan |
| 7 | Selesai | 19 | Sei. Lapan |
| 8 | Binjai | 20 | Brandan Barat |
| 9 | Stabat | 21 | Besitang |
| 10 | Wampu | 22 | Pangkalan Susu |
| 11 | Batang Serangan | 23 | Pematang Jaya |
| 12 | Sawit Seberang | | |

Bupati Langkat adalah pemimpin tertinggi di lingkungan pemerintah Kabupaten Langkat. Bupati Langkat bertanggungjawab kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara. Bupati atau kepala daerah yang menjabat di Kabupaten Langkat ialah Terbit Rencana Perangin Angin, dengan Wakil Bupati Syah Afandin. Mereka menang pada Pemilihan umum Bupati Langkat 2018. Terbit dan Afandin dilantik oleh gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, pada 20 Februari 2019 di Kota Medan, untuk masa jabatan 2019-2024. Namun, dengan ditangkapnya Bupati Langkat, maka Syah Afandin menjadi pelaksana tugas bupati.

PROFIL KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Profil dan Kebijakan Teknis

A. Data Umum

1. Sejarah Kabupaten Pakpak Bharat

Lambang Kabupaten Pakpak Bharat sebagai berikut:



Gambar 1. Lambang Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat

Kabupaten Pakpak Bharat merupakan pemekaran daerah dari Kabupaten Dairi, mengejar ketertinggalan merupakan faktor utama bagi aspirasi masyarakat Pakpak Bharat untuk meningkatkan status daerahnya menjadi suatu Kabupaten dalam kerangka NKRI, juga dengan tujuan agar masyarakat Pakpak Bharat dapat memperjuangkan dan mengatur pembangunan masyarakat dan daerah untuk meningkatkan taraf hidup menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera merupakan dasar dari usul dibentuknya Kabupaten Pakpak Bharat. Kabupaten Pakpak Bharat yang terbentuk dari tiga kecamatan Kabupaten Dairi mengambil nama sub-Wilayah suku Pakpak.

Pada tanggal 20 September 2001 dan 17 Juni 2002 Pemerintah Kabupaten Dairi menerima dan mengadakan pertemuan dengan Komite Pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat, tokoh-tokoh masyarakat dan komponen masyarakat lainnya di Kantor Bupati Dairi saran dan pendapat tentang pembentukan Kabupaten Pakpak Bharat tersebut. Pada tanggal 21 Desember 2001 diterbitkan Surat Keputusan Bupati Dairi Nomor: 400/K/2001 tentang pembentukan Tim Pengumpul Data, Saran dan pendapat tentang pembentukan Kabupaten Pakpak Bharat sebagai langkah pertama pemekaran Kabupaten Dairi.

Setelah kunjungan komisi II DPR RI, dan melalui berbagai proses, akhirnya dikeluarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara maka Kabupaten Pakpak Bharat resmi terbentuk menjadi satu kabupaten otonom dengan 3 kecamatan yaitu Kecamatan Salak, Kecamatan Kerajaan dan Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe. Dengan Ibukota Salak dan dipimpin oleh Drs. Tigor Solin sebagai pelaksana Bupati serta Drs. Gandhi Warta Manik MSi sebagai Sekretaris Wilayah yang pertama.

2. Kondisi Geografis dan Demografis Kabupaten Pakpak Bharat

Kabupaten Pakpak Bharat memiliki luas wilayah 1.375,39 km² atau 1,67% dari total luas Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis, Kabupaten Pakpak Bharat terletak pada garis 2°15'-3°32' Lintang Utara dan 96°00'-98°31' Bujur Timur. Karena terletak dekat Garis Khatulistiwa, Kabupaten Pakpak Bharat tergolong ke daerah beriklim tropis. Ketinggian antara 700 – 1.500 meter di atas permukaan laut dengan kondisi geografis berbukit – bukit. Batas Wilayah Administrasi:

- Sebelah Utara : Kabupaten Dairi
- Sebelah Selatan : Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Humbang Hasundutan
- Sebelah Timur : Kabupaten Samosir
- Sebelah Barat : Provinsi Aceh

3. Potensi Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat

Sektor pertanian menjadi unggulan Kabupaten Pakpak Bharat dengan komoditi utama gambir, cabe, kopi arabika, kentang dan jeruk.

Kabupaten Pakpak Bharat memiliki beberapa tempat wisata air terjun yang menyajikan pemandangan alam yang menyejukan sekaligus memanjakan mata, diantaranya adalah Air Terjun Lae Une, dan Air Terjun Sampuren Lae Simbilulu.

Pariwisata

Kabupaten Pakpak Bharat memiliki beberapa tempat wisata air terjun yang menyajikan pemandangan alam yang menyejukan sekaligus memanjakan mata. Diantaranya adalah

1. Air Terjun Lae Une

Air Terjun Lae Une ini berada di Kecupak, sekitar 7 km dari Kota Salak, Ibu Kota Kabupaten Pakpak Bharat. Ditinjau dari segi alamnya, wisata air terjun Lae Une cukup diperhitungkan keasriannya. Daerah ini masih cukup asri dengan pepohonan dan tumbuhan



lain yang mengelilingi air terjun ini. Sedangkan dari segi potensinya, Lae Une bisa dijadikan sebagai pembangkit listrik karena debit air yang cukup dan lokasinya yang strategis. Keindahan Air Terjun Lae Une, walau belum mendapat penataan dan fasilitas yang memadai mampu mengundang kekaguman setiap orang yang melihatnya.

Kesejukannya dapat membuat orang betah untuk menikmati panorama di Air Terjun Lae Une ini, bahkan tanpa mandi merupakan sebuah kerugian yang besar apabila berkunjung ke objek wisata ini.

2. Air Terjun Sampuren Lae Simbilulu

Obyek wisata air terjun Simbilulu terletak di Kecamatan Tinada Desa Prongil. Air terjun ini menjadi lokasi yang sangat diminati oleh masyarakat untuk dikunjungi saat liburan tahun baru dan liburan lainnya. Selain karena airnya yang bening dan sejuk, lokasi ini sangat indah dan cocok untuk tempat liburan keluarga.



Air terjun Sampuren Lae Simbilulu merupakan air terjun kembar, ada dua air terjun yang berdampingan dan terlihat masih alami keberadaannya. Airnya yang dingin menambah kesejukan yang sangat mengagumkan.

B. Visi dan Misi

Visi

“Terwujudnya Kabupaten Pakpak Bharat yang Maju, Berdaya Saing, Berkeadilan dan Sejahtera Melalui Peningkatan Perekonomian dan Sumber Daya Manusia Berlandaskan Kebudayaan dan Pemberdayaan Masyarakat.”

Misi

1. Meningkatkan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Budaya dan Potensi Lokal untuk Mempercepat Pertumbuhan serta Pemerataan Ekonomi Rakyat Melalui Penguatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat.
2. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya yang Berbasis Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efisien, Efektif dan Mengutamakan Pelayanan Publik.
4. Meningkatkan Pembangunan yang Merata, Berkeadilan dan Berkelanjutan, serta Menciptakan Dunia Usaha dan Investasi yang Adil dan Pro Rakyat.
5. Meningkatkan dan Memperkuat Pelestarian dan Diplomasi Budaya Daerah.

Wilayah administrasi Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2020 terdiri dari 8 kecamatan dengan 52 desa. Kecamatan Salak dan Sitellu Tali Urang Jehe merupakan kecamatan dengan jumlah desa terbanyak, yaitu 10 desa. Sedangkan Kecamatan Pagindar merupakan kecamatan dengan jumlah desa yang paling sedikit, yaitu hanya 4 desa. Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe merupakan kecamatan dengan wilayah terluas yaitu 473,62

km² atau 38.87% dari total luas Kabupaten Pakpak Bharat, sementara Sitellu Tali Urang Julu merupakan wilayah terkecil yaitu 53,02 km² atau 4.35% dari total luas Kabupaten Pakpak Bharat. Kecamatan Pagindar merupakan kecamatan yang paling jauh dari ibu kota Pakpak Bharat yaitu berjarak sekitar 120 kilometer ke ibu kota kecamatan.

1. Kerajaan
2. Pagindar
3. Pergetteng-getteng Sengkut
4. Salak
5. Siempat Rube
6. Sitellu Tali Urang Jehe
7. Sitellu Tali Urang Julu
8. Tinada

Berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilaksanakan pada Bulan Mei tahun 2010, jumlah penduduk di Kabupaten Pakpak Bharat adalah sebesar 40.505 jiwa yang terdiri dari 20.468 jiwa penduduk laki-laki dan 20.037 jiwa penduduk perempuan. Sebanyak 40.505 penduduk Kabupaten Pakpak Bharat menyebar di delapan Kecamatan dan 52 desa, persentase terbesar berada di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe (23,12%) sedang persentase terkecil ada di Kecamatan Pagindar (2,99%). Hasil sensus penduduk pada semester I tahun 2023, penduduk Pakpak Bharat berjumlah 56.572 jiwa.

Bupati Pakpak Bharat adalah pemimpin tertinggi di lingkungan pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. Bupati Pakpak Bharat bertanggungjawab kepada gubernur provinsi Sumatera Utara. Saat ini, bupati atau kepala daerah yang menjabat di Kabupaten Pakpak Bharat ialah Franc Bernhard Tumanggor, dengan Wakil Bupati Mutsyuhito Solin. Mereka menang pada Pemilihan umum Bupati Pakpak Bharat tahun 2020. Franc Tumanggor merupakan bupati Pakpak Bharat ke-5 setelah kabupaten ini didirikan. Mereka dilantik oleh gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, pada 26 Februari 2021 di Kota Medan, untuk periode jabatan 2021-2024.

PROFIL KABUPATEN SAMOSIR

Profil dan Kebijakan Teknis

A. Data Umum

1. Sejarah Kabupaten Samosir

Lambang Kabupaten Samosir sebagai berikut:



Gambar 1. Lambang Pemerintah Kabupaten Samosir

Kabupaten Samosir merupakan pemekaran dari kabupaten induk yakni Kabupaten Toba (sebelumnya masih bernama Toba Samosir), yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara. Pembentukan kabupaten ini diresmikan pada tanggal 7 Januari 2004 oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia. Namun, sejarah panjang Kabupaten Samosir, telah dimulai sejak tahun 1956, di mana wilayah ini masih menjadi bagian dari Kabupaten Tapanuli Utara sebagai kabupaten induk yang kemudian dimekarkan menjadi beberapa kabupaten baru.

Maka, ditetapkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara. Kemudian pada 7 Januari 2004, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atas nama Presiden Republik Indonesia, meresmikan Pembentukan Kabupaten Samosir sebagai salah satu kabupaten baru di provinsi Sumatera Utara. Atas dasar itu, disepakati bahwa tanggal **7 Januari** ditetapkan sebagai Hari Jadi Kabupaten Samosir sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 28 Tahun 2005 tentang Hari Jadi Kabupaten Samosir. Melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.21.27 tanggal 6 Januari 2004 diangkat dan ditetapkan Penjabat Bupati Samosir atas nama Bapak Drs. Wilmar Elyascher Simanjorang, M.Si yang dilantik pada tanggal 15 Januari 2004 di Medan oleh Gubernur Sumatera Utara.

2. Kondisi Geografis dan Demografis Kabupaten Samosir

Secara Geografis Kabupaten Samosir terletak pada 20 24' – 20 25' Lintang Utara dan 98 21' – 99 55' BT. Luas wilayah Kabupaten Samosir 2.069,05 km². Adapun batas wilayah Kabupaten Samosir adalah sebagai berikut:

Batas Wilayah Administrasi:

- Sebelah Utara : Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun

- Sebelah Selatan : Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan
- Sebelah Timur : Kabupaten Toba
- Sebelah Barat : Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat

3. Potensi Wilayah Kabupaten Samosir

Kabupaten Samosir menjadi salah satu tujuan utama wisata di provinsi Sumatera Utara, khususnya bagi wisatawan yang ingin mengunjungi kawasan sekitar Danau Toba. Pulau Samosir yang berada di tengah-tengah Danau Toba, merupakan lokasi di Kabupaten Samosir yang menyediakan wisata adat Batak Toba. Peninggalan budaya Batak Toba, museum Batak, tempat pembuatan kain adat Ulos, pantai danau, pertunjukan Tari Tortor, kuliner khas Batak Toba, pertunjukan Sigale gale, bisa ditemukan di Kabupaten Samosir.

Pada 2 Februari 2022, presiden Indonesia Joko Widodo telah meresmikan dua tempat wisata adat di Samosir, yakni Kampung Ulos Huta Raja di Pangururan dan Huta Siallagan di Simanindo. Penataan dua tempat wisata adat ini, pasca kunjungan Jokowi pada tahun 2019. Melalui Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Jokowi meminta supaya Kampung Ulos dan Huta Siallagan direvitalisasi. Total biaya penataan dua kawasan wisata ini sebanyak Rp 55,8 miliar. Selain itu, Tomok juga menjadi salah satu tujuan wisata di Samosir. Di tempat ini, wisatawan bisa melihat pertunjukan Sigale gale, dan pertunjukan Tari Tortor. Kemudian ada juga wisata pantai, yakni pantai Pasir Putih di Pangururan.

B. Visi dan Misi

Visi

“Terwujudnya Masyarakat Samosir yang Sejahtera dan Bermartabat, secara Ekonomi, Kesehatan dan Pendidikan.”

Misi

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif dan bersih.
2. Membangun kemandirian ekonomi berbasis pertanian dan pariwisata berkelanjutan didukung infrastruktur dasar yang berkualitas.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan sumber daya manusia yang berkepribadian dan berbudaya.

Kabupaten Samosir terdiri dari 9 kecamatan; 6 kecamatan berada di Pulau Samosir, dan 3 kecamatan di daerah lingkaran luar Danau Toba tepat pada punggung pegunungan Bukit Barisan, 6 kelurahan, dan 128 desa. Adapun nama kecamatan di kabupaten Samosir yaitu:

- Harian
- Nainggolan
- Onan Runggu
- Palipi
- Pangururan
- Ronggur Nihuta
- Sianjur Mulamula
- Simanindo
- Sitiotio

Samosir adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari kabupaten Toba sesuai dengan UU RI Nomor 36 Tahun 2003 pada tanggal 18 Desember 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai. Terbentuknya Samosir sebagai kabupaten baru merupakan langkah awal untuk memulai percepatan pembangunan menuju masyarakat yang lebih sejahtera. Penduduk kabupaten Samosir berjumlah 143.168 jiwa (2022).

Bupati Samosir adalah pemimpin tertinggi di lingkungan pemerintah Kabupaten Samosir. Bupati Samosir bertanggungjawab kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara. Saat ini, bupati atau kepala daerah yang menjabat di Kabupaten Samosir ialah Vandiko Timotius Gultom, dengan wakil bupati Martua Sitanggang. Mereka menang pada Pemilihan umum Bupati Samosir tahun 2020, untuk periode tahun 2021-2024. Vandiko merupakan Bupati Samosir ke-3 sejak kabupaten ini didirikan, dan merupakan salah satu bupati terpilih termuda, yakni di bawah 30 tahun. Vandiko dan Martua dilantik oleh gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, pada 26 April 2021 di Kota Medan.

PROFIL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Profil dan Kebijakan Teknis

A. Data Umum

1. Sejarah Kabupaten Serdang Bedagai

Lambang Kabupaten Serdang Bedagai sebagai berikut:



Gambar 1. Lambang Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai

Serdang Bedagai adalah kabupaten di Sumatera Utara, Indonesia. Kabupaten ini beribu kota di Sei Rampah serta baru dimekarkan dari Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan UU RI Nomor 36 Tahun 2003 pada tanggal 18 Desember 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik kabupaten Serdang Bedagai tahun 2021, penduduk kabupaten Serdang Bedagai berjumlah 667.998 jiwa (2022).

Proses lahirnya undang-undang tentang pembentukan Sergai sebagai kabupaten pemekaran merujuk pada usulan yang disampaikan melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 18/K/2002 tanggal 21 Agustus 2002 tentang Persetujuan Pemekaran Kabupaten Deli Serdang.

Kemudian Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 26/K/DPRD/2003 tanggal 10 Maret 2003 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang Atas Usul Rencana Pemekaran Kabupaten Deli Serdang menjadi 2 (dua) Kabupaten, Kabupaten Deli Serdang Induk, dan Kabupaten Serdang Bedagai. Kabupaten yang luasnya mencapai 1.952,38 km² ini, terdiri atas 243 desa/kelurahan yang berada dalam 17 kecamatan.

2. Kondisi Geografis dan Demografis Kabupaten Serdang Bedagai

Secara geografis, Kabupaten Serdang Bedagai terletak pada posisi 2° 57" LU, 3°16" LS, 98° 33" - 99° 27" BT. Luas wilayah Kabupaten Serdang Bedagai 1.952,38 km².

Batas Wilayah Administrasi:

- Sebelah Utara : Selat Malaka
- Sebelah Selatan : Kecamatan Dolok Batunanggar, Raya Kahean dan Silau Kahean di Kab. Simalungun

- Sebelah Timur : Kecamatan Dolok Batunanggar, Raya Kahean dan Silau Kahean di Kab. Simalungun
- Sebelah barat : Sungai Ular dan Sungai Buaya

Penduduk kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2020 berjumlah 657.490 jiwa atau 150.281 keluarga dengan kepadatan penduduk rata-rata 346 jiwa per km². Dari jumlah penduduk tersebut, tingkat pengangguran terbuka relatif kecil yakni 14.774 jiwa atau sekitar 3 persen. Berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2022, penduduk Kabupaten Serdang Bedagai berjumlah 667.998 jiwa. Keragaman budaya yang ada tergambar dari muklti etnis yang ada, yakni Melayu, Batak Toba, Batak Simalungun, Jawa, Karo, Batak Angkola, Batak Mandailing, Minangkabau, Banjar, Aceh, Nias dan Tionghoa-Indonesia.

3. Potensi Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai

Sektor yang menjadi unggulan kabupaten ini adalah sektor pertambangan, perkebunan dan perikanan. Sektor pertambangan komoditi unggulannya adalah granit dan pasir kuarsa, sub sektor perkebunan komoditi yang diunggulkan berupa kakao, kelapa sawit, kelapa dan karet, sektor perikanan komoditi unggulannya adalah perikanan budidaya keramba, kolam, sawah, dan perikanan tangkap.

B. Visi dan Misi

Visi

“Serdang Bedagai Mandiri,Sejahtera dan Religius.”

Misi

1. Meningkatkan kualitas SDM.
2. Menyelenggarakan pelayanan publik yang bersih dan baik.
3. Meningkatkan potensi ekonomi kerakyatan yang berdaya saing.
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur.
5. Melakukan pemberdayaan masyarakat diberbagai aspek dan ketersediaan fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang publik.

Kabupaten Serdang Bedagai terdiri dari 17 kecamatan, 6 kelurahan, dan 237 desa dengan luas wilayah mencapai 1.952,38 km² dan jumlah penduduk sekitar 667.998 jiwa (2022) dengan kepadatan penduduk 338 jiwa/km². Adapun nama kecamatan di kabupaten Serdang Bedagai yaitu:

1. Bandar Khalipah
2. Bintang Bayu

3. Dolok Masihul
4. Dolok Merawan
5. Kotarih
6. Pantai Cermin
7. Pegajahan
8. Perbaungan
9. Sei Bamban
10. Sei Rampah
11. Serba Jadi
12. Silinda
13. Sipispis
14. Tanjung Beringin
15. Tebing Syahbandar
16. Tebingtinggi
17. Teluk Mengkudu

Bupati Serdang Bedagai adalah pemimpin tertinggi di lingkungan pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. Bupati Serdang Bedagai bertanggungjawab kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara. Saat ini, bupati atau kepala daerah yang menjabat di Kabupaten Serdang Bedagai ialah Darma Wijaya dengan Wakil Bupati Adlin Umar Yusri Tambunan.

PROFIL KABUPATEN SIMALUNGUN

Profil dan Kebijakan Teknis

A. Data Umum

1. Sejarah Kabupaten Simalungun

Lambang Kabupaten Simalungun sebagai berikut:



Gambar 1. Lambang Pemerintah Kabupaten Simalungun

Simalungun merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Utara. Jauh sebelum menjadi wilayah sendiri, Simalungun diyakini merupakan Kampung Nagur yang berdiri sebuah kerajaan suku Batak. Kerajaan di Simalungun Dahulu kala di wilayah Kampung Nagur, Sumatera Utara terdapat sebuah kerajaan kecil suku Batak bernama Kerajaan Tanah Djawo. Kerajaan Tanah Djawo ini bermarga Sinaga dan dipimpin oleh seorang raja yang adil dan bijaksana. Dalam melaksanakan pemerintahannya, raja didampingi sejumlah hulubalang yang tangguh dan setia kepada kerajaan. Sementara itu, di luar wilayah Nagur terdapat dua kerajaan dari suku Batak yang berbeda marga. Kerajaan pertama adalah Kerajaan Silou yang bermarga Purba Tambak, satunya lagi adalah Kerajaan Raya yang bermarga Saragih Garingging. Meski berlainan marga, Kerajaan Tanah Djawo, Silou, dan Raya menjalin hubungan politik dan persahabatan. Ketiga negara tersebut hidup dalam kemakmuran dan rakyatnya hidup rukun.

Suatu ketika, terdengar kabar bahwa Kerajaan Majapahit dari Jawa akan datang menyerang Kerajaan Tanah Djawo. Mendengar kabar tersebut, Raja Tanah Djawo meminta bantuan kepada Kerajaan Silou dan Kerajaan Raya. Berkat bantuan Kerajaan Silou dan Kerajaan Raya, Kerajaan Majapahit tidak mampu menaklukkan Kerajaan Tanah Djawo. Selain itu, Kerajaan Silou yang diserang oleh Kerajaan Aceh juga mendapat bantuan dari Tanah Djawo dan Raya. Akibatnya, Aceh gagal menaklukkan Kerajaan Silou. Suatu ketika ketiga kerajaan tersebut diserang oleh pasukan yang tak dikenal. Meski telah saling membantu, Tanah Djawo, Silou, dan Raya akhirnya takluk. Serangan tersebut juga memaksa rakyat dari ketiga kerajaan menyelamatkan diri dengan mengungsi. Rakyat Kerajaan Tanah Djawo mengungsi hingga sampai di Tanah Sihili Misir yang dikenal dengan Pulau Samosir yang berada di tengah Danau Toba, Sumatera Utara. Di sanalah mereka menetap dan memulai kehidupan baru dengan membuka ladang dan memulai bercocok tanam. Setelah sekian lama, kehidupan mereka di Pulau Samosir mulai tertata dan makmur. Bahkan ada yang sampai memiliki cucu.

Suatu ketika sebagian orang dari Tanah Djawo sangat rindu dengan kampung halamannya di Kampung Nagur. Namun, sebagian lagi merasa tidak ingin kembali ke Kampung Nagur karena kehidupannya di Pulau Samosir sudah makmur. Akhirnya, sebagian orang yang rindu Kampung Nagur kembali. Setelah sehari-hari melakukan perjalanan sampailah mereka di kampung halamannya dahulu. Betapa terkejut rakyat yang kembali ke Kampung Nagur melihat kondisinya. Mereka teringat akan peristiwa yang menimpa kampung halamannya dahulu. Rumah-rumah mereka sudah tak ada, hanya tumbuhan semak-semak belukar dan pepohonan yang tumuh subur. Salah satu dari mereka kemudian berkata, "Sima-sima nalungun". Sejak saat itulah Kampung Nagur berubah nama menjadi Sima-sima nalungun yang memiliki makna daerah sunyi dan sepi. Seiring berjalannya waktu, nama Sima-sima Nalungun kemudian berubah menjadi Simalungun yang dikenal hingga saat ini. Simalungun saat ini menjadi sebuah kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Kabupaten Simalungun merupakan rumah bagi masyarakat Batak Simalungun. Pusat pemerintahan atau ibu kota dari kabupaten ini telah resmi berpindah ke kecamatan Raya pada tanggal 23 Juni 2008 dari Kota Pematang Siantar yang telah menjadi daerah otonom, setelah tertunda selama beberapa waktu.

2. Kondisi Geografis dan Demografis Kabupaten Simalungun

Kabupaten ini memiliki 32 kecamatan dengan luas 4.369 km² atau 6,12 % dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Hatonduhan dengan luas 336,26 km², sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi dengan luas 38,97 km². Keseluruhan kecamatan terdiri dari 386 desa/nagori dan 27 kelurahan (2022).

Batas Wilayah Administrasi

- Sebelah Utara : Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Deli Serdang
- Sebelah Selatan : Kabupaten Toba
- Sebelah Timur : Kabupaten Batu Bara dan Kabupaten Asahan
- Sebelah Barat : Kabupaten Karo dan Danau Toba

Pada tahun 2021, penduduk kabupaten Simalungun berdasarkan Kementerian Dalam Negeri 2021 berjumlah 1.038.120 jiwa, dengan kepadatan 237 jiwa/km². Sementara pada tahun 2022, penduduk Kabupaten Simalungun berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara berjumlah 1.021.615 Jiwa.

3. Potensi Wilayah Kabupaten Simalungun

Potensi ekonomi Kabupaten Simalungun sebagian besar terletak pada produksi pertaniannya. Produksi lainnya adalah hasil industri pengolahan dan jasa.

Pada Sektor Pariwisata, objek wisata yang dimiliki antara lain;

Objek wisata yang diunggulkan antara lain:

Parapat

Terletak di tepi Danau Toba dengan jarak 76 Km dari Medan. Beriklim tropis dengan udaranya yang sejuk merupakan salah satu daerah tujuan wisata utama di Sumatera



Utara dan Kota Parapat sebagai pusat kegiatan setiap diadakan acara penting Pariwisata seperti Pesta Danau Toba. Danau Toba yang terjadi dari letusan gunung Toba, terletak 905m di atas permukaan laut, dengan keliling 295 km, dan luas permukaan air danau 1.100 km dengan kedalaman maksimum 529 meter, merupakan danau terbesar di Indonesia.

Air Terjun Bah Biak

Air Terjun Bah Biak ini Terdapat di Kecamatan Sidamanik, sekitar 45 km dari Pematang Raya. Air terjun ini baru akan dikembangkan oleh Dinas Pariwisata karena mulai banyak pengunjung yang tertarik. Akses menuju wisata ini cukup jauh, setelah



kita sampai di kecamatan Sidamanik masuk ke sebuah desa dengan jalan berbatuan. Wisata alam ini masih sangat alami dan menyenangkan untuk berlibur.

Kebun Teh Bah Butong

Kebun Bah Butong yang terletak di Kecamatan Sidamanik sekitar 30 km dari Pematang Raya ini merupakan kebun tertua di antara ketiga kebun, dibuka pertama kali oleh Nederland Handel Maatschappij pada 191.



B. Visi dan Misi

Visi

“Rakyat Harus Sejahtera.”

Misi

1. Pemulihan Ekonomi.

2. Pemulihan Kesehatan.
3. Penerapan GCG (*Good and Clean Government*).
4. Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
6. Peningkatan Pertanian dan Pengembangan Sistem Agribisnis.
7. Peningkatan Kualitas Infrastruktur.
8. Peningkatan Kualitas Generasi Muda/Millennial.
9. Restrukturisasi Anggaran (Perbaikan Postur APBD).
10. Restrukturisasi Organisasi dan Reformasi Birokrasi.

Kabupaten Simalungun terdiri dari 32 kecamatan, 27 kelurahan, dan 386 desa dengan luas wilayah mencapai 4.369 km² dan jumlah penduduk sekitar 1.021.615 jiwa (2022).

Kabupaten Simalungun terdiri dari 32 kecamatan yaitu:

- Bandar
- Bandar Hulan
- Bandar Masilam
- Bosar Maligas
- Dolok Masagal
- Dolok Batunanggar
- Dolok Panribuan
- Dolok Pardamean
- Dolok Silau
- Girsang Sipangan Bolon
- Gunung Malela
- Gunung Maligas
- Haranggaol Horison
- Hatonduhan
- Huta Bayu Raja
- Jawa Maraja Bah Jambi
- Jorlang Hataran
- Panei
- Panombeian Panei
- Pematang Bandar
- Pematang Sidamanik
- Pematang Silima Huta
- Purba
- Raya
- Raya Kahean
- Siantar
- Sidamanik
- Silau Kahean
- Silimakuta
- Tanah Jawa
- Tapan Dolok
- Ujung Padang

Bupati Simalungun adalah pemimpin tertinggi di lingkungan pemerintah Kabupaten Simalungun. Bupati Simalungun bertanggungjawab kepada gubernur provinsi Sumatera Utara. Saat ini, bupati atau kepala daerah yang menjabat di Kabupaten Simalungun ialah Radiapoh Hasiholan Sinaga, dengan wakil bupati Zonny Waldi. Mereka menang pada Pemilihan umum Bupati Simalungun 2020, untuk periode tahun 2021-2024. Mereka dilantik oleh gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, pada 26 April 2021 di Kota Medan.

PROFIL KOTA BINJAI

Profil dan Kebijakan Teknis

A. Data Umum

1. Sejarah Kota Binjai

Lambang Kota Binjai sebagai berikut:



Gambar 1. Lambang Pemerintah Kota Binjai

Pada tahun 1823, Gubernur Inggris yang berkedudukan di Pulau Penang mengutus John Anderson ke pesisir Sumatera timur dan dalam catatannya disebutkan sebuah kampung yang bernama "*Ba Bingai*". Sejak tahun 1822, Binjai telah dijadikan bandar/pelabuhan dimana hasil pertanian lada yang diekspor adalah berasal dari perkebunan lada di sekitar ketapangai (pungai) atau Kelurahan Kebun Lada/Damai.

Selanjutnya pada tahun 1864, Daerah Deli telah dicoba ditanami tembakau oleh pioner Belanda bernama J. Nienkyis yang mendorong didirikannya Deli Maatschappij pada tahun 1866. Orang Belanda berusaha menguasai Tanah Deli menggunakan politik pecah belah melalui pengangkatan datuk-datuk. Usaha ini ditentang oleh Datuk Kocik, Datuk Jalil dan Suling Barat, sementara Datuk Sunggal tidak menyetujui pemberian konsensi tanah kepada perusahaan Rotterdenmy oleh Sultan Deli karena tanpa persetujuan. Di bawah kepemimpinan Datuk Sunggal bersama rakyatnya di Timbang Langkat (Binjai) dibuat benteng pertahanan untuk menghadapi Belanda.

Belanda merasa terhina atas tindakan ini dan memerintahkan kapten Koops untuk menumpas para datuk yang menentang Belanda. Pada **17 Mei 1872** terjadilah pertempuran yang sengit antara Datuk/masyarakat dengan Belanda. Peristiwa perlawanan inilah yang menjadi tonggak sejarah dan ditetapkan sebagai **hari jadi Kota Binjai**. Perjuangan para datuk/rakyat terus berkobar dan pada akhirnya pada 24 Oktober 1872 Datuk Kocik, Datuk Jalil dan Suling Barat dapat ditangkap Belanda dan kemudian pada tahun 1873 dibuang ke Cilacap. Pada tahun 1917 oleh Pemerintah Belanda dikeluarkan Instelling Ordonantie No.12 dimana Binjai dijadikan *Gemeente* dengan luas 267 Ha.

Pada tahun 1942-1945 Binjai dibawah Pemerintahan Jepang dengan kepala pemerintahan Kagujawa (dengan sebutan *Guserbu*) dan tahun 1944/1945 pemerintahan kota dipimpin oleh ketua Dewan Eksekutif J. Runnanbi dengan anggota Dr. RM Djulham, Natangsa Sembiring dan Tan Hong Poh.

Pada tahun 1945, (saat revolusi) sebagai kepala pemerintahan Binjai adalah RM. Ibnu. Pada 29 Oktober 1945, T. Amir Hamzah diangkat menjadi residen Langkat oleh komite nasional. Pada masa pendudukan Belanda tahun 1947 Binjai berada di bawah Asisten Residen J. Bonger dan RM. Ibnu sebagai Wakil Wali Kota Binjai. Pada tahun 1948 -1950 pemerintahan Kota Binjai dipegang oleh ASC More. Tahun 1950-1956 Binjai menjadi kota Administratif kabupaten Langkat dan sebagai wali kota adalah OK Salamuddin kemudian T. Ubaidullah Tahun 1953-1956. Berdasarkan Undang-Undang Daruat No.9 Tahun 1956 Kota Binjai menjadi otonom dengan wali kota pertama SS Parumuhan.

Dalam perkembangannya Kota Binjai sebagai salah satu daerah tingkat II di propinsi Sumatera Utara telah membenahi dirinya dengan melakukan pemekaran wilayahnya. Semenjak ditetapkan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1986 wilayah kota Binjai telah diperluas menjadi 90,23 km² dengan 5 wilayah kecamatan yang terdiri dari 11 desa dan 11 kelurahan. Setelah diadakan pemecahan desa dan kelurahan pada tahun 1993 maka jumlah desa menjadi 17 dan kelurahan 20. Perubahan ini berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.140-1395

/SK/1993 tanggal 3 Juni 1993 tentang Pembentukan 6 Desa Persiapan dan Kelurahan Persiapan di Kota Binjai. Berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara No.146-2624/SK/1996 tanggal 7 Agustus 1996, 17 desa menjadi kelurahan.

2. Kondisi Geografis dan Demografis Kota Binjai

Letak geografis Binjai **03°03'40"–03°40'02" LU** dan **98°27'03"–98°39'32" BT**. Ketinggian rata-rata adalah 28 meter di atas permukaan laut. Sebenarnya, Binjai hanya berjarak 8 km dari Medan bila dihitung dari perbatasan di antara kedua wilayah yang dipisahkan oleh Kabupaten Deli Serdang. Jalan Raya Medan Binjai yang panjangnya 22 km, 9 km pertama berada di dalam wilayah Kota Medan, Km 10 sampai Km 17 berada dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang dan mulai Km 17 adalah berada dalam wilayah Kota Binjai. Luas wilayah Kota Binjai 90,23 km².

Ada 2 sungai yang membelah Kota Binjai yaitu Sungai Bingai dan Mencirim yang menyuplai kebutuhan sumber air bersih bagi PDAM Tirta Sari Binjai untuk kemudian disalurkan untuk kebutuhan penduduk kota. Namun di pinggiran kota, masih banyak penduduk yang menggantungkan kebutuhan air mereka kepada air sumur yang memang masih layak dikonsumsi.

Batas Wilayah Administrasi

- Sebelah Utara : Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang
- Sebelah Selatan : Kabupaten Deli Serdang
- Sebelah Timur : Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang
- Sebelah barat : Kabupaten Langkat

Kota Binjai merupakan kota multi etnis, yang dihuni oleh suku Melayu, Batak, termasuk Toba, Karo, Mandailing, Angkola, kemudian Jawa, Tionghoa, dan suku lainnya. Kemajemukan etnis ini menjadikan Binjai kaya akan kebudayaan yang beragam. Jumlah penduduk kota Binjai sampai pada April 2016 adalah 267.901 jiwa dengan kepadatan penduduk 2.961,86 jiwa/km². Tenaga kerja produktif sekitar 160.000 jiwa. Banyak juga penduduk Binjai yang bekerja di Medan karena transportasi dan jarak yang relatif dekat. Pada tahun 2022, penduduk Kota Binjai berjumlah 295.361 jiwa.

3. Potensi Wilayah Kota Binjai

Daerah komersial dan pusat perekonomian serta pusat pemerintahan terutama berpusat di wilayah Kecamatan Binjai Kota. Kawasan perindustrian dipusatkan di daerah Binjai Utara, sedangkan di sebelah timur dan selatan adalah daerah konsentrasi pertanian. Daerah pengembangan peternakan dipusatkan di kawasan Binjai Barat. Kawasan Industri Binjai di Kecamatan Binjai Utara direncanakan di Kelurahan Cengkih Turi dengan luas wilayah 300 ha. Binjai juga adalah penghasil minyak bumi dan gas ditandai dengan kawasan eksplorasi minyak bumi dan gas alam di kawasan Tandam Hilir, Kecamatan Binjai Utara.

Data tahun 1999 menunjukkan bahwa 29% dari total kegiatan perekonomian di Kotamadya Binjai bersumber dari sektor perdagangan dan jasa. Sedangkan sektor industri menyumbang nilai 23% dari total kegiatan perekonomian tadi. Pendapatan per kapita penduduk Binjai adalah sebesar Rp. 3,3 juta, sayang angka ini masih berada di bawah rata-rata pendapatan per kapita provinsi Sumatera Utara yang besarnya Rp. 4,9 juta.

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Binjai atas dasar harga tetap sebesar 5,68 persen pada tahun 2007. Hal ini menunjukkan kenaikan yang cukup baik jika dibandingkan dengan tahun 2006 sebesar 5,32 persen. Secara umum ada empat sektor yang cukup dominan dalam pembentukan total PDRB Kota Binjai yaitu Sektor Industri Pengolahan, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan dan Sektor Jasa-jasa

Bidang perkebunan tentu saja yang menjadi perhatian adalah perkebunan rambutan yang mencapai 425 ha dengan kapasitas produksi 2.400 ton per tahun. Sayangnya, kapasitas sebesar ini tidak dibarengi dengan modernisasi industri pengolahan rambutan menjadi komoditas unggulan yang bernilai plus dibandingkan dengan hanya menjual buah rambutan itu sendiri, misalnya industri pengalengan rambutan dengan jalur pemasaran yang komplet.

Kota Binjai berkembang dengan pesat dan terus berbenah menjadi kota tujuan wisata. Sejumlah objek wisata alam atau sejarah di kota ini, antara lain; Arum Jeram Sungai Binge; Masjid Agung Binjai; Pantai Sei Bingei; Tugu Perjuangan 1945; dan Vihara Setia Buddha.

B. Visi dan Misi

Visi

“Mewujudkan Binjai yang Lebih Maju, Berbudaya, dan Religius.”

Misi

1. Mewujudkan Penyeleggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Melayani, dan Profesional.
2. Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis digital, Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan yang baik.
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas.

Kota Binjai terbagi atas 5 kecamatan yang kemudian dibagi lagi menjadi 37 kelurahan dan desa. Sedianya Binjai hanyalah sebuah kecamatan di dalam lingkup Kabupaten Langkat. Lima kecamatan tersebut masing-masing adalah:

- Binjai Kota
- Binjai Utara
- Binjai Selatan
- Binjai Barat
- Binjai Timur

Kecamatan Binjai Kota, Binjai Timur dan Binjai Selatan baru dibentuk pada tahun 1981. Kota Binjai sebelumnya merupakan tempat bermarkas Kepolisian Resort Langkat yang mengurus urusan kepolisian Kota Binjai dan Kabupaten Langkat. Pada tahun 2001, Polres Langkat kemudian dipindahkan bermarkas di Stabat, ibu kota Kabupaten Langkat. Sedangkan untuk Kota Binjai dibentuk Kepolisian Resort Kota Binjai (Polresta Binjai). Tepat di depan kantor wali kota, terdapat *Lapangan Merdeka* dan *Pendopo Umar Baki* di Jalan Veteran. Lapangan Merdeka merupakan alun-alun warga Kota Binjai sedangkan Pendopo Umar Baki adalah gedung serba guna untuk melangsungkan banyak acara resmi maupun tidak resmi.

Wali kota adalah pemimpin tertinggi di lingkungan pemerintah Kota Binjai. Wali kota Binjai bertanggung jawab kepada gubernur provinsi Sumatera Utara. Saat ini, kepala daerah yang menjabat di Kota Binjai adalah Wali Kota Amir Hamzah bersama dengan Wakil Wali Kota Binjai Rizky Yunanda Sitepu.

PROFIL KOTA PEMATANG SIANTAR

Profil dan Kebijakan Teknis

A. Data Umum

1. Sejarah Kota Pematang Siantar

Lambang Kota Pematang Siantar sebagai berikut:



Gambar 1. Lambang Pemerintah Kota Pematang Siantar

Masa Kerajaan Pematang Siantar

Sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Pematang Siantar merupakan wilayah dan pusat pemerintahan dari Kerajaan Siantar, yaitu satu dari tujuh kerajaan yang ada di Simalungun. Pematang Siantar yang berkedudukan di Pulau Holing dan raja terakhir dari dinasti ini adalah keturunan marga Damanik yaitu Tuan Sang Nawaluh Damanik yang memegang kekuasaan sebagai raja tahun 1906.

Masa Pendudukan Belanda

Setelah Belanda memasuki daerah Sumatera Utara, daerah Simalungun menjadi daerah kekuasaan Belanda sehingga pada tahun 1907 berakhir kekuasaan raja-raja. Kontrolleur Belanda yang semula berkedudukan di Perdagangan, pada tahun 1907 dipindahkan ke Pematang Siantar. Sejak itu Pematang Siantar berkembang menjadi daerah yang banyak dikunjungi pendatang baru, Bangsa Cina mendiami kawasan Timbang Galung dan Kampung Melayu.

Pada tahun 1910 didirikan Badan Persiapan Kota Pematang Siantar. Kemudian pada tanggal 1 Juli 1917 berdasarkan Stad Blad No. 285 Pematang Siantar berubah menjadi Gemente yang mempunyai otonomi sendiri. Sejak Januari 1939 berdasarkan Stad Blad No. 717 berubah menjadi Gemente yang mempunyai Dewan.

Masa Pendudukan Jepang

Pada zaman Jepang berubah menjadi Siantar State dan Dewan dihapus. Setelah Proklamasi kemerdekaan, Pematang Siantar kembali menjadi Daerah Otonomi. Berdasarkan Undang-undang No.22/ 1948 Status Gemente menjadi Kota Kabupaten Simalungun dan Wali Kota dirangkap oleh Bupati Simalungun sampai tahun 1957.

Masa Kemerdekaan Indonesia

Berdasarkan UU No.1/1957 berubah menjadi Kota Praja Penuh dan dengan keluarnya Undang-undang No.18/ 1965 berubah menjadi Kota, dan dengan keluarnya Undang-

undang No. 5/ 1974 tentang-Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah berubah menjadi Kota Daerah Tingkat II Pematang Siantar sampai sekarang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 1981 Kota Daerah Tingkat II Pematang Siantar terbagi atas empat wilayah kecamatan yang terdiri atas 29 Desa/Kelurahan dengan luas wilayah 12,48 km² yang peresmiannya dilaksanakan oleh Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 17 Maret 1982.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1986 tanggal 10 Maret 1986 Kota Daerah Tingkat II Pematang Siantar diperluas menjadi 6 wilayah kecamatan, di mana 9 desa/Kelurahan dari wilayah Kabupaten Simalungun masuk menjadi wilayah Kota Pematang Siantar, sehingga Kota Pematang Siantar terdiri dari 38 desa/kelurahan dengan luas wilayah menjadi 70,230 km² Pada tanggal 23 Mei 1994, dikeluarkan kesepakatan bersama Penyesuaian Batas Wilayah Administrasi antara Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun. Adapun hasil kesepakatan tersebut adalah wilayah Kota Pematang Siantar menjadi seluas 79,9706 km². Pada tahun 2007, diterbitkan 5 Peraturan Daerah tentang pemekaran wilayah administrasi Kota Pematang Siantar yaitu:

1. Peraturan Daerah No.3 tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Siantar Sitalasari
2. Peraturan Daerah No.6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Siantar Marimbun
3. Peraturan Daerah No.7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan Bah Sorma
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan Tanjung Tengah, Nagapitu dan Tanjung Pinggir
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan Parhorasan Nauli, Sukamakmur, Marihat Jaya, Tong Marimbun, Mekar Nauli dan Nagahuta Timur

Dengan demikian jumlah Kecamatan di Kota Pematang Siantar ada sebanyak delapan kecamatan dengan jumlah kelurahan sebanyak lima puluh tiga Kelurahan.

2. Kondisi Geografis dan Demografis Kota Pematang Siantar

Kota Pematang Siantar terletak pada garis 2° 53' 20"-3° 01' 00" Lintang Utara dan 99° 1'00"-99° 6' 35" Bujur Timur, dan merupakan enklave wilayah Kabupaten Simalungun.

Luas daratan Kota Pematang Siantar adalah 79,971 km² terletak 400-500 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan luas wilayah menurut kecamatan, kecamatan yang terluas adalah

kecamatan Siantar Sitalasari dengan luas wilayah 22,723 km² atau sama dengan 28,41% dari total luas wilayah Kota Pematang Siantar.

Batas Wilayah Administrasi

- Sebelah Utara : Kabupaten Simalungun
- Sebelah Selatan : Kabupaten Simalungun
- Sebelah Timur : Kabupaten Simalungun
- Sebelah barat : Kabupaten Simalungun

Pada tahun 2015 penduduk Kota Pematang Siantar mencapai 247.411 jiwa dengan kepadatan penduduk 3.093,86 jiwa per km². Penduduk perempuan di Kota Pematang Siantar lebih banyak dari penduduk laki-laki. Pada tahun 2015 penduduk Kota Pematang Siantar yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 120.597 jiwa dan penduduk perempuan 126.814 jiwa. Dengan demikian *sex ratio* penduduk Kota Pematang Siantar sebesar 95,10. Pada tahun 2022, penduduk Kota Pematang Siantar berjumlah 274.392 jiwa.

3. Potensi Wilayah Kota Pematang Siantar

Sektor Unggulan di Kota Pematang Siantar yaitu di bidang Industri dan perdagangan.

Pada sektor wisata Kota Pematang Siantar juga mempunyai objek wisata antara lain:

Taman Hewan Siantar (Kebun Binatang)

Taman Hewan Pematang Siantar (THPS) merupakan salah satu objek wisata di Sumatera Utara sebagai tempat hiburan yang layak, terjangkau dan mendidik bagi berbagai kalangan, memiliki ratusan jenis hewan yang berasal dari dalam dan luar negeri juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas bermain.



Pemugaran dan pengembangannya diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, pada tanggal 13 November 2007.

Taman Bunga

Terletak tepat di pusat kota Pematang Siantar, tepatnya di depan kantor Walikota Pematang Siantar. Udara disekitar taman bunga sangatlah sejuk, kita bisa berkumpul bersama keluarga, pacar dan teman di sana. Banyak penjual dan hiburan yang disediakan disana. Taman Bunga menjadi tempat alternatif bagi anda yang ingin menenangkan diri atau sekedar berkumpul bersama teman-teman anda.

Detis Sari Indah

Adalah tempat rekreasi kolam pemandian yang ada di kota Pematang Siantar. Tepatnya terletak di Jalan Pematang. Memiliki 3 kolam yang berbeda ukuran dan kedalamannya. Fasilitas pendukung seperti Kantin, dan Ruang parkir.

B. Visi dan Misi

Visi

“Terwujudnya Kota Pematang Siantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas.”

Misi

1. Menguatkan kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, humanis, agamis dan beradab dengan menghargai local wisdom dan keheterogenan yang berkualitas.
2. Menguatkan dan memulihkan perekonomian regional, penyehatan iklim usaha perdagangan dan jasa, UMKM dan koperasi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan yang terdampak masa pandemi dan atau paska pandemi Covid-19.
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip good governance dan corporate governance.
4. Menguatkan sentralitas dan daya tarik kota, guna pencapaian Siantar sebagai sub pusat perdagangan dan jasa regional di Provinsi Sumatera Utara.
5. Mewujudkan Kota berkualitas melalui penataan ruang, pengembangan infrastruktur, keindahan dan kebersihan lingkungan kota secara berkelanjutan.

Kota Pematang Siantar terdiri dari 8 kecamatan dan 53 kelurahan dengan luas wilayah mencapai 79,971 km² dan jumlah penduduk sekitar 274.392 jiwa (2022).

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Pematang Siantar, adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Siantar Barat
2. Kecamatan Siantar Marihat
3. Kecamatan Siantar Marimbun
4. Kecamatan Siantar Martoba
5. Kecamatan Siantar Selatan
6. Kecamatan Siantar Sitalasari
7. Kecamatan Siantar Timur
8. Kecamatan Siantar Utara

Wali kota adalah pemimpin tertinggi di lingkungan pemerintah Kota Pematang Siantar. Wali kota Pematang Siantar bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara. Saat ini, kepala daerah yang menjabat di Kota Pematang Siantar adalah wali kota Susanti Dewayani. Sebelumnya, pada Pemilihan umum Wali Kota Pematang Siantar 2020, Susanti Dewayani merupakan calon wakil wali kota, bersama calon wali kota Asner Silalahi, dan pasangan tersebut menang pada pemilihan untuk periode tahun 2021-2024. Namun, Asner meninggal dunia sebelum resmi dilantik.

Susanti kemudian resmi dilantik menjadi wakil wali kota sebagai pemenang pilkada, oleh gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, pada 22 Februari 2022 di kantor gubernur Sumatera

Utara Kota Medan. Sementara posisi wakil wali kota masih kosong. Selanjutnya, DPRD Kota Pematang Siantar akan mengadakan rapat untuk memilih wakil wali kota. Susanti Dewayani diangkat menjadi wali kota Pematang Siantar untuk periode 2022-2024 pada tanggal 22 Agustus 2022. Susanti Dewayani mengganti pasangan Hefriansyah–Togar Sitorus untuk periode 2017-2022.

PROFIL KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Profil dan Kebijakan Teknis

A. Data Umum

1. Sejarah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Lambang Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai berikut:



Gambar 1. Lambang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Kesultanan Kota Pinang pada mulanya bernama Kesultanan Pinang Awan. Kesultanan ini didirikan oleh Batara Sinomba atau Batara Gurga Pinayungan Tuanku Raja Nan Sakti, putra Sultan Alamsyah Syaifuddin yang berasal dari Kerajaan Pagaruyung.

Sultan Batara Sinomba kemudian menikah dengan seorang puteri setempat. Ia memperoleh dua orang putra dan seorang putri yang bernama Siti Ungu Selendang Bulan. Kemudian ia menikah lagi dengan seorang putri setempat lainnya dan memperoleh seorang putra. Istrinya yang kedua berusaha mempengaruhi Batara Sinomba agar putranyalah yang kelak menggantikannya sebagai raja, sehingga kedua orang putra raja dari istri yang pertama itu diusir. Setelah membunuh Batara Sinomba berkat bantuan tentara Kerajaan Aceh, maka Sultan Mangkuto Alam putra dari istri yang pertama, naik tahta menjadi sultan Kota Pinang. Sebagai balas jasa, Siti Ungu dinikahkan kepada raja Aceh, Sultan Iskandar Muda. Kelak keturunan Mangkuto Alam dan Siti Ungu inilah kemudian yang menjadi raja-raja di Kesultanan Asahan, Pannai, dan Bilah.

Setelah Jepang meninggalkan Indonesia pada tahun 1945, para sultan di Sumatera Timur menghendaki kedudukannya sebagai raja kembali dipulihkan. Namun setahun kemudian, pergerakan anti-kaum bangsawan dalam sebuah Revolusi Sosial Sumatera Timur, tak menginginkan adanya pemulihan sistem feodalisme tersebut. Akibatnya kesultanan- kesultanan yang ada di Sumatera Timur, seperti Deli, Langkat, Serdang, Bilah, Panai, Kualuh, dan Kota Pinang, dipaksa untuk berakhir dan bergabung dengan Republik Indonesia.

2. Kondisi Geografis dan Demografis Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Secara geografis, Kabupaten Labuhanbatu Selatan berada pada 1°26'00'' – 2°15'55'' Lintang Utara, 99°40'00'' – 100°26'00'' Bujur Timur. Pada umumnya Kabupaten Labuhanbatu Selatan berada pada ketinggian di bawah 100 m di atas permukaan laut.

Luas wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan 3.596 km². Batas-batas Wilayah Administrasi Kabupaten Labuhanbatu Selatan:

- Sebelah Utara : Kabupaten Labuhanbatu
- Sebelah Selatan : Kabupaten Padang Lawas Utara
- Sebelah Timur : Provinsi Riau
- Sebelah Barat : Kabupaten Padang Lawas Utara

Pada tahun 2020, penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan berjumlah 314.094 jiwa dengan kepadatan penduduk 87 jiwa per km².

Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Torgamba yaitu sebanyak 109.970 jiwa dengan kepadatan penduduk 84 jiwa per Km², sedangkan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Silangkitang sebanyak 30.728 jiwa dengan kepadatan penduduk 88 jiwa per Km². Kecamatan Kotapinang merupakan kecamatan yang paling padat penduduknya dengan kepadatan 116 jiwa per Km² dan Kecamatan Kampung Rakyat merupakan Kecamatan dengan kepadatan penduduk terkecil yaitu 74 jiwa per km². Pada tahun 2022, penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan berjumlah 320.324 jiwa.

3. Potensi Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

1. Komoditi unggulan Kabupaten Labuhan Batu Selatan yaitu Sektor Pertanian dan Perkebunan antara lain, Sawit, Produk Gula merah, pada sektor Pariwisata,
2. Pada sektor Pariwisata, Objek Wisata yang dimiliki antara lain,
3. Pemandian alam Sampuran, Wisata pemandian Sampuran juga disebut oleh warga dengan “Kolam Aqua” Sampuran. Alasan mengapa tempat ini disebut kolam pemandian aqua adalah karena “aek na tio” (airnya jernih dan bersih);
4. Pemandian Pulo Wiski Desa Simonis, Pulo wiski merupakan Tempat pemandian wisata alam yang letaknya berada di Desa Simonis Kecamatan Na IX-X.
5. Air Terjun Pelangi, Objek Wisata ini berjarak 15 km dari Kota Aek Kanopan, tepatnya di Desa Kuala Beringin Kecamatan Kualuh Hulu, Air Terjun Pelangi menyuguhkan keindahan alam nan eksotis dengan ketinggian air terjun 15m dan dilengkapi dengan permainan Flying Fox.



B. Visi dan Misi

Visi

“Labuhanbatu Selatan Sejahtera dan Bermartabat.”

Misi

1. Mewujudkan masyarakat Labuhanbatu Selatan yang bermartabat dalam kehidupan beriman dan bertaqwa, tersedianya sandang pangan, rumah yang layak, pendidikan yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau dan pendidikan yang gratis.
2. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjamin/assurance, terjangkau, merata dan berkeadilan.
3. Mewujudkan Labuhanbatu Selatan dalam pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.
4. Mewujudkan Labuhanbatu Selatan yang bermartabat dalam peningkatan kualitas pendidikan.
5. Menciptakan perekonomian yang kuat untuk menjamin pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan lapangan kerja, peningkatan kuantitas dan kualitas produksi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, penguatan lembaga keuangan dan koperasi serta pengembangan potensi kawasan wisata.
6. Menciptakan sinergi pembangunan di bidang infrastruktur, pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan hidup.

Kabupaten Labuhanbatu Selatan terdiri dari 5 kecamatan, 2 kelurahan, dan 52 desa dengan luas wilayah mencapai 3.596,00 km² dan jumlah penduduk sekitar 320.324 jiwa (2022) dengan kepadatan penduduk 87 jiwa/km².

1. Kecamatan Kotapinang
2. Kecamatan Kampung Rakyat
3. Kecamatan Sungai Kanan
4. Kecamatan Silangkitang
5. Kecamatan Torgamba

Bupati merupakan pemimpin tertinggi di lingkungan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Bupati Labuhanbatu Selatan bertanggungjawab kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara atas wilayah Labuhanbatu Selatan. Saat ini, bupati atau kepala daerah yang menjabat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan ialah Edimin, didampingi wakil bupati Ahmad Padli Tanjung. Mereka menang pada Pemilihan umum Bupati Labuhanbatu Selatan 2020. Edimin menjadi bupati definitif Labuhanbatu Selatan yang ke-3.

PROFIL KABUPATEN LABUHANBATU

Profil dan Kebijakan Teknis

A. Data Umum

1. Sejarah Kabupaten Labuhanbatu

Lambang Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut:



Gambar 1. Lambang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu

Kekalahan Jepang pada perang asia timur raya, yaitu jepang menyerah pada sekutu tanggal 15 agustus 1945, telah memberikan kesempatan kepada bangsa indonesia untuk merdeka sebagai bangsa yang berdaulat.

Demikianlah maka pada tanggal 17 agustus 1945, kemerdekaan republik indonesia diproklamirkan oleh soekarno – hatta atas nama bangsa indonesia. selanjutnya pada tanggal 18 agustus 1945, undang undang dasar 1945 ditetapkan oleh panitia persiapan kemerdekaan indonesia (ppki) sebagai undang undang dasar negara republik indonesia.

Secara pasti tidak diketahui kapan belanda masuk ke Labuhanbatu. dari berbagai keterangan yang dihimpun menyatakan bahwa belanda masuk ke Labuhanbatu berkisar tahun 1825, namun ada pula keterangan yang mengatakan bahwa kedatangan belanda ke Labuhanbatu adalah setelah selesai perang paderi (berkisar tahun 1831). pada tahun 1862, kesatuan angkatan laut belanda dibawah pimpinan “bevel hebee” datang kekampung Labuhanbatu (di hulu Kota Labuhan Bilik sekarang) melalui sungai barumon, di kampung Labuhanbatu tersebut belanda membuat tempat pendaratan dari batu beton, lama kelamaan tempat pendaratan tersebut berkembang menjadi tempat pendaratan / persinggahan kapal – kapal, yang kemudian menjadi sebuah kampung (desa) yang lebih besar dan namanya disebut “pelabuhan batu”. akhirnya nama pelabuhan batu ini dipersingkat sebutannya menjadi “Labuhanbatu”. kemudian nama itu melekat dan ditetapkan menjadi nama wilayah kabupaten Labuhanbatu.

Pada tahun 1942 tentara dai nippon (Jepang) menduduki seluruh wilayah indonesia. selanjutnya pada tanggal 3 maret 1942 tentara jepang mendarat di perupuk (Tanjung Tiram), dari perupuk sebahagian tentara jepang tersebut melanjutkan gerakan untuk merebut kota tebing tinggi dan selanjutnya kota medan. kemudian sebahagian lagi bergerak ke wilayah tanjung balai yang pada saat itu sebagai pusat pemerintahan afdeling asahan. selanjutnya dari asahan (Tanjung Balai) menuju wilayah Labuhanbatu untuk merebut kota rantauprapat.

2. Kondisi Geografis dan Demografis Kabupaten Labuhanbatu

Pada mulanya luas kabupaten ini adalah 9.223,18 km² atau setara dengan 12,87% dari luas Wilayah Provinsi Sumatera Utara. Sebagai Kabupaten terluas kedua setelah Kabupaten Tapanuli Selatan, sedangkan jumlah penduduknya sebanyak 1.431.605 jiwa pada tahun 2007. Kabupaten Labuhanbatu terletak pada koordinat 10 260 – 20 110 Lintang Utara dan 910 010 – 950 530 Bujur timur. Dengan dibentuknya Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Kabupaten Labuhanbatu Utara, maka luas kabupaten ini menjadi 2.561,38 km² dan penduduknya sebanyak 493.899 jiwa pada tahun 2020. Pada tahun 2022, penduduk Kabupaten Labuhanbatu Utara berjumlah 499.982 jiwa.

Batas Wilayah Administrasi

- Sebelah Utara : Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Selat Malaka
- Sebelah Selatan : Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Kabupaten Padang Lawas Utara
- Sebelah Timur : kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Kabupaten Rokan Hilir Riau
- Sebelah barat : Kabupaten Labuhanbatu Utara

3. Potensi Wilayah Kabupaten Labuhanbatu

Pada tahun 2003 Kabupaten ini menjadi salah satu daerah kabupaten/kota dengan ekonomi terbaik se-indonesia.

Sektor komoditi pengolahan minyak goreng dan Soleokimia, Tambak udang, pengusaha ikan kerapu, industri pakan ternak atau olahan jagung, industri olahan karet, menjadi unggulan Kabupaten Labuhanbatu.

Pada sektor pariwisata kabupaten Labuhanbatu mempunyai tempat wisata bagus seperti:

- Pemandian Alam Aek Pala, di Kecamatan Bilah Barat.
- Air Terjun Linghahara(AirTerjun Baru) di Kecamatan Rantau Selatan.
- Pulau Sikantan di Tanjung Sarang Elang, Kecamatan Panai Hulu.



B. Visi dan Misi

Visi

“Terwujudnya Masyarakat Labuhanbatu Yang Berkarakter, Maju Dan Sejahtera Tahun 2024.”

Misi

1. Menciptakan Tata Kelola Pemerintah yang Merakyat, Bersih dan Profesional.
2. Meningkatkan Pembangunan dan Kualitas Infrastruktur dengan Mengacu kepada Prinsip Prioritas Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
3. Meningkatkan Kehidupan Masyarakat di Bidang Keagamaan, Sosial dan Budaya.
4. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Berbasis Potensi Daerah seperti Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan.
5. Meningkatkan Kualitas Pendidikan untuk Membangun Karakter dan Sumber Daya Manusia.
6. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan sebagai Upaya Memperbaiki Kualitas Hidup Masyarakat.
7. Mengurangi Angka Pengangguran dengan Meningkatkan Kualitas dan Produktivitas Sumber Daya Manusia.
8. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Pengembangan dan Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Koperasi, UMKM Dan Industri Kecil.
9. Mengembangkan Potensi Wisata Daerah dan Industri Kreatif.
10. Meningkatkan Kebersihan, Keamanan, Ketertiban, Keindahan dan Kekeluargaan di Tengah Kehidupan Masyarakat.

Pada mulanya, jumlah kecamatan di kabupaten ini adalah 22 kecamatan. Dengan dibentuknya Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, maka jumlah kecamatan di kabupaten ini menjadi 9 kecamatan. Berikut nama-nama kecamatan tersebut:

1. Bilah Barat
2. Bilah Hilir
3. Bilah Hulu
4. Panai Hilir
5. Panai Hulu
6. Panai Tengah
7. Pangkatan
8. Rantau Selatan
9. Rantau Utara

Kabupaten Labuhanbatu mempunyai kedudukan yang cukup strategis, yaitu berada pada jalur lintas timur Sumatera dan berada pada persimpangan menuju Propinsi Sumatera Barat dan Riau, yang menghubungkan pusat-pusat perkembangan wilayah di Sumatera dan Jawa serta

mempunyai akses yang memadai ke luar negeri karena berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Bupati menjadi pemimpin tertinggi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu. Bupati Labuhanbatu bertanggungjawab kepada gubernur provinsi Sumatera Utara atas wilayah Labuhanbatu. Saat ini, bupati atau kepala daerah yang menjabat di Kabupaten Labuhanbatu ialah Erik Adtrada Ritonga, didampingi wakil bupati Ellya Rosa Siregar. Mereka menang pada Pemilihan umum Bupati Labuhanbatu 2020. Erik menjadi bupati definitif Kabupaten Labuhanbatu yang ke-20. Erik dan Ellya dilantik oleh gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, pada 13 September 2021 di Kota Medan, untuk periode jabatan 2021-2024.

PROFIL KABUPATEN MANDAILING NATAL

Profil dan Kebijakan Teknis

A. Data Umum

1. Sejarah Kabupaten Mandailing Natal

Lambang Kabupaten Mandailing Natal sebagai berikut:



Gambar 1. Lambang Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal

Pemerintah Hindia Belanda mulai memasuki wilayah Mandailing Natal tahun 1824 dan membentuk pemerintahan dibawah Karesidenan Air Bangis bagian dari Gouvernment Sumatera's Westkust. Tahun 1834 ibu kota pemerintahan Mandailing pindah dan berada di bawah Karesidenan Tapanuli. Tahun 1852, Wilayah Mandailing Natal dibagi menjadi 2 Afdeling yaitu (1) Afdeling Mandailing terdiri dari Groot Mandailing, Klein Mandailing, Ulu dan Pakantan dan Batang Natal; dan (2) Afdeling Natal terdiri dari Distrik Natal, Sinunukan, Partiloban, Kara-kara, Teloh Baleh, Tabuyung, Singkuang, Batu Mondan dan Batahan.

Sebelum Mandailing Natal menjadi sebuah kabupaten, wilayah ini masih termasuk Kabupaten Tapanuli Selatan. Setelah terjadi pemekaran, dibentuklah Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1998, secara formal diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 23 November 1998.

2. Kondisi Geografis dan Demografis Kabupaten Mandailing Natal

Kabupaten Mandailing Natal terletak pada 0°10'-1°50' Lintang Utara dan 98°10'- 100°10' Bujur Timur dengan rentang ketinggian 0-2.145 m di atas permukaan laut. Luas wilayah Kabupaten Mandailing Natal 6.535,42 km².

Batas Wilayah Administrasi

- Sebelah Utara : Kabupaten Tapanuli Selatan
- Sebelah Selatan : Pasaman dan Pasaman Barat
- Sebelah Timur : Padang Lawas
- Sebelah Barat : Samudera Indonesia

Pada tahun 2022, penduduk Kabupaten Mandailing Natal berjumlah 438.965 jiwa.

3. Potensi Wilayah Kabupaten Mandailing Natal

Komoditi unggulan Kabupaten Mandailing Natal yaitu sektor Pertanian, Perkebunan dan Jasa. Sektor Pertanian komoditi unggulannya adalah jagung, kedelai, ubi jalar dan ubi kayu. Sub

sektor perkebunan komoditi yang diunggulkan berupa kopi, kelapa, kakao, kelapa sawit, lada, karet, aren, gambir, kayu manis, kemiri, nilam, pala, pinang, tembakau dan cengkeh. **Pariwisata** Kabupaten Mandailing Natal memiliki objek wisata berupa keindahan alam dan peninggalan sejarah. Obyek wisata yang cukup terkenal di Kabupaten Mandailing Natal adalah Gunung Sorik Merapi. Gunung berapi Sorik Marapi terletak pada ketinggian 2.142 m di atas permukaan laut.



Hutan di sekeliling gunung ini masih dalam kondisi yang baik dan penuh dengan berbagai keanekaragaman hayati dan menjadi aset terbesar untuk pengembangan Taman Nasional batang Gadis. Kegiatan trekking akhir-akhir ini sudah mulai sering dilakukan untuk penelitian kekayaan alam Mandailing Natal. Ada beberapa trek menuju puncak Sorik Marapi ini. Untuk mencapai ke puncak Sorik Marapi ini dibutuhkan waktu rata-rata 3 jam.

B. Visi dan Misi

Visi

“Akselerasi Pembangunan menuju Mandailing Natal yang Mandiri, Kompetitif, Berkeadilan dan Bermartabat.”

Misi

1. Meningkatkan Ekonomi di bidang Agrikultur, Industri, dan Pariwisata Berlandaskan Kearifan Lokal sehingga Terwujud Kebijakan yang Inklusif dan Berkelanjutan.
2. Meningkatkan Fasilitas Umum termasuk Infrastruktur Jalan Raya, Jalan Desa, Balai Kecamatan dan Pusat Olah Raga.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Melalui Revolusi Belajar-Mengajar dan Pelatihan Sosial Menuju Perubahan dan Konsumtif Menjadi Produktif.
4. Memperbaiki Gaya Hidup dan Kualitas Lingkungan serta Meningkatkan Literasi Kesehatan Menuju Mandailing Natal Sehat Insannya Bersih Alamnya.
5. Memperkokoh Budaya Mandailing Natal melalui Penambahan Mata Pelajaran, Kuliner dan Event Tahunan.
6. Meningkatkan Efektifitas dan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan sehingga Terwujud Kepemimpinan Yang Meritokratif dan Terbuka.
7. Meningkatkan Sinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat demi Akselerasi Pembangunan Mandailing Natal.

Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari 23 kecamatan, 27 kelurahan, dan 377 desa dengan luas wilayah mencapai 6.535,42 km² dan jumlah penduduk sekitar 438.965 jiwa (2022, antara lain;

1. Batahan
2. Batang Natal

3. Bukit Malintang
4. Huta Bargot
5. Kotanopan
6. Lembah Sorik Marapi
7. Lingga Bayu Muara Batang Gadis
8. Muara Sipongi
9. Naga Juang
10. Natal
11. Pakantan
12. Panyabungan Barat
13. Panyabungan Kota
14. Panyabungan Selatan
15. Panyabungan Timur
16. Panyabungan Utara
17. Puncak Sorik Marapi
18. Ranto Baek
19. Siabu
20. Sinunukan
21. Tambangan
22. Ulu Pungkut

Bupati Mandailing Natal adalah pemimpin tertinggi di lingkungan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Bupati Mandailing Natal bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara. Saat ini, bupati atau kepala daerah yang menjabat di Kabupaten Mandailing Natal ialah Jafar Sukhairi Nasution, dengan wakil bupati Atika Azmi Utammi Nasution. Mereka menang pada Pemilihan umum Bupati Mandailing Natal 2020. Sukhairi merupakan bupati Mandailing Natal ke-4 setelah kabupaten ini didirikan tahun 1998. Sukhairi dan Atika dilantik oleh gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, pada 22 Juli 2021 di Kota Medan, untuk masa jabatan 2021-2024.

PROFIL KABUPATEN NIAS SELATAN

Profil dan Kebijakan Teknis

A. Data Umum

1. Sejarah Kabupaten Nias Selatan

Lambang Kabupaten Nias Selatan sebagai berikut:



Gambar 1. Lambang Pemerintah Kabupaten Nias Selatan

Nias Selatan adalah kabupaten di Pulau Nias, Sumatera Utara, Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nias Selatan tahun 2022, penduduk kabupaten ini berjumlah 373.674 jiwa. Ibukota Nias Selatan ialah kecamatan Teluk Dalam.

Nias Selatan sebelumnya adalah bagian dari Kabupaten Nias. Status otonom diperoleh pada 25 Februari 2003 dan diresmikan pada 28 Juli 2003. Kabupaten ini terdiri dari 104 gugusan pulau besar dan kecil. Letak pulau-pulau itu memanjang sejajar Pulau Sumatera. Panjang pulau-pulau itu lebih kurang 60 kilometer, lebar 40 kilometer.

Dari seluruh gugusan pulau itu, ada empat pulau besar, yakni Pulau Tanah Bala (39,67 km²), Pulau Tanah Masa (32,16 km²), Pulau Tello (18 km²), dan Pulau Pini (24,36 km²). Tidak seluruh pulau berpenghuni. Masyarakat Nias Selatan tersebar di 21 pulau dalam delapan kecamatan.

2. Kondisi Geografis dan Demografis Kabupaten Nias Selatan

Kabupaten Nias Selatan terletak pada 0°12'-1°32' LU dan 97° - 98° BT. Luas wilayah Kabupaten Nias Selatan 2.487,99 km². Batas Wilayah Administrasi:

- Sebelah Utara : Kabupaten Nias
- Sebelah Selatan : Kepulauan Mentawai
- Sebelah Timur : Kabupaten Mandailing Natal
- Sebelah barat : Samudera Hindia

3. **Potensi Wilayah Kabupaten Nias Selatan**

Sektor unggulan Kabupaten Nias Selatan adalah pariwisata, kelautan, perikanan, peternakan, dan transportasi laut. Sektor pariwisata terdiri dari wisata alam antara lain Pantai Sorake dan Pantai Lagundri dan wisata budaya yaitu Lompat Batu di Bawomataluo. Komoditi unggulan Kabupaten Nias Selatan yaitu sektor Pertanian, Perkebunan dan Jasa. Sektor pertanian komoditi unggulannya adalah jagung, ubi jalar dan ubi kayu. Sub sektor perkebunan komoditi yang diunggulkan berupa kopi, kakao, karet, kelapa, nilam, pala, pinang dan cengkeh.

Pada sektor pariwisata, Objek wisata yang dimiliki antara lain;

1. **Pantai Sorake**

Pantai Sorake merupakan langganan perlombaan surfer tingkat dunia. Setiap tahun di pantai Sorake ramai dengan event kejuaraan surfer yang menarik perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara.



Di sekitar pantai menyediakan pelayanan hotel kelas internasional. Hal yang menarik terjadi jika saat air surut, keadaan pantai ini akan landai dan air laut cenderung berkurang sehingga kita dapat melihat terumbu karang sembari menyaksikan ikan hias laut kecil yang terjebak di antara karang.

2. **Pantai Lagundri**

Pantai Lagundri merupakan salah satu pantai terbaik di pulau Nias Selatan, bersebelahan dengan pantai Sorake. Ombak di pantai Lagundri tidak begitu besar malah kadang tidak ada, bergantung arah angin.



Pantai Lagundri cocok untuk belajar selancar bagi pemula karena ombaknya yang landai.

B. Visi dan Misi Visi

“Nias Selatan Maju, Masyarakat Sejahtera.”

Misi

1. Menciptakan Kultur serta Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan, dan Berorientasi pada Pelayanan.
2. Pemerataan Pembangunan dengan Skala Prioritas.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berkualitas, Berdaya Saing, serta Kreatif dan Inovatif.
4. Mengembangkan Perekonomian Masyarakat yang Produktif dan Tidak Konsumtif.
5. Memberi Rasa Aman dan Nyaman di Tengah Masyarakat.

Kabupaten Nias Selatan terdiri dari 35 kecamatan, 2 kelurahan, dan 459 desa dengan luas wilayah mencapai 2.487,99 km² dan jumlah penduduk sekitar 373.674 jiwa (2022).

| | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Kecamatan Amandraya. | 18. Kecamatan O'o'u. |
| 2. Kecamatan Aramo. | 19. Kecamatan Onohazumba. |
| 3. Kecamatan Boronadu. | 20. Kecamatan Onolalu. |
| 4. Kecamatan Fanayama. | 21. Kecamatan Pulau-Pulau Batu. |
| 5. Kecamatan Gomo. | 22. Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat. |
| 6. Kecamatan Hibala. | 23. Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur. |
| 7. Kecamatan Hilimegai. | 24. Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara. |
| 8. Kecamatan Hilisalawa'ahe. | 25. Kecamatan Sidua'ori. |
| 9. Kecamatan Huruna. | 26. Kecamatan Simuk. |
| 10. Kecamatan Idanotae. | 27. Kecamatan Somambawa. |
| 11. Kecamatan Lahusa. | 28. Kecamatan Susua. |
| 12. Kecamatan Lolomatua. | 29. Kecamatan Tanah Masa. |
| 13. Kecamatan Lolowau. | 30. Kecamatan Teluk Dalam |
| 14. Kecamatan Luahagundre Maniamolo. | 31. Kecamatan Toma. |
| 15. Kecamatan Maniamolo. | 32. Kecamatan Ulunoyo. |
| 16. Kecamatan Mazino. | 33. Kecamatan Ulu Idanotae. |
| 17. Kecamatan Mazo. | 34. Kecamatan Umbunasi. |
| | 35. Kecamatan Ulususua. |

Bupati adalah pemimpin tertinggi di lingkungan pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Bupati Nias Selatan bertanggungjawab kepada gubernur provinsi Sumatera Utara. Saat ini, bupati atau kepala daerah yang menjabat di Kabupaten Nias Selatan ialah Hilarius Duha, dengan wakil bupati Firman Giawa. Mereka adalah pemenang pada Pemilihan umum Bupati Nias Selatan 2020, untuk periode tahun 2021-2024. Hilarius dan Firman dilantik oleh gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, pada 26 April 2021 di kantor gubernur Sumatera Utara di Kota Medan. Pelantikan ini merupakan periode kedua bagi Hilarius Duha sebagai bupati Nias Selatan.

PROFIL KABUPATEN NIAS

Profil dan Kebijakan Teknis

A. Data Umum

1. Sejarah Kabupaten Nias

Lambang Kabupaten Nias sebagai berikut:



Gambar 1. Lambang Pemerintah Kabupaten Nias

Pada Tahun 1956 kabupaten Nias ditetapkan sebagai satu Kabupaten Otonom di lingkungan Provinsi Sumatera Utara sesuai Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara tanggal 7 November 1956 yang sekaligus menandai bahwa Kabupaten Nias pada tanggal tersebut secara resmi telah diakui dalam cakupan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan batas-batas yang meliputi wilayah Afddeling Nias Dulu (Staatsblad 1973 No. 563) sebagaimana dimaksud dalam ketetapan Gubernur Propinsi Tapanuli/Sumatera Timur tanggal 18 Januari 1950 No. 19/pn/dpda/50, sejak ditambah menurut Ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera Utara tanggal 19 Mei 1951 No. 20/I/PSUjo, Keputusan Panitia Penyelenggara Pembentukan Propinsi Sumatera Utara tanggal 31 Januari 1952 (tidak bernomor). Berdasarkan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa “untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk Peraturan Daerah dengan memuat materi muatan terdiri atas penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, maka Hari Jadi Kabupaten Nias ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Hari Jadi Kabupaten Nias. Atas amanat ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Nias menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 tahun 2017 tentang Hari Jadi Kabupaten Nias, sehingga 04 Desember 1870 menjadi Hari Jadi Kabupaten Nias, dan 04 Desember Setiap Tahun akan dirayakan sebagai Hari Kelahiran Kabupaten Nias.

Pemekaran Kabupaten Nias

Kabupaten Nias yang pada awalnya merupakan satu-satunya Kabupaten Tertua yang berada di Wilayah Kepulauan Nias telah melahirkan 4 (empat) Daerah Otonom baru yakni:

1. Kabupaten Nias Selatan yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003;
2. Kabupaten Nias Utara yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 45 Tahun 2008;

3. Kabupaten Nias Barat yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008;

4. Kota Gunungsitoli yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008.

2. Kondisi Geografis dan Demografis Kabupaten Nias

Nias adalah salah satu kabupaten di Sumatera Utara yang terletak di Pulau Nias. Sejak tahun 2016, ibu kota Kabupaten Nias berada di Gido, yang sebelumnya ada di kota Gunungsitoli (1956-2016), yang sudah dimekarkan menjadi kota. Pekerjaan utama masyarakat Kabupaten Nias adalah petani dan nelayan, dengan tingkat kemiskinan mencapai 15,69% (22.100 jiwa), berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2022, penduduk Kabupaten Nias berjumlah 147.916 jiwa. Luas wilayah Kabupaten Nias 1.438,64 km². Bandara utama di pulau Nias yakni Bandar Udara Binaka, berada di kabupaten ini, tepatnya di kecamatan Gido, ibukota kabupaten Nias. Batas Wilayah Administrasi:

- Sebelah Utara : Pulau-Pulau di Provinsi NAD
- Sebelah Selatan : Kabupaten Nias Selatan
- Sebelah Timur : Pulau Mursala Kabupaten Tapanuli Tengah
- Sebelah barat : Samudera Hindia

3. Potensi Wilayah Kabupaten Nias

Kabupaten Nias mempunyai potensi unggulan antara lain di bidang Industri Crumb rubber, Pengolahan Kelapa, Budidaya ikan Kerapu, Budidaya Rumput Laut, Wisata Bahari. Daerah wisata yang menjadi unggulan antara lain:

1. Air Terjun Baho Hou.

Air terjun ini, berasal dari hulu Sungai Hou yang memiliki 5 tingkatan.

2. Pantai Lagundri

Pantai Lagundri menjadi magnetnya surfer.

Pantai ini pernah dijadikan sebagai tempat lomba *surf* tingkat dunia karena ombak yang dimilikinya tak kalah dengan yang di Hawaii.



B. Visi dan Misi

Visi

“Kabupaten Nias Maju.”

Misi

1. Desa Terakses, Ibukota Terurus.
2. Kesehatan, Pendidikan, dan Sumber Daya Manusia Beranjak.

3. Petani, Peternak, dan Nelayan Produktif.

Jumlah kecamatan di kabupaten Nias adalah 10 kecamatan. Berikut nama-nama kecamatan tersebut:

1. Bawolato
2. Botomuzoi
3. Gido
4. Hili Serangkai
5. Hiliduhu
6. Idanogawo
7. Ma'u
8. Somolo-molo
9. Ulugawo
10. Sogae'adu

Nias adalah salah satu kabupaten di Sumatera Utara yang terletak di Pulau Nias. Sejak tahun 2016, ibu kota Kabupaten Nias berada di Gido, yang sebelumnya ada di kota Gunungsitoli (1956-2016), yang sudah dimekarkan menjadi kota. Pekerjaan utama masyarakat Kabupaten Nias adalah petani dan nelayan, dengan tingkat kemiskinan mencapai 15,69% (22.100 jiwa), berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2022, penduduk kabupaten Nias berjumlah 147.916 jiwa. Bandara utama di pulau Nias yakni Bandar Udara Binaka, berada di kabupaten ini, tepatnya di kecamatan Gido, ibukota kabupaten Nias.

Bupati menjadi pemimpin tertinggi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Nias. Bupati Nias bertanggung jawab kepada gubernur provinsi Sumatera Utara atas wilayah Nias. Saat ini, bupati atau kepala daerah yang menjabat di Kabupaten Nias ialah Yaatulo Gulo, didampingi wakil bupati Arota Lase.

PROFIL KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Profil dan Kebijakan Teknis

A. Data Umum

1. Sejarah Kabupaten Padang Lawas Utara

Lambang Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai berikut:



Gambar 1. Lambang Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara

Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2007. Tapanuli Selatan dimekarkan menjadi 3 wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai kabupaten induk dengan ibukota Sipirok, kemudian Kabupaten Padang Lawas Utara dengan ibukota Gunung Tua, dan Kabupaten Padang Lawas dengan ibukota Sibuhuan. Beberapa kecamatan yang masuk ke masing-masing kabupaten juga dimekarkan untuk menunjang pengembangan kabupaten.

Dasar hukum pendirian Kabupaten Padang Lawas Utara adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 dan disahkan pada tanggal 14 Agustus 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara dan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 dan disahkan pada tanggal 14 Agustus 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas. Drs. H. Arsyad, menjadi penjabat bupati sementara, dan Bachrum Harahap menjadi bupati pertama Padang Lawas Utara.

2. Kondisi Geografis dan Demografis Kabupaten Padang Lawas Utara

Secara geografis, Secara geografis Kabupaten Padang Lawas Utara terletak pada 1°13'50" - 2°02'32" Lintang Utara dan 99°20'44" - 100°19'10" Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara 3.918 km². Batas Wilayah Administrasi:

- Sebelah Utara : Kabupaten Labuhan Batu
- Sebelah Selatan : Kabupaten Padang Lawas
- Sebelah Timur : Provinsi Riau
- Sebelah barat : Kabaputen Tapanuli Selatan

Jumlah Penduduk Padang Lawas Utara pada hasil sensus 2010 berjumlah 223.531 jiwa dengan kepadatannya 57 per kilometer persegi, yang pada tahun 2022 meningkat menjadi 269.845 jiwa dengan pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun sekitar 2,18 persen.

3. Potensi Wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara

Sektor pertanian menjadi unggulan Kabupaten Padang Lawas Utara dengan komoditi kopi, kelapa, kelapa sawit, karet, kakao, dan cengkeh.

Pada Sektor Pariwisata, Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki sebuah yang bernama Candi Bahal Portibi. Lokasi Candi Bahal Portibi terletak tidak jauh dari pusat kota Gunung Tua. Sekitar 15 km dari Candi tersebut, terdapat sebuah desa bernama Desa Bahal.

Sekitar 1 km ke depan, terdapat sebuah sungai indah, bernama Sungai Batang Pane. Di pinggiran sungai tersebutlah, terletak candi peninggalan Hindu Kuno ribuan tahun lalu ini. Ada tiga candi berdekatan disana, namun yang paling utama disebut Candi Bahal.



B. Visi dan Misi

Visi

“Bersama membangun Padang Lawas Utara Beriman, Cerdas, Maju dan Beradat.”

Misi

1. Mewujudkan Sistem Pemerintahan yang Demokratis, Aspiratif dan Akuntabel Demi Tercapainya Masyarakat yang Sejahtera.
2. Melanjutkan Percepatan Pembangunan yang Adil dan Merata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan.
3. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan dalam Rangka Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar.

Kabupaten Padang Lawas Utara terdiri dari 12 kecamatan yaitu:

- Batang Onang
- Dolok
- Dolok Sigompulon
- Halongonan
- Hulu Sihapas

- Padang Bolak
- Padang Bolak Julu
- Portibi
- Simangambat
- Ujung Batu
- Halongonan Timur
- Padang Bolak Tenggara

Bupati Padang Lawas Utara (Paluta) adalah pemimpin tertinggi di lingkungan pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara. Bupati Paluta bertanggungjawab kepada gubernur provinsi Sumatera Utara. Saat ini, bupati atau kepala daerah yang menjabat di Kabupaten Padang Lawas Utara ialah Andar Amin Harahap, dengan Wakil Bupati Hariro Harahap.

PROFIL KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Profil dan Kebijakan Teknis

A. Data Umum

1. Sejarah Kabupaten Tapanuli Selatan

Lambang Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai berikut:



Gambar 1. Lambang Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan

Pada tahun 1992 Kecamatan Natal di mekarkan menjadi tiga kecamatan yaitu kecamatan natal Dengan Ibukota Natal, Kecamatan Muara Batang Gadis dengan ibu kotanya Singkuang, dan Kecamatan Batahan dengan Ibu Kotanya Batahan. Juga dibentuk Kecamatan Siais dengan Ibukotanya Simarpinggan yang berasal dari sebagian kecamatan Psp. Barat. Kemudian pada tahun 1996 sesuai dengan PP.RI.No 1 Tahun 1996 Tanggal 3 Januari di bentuk Kecamatan Halongonan Dengan Ibukotanya Hutaimbaru, yang merupakan pemekaran dari kecamatan Padang Bolak.

Dengan terbitnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998 dan disahkan pada tanggal 23 Nopember 1998 tentang pembentukan Kabupaten Mandailing Natal maka kabupaten Tapanuli Selatan di mekarkan menjadi dua Kabupaten, yaitu Kabupaten Mandailing Natal (Ibukotanya panyabungan) dengan jumlah daerah administrasi 8 Kecamatan dan Kabupaten Tapanuli Selatan (Ibukotanya Padangsidimpuan) dengan jumlah daerah administrasi 16 Kecamatan Sejarah perkembangan Tapanuli Selatan Berlanjut dengan terbitnya Undang-undang tahun 2001 tentang pembentukan Kota Padangsidimpuan, serta Undang-undang No 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tapanuli Selatan. Selanjutnya sesuai dengan Perda Kabupaten Tapanuli Selatan No 12 Tahun 2007 di bentuk kecamatan Muara Batang Toru yang wilayahnya sebagian berasal dari Kecamatan Batangtoru dan Kecamatan Angkola Barat.

Pada tahun yang sama yaitu Perda No 13 Tahun 2007 telah terjadi perubahan nama Kecamatan Padangsidimpuan timur Menjadi Angkola Timur, Padang sidimpuan Barat menjadi Angkola Barat dan Kecamatan Siais menjadi Angkola Selatan. Dan sesuai Perda NO 5 Tahun 2010 tentang pembentukan Kecamatan Tantom Angkola dan Angkola Sangkunur maka secara Administrasi, Wilayah Kabupaten Tapanuli aselatan Terdiri Dari 14 (empat belas) kecamatan, duaratus 12 Desa dan 26 kelurahan.

2. Kondisi Geografis dan Demografis Kabupaten Tapanuli Selatan

Di sebelah utara, kabupaten ini berbatasan dengan kabupaten Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara. Di bagian Timur, berbatasan dengan kabupaten Padang Lawas dan Padang Lawas Utara, sebelah barat dan selatan berbatasan dengan kabupaten Mandailing Natal, dan tepat di tengah wilayahnya, terdapat kota Padang Sidempuan yang seluruhnya dikelilingi oleh kabupaten ini. Luas wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan 4.467,35 km².

Secara garis besar, kabupaten ini dilintasi oleh pegunungan Bukit Barisan, sehingga diseluruh penampakannya pasti terlihat bukit di mana-mana. Kabupaten ini masih memiliki daerah reservasi air di kawasan hutan Batang Toru yang masih kaya akan flora dan fauna yang sudah langka seperti kancil, rusa, kelinci, harimau, kucing hutan, tapir, anggrek hutan dan lain-lain. Dan sekarang sudah diusulkan menjadi kawasan Hutan Lindung. Karena sudah sangat rawan dengan perambahan hutan yang mengancam kehidupan yang ada di sekitar kawasan tersebut.

Terdapat beberapa bukit dan gunung yang terkenal, antara lain Gunung Lubuk raya, Gunung Sibual-buali (masih aktif, dan memiliki geysir dan sumber air panas yang di tampung di dua kolam pemandian umum di daerah Sipirok, bukit (tor) Simago-mago, dan lain-lain.

Penduduk asli di Tapanuli Selatan adalah suku Batak Angkola, yang masih dekat dengan suku Batak Toba. Selain suku Batak Angkola, ada juga suku lainnya, umumnya adalah Batak Toba dan Mandailing. Meskipun sering disamakan, namun suku Angkola dan Mandailing adalah suku yang berbeda. Suku Batak Angkola sendiri mengenal paham kekerabatan patrilineal, sehingga orang Batak Angkola mengenal marga. Marga-marga orang Batak Angkola antara lain Siregar, Harahap, Hasibuan, Rambe, Daulay, Tanjung, Ritonga, Pane, Lubis, Nasution, Hutasuhut, dan lainnya. Orang Batak Angkola juga mengenal pelarangan kawin antar semarga.

Rumah adat masyarakat Batak Angkola disebut Bagas Godang, yang masih mirip dengan Rumah Bolon dalam suku Batak Toba, namun arti keduanya secara harafiah sama yakni Rumah Besar. Bagas Godang berbentuk rumah panggung dan didominasi warna hitam, dengan atap memakai ijuk, dan dinding yang terbuat dari papan. Jika Jabu Bolon banyak ditambahi ornamen kepala Kerbau, sementara untuk Bagas Godang tidak demikian.

3. Potensi Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan

Secara umum, mata pencaharian masyarakat di kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai petani dan berkebun. Hasil pertanian yang terkenal adalah kopi, padi, salak, karet, kakao, kelapa, kulit manis, kemiri, cabe, bawang merah, bawang daun, dan sayur-sayuran.

Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki beberapa objek wisata, antara lain Danau Buatan Cekdam di daerah Pargarutan), Danau Siasis, Danau Marsabut, Pemandian Aek Parsariran (di daerah Batang Toru), Pemandian Aek Sijorni, bukit (tor) Simago-mago (Sipirok). Ada juga Istana Adat di Muara Tais, wisata kerajinan tenun kain ulos tradisional dan panorama alam dengan suhu sejuk di daerah Sipirok.

B. Visi dan Misi

Visi

“Menjadikan Tapanuli Selatan yang Maju Berbasis Sumber Daya Manusia Pembangun yang Sehat, Cerdas, Sejahtera serta Sumber Daya Alam yang Produktif dan Lestari.”

Misi

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pembangun yang Unggul, dan Mandiri Berdasarkan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK) serta Iman dan Taqwa (IMTAQ).
2. Meningkatkan Perekonomian yang Berbasis Pertanian dan Ekonomi Kerakyatan melalui Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Lokal yang Produktif, dan Berwawasan Lingkungan.
3. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur dengan Memanfaatkan Sumber Daya di Daerah dan Pemerintah Atasan serta Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana, Fasilitas Sosial dan Umum Masyarakat.
4. Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah melalui Reformasi Birokrasi yang Berkesinambungan Guna Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa.
5. Meningkatkan Standard Hidup Layak, Keamanan dan Kenyamanan Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat Tapanuli Selatan.

Pada tahun 2022, penduduk Kabupaten Tapanuli Selatan berjumlah 307.312 jiwa. Kabupaten Tapanuli Selatan dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati dan dibantu Sekretaris Daerah yang merupakan unsur staf. Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki 53 Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari: 2 sekretariat, 5 badan, 1 Inspektorat, 12 Dinas, dan 15 Kecamatan.

| No. | Nama Kecamatan |
|-----|----------------------------------|
| 1. | Kecamatan Aek Bilah |
| 2. | Kecamatan Angkola Barat |
| 3. | Kecamatan Angkola Muara Tais |
| 4. | Kecamatan Angkola Sangkununur |
| 5. | Kecamatan Angkola Selatan |
| 6. | Kecamatan Angkola Timur |
| 7. | Kecamatan Arse |
| 8. | Kecamatan Batang Angkola |
| 9. | Kecamatan Batang Toru |
| 10. | Kecamatan Marancar |
| 11. | Kecamatan Muara Batang Toru |
| 12. | Kecamatan Saipar Dolok Hole |
| 13. | Kecamatan Sayur Matinggi |
| 14. | Kecamatan Sipirok |
| 15. | Kecamatan Tano Tombangan Angkola |

Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan saat ini dijabat oleh pasangan Dolly Putra Parlindungan Pasaribu dan Rasyid Assaf Dongonran.

PROFIL KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Profil dan Kebijakan Teknis

A. Data Umum

1. Sejarah Kabupaten Tapanuli Tengah

Lambang Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai berikut:



Gambar 1. Lambang Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, sejarah perkembangan pemerintah di Kabupaten Tapanuli Tengah diawali dengan terbitnya *Besluit* Nomor 1 dari Residen Tapanuli DR. Ferdinand Lumbantobing pada tanggal 5 Oktober 1945 yang memuat Pembentukan Daerah Tapanuli dengan pengangkatan staf pemerintahannya, juga pengangkatan Kepala-kepala Luhak diangkat Bapak. Cornelius Sihombing (Alm). Dalam catatan sejarah Tapanuli Tengah, beliauulah dianggap sebagai Bupati pertama Tapanuli Tengah.

Kemudian sesuai dengan UU Drt. Nomor 7 Tahun 1956, di Daerah Provinsi dibentuk daerah otonom kabupaten. Salah satu kabupaten yang dibentuk dalam UU Drt. tersebut adalah Kabupaten Tapanuli Tengah. Mengingat begitu luasnya wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, maka untuk meningkatkan daya guna pemerintahan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan di daerah ini, maka pada tahun 1964 Kabupaten Tapanuli Tengah dan Dairi dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten, yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah dan Dairi sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi.

Pada tahun 1998 untuk kedua kalinya Kabupaten Tapanuli Tengah dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten, yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Toba Samosir, sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal. Kemudian pada tahun 2003, Kabupaten Tapanuli Tengah untuk yang ketiga kalinya dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten, yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai dengan UU Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Barat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara.

Sebagaimana uraian singkat sejarah perkembangan Pemerintahan Republik Indonesia di Kabupaten Tapanuli Tengah yang diawali dengan terbitnya *Besluit* Nomor 1 dari Residen Tapanuli DR. Ferdinand Lumbantobing pada tanggal 5 Oktober 1945 yang memuat Pembentukan Daerah Tapanuli dan Pengangkatan Kepala-kepala Luhak dalam daerah Tapanuli, maka tanggal 5 Oktober ditetapkan menjadi Hari Jadi Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 3 Tahun 2003.

2. Kondisi Geografis dan Demografis Kabupaten Tapanuli Tengah

Letak geografis Kabupaten Tapanuli Tengah berada pada ketinggian 0-1.266 m diatas permukaan laut dan terletak pada koordinat 1°11'00" - 2°22'0" LU dan 98°07' - 98°12' BT dengan batas-batas wilayah padasebelah utara berbatas dengan Provinsi Aceh, sebelah selatan berbatas dengan Kabupaten Tapanuli Selatan, sebelah timur berbatas dengan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan dan Pakpak Bharat di sebelah barat berbatasan dengan Sibolga dan Samudera Indonesia.

Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai luas daratan sebesar 2.194,98 km² 3,06 persen luas Provinsi Sumatera Utara dan luas laut Kabupaten Tapanuli Tengah ± 4.000 km², sebagian besar berada di Pulau Sumatera dan sebagian kecil merupakan pulau-pulau yang tersebar di Samudera Hindia. Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah adalah ± 6.194,98 km². Secara administratif Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki 20 Kecamatan, yang terdiri dari 159 Desa dan 56 Kelurahan. Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Kolang yakni 400,65 km² (18,25 persen), sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Barus yaitu 21,81 km² (0,99 persen).

Jumlah pulau-pulau di Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 32 (tigapuluh dua) pulau yang hanya sebagian kecil dihuni oleh penduduk. Sebaran ke-32 pulau tersebut tersebar di 6 (enam) Kecamatan, yaitu di Kecamatan Barus terdapat 2 pulau, Kecamatan Sorkam 1 pulau, Kecamatan Badiri 3 pulau, Kecamatan Tapan Nauli 20 pulau, Kecamatan Manduamas 4 pulau, Kecamatan Sosorgadong 1 pulau, dan Kecamatan Pandan 1 pulau. Adapun seluruh pulau-pulau tersebut telah memiliki nama.

| Batas Wilayah | |
|----------------------|--|
| <u>Utara</u> | <u>Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan</u> |
| <u>Timur</u> | <u>Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Selatan</u> |
| <u>Selatan</u> | <u>Samudera Indonesia</u> |
| <u>Barat</u> | <u>Kabupaten Aceh Singkil (Provinsi Aceh)</u> |

Masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri dari berbagai etnis, antara lain etnis Pesisir, Batak, Melayu, Minangkabau, Jawa, Bugis, Aceh, dan pembauran dari suku-suku bangsa lain sebagai pendatang. Kehidupan etnis yang ada berjalan cukup baik dan harmonis, memiliki rasa kekeluargaan yang cukup tinggi. Hal ini didukung kegiatan sosial dan adat istiadat di kalangan masyarakat, serta didorong rasa kebersamaan sesuai dengan motto Kabupaten Tapanuli Tengah "Sahata Saoloan" atau "seia sekata". Jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2022 sebesar 356.918 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebesar 163 jiwa per km². Kecamatan yang terpadat penduduknya adalah Kecamatan Pandan sebesar 51.788 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 1.509 jiwa per km². Jumlah penduduk di Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2022, yaitu 366.361 jiwa.

3. Potensi Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah

Sektor pertambangan komoditi unggulannya adalah batubara, granit, kaolin, niobium, seng, tembaga, timah putih dan timbal, Sub sektor perkebunan komoditi yang diunggulkan berupa Kopi, Kelapa, kakao, karet, kelapa sawit, dan cengkeh, sektor perikanan komoditi unggulannya adalah perikanan budidaya keramba, kolam, laut, sawah dan tambak. Pada sektor wisata, objek wisata yang dimiliki antara lain:

1. Air Terjun Silak-lak



Air terjun Silak-lak terletak di Desa Unte Mungkur II Kecamatan Kolang. Tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk mencapai lokasi tersebut karena jaraknya dekat hanya ± 30 Km dari Kota Pandan. Air terjun ini mempunyai beberapa tingkat dengan ketinggian ± 600 meter. Di sekitar air terjun silak-lak, hutannya masih alami menambah kesejukan bila

berada di objek wisata air terjun Silak-lak.

2. Air Terjun Mursala

Air terjun Mursala terletak di Pulau Mursala Kecamatan Tapan Nauli dan air terjun ini tidak pernah kering airnya walaupun pada musim kemarau. Konon, air terjun mursala ini adalah tempat bermain seorang putri cantik yang bernama Putri Runduk. Putri Runduk mempunyai kolam tempat mandi di atas puncak Pulau Mursala dari tempat mana air terjun mengalir.



Untuk mencapai air terjun ini diperlukan waktu ±4 jam dari kota Pandan dengan kendaraan laut bermotor.

B. Visi dan Misi

Visi

“Terwujudnya Masyarakat Tapanuli Tengah yang Berkarakter, Mandiri, Berakhlak, dan Berkeadilan yang Sejahtera.”

Misi

1. Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa dan Inovatif.
2. Tersedianya Infrastruktur Publik yang Memadai dan Efektif.
3. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Dasar yang Bermutu Bagi Masyarakat.
4. Menyediakan Pendidikan Gratis 12 Tahun dan Meningkatkan Mutu Pendidikan yang Memiliki Daya Saing.
5. Menumbuhkembangkan Perekonomian Rakyat, Menuju Kedaulatan Sumber Daya Alam Berkarakter.
6. Memperkokoh Kerukunan Kehidupan Beragama dan Budaya yang Lestari.
7. Menciptakan Dunia Usaha dan Investasi yang Adil dan Pro Rakyat.
8. Mengembangkan Potensi Wisata secara Serius menuju Peningkatan Ekonomi Rakyat.
9. Tersedianya Kebutuhan Petani dan Nelayan yang Cukup dan Memadai.
10. Terwujudnya Rumah Sehat Bagi Warga Miskin dan Santunan Kematian Bagi Masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah.

Kabupaten Tapanuli Tengah dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati. Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari: sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 6 badan, 19 Dinas, dan 20 Kecamatan.

| Badan | Dinas | Kecamatan |
|--------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1. BAPPEDA | 1. Dinas Kependudukan dan | 1. Andam Dewi |
| 2. BAPEDALDA | Pencatatan Sipil | 2. Badiri |
| 3. BPMDP | 2. Dinas Kesehatan | 3. Barus |
| 4. Badan KB dan KK | 3. Dinas Ketahanan Pangan | 4. Barus Utara |
| BKD | 4. Dinas Ketenagakerjaan | 5. Kolang |
| 5. BAKESBANGPOL | 5. Dinas Komunikasi dan | 6. Lumut |
| 6. BPBD | Informatika | 7. Manduamas |
| | 6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil | 8. Pandan |
| | Menengah Perindustrian dan | (Ibukota) |
| | Perdagangan | 9. Pasaribu Tobing |
| | 7. Dinas Lingkungan Hidup | 10. Pinangsori |
| | 8. Dinas Pariwisata | 11. Sarudik |
| | 9. Dinas Pekerjaan Umum dan | 12. Sibabangun |
| | Tata Ruang | 13. Sirandorong |

| | | |
|--|---|------------------|
| | 10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 14. Sitahuis |
| | 11. Dinas Pemuda dan Olah Raga | 15. Sorkam |
| | 12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 16. Sorkam Barat |
| | 13. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 17. Sosor Gadong |
| | 14. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 18. Suka Bangun |
| | 15. Dinas Perhubungan | 19. Tapan Nauli |
| | 16. Dinas Perpustakaan | 20. Tukka |
| | 17. Dinas Pertanian | |
| | 18. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| | 19. Dinas Sosial | |

Bupati Tapanuli Tengah adalah pemimpin tertinggi di lingkungan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Bupati Tapanuli Tengah bertanggungjawab kepada gubernur provinsi Sumatera Utara. Saat ini, kepala daerah yang menjabat di Kabupaten Tapanuli Tengah ialah Sugeng Riyanta sebagai Pj. Bupati Tapanuli Tengah.

PROFIL KABUPATEN TAPANULI UTARA

Profil dan Kebijakan Teknis

A. Data Umum

1. Sejarah Kabupaten Tapanuli Utara

Lambang Kabupaten Tapanuli Utara sebagai berikut:



Gambar 1. Lambang Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, sejarah perkembangan pemerintah di Kabupaten Tapanuli Utara diawali dengan terbitnya *Besluit* Nomor 1 dari Residen Tapanuli DR. Ferdinand Lumbantobing pada tanggal 5 Oktober 1945 yang memuat Pembentukan Daerah Tapanuli dengan pengangkatan staf pemerintahannya, juga pengangkatan Kepala- kepala Luhak diangkat Bapak. Cornelius Sihombing (Alm). Dalam catatan sejarah Tapanuli Utara, beliaulah dianggap sebagai Bupati pertama Tapanuli Utara.

Kemudian sesuai dengan UU Drt. Nomor 7 Tahun 1956, di Daerah Provinsi dibentuk daerah otonom kabupaten. Salah satu kabupaten yang dibentuk dalam UU Drt. tersebut adalah Kabupaten Tapanuli Utara. Mengingat begitu luasnya wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, maka untuk meningkatkan daya guna pemerintahan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan di daerah ini, maka pada tahun 1964 Kabupaten Tapanuli Utara dan Dairi dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten, yaitu Kabupaten Tapanuli Utara dan Dairi sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi.

Pada tahun 1998 untuk kedua kalinya Kabupaten Tapanuli Utara dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten, yaitu Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Toba Samosir, sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal. Kemudian pada tahun 2003, Kabupaten Tapanuli Utara untuk yang ketiga kalinya dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten, yaitu Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai dengan UU Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Barat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara.

Sebagaimana uraian singkat sejarah perkembangan Pemerintahan Republik Indonesia di Kabupaten Tapanuli Utara yang diawali dengan terbitnya *Besluit* Nomor 1 dari Residen Tapanuli DR. Ferdinand Lumbantobing pada tanggal 5 Oktober 1945 yang memuat Pembentukan Daerah Tapanuli dan Pengangkatan Kepala-kepala Luhak dalam daerah Tapanuli, maka tanggal 5 Oktober ditetapkan menjadi Hari Jadi Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 3 Tahun 2003.

2. Kondisi Geografis dan Demografis Kabupaten Tapanuli Utara

Kabupaten Tapanuli Utara memiliki topografi berbukit dan berlembah - lembah dengan suhu antara 12°C-28°C. Kondisi geografis yang berada pada ketinggian 150-1.700 meter di atas permukaan laut menjadikan wilayah ini sebagai kawasan pertanian dan agrobisnis dengan potensi pengembangan yang cukup besar. Secara keseluruhan beberapa wilayah kecamatan berada pada ketinggian dengan kisaran > 1.500 mdpl (Kecamatan Muara, Pangaribuan, Sipahutar, Siatas Barita, Pagaran dan Siborongborong). Sementara itu kecamatan yang bersebelahan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki ketinggian yang lebih rendah, yaitu Kecamatan Parmonangan, Adiankoting, Purbatua, Pahae Jae dan sebagian besar Simangumban. Kabupaten Tapanuli Utara memiliki topografi dan kontur tanah yang beraneka ragam, yaitu daerah dataran besar 3,16 persen, daerah landai sebesar 26,86 persen, daerah miring sebesar 25,63 persen dan daerah terjal 44,35 persen.

Kabupaten Tapanuli Utara merupakan salah satu daerah Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang terletak di wilayah dataran tinggi Sumatera Utara berada pada ketinggian antara 150-1.700 meter di atas permukaan laut. Secara geografis letak Kabupaten Tapanuli Utara diapit atau berbatasan langsung dengan lima kabupaten yaitu, di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Labuhan Batu Utara, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Humbang Hasundutan dan Tapanuli Tengah. Secara astronomis Kabupaten Tapanuli Utara berada pada posisi 1°20'-2°41' Lintang Utara dan 98°05'-99°16' Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Tapanuli Utara adalah 3.800,31 km² yang terdiri dari luas daratan 3.793,71 Km² dan perairan Danau Toba seluas 6,60 km². Perhitungan luasan ini didasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan, yang mengamanatkan bahwa Kabupaten Tapanuli Utara dimekarkan menjadi Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan.

Secara administrasi Kabupaten Tapanuli Utara berbatasan dengan empat kabupaten yaitu:

1. Sebelah Utara dengan Kabupaten Toba Samosir
2. Sebelah Timur dengan Kabupaten Labuhan Batu Utara.
3. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan

4. Sebelah Barat dengan Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Jumlah penduduk kabupaten Tapanuli Utara di tahun 2022 sebanyak 323.652 jiwa, dengan kepadatan penduduk 85 jiwa/km² dan kabupaten ini merupakan kawasan yang mayoritas penduduknya adalah etnis atau suku Batak Toba.

3. Potensi Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara

Sektor pertambangan komoditi unggulannya adalah batu apung, batu gamping, belerang, bentonit, diatomea, feldspar, granit, kalsit, kaolin, kuarsit, lempung, marmer, mika, panas bumi, pasir kuarsa, sirtu, timbal, trass, travertin, zeolit, Sub sektor perkebunan komoditi yang diunggulkan berupa Kopi, karet, tebu, kakao, kelapa sawit, Kelapa dan cengkeh, sektor perikanan komoditi unggulannya adalah perikanan budidaya kolam, sawah dan jaring apung. Potensi wisata unggulan antara lain:

1. Salib Kasih

Obyek wisata agama salib kasih Siatas Barita terletak di Kecamatan Siatas Barita. Kawasan obyek wisata ini merupakan tempat beristirahat pertama misionaris Nommensen setelah sampai di Rura Silindung pada 11 Nopember 1863. Dari puncak bukit Siatas Barita, DR.Ingwer Ludwig Nommensen berdiri memandang ke arah Rura Silindung di bawahnya.



Lama dia terpaku dan takjub akan keindahan panorama Tano Batak. Maka diapun berdoa, "Hidup atau mati, biarlah aku tinggal di tengah-tengah bangsa ini untuk menyebarkan firmanmu dan kerajaan-Mu." Demikianlah peristiwa pada tahun 1863, ketika misionaris agama Kristen asal Jerman itu mengawali babak kehidupan baru bagi orang-orang Batak yang belum mengenal agama Kristen. Nommensen wafat tanggal 23 Mei 1918, dimakamkan di desa Sigumpar sekitar 60 Km utara Tarutung. Pada tahun 1993/1994, sebagai penghormatan dan penghargaan atas jasa- jasanya, maka Pemda Tapanuli Utara membangun Salib Kasih dengan tinggi 31 meter di puncak bukit Siatas Barita. Pada waktu-waktu tertentu masyarakat Batak dan turis asing melakukan ibadah terbuka di tempat ini.

2. Pemandian Air Soda Aek Rara

Salah satu obyek wisata alam di Tapanuli Utara adalah "Aek Rara" (air berwarna merah) berjarak sekitar tiga kilometer dari Tarutung. Aek Rara atau disebut juga Air Soda hanya terdapat di dua tempat di dunia, yaitu di Venezuela kawasan Amerika Latin



dan di Desa Parbubu Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara. "Aek Rara" merupakan lokasi tujuan wisata dan pemandian.

B. Visi dan Misi

Visi

"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata."

Misi

1. Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani melalui Perlindungan Petani dan Lahan Pertanian Berkelanjutan.
2. Pengembangan Komoditi dan Produk Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Sumber Daya Lokal.
3. Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan.
4. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM Melalui Pelatihan Tenaga Kerja, Pemanfaatan IPTEK Dan Pengembangan Jiwa Kewirausahaan.
5. Meningkatkan Destinasi Wisata Melalui Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya, Rohani dan Agrowisata.
6. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Terintegrasi dengan Mengacu pada Penataan Ruang/Wilayah, Perlindungan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup.
7. Meningkatkan Kapasitas Desa Menuju Desa Mandiri.
8. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Sistem *e-Government*.

Kabupaten Tapanuli Utara dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati. Kabupaten Tapanuli Utara memiliki Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari: sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 6 badan, 19 Dinas, dan 15 Kecamatan.

| Badan | Dinas | Kecamatan |
|---|--|-------------------------|
| 1 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1 Kecamatan Adiankoting |
| 2 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat | 2 Dinas Kesehatan | 2 Kecamatan Garoga |
| 3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 3 Dinas Ketahanan Pangan | 3 Kecamatan Muara |
| 4 Badan Keuangan Aset dan Daerah | 4 Dinas Ketenagakerjaan | 4 Kecamatan Pagaran |
| 5 Badan Pendapatan | 5 Dinas Komunikasi dan Informatika | 5 Kecamatan Pahae Jae |
| 6 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah | 6 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan | 6 Kecamatan Pahae Julu |
| | 7 Dinas Lingkungan Hidup | 7 Kecamatan Pangaribuan |

| | | |
|--|--|-----------------------------|
| | 8 Dinas Pariwisata | 8 Kecamatan Parmonangan |
| | 9 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 9 Kecamatan Purbatua |
| | 10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 10 Kecamatan Siatas Barita |
| | 11 Dinas Pemuda dan Olah Raga | 11 Kecamatan Siborongborong |
| | 12 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 12 Kecamatan Simangumban |
| | 13 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 13 Kecamatan Sipahutar |
| | 14 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 14 Kecamatan Sipoholon |
| | 15 Dinas Perhubungan | 15 Kecamatan Tarutung |
| | 16 Dinas Perpustakaan | |
| | 17 Dinas Pertanian | |
| | 18 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| | 19 Dinas Sosial | |

Nikson Nababan, lahir di Siborongborong, Sumatera Utara, 05 Oktober 1972, adalah Bupati Tapanuli Utara untuk periode 2019 s/d 2024. Sarlandy Hutabarat, lahir pada tanggal 7 November 1954, adalah Wakil Bupati Tapanuli Utara untuk periode 2019 s/d 2024.

PROFIL KOTA GUNUNGSITOLI

Profil dan Kebijakan Teknis

A. Data Umum

1. Sejarah Kota Gunungsitoli

Lambang Kota Gunungsitoli sebagai berikut:



Gambar 1. Lambang Pemerintah Kota Gunungsitoli

Gunungsitoli adalah kota di Pulau Nias, Sumatera Utara, Indonesia. Gunungsitoli sudah berdiri sejak abad ke-16, tetapi baru diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, Mardiyanto, pada tanggal 26 November 2008, menjadi kota otonom sebagai salah satu hasil pemekaran dari Kabupaten Nias. Pada tahun 2022, penduduk kota ini berjumlah 136.017 jiwa dengan kepadatan 290 jiwa/km².

Gunungsitoli merupakan kota tertua dan terbesar yang ada di Kepulauan Nias. Gunungsitoli ditingkatkan statusnya dari kecamatan menjadi kota otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008.

Berdasarkan catatan sejarah, Gunungsitoli atau sering disebut Luaha sudah dikenal dan dikunjungi sejak abad ke-16. Posisi kota Luaha ini terletak pada muara sungai Nou atau pasar Gunungsitoli saat ini. Pada saat itu ada tiga marga dominan yang menghuni kota Luaha, yaitu Harefa, Zebua, dan Telaumbanua atau lebih dikenal dengan Sitölu Tua.

Belum diketahui secara pasti asal muasal penamaan Gunungsitoli. Berdasarkan referensi yang ditemukan dari sebuah buku yang ditulis seorang pastor yang mendirikan Museum Pusaka Nias, disebutkan nama Gunungsitoli diberikan oleh para pedagang yang berasal dari Indocina. Kelak, para pedagang inilah yang disebut-sebut sebagai nenek moyang bangsa Nias. Merujuk secara harfiah, jelas kata Gunungsitoli berasal dari kata 'gunung' dan kata 'sitoli'. Gunung berarti tanah yang tinggi (berbukit) dan sitoli berasal dari nama orang yang berdiam di bukit dekat rumah sakit (daerah Onozitoli sekarang).

2. Kondisi Geografis dan Demografis Kota Gunungsitoli

Kota Gunungsitoli terletak di Pulau Nias dan berjarak sekitar 85 mil laut dari Kota Sibolga. Ada dua pintu masuk dan keluar Pulau Nias yang berada di Kota Gunungsitoli, yaitu Bandar Udara Binaka dan Pelabuhan Angin Gunungsitoli. Luas wilayah Kota Gunungsitoli 469,4 km². Sebagian besar wilayah kota ini berbukit-bukit sempit dengan ketinggian bervariasi antara 0-800 meter dpl. Struktur batuan dan susunantana umumnya bersifat labil, mengakibatkan sering terjadi patahan pada jalan-jalan aspal dan longsor. Batas Wilayah Administrasi:

- Sebelah Utara : Kabupaten Nias Utara
- Sebelah Selatan : Kabupaten Nias
- Sebelah Timur : Samudera Hindia
- Sebelah barat : Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Nias

3. Potensi Wilayah Kota Gunungsitoli

Sebagian besar mata pencarian penduduk berasal dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, perikanan, termasuk juga perdagangan.

Padi sawah merupakan komoditas tanaman pangan terbesar yang diusahakan para petani. Pada tahun 2012, luas panen padi sawah mencapai 2.968 hektar dengan produksi sebesar 6.808 ton. Tanaman pangan terbesar berikutnya adalah ubi kayu dengan luas panen 231 hektar dan produksi 440 ton. Yang unik adalah komoditas ubi jalar. Luas panennya dapat mencapai 434 hektar, tetapi produksinya hanya 14 ton karena mayoritas penduduk menanam ubi jalar hanya memanfaatkan daunnya, bukan memanen umbinya, yang digunakan untuk makanan ternak babi.

Panorama pantai yang indah, rumah adat Nias, dan peninggalan sejarah berupa batu megalit yang tersebar di setiap kecamatan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Ada sembilan pantai yang telah dikomersilkan untuk umum, yaitu pantai Nusa Lima, Malaga, Marina, Simanaere, Laowömaru, Bunda, Muara Indah, Carlita, dan Hoya. Keberadaan Kota Gunungsitoli menjadi pintu gerbang wisata di Pulau Nias, beberapa objek pariwisata, diantaranya:

1. Gua Tögi Ndrawa; sebuah gua kuno yang lokasinya berada di desa Lelewönu Niko'otanö, Kecamatan Gunungsitoli, sekitar 3 km dari pusat kota.
2. Muara Indah; sekitar 15 km dari pusat kota, tidak jauh dari Pantai Charlita. Tempat ini berada di muara sungai.
3. Museum Pusaka Nias, berada di Kota Gunungsitoli, di Jalan Yos Sudarso No. 134A. Museum ini berdiri pada 1995, atas inisiatif Pastor Yohannes Hammerle.
4. Rumah Adat Desa Tumöri; sekitar 10 rumah adat di Desa Tumöri, Kecamatan Gunungsitoli Barat, berjarak 30 menit dari Bandara Binaka.

B. Visi dan Misi

Visi

“Kota Gunungsitoli Berdaya Saing, Nyaman dan Sejahtera.”

Misi

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul.
2. Memperkuat Perekonomian yang Berbasis Sumber Daya Lokal.
3. Membangun Infrastruktur secara Merata dan Pemanfaatan Ruang yang Berwawasan Lingkungan.
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik.
5. Memperkokoh Kehidupan Sosial Kemasyarakatan yang Berbudaya, Religius, dan Taat Hukum.

Kota Gunungsitoli terdiri dari 6 kecamatan, 3 kelurahan dan 98 desa dengan luas wilayah mencapai 469,4 km² dan jumlah penduduk sekitar 136.017 jiwa (2022) dengan kepadatan penduduk 290 jiwa/km².

Kecamatan di Kota Gunungsitoli adalah:

1. Kecamatan Gunungsitoli
2. Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa
3. Kecamatan Gunungsitoli Barat
4. Kecamatan Gunungsitoli Idanoi
5. Kecamatan Gunungsitoli Selatan
6. Kecamatan Gunungsitoli Utara

Walikota adalah pemimpin tertinggi di lingkungan pemerintah Kota Gunungsitoli. Walikota Gunungsitoli bertanggungjawab kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara. Saat ini, Walikota atau kepala daerah yang menjabat di Kota Gunungsitoli ialah Lakhomizaro Zebua, dengan Wakil Walikota Sowa'a Laoli.

PROFIL KOTA PADANG SIDEMPUAN

Profil dan Kebijakan Teknis

A. Data Umum

1. Sejarah Kota Padang Sidempuan

Lambang Kota Padang Sidempuan sebagai berikut:



Gambar 1. Lambang Pemerintah Kota Padang Sidempuan

Kota Padang Sidempuan merupakan sebuah kota di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota Padangsidempuan terkenal dengan sebutan kota salak dikarena banyaknya kebun salak di sana, terutama pada kawasan di kaki Gunung Lubukraya.

Nama kota ini berasal dari “Padang na dimpu” (padang=hamparan luas, na=di, dan dimpu=tinggi) yang berarti “hamparan rumput yang luas yang berada di tempat yang tinggi.” pada zaman dahulu daerah ini merupakan tempat persinggahan para pedagang dari berbagai daerah, pedagang ikan dan garam dari Sibolga-Padangsidempuan-Panyabungan, Padang Bolak (paluta)-Padangsidempuan-Sibolga.

Seiring perkembangan zaman, tempat persinggahan ini semakin ramai dan kemudian menjadi kota. Kota ini dibangun pertama kali sebagai benteng pada 1821 oleh pasukan Paderi yang dipimpin oleh Tuanku Imam Lelo. Benteng ini membentang dari Batang Ayumi sampai Aek Sibontar. Sisa-sisa benteng peninggalan Perang Paderi saat ini masih ditemukan, walau sudah tidak terawat dengan baik. Dan pengaruh pasukan Paderi ini berdampak pada agama yang dianut oleh mayoritas penduduk kota ini beragama Islam.

Pada zaman penjajahan Belanda, kota Padang Sidempuan dijadikan pusat pemerintahan oleh penjajah Belanda di daerah Tapanuli. Peninggalan bangunan Belanda disana masih dapat dijumpai berupa kantor pos polisi pusat kota padangsidempuan. Sehingga tidak heran, kalau ingin melihat sejarah kota Padang Sidempuan, tersimpan foto-foto zaman dahulu kota Padang Sidempuan di sebuah museum di kota Leiden, Belanda.

Sebelumnya Padang Sidempuan merupakan Kota Administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1982. Kemudian sejak tanggal 21 Juni 2001, berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2001, Kota Padang Sidempuan ditetapkan sebagai Daerah Otonom dan merupakan hasil penggabungan dari Kecamatan Padang Sidempuan Utara, Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua, Kecamatan Padang Sidempuan Hutaimbaru, dan Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara yang sebelumnya masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Kondisi Geografis dan Demografis Kota Padang Sidempuan

Secara geografis, kota Padangsidempuan secara keseluruhan dikelilingi oleh Kabupaten Tapanuli Selatan yang dulunya merupakan kabupaten induknya. Kota ini merupakan persimpangan jalur darat menuju kota Medan, Sibolga, dan Padang (Sumatera Barat) di jalur lintas barat Sumatera.

Topografi wilayahnya yang berupa lembah yang dikelilingi oleh Bukit Barisan, sehingga kalau dilihat dari jauh, wilayah kota Padangsidempuan tak ubahnya seperti cekungan yang meyerupai danau. Puncak tertinggi dari bukit dan gunung yang mengelilingi kota ini adalah Gunung Lubuk Raya dan Bukit (Tor) Sanggarudang yang terletak berdampingan di sebelah utara kota.

Salah satu puncak bukit yang terkenal di Padangsidempuan yaitu Bukit (Tor) Simarsayang. Juga terdapat banyak sungai yang melintasi kota ini, antara lain sungai Batang Ayumi, Aek Sangkumpul Bonang (yang sekarang menjadi nama pusat perbelanjaan di tengah kota ini), Aek Rukkare yang bergabung dengan Aek Sibontar, dan Aek Batangbahal, serta Aek Batang Angkola yang mengalir di batas selatan/barat daya kota ini dan dimuarai oleh Aek Sibontar didekat Stadion Naposo. Luas wilayah Kota Padang Sidempuan 159.28 km². Batas Wilayah Administrasi:

- Sebelah Utara : Kabupaten Tapanuli Selatan
- Sebelah Selatan : Kabupaten Tapanuli Selatan
- Sebelah Timur : Kabupaten Tapanuli Selatan
- Sebelah barat : Kabupaten Tapanuli Selatan

3. Potensi Wilayah Kota Padang Sidempuan

Dengan iklim yang sejuk Kota Padangsidempuan memiliki sektor unggulan di bidang pertanian, yang antara lain salak, duku atau buah langsung, alpukat, manggis, mangga, durian dan jeruk.

Salak Padangsidempuan



Salak Padangsidempuan merah memiliki sejumlah ciri khas, seperti warna daging buah putih semburat merah dengan rasa daging buah kombinasi manis, masam dan sepat. Daging buahnya juga memiliki ketebalan berkisar 0,3-2,0 cm dengan sifat daging buah agak menempel pada biji, serta bertekstur agak lunak, berair dan berserat halus.

B. Visi dan Misi

Visi

“Padang Sidempuan yang Berkarakter, Bersih, Aman, dan Sejahtera.”

Misi

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Religius Cerdas dan Berbudaya Dengan Pemanfaatan Iman dan Taqwa (IMTAQ) dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), Melalui Pengelolaan Pendidikan yang Berkualitas.
2. Membuka Lapangan Kerja dengan Iklim Investasi yang Kondusif dan Meningkatkan Potensi Ekonomi Kerakyatan yang Berdaya Saing dengan Titik Berat pada Perdagangan, Pertanian, Pengelolaan dan Pembinaan Usaha Kecil Menengah, dan Industri Rumah Tangga.
3. Menyediakan dan Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Infrastruktur untuk Mendukung Pertumbuhan dan Perkembangan Kota.
4. Menyediakan dan Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Kesehatan untuk Terwujudnya Masyarakat yang Sehat dan Sejahtera.
5. Meningkatkan Pelayanan Publik dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Baik (*Clean And Good Governance*) Sesuai dengan Hukum dan Ketentuan yang Berlaku.
6. Meningkatkan Peran Serta Pemuda dan Perempuan dalam Setiap Gerak Pembangunan dan Melakukan Pembinaan Terhadap Generasi Muda dalam Rangka Mengantisipasi Munculnya Masalah Penyalahgunaan Narkoba dan Tindak Kriminal Lainnya.
7. Menyediakan dan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Publik Sebagai Tempat Bermain dan Bersosialisasi untuk Lapisan Masyarakat, Termasuk Anak Anak dan Kelompok Difabel.

Kota Padang Sidempuan atau *Kota Padangsidempuan* terdiri dari 6 kecamatan, 37 kelurahan, dan 42 desa dengan luas wilayah mencapai 159,28 km² dan jumlah penduduk sekitar 231.062 jiwa (2022). Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Padang Sidempuan, adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Padang Sidempuan Angkola Julu
2. Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua
3. Kecamatan Padang Sidempuan Hutaimbaru
4. Kecamatan Padang Sidempuan Selatan

5. Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara
6. Kecamatan Padang Sidempuan Utara

Wali kota Padang Sidempuan adalah pemimpin tertinggi di lingkungan pemerintah Kota Padang Sidempuan. Wali Kota Padang Sidempuan bertanggungjawab kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara. Saat ini, Wali Kota yang menjabat di Kota Padang Sidempuan ialah Irsan Efendi Nasution, dengan Wakil Wali Kota Arwin Siregar.

PROFIL KOTA SIBOLGA

Profil dan Kebijakan Teknis

A. Data Umum

1. Sejarah Kota Sibolga

Lambang Kota Sibolga sebagai berikut:



Gambar 1. Lambang Pemerintah Kota Sibolga

Kota Sibolga dahulunya merupakan Bandar kecil di Teluk Tapani Nauli dan terletak di Poncan Ketek. Pulau kecil ini letaknya tidak jauh dari kota Sibolga yang sekarang ini. Diperkirakan Bandar tersebut berdiri sekitar abad delapan belas dan sebagai penguasa adalah “Datuk Bandar”. Kemudian pada zaman pemerintahan kolonial Belanda, pada abad sembilan belas didirikan Bandar Baru yaitu Kota Sibolga yang sekarang, karena Bandar di Pulau Poncan Ketek dianggap tidak akan dapat berkembang. Disamping pulaunya terlalu kecil juga tidak memungkinkan menjadi Kota Pelabuhan yang fungsinya bukan saja sebagai tempat bongkar muat barang tetapi juga akan berkembang sebagai Kota Perdagangan. Akhirnya Bandar Pulau Poncan Ketek mati bahkan bekas-bekasnya pun tidak terlihat saat ini. Sebaliknya Bandar Baru yaitu Kota Sibolga yang sekarang berkembang pesat menjadi Kota Pelabuhan dan Perdagangan.

Pada zaman awal kemerdekaan Republik Indonesia Kota Sibolga menjadi ibukota Keresidenan Tapanuli di bawah pimpinan seorang Residen dan membawahi beberapa “Luka atau Bupati”. Pada zaman revolusi fisik Sibolga juga menjadi tempat kedudukan Gubernur Militer Wilayah Tapanuli dan Sumatera Timur Bagian Selatan, kemudian dengan dikeluarkannya surat keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 102 Tanggal 17 Mei 1946, Sibolga menjadi Daerah Otonom tingkat “D” yang luas wilayahnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Residen Tapanuli Nomor: 999 tanggal 19 November 1946 yaitu Daerah Kota Sibolga yang sekarang. Sedang desa-desa sekitarnya yang sebelumnya masuk wilayah Sibolga On Omne Landen menjadi atau masuk Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Sibolga ditetapkan menjadi Daerah Swatantra Tingkat II dengan nama Kotapraja Sibolga yang dipimpin oleh seorang Walikota dan daerah wilayahnya sama dengan Surat Keputusan Residen Tapanuli Nomor: 999 tanggal 19 November 1946.

Selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor: 18 tahun 1956 Daerah Swatantra Tingkat II Kotapraja Sibolga diganti sebutannya menjadi Daerah Tingkat II Kota Sibolga yang pengaturannya selanjutnya ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Walikota sebagai Kepala Daerah. Kemudian hingga sekarang Sibolga merupakan Daerah Otonom Tingkat II yang dipimpin oleh

wali kota sebagai kepala daerah.

Kemudian dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 1979 tentang pola dasar Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Sibolga ditetapkan Pusat Pembangunan Wilayah I Pantai Barat Sumatera Utara. Perkembangan terakhir yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Daerah Nomor: 4 Tahun 2001, tentang Pembentukan Organisasi Kantor Kecamatan, Sibolga dibagi menjadi 4 (empat) Kecamatan, yaitu: Kecamatan Sibolga Utara, Kecamatan Sibolga Kota, Kecamatan Sibolga Selatan, dan Kecamatan Sibolga Sambas.

2. Kondisi Geografis dan Demografis Kota Sibolga

Sibolga adalah salah satu kota yang ada di provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota ini terletak di pantai Barat pulau Sumatera, membujur sepanjang pantai dari Utara ke Selatan dan berada pada kawasan Teluk Tapian Nauli. Jaraknya sekitar 350 km dari Kota Medan, atau sekitar 8 jam perjalanan. Kota Sibolga hanya memiliki luas 10,77 km² dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik kota Sibolga 2022, kota ini memiliki penduduk sebanyak 90.366 jiwa.

Kota Sibolga dipengaruhi oleh letaknya yaitu berada pada daratan pantai, lereng, dan pegunungan. Terletak pada ketinggian berkisar antara 0-150 meter dpl, dengan kemiringan lahan kawasan kota ini bervariasi antara 0-2 % sampai lebih dari 40 %.

Batas Wilayah Administrasi

- Sebelah Utara : Kabupaten Tapanuli Tengah
- Sebelah Selatan : Kabupaten Tapanuli Tengah
- Sebelah Timur : Kabupaten Tapanuli Tengah
- Sebelah barat : Samudera Hindia

3. Potensi Wilayah Kota Sibolga

Sektor unggulan di Kota Sibolga yaitu di bidang perikanan, perdagangan dan pariwisata. Pada Sektor Pariwisata terdapat objek wisata antara lain;

Tango Saratus

Tango Saratus merupakan tempat bersejarah di Kota Sibolga dan gambaran dari masa lampau yang penuh dengan perjuangan.

Wisata Benteng Bukit Ketapang

Wisata Benteng Bukit Ketapang berada di Kelurahan Sibolga Ilir Kota Sibolga Sumatera Utara dan sebuah lubang yang diduga lubang angin dari benteng tersebut. Dua Benteng terletak di Bukit dan tiga benteng lagi terletak di atas bukit. Sebuah pondasi yang merupakan bekas benteng menjadi objek wisata yang sangat menarik.



Pulau Poncan Gadang

Pulau Poncan Gadang terkenal dengan keindahan pantainya, kejernihan airnya, pasir putih, dan juga dikelilingi oleh taman laut yang indah dengan beragam jenis ikan hias dan terumbu karang yang sangat cocok bagi pecinta memancing, *diving* dan *snorkeling*.



B. Visi dan Misi

Visi

“Mewujudkan Sibolga Sehat, Pintar, dan Makmur.”

Misi

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) dengan Transparan dan Akuntabel.
2. Mewujudkan dan Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Serta Pelayanan Sehingga dapat Melahirkan Masyarakat yang Cerdas Menuju Masyarakat yang Makmur.
3. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang Proporsional Berbasis Jumlah Penduduk untuk Menata Pemukiman Warga agar Terciptanya Lingkungan yang Sehat dan Infrastruktur Kota yang Terang dengan Memanfaatkan Tata Ruang yang Berwawasan Kota Pintar (*Smart City*).
4. Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas, Memberikan Subsidi Penuh terhadap Kebutuhan Belajar 9 Tahun dan Memberikan Beasiswa Bagi Siswa Berprestasi untuk Melanjutkan Studi ke Perguruan Tinggi, serta Meningkatkan Kesejahteraan Guru.
5. Membuka Lapangan Kerja dan Peluang Berusaha dengan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan serta Menjalin Kerjasama dengan Pelaku Ekonomi Lainnya di Kota Sibolga Maupun di Luar Kota Sibolga.

Kota Sibolga terletak pada 1° 42'1° 46' Lintang Utara dan 98° 44' - 98° 48' Bujur Timur. Kota Sibolga terdiri dari 4 kecamatan dan 17 kelurahan dengan luas wilayah mencapai 10,77 km² dan jumlah penduduk sekitar 89.584 jiwa (2020) dengan kepadatan penduduk 8.318 jiwa/km².

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Sibolga, adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Sibolga Kota
2. Kecamatan Sibolga Sambas
3. Kecamatan Sibolga Selatan
4. Kecamatan Sibolga Utara

Wali Kota Sibolga adalah pemimpin tertinggi di lingkungan pemerintah Kota Sibolga. Wali Kota Sibolga bertanggungjawab kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara. Saat ini, Wali kota atau kepala daerah yang menjabat di Kota Sibolga ialah Jamaluddin Pohan, dengan Wakil Wali Kota Pantas Maruba Lumbantobing. Mereka menang pada Pemilihan umum Wali Kota Sibolga 2020. Jamaluddin merupakan Wali kota Sibolga ke-21 setelah kota ini didirikan. Jamaluddin dan Pantas

dilantik oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, pada 26 Februari 2021 di Kota Medan, untuk masa jabatan 2021-2024.

PROFIL KABUPATEN ASAHAN

Profil dan Kebijakan Teknis

A. Data Umum

1. Sejarah Kabupaten Asahan

Lambang Kabupaten Asahan sebagai berikut:



Gambar 1. Lambang Pemerintah Kabupaten Asahan

Perjalanan Sultan Aceh “Sultan Iskandar Muda” ke Johor dan Malaka pada tahun 1612 dapat dikatakan sebagai awal dari Sejarah Asahan. Dalam perjalanan tersebut, rombongan Sultan Iskandar Muda beristirahat di kawasan sebuah hulu sungai, yang kemudian dinamakan ASAHAN. Perjalanan dilanjutkan ke sebuah “Tanjung” yang merupakan pertemuan antara sungai Asahan dengan sungai Silau, kemudian bertemu dengan Raja Simargolang. Di tempat itu juga, Sultan Iskandar Muda mendirikan sebuah pelataran sebagai “Balai” untuk tempat menghadap, yang kemudian berkembang menjadi perkampungan. Perkembangan daerah ini cukup pesat sebagai pusat pertemuan perdagangan dari Aceh dan Malaka, sekarang ini dikenal dengan “Tanjung Balai”.

Dari hasil perkawinan Sultan Iskandar Muda dengan salah seorang puteri Raja Simargolang lahirlah seorang putera yang bernama Abdul Jalil yang menjadi cikal bakal dari kesultanan Asahan. Abdul Jalil dinobatkan menjadi Sultan Asahan I. Pemerintahan kesultanan Asahan dimulai tahun 1630 yaitu sejak dilantiknya Sultan Asahan yang I s.d. XI. Selain itu di daerah Asahan, pemerintahan juga dilaksanakan oleh datuk-datuk di Wilayah Batu Bara dan ada kemungkinan kerajaan-kerajaan kecil lainnya.

Tanggal 22 September 1865, kesultanan Asahan berhasil dikuasai Belanda. Sejak itu, kekuasaan pemerintahan dipegang oleh Belanda. Kekuasaan pemerintahan Belanda di Asahan/Tanjung Balai dipimpin oleh seorang Kontroler, yang diperkuat dengan Gouvernements Besluit tanggal 30 September 1867, Nomor 2 tentang pembentukan Afdeling Asahan yang berkedudukan di Tanjung Balai dan pembagian wilayah pemerintahan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Onder Afdeling Batu Bara
- b. Onder Afdeling Asahan
- c. Onder Afdeling Labuhan Batu

Kerajaan Sultan Asahan dan pemerintahan Datuk-Datuk di wilayah Batu Bara tetap diakui oleh Belanda, namun tidak berkuasa penuh sebagaimana sebelumnya. Wilayah pemerintahan Kesultanan dibagi atas Distrik dan Onder Distrik yaitu:

- a. Distrik Tanjung Balai dan Onder Distrik Sungai Kepayang
- b. Distrik Kisaran
- c. Distrik Bandar Pulau dan Onder Distrik Bandar Pasir Mandoge

Sedangkan wilayah pemerintahan Datuk-datuk di Batu Bara dibagi menjadi wilayah Self

Bestuur yaitu:

- a. Self Bestuur Indrapura
- b. Self Bestuur Lima Puluh
- c. Self Bestuur Pesisir
- d. Self Bestuur Suku Dua (Bogak dan Lima Laras)

Pemerintahan Belanda berhasil ditundukkan Jepang (tanggal 13 Maret 1942), sejak saat itu Pemerintahan Fasisme Jepang disusun menggantikan Pemerintahan Belanda. Pemerintahan Fasisme Jepang dipimpin oleh Letnan T. Jamada dengan struktur pemerintahan Belanda yaitu Asahan Bunsyu dan bawahannya Fuku Bunsyu Batu bara. Selain itu, wilayah yang lebih kecil di bagi menjadi Distrik yaitu Distrik Tanjung Balai, Kisaran, Bandar Pulau, Pulau Rakyat dan Sei Kepayang. Pemerintahan Fasisme Jepang berakhir pada tanggal 14 Agustus 1945 dan 17 Agustus 1945 Kemerdekaan Negara Republik Indonesia diproklamirkan.

Sesuai dengan perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia ,maka berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1945, Komite Nasional Indonesia Wilayah Asahan di bentuk pada bulan September 1945. Pada saat itu pemerintahan yang di pegang oleh Jepang sudah tidak ada lagi, tapi pemerintahan Kesultanan dan pemerintahan Fuku Bunsyu di Batu Bara masih tetap ada. Tanggal 15 Maret 1946, berlaku struktur pemerintahan Republik Indonesia di Asahan dan wilayah Asahan di pimpin oleh Abdullah Eteng sebagai kepala wilayah dan Sori Harahap sebagai wakil kepala wilayah, sedangkan wilayah Asahan dibagi atas 5 (lima) Kewedanan, yaitu:

- a. Kewedanan Tanjung Balai
- b. Kewedanan Kisaran
- c. Kewedanan Batubara Utara
- d. Kewedanan Batubara Selatan
- e. Kewedanan Bandar Pulau

Kemudian setiap tahun tanggal 15 Maret diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Asahan. Pada Konferensi Pamong Praja se-Keresidenan Sumatera Timur pada bulan Juni 1946 diadakan penyempurnaan struktur pemerintahan, yaitu:

- a. Sebutan Wilayah Asahan diganti dengan Kabupaten Asahan
- b. Sebutan Kepala Wilayah diganti dengan sebutan Bupati
- c. Sebutan Wakil Kepala Wilayah diganti dengan sebutan Patih

Berdasarkan keputusan DPRD-GR Tk. II Asahan No. 3/DPR-GR/1963 Tanggal 16 Pebruari 1963 diusulkan ibukota Kabupaten Asahan dipindahkan dari Kotamadya Tanjung Balai ke kota Kisaran dengan alasan supaya Kotamadya Tanjung Balai lebih dapat mengembangkan diri dan juga letak Kota Kisaran lebih strategis untuk wilayah Asahan. Hal ini baru teralisasi pada tanggal 20 Mei 1968 yang diperkuat dengan peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 1980, Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 28, Tambahan Negara Nomor 3166.

Pada tahun 1982, Kota Kisaran ditetapkan menjadi Kota Administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1982, Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 1982. Dengan adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 821.26-432 tanggal 27 Januari 1986 dibentuk Wilayah Kerja Pembantu Bupati Asahan dengan 3 (tiga) wilayah Pembantu Asahan, yaitu :

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 4 Tahun 1981 dan Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 1983 tentang Pembentukan, Penyatuan, Pemecahan dan Penghapusan Desa di Daerah Tingkat II Asahan telah dibentuk 40 (empat puluh) Desa Persiapan dan Kelurahan Persiapan sebanyak 15 (lima belas) yang tersebar di beberapa Kecamatan, yang peresmian pendefinitifannya dilaksanakan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara pada tanggal 20 Pebruari 1997, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 146/2622/SK/Tahun 1996 tanggal 7 Agustus 1996.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 138/814.K/Tahun 1993 tanggal 5 Maret 1993 telah dibentuk Perwakilan Kecamatan di 3 (tiga) Kecamatan, masingmasing sebagai berikut :

- a. Perwakilan Kecamatan Sei Suka di Kecamatan Air Putih
- b. Perwakilan Kecamatan Sei Balai di Kecamatan Tanjung Tiram
- c. Perwakilan Kecamatan Aek Kuasan di Kecamatan Pulau Rakyat

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan no. 323 tanggal 20 September 2000 dan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan no. 28 tanggal 19 September 2000 telah menetapkan tiga kecamatan perwakilan yaitu Kecamatan Sei Suka, Aek Kuasan dan Sei Balai menjadi kecamatan yang Definitif. Kemudian berdasarkan Peraturan Bupati Asahan Nomor 9 Tahun 2006 tanggal 30 Oktober 2006 dibentuk 5 (lima) desa baru hasil pemekaran yaitu :

- a. Desa Tomuan Holbung, pemekaran dari desa Huta Padang, Kec. BP Mandoge
- b. Desa Mekar Sari, pemekaran dari desa Pulau Rakyat Tua, Kec. Pulau Rakyat
- c. Desa Sipaku Area, pemekaran dari desa Simpang Empat, kec. Simpang Empat
- d. Desa Sentang, pemekaran dari desa Lima Laras, kec. Tanjung Tiram
- e. Desa Suka Ramai, pemekaran dari desa Limau Sundai, kec. Air Putih.

Pada pertengahan tahun 2007 berdasarkan Undang-undang RI Nomor 5 tahun 2007 tanggal 15

Juni 2007 tentang pembentukan Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Asahan dimekarkan menjadi dua Kabupaten yaitu Asahan dan Batu Bara. Wilayah Asahan terdiri atas 13 kecamatan sedangkan Batu Bara 7 kecamatan. Tanggal 15 Juni 2007 juga dikeluarkan keputusan Bupati Asahan Nomor 196- Pem/2007 mengenai penetapan Desa Air Putih, Suka Makmur dan Desa Gajah masuk dalam wilayah Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan. Sebelumnya ketiga desa tersebut masuk dalam wilayah Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara, namun mereka memilih bergabung dengan Kabupaten Asahan.

Struktur Pemerintahan Kabupaten Asahan pada saat ini terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah Kab. Asahan
- b. Sekretariat DPRD Kab. Asahan
- c. 1 Inspektorat
- d. 17 Dinas Daerah
- e. 7 Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan dan 3 berbentuk Kantor
- f. 25 Kecamatan
- g. 149 Desa
- h. 27 Kelurahan

Dari mulai berdirinya Kabupaten Asahan yaitu pada tanggal 15 Maret 1946 sampai dengan sekarang, Kabupaten Asahan dipimpin oleh Bupati Asahan yaitu:

| No | Nama | Periode Jabatan | |
|----|---|-----------------|----------------|
| | | Awal Menjabat | Akhir Menjabat |
| 1 | Abdullah Eteng | 1946 | 1954 |
| 2 | Rakuta Sembiring | 1954 | 1960 |
| 3 | H. Abdul Aziz | 1960 | 1960 |
| 4 | Usman J.S. | 1960 | 1966 |
| 5 | H. Abdul Manan Simatupang | 1966 | 1979 |
| 6 | Drs. Ibrahim Gani (Pelaksana Bupati) | 1979 | 1979 |
| 7 | Dr. Bahmid Muhammad | 1979 | 1984 |
| 8 | H.A. Rasyid Nasutiona (Pelaksana Bupati) | 1984 | 1984 |
| 9 | Abdul Wahab Dalimunthe (Pelaksana Bupati) | 1984 | 1984 |
| 10 | H. Zulfirman Siregar | 1984 | 1989 |
| 11 | H. Rihold Sihotang (Periode I) | 1989 | 1994 |
| 12 | H. Rihold Sihotang (Periode II) | 1994 | 1999 |
| 13 | Drs. H. Fachruddin Lubis (Pelaksana Bupati) | 1999 | 2000 |
| 14 | Drs. Hakimil Nasution (Pelaksana Bupati) | 2000 | 2000 |
| 15 | Drs. H. Risuddin | 2000 | 2005 |
| 16 | Drs. H. Taufan Gama Simatupang, M.AP | 2010 | 2015 |
| 17 | H.M. Fitriyus (Pejabat) | 2015 | 2016 |
| 18 | Drs. H. Taufan Gama Simatupang, M.AP | 2016 | 2019 |
| 19 | H.Surya, B.Sc (Pelaksana Harian) | 2019 | 2021 |
| 20 | H.Surya, B.Sc (Pelaksana Tugas) | 2019 | 2021 |
| 21 | John Hardi Nasution (Pelaksana Harian) | 2021 | 2021 |

| | | | |
|----|---------------|------|----------|
| 22 | H.Surya, B.Sc | 2021 | Sekarang |
|----|---------------|------|----------|

2. Kondisi Geografis dan Demografis Kabupaten Asahan

Kabupaten Asahan adalah sebuah kabupaten yang terletak di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara, Indonesia. Ibukota Kabupaten Asahan berada di Kisaran. Secara geografis Kabupaten Asahan terletak pada posisi 2°30'00" - 3°10'00" Lintang Utara, 99°00' - 100°00' Bujur Timur dengan ketinggian 0 – 100m di atas permukaan laut. Batas wilayah Kabupaten Asahan dengan wilayah lainnya adalah:

- Sebelah utara : Kabupaten Batubara
- Sebelah timur : Kabupaten Selat Malaka
- Sebelah selatan : Kabupaten Labuhan Batu Utara dan Toba Samosir
- Sebelah barat : Kabupaten Simalungun



Gambar 2. Peta Kabupaten Asahan

Luas wilayah Kabupaten Asahan yang tercatat adalah 3.732,97 km², atau 373.297 Ha. Kabupaten Asahan terdiri atas 25 kecamatan yaitu:

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Kecamatan B.P. Mandoge | 14. Kecamatan Air Batu |
| 2. Kecamatan Bandar Pulau | 15. Kecamatan Sei Dadap |
| 3. Kecamatan Aek Songsongan | 16. Kecamatan Buntu Pane |
| 4. Kecamatan Rahuning | 17. Kecamatan Tinggi Raja |
| 5. Kecamatan Pulau Rakyat | 18. Kecamatan Setia Janji |
| 6. Kecamatan Aek Kuasan | 19. Kecamatan Meranti |
| 7. Kecamatan Aek Ledong | 20. Kecamatan Pulo Bandring |
| 8. Kecamatan Sei Kepayang | 21. Kecamatan Rawang Panca Arga |
| 9. Kecamatan Sei Kepayang Barat | 22. Kecamatan Air Joman |
| 10. Kecamatan Sei Kepayang Timur | 23. Kecamatan Silau Laut |
| 11. Kecamatan Tanjung Balai | 24. Kecamatan Kota Kisaran Barat |

12. Kecamatan Simpang Empat
13. Kecamatan Teluk Dalam

25. Kecamatan Kota Kisaran Timur

Sensus penduduk Kabupaten Asahan pada tahun 2020 berjumlah 769.960 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 206,26 orang per km². Sementara jumlah penduduk tahun 2021 berjumlah 777.626 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 208,31 orang per km². Laju pertumbuhan penduduk penduduk dari tahun 2020-2021 sebesar 1,33 persen. Jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Asahan sejumlah 384.234 jiwa perempuan dan penduduk laki-laki sejumlah 389.391 jiwa. Pada tahun 2022, penduduk Kabupaten Asahan berjumlah 787.681 jiwa. Distribusi penduduk terbesar pada Kabupaten Asahan berada di Kecamatan Kisaran Timur dengan tingkat distribusi sebesar 10,61 persen sedangkan Kecamatan Sei Kepayang Timur yang terendah dengan distribusi penduduk sebesar 1,24 persen. Komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur, presentase 0-14 tahun sebesar 9,7 persen, 15-64 tahun sebesar 61,91 persen, dan usia 65 tahun ke atas sebesar 4,96 persen. Dilihat dari komposisi tersebut jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia non produktif dengan rasio beban ketergantungan sebesar 52,98. Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Asahan turun pada tahun 2021. Pada tahun 2020, TPAK di Asahan 64,94 persen menurun menjadi 63,02 persen di tahun 2021. Jika dilihat dari status pekerjaannya, 43,61 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di Asahan adalah buruh atau karyawan. Penduduk yang berusaha dengan dibantu anggota keluarga mencapai 7,2 persen, sedangkan penduduk yang bekerja sebagai pekerja keluarga mencapai 7,77 persen. Sebesar 3,99 persen penduduk Asahan yang menjadi pengusaha yang mempekerjakan buruh tetap/bukan anggota keluarganya. Jumlah pencari kerja yang terdaftar Menurut tingkat pendidikan pada tahun 2021 sebanyak 1.324 orang, yang terdiri dari 645 pencari kerja laki-laki dan sisanya 188 adalah pekerja perempuan. Jumlah pengangguran tahun 2021 sebanyak 21.730 orang. Bila kita lihat dari pendidikan yang ditamatkan ada sebanyak 3.436 orang yang berpendidikan SMA ke atas (15,81%) dan selebihnya berpendidikan SMP ke bawah sebesar 1.350 orang (6,21%).

3. Potensi Wilayah Kabupaten Asahan

Pada tahun 2021 PDRB Kabupaten Asahan adhb (atas dasar harga berlaku) sebesar Rp41,99 triliun tumbuh dibandingkan dengan pada tahun 2020 sebesar Rp 38,69 triliun. PDRB Kabupaten Asahan kontribusi terbesar bersumber dari sektor pertanian sebesar 37,91%, diikuti oleh sektor pengolahan sebesar 23,05%, dan sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 19,47%.

Sektor pertanian Kabupaten Asahan memiliki potensi diantaranya adalah di bidang hortikultura, perkebunan, dan perikanan. Pada bidang hortikultura komoditas andalan adalah cabai besar dimana produksi selama tahun 2021 sebesar 959,2 ton dengan rata-rata produksi 65,92 ku/ha. Produksi cabai besar pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 46,3 persen. Dimana daerah penghasil cabai besar terbesar adalah Kecamatan Air Joman

dan Simpang Empat. Sedangkan pada sektor perkebunan potensi komoditas di Kabupaten Asahan antara lain adalah perkebunan karet, kelapa sawit, cokelat, dan kelapa. Produksi perkebunan karet pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 17,5 persen. Sedangkan untuk komoditas kelapa sawit, Kabupaten Asahan merupakan pusat perkebunan sawit rakyat di Sumatera Utara, dimana seluruh tanaman kelapa sawit ditanam di seluruh kecamatan di Kabupaten Asahan. Produksi kelapa sawit (tandan buah segar) tahun 2021 sebesar 1.609.452,07 ton dengan total luas tanaman 75.192,42 ha. Hal ini dapat berkembang karena didukung oleh banyaknya perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan kelapa sawit.

Selain di sektor pertanian, Kabupaten Asahan memiliki potensi lain pada sektor pengolahan, dimana pada tahun 2021 berkontribusi Rp 9,68 triliun terhadap PDRB (adhb) tumbuh 7,68% dibandingkan pada tahun 2020. Dari sisi investasi pada tahun 2021 sektor pengolahan memberikan kontribusi terbanyak terhadap penambahan investor sejumlah 28 baik dari penanam modal dalam negeri (PMDN) maupun penanam modal asing (PMA).

B. Visi dan Misi

Visi

“Masyarakat Asahan Sejahtera yang Religius dan Berkarakter.”

Misi

1. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Inovatif, Professional, dan Akuntabel.
2. Meningkatkan Kerjasama Antar Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah dalam Rangka Mendorong Perekonomian Daerah.
3. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam Membangun Kemandirian Ekonomi.
4. Menciptakan Iklim yang Kondusif dan Kemudahan Investasi Bagi Pengembangan Usaha dalam Menciptakan Lapangan Kerja.
5. Meningkatkan Akurasi Proses Perencanaan, Penganggaran dan Pengelolaan APBD yang Transparan dan Berorientasi pada Kepentingan Masyarakat.
6. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Menumbuhkan Partisipasi Masyarakat dalam Memelihara Kesehatan.
7. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Daya Dukung Generasi Muda yang Melek Teknologi dan Budaya Literasi Tinggi.
8. Mendorong Terciptanya Keamanan dan Ketertiban dalam Kehidupan Bermasyarakat.
9. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berorientasi Mendukung Produktivitas dan Pengembangan Kawasan Strategis.
10. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkualitas, Berkelanjutan dan Bernilai Ekonomis.
11. Meningkatkan Pemahaman dan Penerapan Nilai-Nilai Keagamaan dalam Segala Aspek Kehidupan Masyarakat yang Demokratis, Rukun dan Gotong Royong.

12. Meningkatkan Perlindungan dan Penanggulangan Masalah Sosial Kemasyarakatan yang Berbasis pada Kompetensi Sumber Daya Manusia.

Kabupaten Asahan dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati dan dibantu Sekretaris Daerah yang merupakan unsur staf. Kabupaten Asahan memiliki 53 Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari: 2 sekretariat, 4 badan, 1 Inspektorat, 21 Dinas, dan 25 Kecamatan. Selengkapnya terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan saat ini dijabat oleh pasangan H. Surya, B.Sc. dan Taufik Ismail, S.Sos, M.Si. Pasangan ini memulai masa jabatan pada bulan 26 Februari 2021 untuk masa jabatan selama 5 tahun (dari tahun 2021 s.d 2024). Sementara Sekretaris Daerah dijabat oleh Drs. John Hardi Nasution, M.Si.

PROFIL KOTA MEDAN

Profil dan Kebijakan Teknis

A. Data Umum

1. Sejarah Kota Medan

Lambang Kota Medan adalah sebagai berikut.



Gambar 1. Lambang Kota Medan

Medan berasal dari kata Bahasa Tamil *Maidhan* atau *Maidhanam* yang berarti tanah lapang atau tempat yang luas, yang kemudian teradopsi ke Bahasa Melayu. Hari jadi Kota Medan diperingati sejak Tahun 1970 yang pada mulanya ditetapkan pada tanggal 1 April 1909. Tanggal ini kemudian mendapat bantahan yang cukup keras dari kalangan pers dan beberapa ahli sejarah. Oleh sebab itu, Wali Kota membentuk panitia sejarah hari jadi Kota Medan untuk melakukan penelitian dan penyelidikan. Berdasarkan perumusan yang dilakukan oleh Pansus Hari Jadi Kota Medan yang diketuai oleh M A Harahap, hari jadi Kota Medan menjadi tanggal 1 Juli 1590 yang secara resmi ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tk.II Medan dan mencabut Hari Ulang Tahun Kota Medan yang diperingati setiap tanggal 1 April pada periode sebelumnya. Sejarah Kota Medan dapat diuraikan dalam beberapa periode atau masa sebagai berikut.

a. Medan Tanah Deli

Dahulu Kota Medan ini dikenal dengan nama Tanah Deli karena lokasinya terletak di Tanah Deli dan keadaan tanah yang berawa-rawa kurang lebih seluas 4000 Ha. Beberapa sungai melintasi Kota Medan yang semuanya bermuara ke Selat Malaka yakni Sei Deli, Sei Babura, Sei Sikambing, Sei Denai, Sei Putih, Sei Badra, Sei Belawan dan Sei Sulang Saling/Sei Kera.

Berdasarkan penelitian dari Van Hissink Tahun 1900 yang dilanjutkan oleh penelitian Vriens Tahun 1910, jenis tanah di wilayah Deli terdiri dari tanah liat, tanah pasir, tanah campuran, tanah hitam, tanah coklat dan tanah merah. Selain jenis tanah tersebut, ditemukan juga jenis tanah liat yang spesifik yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan batu bata yang berkualitas tinggi yang telah ada sejak zaman penjajahan Belanda di Bakaran Batu (sekarang Medan Tenggara atau Menteng) salah satu pabrik batu bata pada zaman itu adalah Deli Klei.

Menurut Volker, pada Tahun 1860 Medan masih merupakan hutan rimba dan muara-muara sungai diselingi pemukiman penduduk yang berasal dari Karo dan Semenanjung Malaya. Pada Tahun 1863 orang-orang Belanda mulai membuka kebun Tembakau di Deli yang sempat menjadi

primadona Tanah Deli. Sejak itu perekonomian terus berkembang sehingga Medan menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian di Sumatera Utara.

b. Kampung Medan dan Tembakau Deli

Pada mulanya yang membuka perkampungan Medan adalah Guru Patimpus yang memiliki dua orang anak laki-laki yakni Kolok dan Kecik yang berada di Tanah Deli, sehingga sejak zaman penjajahan orang selalu merangkaikan Medan dengan Deli (Medan-Deli). Istilah Medan-Deli berangsur-angsur lenyap sejak zaman kemerdekaan sehingga kurang populer di kalangan masyarakat. Guru Patimpus tergolong orang yang berfikiran maju, terbukti dengan menyuruh anaknya berguru (menuntut ilmu) membaca Alqur'an kepada Datuk Kota Bangun dan memperdalam ilmu tentang agama Islam sampai ke Aceh.

Pada awalnya Medan merupakan sebuah kampung kecil bernama Medan Putri. Perkembangan Kampung Medan Putri tidak terlepas dari posisinya yang strategis karena terletak di pertemuan sungai Deli dan Babura tidak jauh dari jalan Putri Hijau sekarang. Kedua sungai tersebut dahulu merupakan jalur lalu lintas perdagangan yang cukup ramai sehingga Kampung Medan Putri yang merupakan cikal bakal Kota Medan dengan cepat berkembang dan menjadi pelabuhan transit yang sangat penting.

Hal yang menguatkan bahwa adanya Kampung Medan ini adalah keterangan H. Muhammad Said dikutip dari buku *Deli in Woord en Beeld* yang ditulis oleh N. Ten Cate. Dalam buku tersebut dinyatakan bahwa dahulu Kampung Medan merupakan benteng dan sisanya masih ada terdiri dari dinding dua lapis berbentuk bundaran yang terdapat di pertemuan antara dua sungai yakni Sungai Deli dan Babura. Letak dari Kampung Medan ini adalah di Wisma Benteng sekarang dan rumah *Administrateur* adalah kantor PTP IX Tembakau Deli yang sekarang.

Sekitar Tahun 1612 setelah dua dasawarsa berdiri Kampung Medan, Sultan Iskandar Muda yang berkuasa di Aceh mengirim panglimanya bernama Gocah Pahlawan yang bergelar Laksamana Kuda Bintang menjadi pemimpin yang mewakili kerajaan Aceh di Tanah Deli. Gocah Pahlawan membuka negeri baru di Sungai Lalang, Percut. Gocah Pahlawan selaku Wali dan Wakil Sultan Aceh memanfaatkan kebesaran imperium Aceh berhasil memperluas wilayah kekuasaannya meliputi Kecamatan Percut Sei Tuan dan Medan Deli sekarang. Dia juga mendirikan kampung-kampung Gunung Klarus, Sampali, Kota Bangun, Pulau Brayan, Kota Jawa, Kota Rengas Percut, dan Sigara-gara. Gocah Pahlawan kawin dengan putri Datuk Sunggal dan setelah perkawinan ini raja-raja di Kampung Medan menyerah pada Gocah Pahlawan.

Gocah Pahlawan wafat pada Tahun 1653 dan digantikan oleh puteranya Tuanku Panglima Perunggit, yang memproklamkan kemerdekaan Kesultanan Deli dari Kesultanan Aceh pada Tahun 1669 dengan ibu kota di Labuhan, kira-kira 20 km dari Medan.

Dalam bukunya *Mission to the East Coast of Sumatera* (terbitan Edinburg 1826), Jhon Anderson seorang berkebangsaan Inggris melakukan kunjungan ke Kampung Medan Tahun 1823 mencatat dalam bukunya bahwa penduduk Kampung Medan pada waktu itu masih berjumlah 200 orang.

Namun, dia hanya melihat penduduk yang berdiam di pertemuan antara dua sungai tersebut. Dalam buku tersebut juga dicatat bahwa sepanjang sungai Deli hingga ke dinding tembok mesjid Kampung Medan dibangun dengan batu- batu granit berbentuk bujur sangkar. Batu-batu ini diambil dari sebuah Candi Hindu Kuno di Jawa.

Pesatnya perkembangan Kampung Medan Putri juga tidak terlepas dari perkebunan tembakau yang sangat terkenal dengan tembakau Deli. Pada Maret 1864 contoh hasil panen tembakau Deli dikirim ke Rotterdam di Belanda untuk diuji kualitasnya, yang terbukti sebagai daun tembakau yang berkualitas tinggi untuk pembungkus cerutu.

Pada Tahun 1863, Sultan Deli memberikan tanah kepada Nienhuys Van der Falk dan Elliot dari Firma Van Keeuwen en Mainz & Co seluas 4.000 bahu (1 bahu = 0,74 ha) secara *erfpacht* 20 tahun di Tanjung Sepassi dekat Labuhan. Kemudian pada Tahun 1866 Janssen, P.W. Clemen, Cremer dan Nienhuys mendirikan de Deli Maatscapij di Labuhan. Dia melakukan ekspansi perkebunan baru di daerah Martubung, Sunggal (Tahun 1869), Sungai Beras dan Klumpang (Tahun 1875), yang jumlahnya pada Tahun 1874 mencapai 22 perusahaan perkebunan. Sehubungan kegiatan perdagangan tembakau yang sudah sangat luas dan berkembang, Nienhuys memindahkan kantor perusahaannya dari Labuhan ke Kampung Medan Putri sehingga Kampung Medan Putri semakin ramai dan selanjutnya berkembang dengan nama yang lebih dikenal sebagai "Kota Medan".

c. Penjajahan Belanda di Tanah Deli

Untuk menguasai Sumatera, Belanda berperang melawan Aceh, Minangkabau, dan Sisingamangaraja di daerah Tapanuli. Gubernur Jenderal Belanda J Van den Bosch mengerahkan pasukannya ke Sumatera setelah perang Jawa berakhir dan diperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk menguasai Sumatera selama 25 tahun. Namun, ternyata waktu yang dibutuhkan lebih kurang 78 tahun mulai dari Tahun 1864 s.d 1942.

Penaklukan Belanda atas Sumatera terhenti ditengah jalan karena Menteri Jajahan Belanda waktu itu J C Baud menyuruh pasukannya mundur walaupun mereka telah mengalahkan Minangkabau dengan perang Paderi (Tahun 1821 s.d 1837).

Di lain pihak, Sultan Ismail yang berkuasa di Riau secara tiba-tiba diserang oleh gerombolan Inggris dibawah pimpinan Adam Wilson. Berhubung pada waktu itu kekuatannya terbatas maka Sultan Ismail meminta perlindungan pada Belanda. Sejak saat itu terbukalah kesempatan bagi Belanda untuk menguasai Kerajaan Siak Sri Indrapura yang rajanya adalah Sultan Ismail. Pada tanggal 1 Februari 1858 Belanda mendesak Sultan Ismail untuk menandatangani perjanjian agar daerah taklukan kerajaan Siak Sri Indrapura termasuk Deli, Langkat dan Serdang di Sumatera Timur masuk kekuasaan Belanda. Karena daerah Deli telah masuk kekuasaan Belanda otomatis Kampung Medan menjadi jajahan Belanda, namun kehadiran Belanda belum secara fisik menguasai Tanah Deli.

Pada Tahun 1858 Elisa Netscher diangkat menjadi Residen Wilayah Riau dan sejak itu dia

mengangkat dirinya menjadi pembela Sultan Ismail yang berkuasa di kerajaan Siak. Tujuan Netscher membela Sultan Ismail secara politis mempermudah dirinya menguasai daerah taklukan kerajaan Siak yakni Deli yang di dalamnya termasuk Kampung Medan Putri.

Pada Tahun 1879, Ibukota Asisten Residen Deli dipindahkan dari Labuhan ke Medan dan pada tanggal 1 Maret 1887 Ibukota Residen Sumatera Timur dipindahkan dari Bengkalis ke Medan. Istana Kesultanan Deli yang semula berada di Kampung Bahari (Labuhan) juga dipindahkan dengan selesainya pembangunan Istana Maimoon pada tanggal 18 Mei 1891, dengan demikian Ibukota Deli telah resmi pindah ke Medan.

Pada Tahun 1915 Residensi Sumatera Timur ditingkatkan kedudukannya menjadi Gubernemen. Selanjutnya pada Tahun 1918 Kota Medan resmi menjadi *Gemeente* (Kota Praja) dengan Wali Kota Baron Daniel Mac Kay. Berdasarkan "*Acte van Schenking*" (Akte Hibah) Nomor 97 Notaris J M de-Hondt Junior tanggal 30 Nopember 1918. Sultan Deli menyerahkan tanah Kota Medan kepada *Gemeente* Medan, sehingga resmi di bawah kekuasaan langsung Hindia Belanda. Pada masa awal Kotapraja ini, Medan masih terdiri dari empat kampung yaitu Kampung Kesawan, Sungai Rengas, Petisah Hulu, dan Petisah Hilir. Pada Tahun 1918 penduduk Medan tercatat sebanyak 43.826 jiwa yang terdiri dari Eropa 409 orang, Indonesia 35.009 orang, Cina 8.269 orang, dan Timur Asing lainnya 139 orang.

Sejak saat itu Kota Medan berkembang semakin pesat, berbagai fasilitas dibangun diantaranya adalah Kantor Stasiun Percobaan AVROS di Kampung Baru (1919) sekarang RISPAA, hubungan Kereta Api Pangkalan Brandan - Besitang (1919), Konsulat Amerika (1919), Sekolah Guru Indonesia di Jl. H.M. Yamin sekarang (1923), Mingguan Soematra (1924), Perkumpulan Renang Medan (1924), Pusat Pasar, R.S. Elizabeth, Klinik Sakit Mata, dan Lapangan Olah Raga Kebun Bunga (1929). Secara historis perkembangan Kota Medan sejak awal telah menjadi pusat perdagangan (ekspor-impor) dan sejak Medan dijadikan sebagai ibukota Deli juga telah menjadikannya sebagai pusat pemerintah, yang sekarang menjadi ibukota Provinsi Sumatera Utara.

d. Kota Medan Masa Penjajahan Jepang

Pada Tahun 1942 penjajahan Belanda berakhir di Sumatera, saat itu Jepang mendarat di beberapa wilayah lain seperti Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan khusus di Sumatera Jepang mendarat di Sumatera Timur. Tentara Jepang yang mendarat di Sumatera adalah tentara XXV yang berpangkalan di Shonanto yang lebih dikenal dengan nama Singapore, pada tanggal 11 dan 12 Maret 1942. Pasukan ini terdiri dari Divisi Garda Kemaharajaan ke-2 ditambah dengan Divisi ke-18 dipimpin langsung oleh Letjend. Nishimura. Ada empat tempat pendaratan mereka ini yakni Sabang, Ulele, Kuala Bugak (dekat Peurlak Aceh Timur sekarang) dan Tanjung Tiram (kawasan Batubara sekarang). Pasukan tentara Jepang yang mendarat di kawasan Tanjung Tiram inilah yang masuk ke Kota Medan, mereka menaiki sepeda yang mereka beli dari rakyat sekitarnya secara barter.

Ketika peralihan kekuasaan Belanda kepada Jepang keadaan Kota Medan kacau balau, orang pribumi mempergunakan kesempatan ini membalas dendam terhadap orang Belanda. Keadaan ini segera ditertibkan oleh tentara Jepang dengan mengerahkan pasukannya yang bernama “Kempetai” (Polisi Militer Jepang). Dengan masuknya Jepang di Kota Medan keadaan segera berubah terutama pemerintahan sipilnya yang zaman Belanda disebut *Gemeente Bestuur* oleh Jepang dirubah menjadi Medan Sico (Pemerintahan Kotapraja). Pejabat pemerintahan sipil di tingkat Kotapraja Kota Medan ketika itu hingga berakhirnya kekuasaan Jepang bernama Hoyasakhi. Untuk tingkat keresidenan di Sumatera Timur karena masyarakatnya heterogen disebut Syucokan yang ketika itu dijabat oleh T Nakashima, pembantu Residen disebut dengan Gunseibu. Di sebelah Timur Kota Medan yakni Marindal sekarang dibangun Kengrohositai sejenis pertanian kolektif. Di kawasan Titi Kuning Medan Johor sekarang tidak jauh dari lapangan terbang Polonia sekarang mereka membangun landasan pesawat tempur Jepang.

e. Kota Medan Menyambut Kemerdekaan Republik Indonesia

Pada Tahun 1945, di seluruh Indonesia bergema persiapan proklamasi termasuk di Kota Medan tokoh-tokoh pemuda melakukan berbagai persiapan kemerdekaan. Berhubung Kota Hiroshima telah dijatuhi bom atom, kekuatan Jepang telah lumpuh, dan tentara sekutu berhasrat kembali untuk menduduki Indonesia.

Khususnya di kawasan Kota Medan dan sekitarnya, ketika Jepang menyadari kekalahannya segera menghentikan segala kegiatan, terutama yang berhubungan dengan pembinaan dan pengerahan pemuda seperti Heiho, Romusha, Gyu Gun dan Talapeta dibubarkan atau kembali kepada masyarakat. Secara resmi dibubarkan pada tanggal 20 Agustus 1945 karena pada hari itu pula penguasa Jepang di Sumatera Timur yang disebut Tetsuzo Nakashima mengumumkan kekalahan Jepang dan tugas pasukan mereka dibekas pendudukan untuk menjaga status quo sebelum diserahkan kepada pasukan sekutu. Beberapa tokoh pemuda, terutama bekas perwira Gyu Gun diantaranya Letnan Achmad Tahir mendirikan suatu kepanitiaan untuk menanggulangi Heiho, Romusha yang sanak saudaranya tidak ada di kota Medan. Panitia ini dinamakan “Panitia Penolong Pengangguran Eks Gyu Gun“ yang berkantor di Jl. Istana No.17 (Gedung Pemuda sekarang).

Pada tanggal 17 Agustus 1945 gema kemerdekaan telah sampai ke kota Medan walaupun terbatas karena kondisi komunikasi saat itu sangat sederhana. Kantor Berita Jepang Domei sudah ada perwakilan di Medan, namun mereka tidak mau menyiarkan berita kemerdekaan tersebut sehingga masyarakat masih bingung.

Sekelompok kecil tentara sekutu pada tanggal 1 September 1945 yang dipimpin Letnan I Pelaut Brondgeest tiba di Kota Medan dan berkantor di Hotel De Boer (sekarang Hotel Dharma Deli). Tugasnya mempersiapkan pengambilalihan kekuasaan dari Jepang. Pada saat itu pula tentara Belanda yang dipimpin oleh Westerling didampingi perwira penghubung sekutu bernama Mayor Yacobs dan Letnan Brondgeest berhasil membentuk kepolisian Belanda untuk kawasan Sumatera

Timur yang anggotanya diambil dari eks KNIL dan Polisi Jepang yang pro Belanda. Akhirnya dengan perjuangan sulit, tokoh pemuda yakni Achmad Tahir, Amir Bachrum Nasution, Edisaputra, Rustam Efendy, Gazali Ibrahim, Roos Lila, A.malik Munir, Bahrum Djamil, Marzuki Lubis, dan Muhammad Kasim Jusni mengadakan berbagai aksi agar kemerdekaan harus ditegakkan di Indonesia demikian juga di kota Medan.

2. Kondisi Geografis dan Demografis Kota Medan

Kota Medan memiliki luas 26.510 hektare (265,10 km²) atau 3,6% dari keseluruhan wilayah Sumatera Utara. Dengan demikian, dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya, Medan memiliki luas wilayah yang relatif kecil dengan jumlah penduduk yang relatif besar. Secara geografis Kota Medan terletak pada 3°30' – 3°43' Lintang Utara dan 98°35'–98°44' Bujur Timur. Curah hujan di Kota Medan digolongkan dua macam yakni Maksima Utama dan Maksima Tambahan. Maksima Utama terjadi pada bulan Oktober s.d Desember sedangkan Maksima Tambahan antara bulan Januari s.d September dengan intensitas rata-rata 4,4 mm/jam. Untuk itu topografi, Kota Medan cenderung miring ke utara dan berada pada ketinggian 2,5–37,5 meter di atas permukaan laut. Secara administratif batas wilayah Kota Medan di sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah timur, selatan, dan barat berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang. Kota Medan terdiri dari 21 kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Medan Amplas
- b. Kecamatan Medan Area
- c. Kecamatan Medan Barat
- d. Kecamatan Medan Baru
- e. Kecamatan Medan Belawan
- f. Kecamatan Medan Deli
- g. Kecamatan Medan Denai
- h. Kecamatan Medan Helvetia
- i. Kecamatan Medan Johor
- j. Kecamatan Medan Kota
- k. Kecamatan Medan Labuhan
- l. Kecamatan Medan Maimun
- m. Kecamatan Medan Marelan
- n. Kecamatan Medan Perjuangan
- o. Kecamatan Medan Petisah
- p. Kecamatan Medan Polonia
- q. Kecamatan Medan Sunggal
- r. Kecamatan Medan Selayang
- s. Kecamatan Medan Tembung

t. Kecamatan Medan Tuntungan

u. Kecamatan Medan Timur

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dalam katalog “Kota Medan Dalam Angka 2022” jumlah penduduk Kota Medan pada Tahun mencapai 2.435.252 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 9.186 jiwa/km².

Secara geografis Medan didukung oleh daerah-daerah yang kaya sumber daya alam seperti Deli Serdang, Labuhan Batu, Simalungun, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Karo, Binjai, dan lain-lain. Kondisi ini menjadikan Kota Medan secara ekonomi mampu mengembangkan berbagai kerjasama dan kemitraan yang sejajar, saling menguntungkan, saling memperkuat dengan daerah disekitarnya. Di samping itu sebagai daerah pinggir jalur pelayaran Selat Malaka, Medan memiliki posisi strategis sebagai gerbang (pintu masuk) kegiatan perdagangan barang dan jasa baik domestik maupun luar negeri (ekspor-impor). Posisi geografis Medan ini telah mendorong perkembangan kota dalam dua kutub pertumbuhan secara fisik yaitu daerah Belawan dan pusat Kota Medan saat ini.

Medan adalah kota multietnis yang penduduknya terdiri dari orang-orang dengan latar belakang budaya dan agama yang berbeda-beda. Selain Melayu dan Karo sebagai penghuni awal, Kota Medan didominasi oleh etnis Jawa, Batak, Tionghoa, Minangkabau, Mandailing, dan India. Mayoritas penduduk Medan bekerja di sektor perdagangan, sehingga banyak ditemukan ruko di berbagai sudut kota. Di Kota Medan juga terdapat kantor-kantor konsulat dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Malaysia, dan Jerman. Secara persentasi, Kota Medan didominasi oleh suku bangsa Batak yang meliputi Batak Toba, Angkola, Mandailing, Karo, Simalungun, dan Pakpak. Pada Tahun 2000, penduduk Kota Medan berdasarkan suku dengan komposisi Batak sebanyak 33,70% (Batak Toba 19,21%, Angkola dan Mandailing 9,36%, Karo 4,10%; Simalungun 0,69%; Pakpak 0,34%),

Jawa sebanyak 33,03%, Tionghoa sebanyak 10,65%, Minangkabau sebanyak 8,60%, Melayu sebanyak 6,59%, Aceh sebanyak 2,78%, Nias sebanyak 0,69%, dan suku lainnya 3,96%. Secara historis, pada Tahun 1918 tercatat bahwa Kota Medan dihuni sebanyak 43.826

jiwa. Dari jumlah tersebut 409 orang keturunan Eropa, 35.009 orang Indonesia, 8.269 keturunan Tionghoa, dan 139 berasal dari ras Timur lainnya.

3. Potensi Wilayah Kota Medan

Kota Medan merupakan kota ketiga terbesar di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya merupakan pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat dengan pelabuhan Belawan dan Bandar Udara Internasional Kualanamu. Akses dari pusat kota dan bandara telah terlengkapi oleh jalan tol dan kereta api. Medan adalah kota pertama di Indonesia yang berhasil mengintegrasikan bandara dengan kereta.

Berbatasan dengan selat Malaka, Medan menjadi kota perdagangan industri dan bisnis yang penting untuk Indonesia. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kota Medan adalah salah satu dari empat pusat pertumbuhan utama untuk Indonesia bersama dengan Jakarta, Surabaya dan Makassar. Mayoritas penduduk Kota Medan bekerja pada sektor perdagangan sehingga salah satu penyumbang terbesar terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Medan adalah sektor perdagangan, bank dan lembaga keuangan lainnya serta industri. Sektor industri merupakan penyerap tenaga kerja terbesar, dengan laju pertumbuhan yang positif setiap tahunnya. Nilai produksi sektor industri Kota Medan setiap tahun mengalami peningkatan namun kontribusinya terhadap PDRB Kota Medan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan semakin besarnya sektor lain yang memberikan kontribusi, selain itu terdapat potensi ekonomi Kota Medan lainnya pada sektor perdagangan, angkutan dan komunikasi serta keuangan dan jasa.

Kota Medan sebagai kota transit atau pintu gerbang masuknya wisatawan yang datang dari luar kota maupun negeri sebelum melakukan perjalanan ke daerah tujuan wisata lain seperti Berastagi, Parapat, Pulau Samosir, Danau Toba, dan berbagai daerah tujuan wisata yang ada di Sumatera Utara, maka Kota Medan memiliki beberapa potensi dan keunggulan pariwisata yang dapat dikunjungi baik secara kolektif maupun pribadi. Selain itu, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2021, Kota Medan memiliki kawasan cagar budaya berupa kawasan bersejarah dan empat di antaranya berada dalam kawasan pusat pelayanan. Cagar budaya yang dapat kita temukan diantaranya seperti Istana Maimoon, Rumah Tjong A Fie, Mesjid Raya, Gereja Lama, Graha Bunda Maria Annai Velangkani, Klenteng Hindu Shri Mariamman, dan lain sebagainya. Penduduk Kota Medan yang multietnis juga menyebabkan keanekaragaman kuliner di masyarakatnya dan menjadikan Medan menjadi salah satu kota tujuan wisata kuliner.

Selain itu berbagai terobosan dan kebijakan telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan untuk dapat menarik minat investor asing. Mulai dari penyempurnaan pelayanan perizinan investasi sampai kepada pemberian insentif baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Berbagai langkah debirokrasi dan deregulasi terus berlanjut untuk menciptakan efisiensi berusaha dan berinvestasi termasuk konsistensi aturan. Selain itu kepastian hukum untuk meminimalisir ketidakpastian berusaha bagi investasi asing. Berbagai langkah yang telah, sedang dan akan

dilanjutkan tersebut diharapkan juga menghapus perbedaan perlakuan antara investor asing dan lokal, sehingga investor asing dapat memiliki akses yang sama termasuk dari lembaga perbankan domestik atau local.

B. Visi dan Misi

Visi

“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah, Maju dan Kondusif.”

Misi

Medan Berkah, Medan Maju, Medan Bersih, Medan Membangun, Medan Kondusif, Medan Inovatif, Medan Beridentitas.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah saat ini dijabat oleh M. Bobby Afif Nasution dan H. Aulia Rachman untuk periode Tahun 2021 s.d. 2024. Sementara Sekretaris Daerah dijabat oleh Wiriya Alrahman dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dijabat oleh Zulkarnain.

PROFIL KABUPATEN PADANG LAWAS

Profil dan Kebijakan Teknis

A. Data Umum

1. Sejarah Kabupaten Padang Lawas

Lambang Kabupaten Padang Lawas sebagai berikut:



Gambar 1. Lambang Kabupaten Padang Lawas

Kabupaten Padang Lawas merupakan pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Lahirnya Kabupaten Padang Lawas melalui pertimbangan dan proses yang panjang disamping memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Penetapan Kabupaten Padang Lawas didasarkan pada diundangkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara dengan pusat pemerintahan di Kecamatan Barumon Kelurahan Sibuhuan yang terdiri dari 17 kecamatan. Data Badan Pusat Statistik Tahun 2022 luas wilayah Kabupaten Padang Lawas adalah 3.912,18 km². Wilayah Kabupaten Padang Lawas bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Pasaman (Provinsi Sumatera Barat) dan Kecamatan Siabu (Kabupaten Mandailing Natal), dan bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Gunung Malintang (Kabupaten Mandailing Natal), Kecamatan Sayur Matinggi (Kabupaten Tapanuli Selatan) dan Kecamatan Batang Angkola (Kabupaten Tapanuli Selatan). Wilayah administrasi Kabupaten Padang Lawas terdiri dari 17 wilayah kecamatan, 303 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan Hutaraja Tinggi termasuk bagian dari wilayah di Kabupaten Padang Lawas yang paling luas sebesar 663,24 km², sementara Kecamatan Barumon Baru adalah kecamatan yang paling kecil luas wilayahnya yaitu sebesar 13,73 km². Pada tahun 2022, penduduk Kabupaten Padang Lawas berjumlah 269.799 jiwa.

2. Kondisi Geografis dan Demografis Kabupaten Padang Lawas

Secara geografis, posisi Kabupaten Padang Lawas terletak pada 0° 45' - 1° 33' Lintang Utara dan 99° 24' - 100° 11' Bujur Timur. Berdasarkan Peta Bakosurtanal skala 1 : 50.000, maka secara geografis Kabupaten Padang Lawas terletak pada posisi 960 47' – 970 31' Bujur Timur dan 040 43' - 050 16' Lintang Utara. Batas wilayah Kabupaten Padang Lawas dengan wilayah lainnya adalah:

- Sebelah Utara : Kabupaten Padang Lawas Utara
- Sebelah Timur : Kabupaten Rokan Hulu

- Sebelah Selatan : Kabupaten Pasaman (Provinsi Sumatera Barat) dan Kecamatan Siabu (Kabupaten Mandailing Natal)
- Sebelah barat : Kecamatan Gunung Malintang (Kabupaten Mandailing Natal), Kecamatan Sayur Matinggi (Kabupaten Tapanuli Selatan), dan Kecamatan Batang Angkola (Kabupaten Tapanuli Selatan)

Wilayah Kabupaten Padang Lawas terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi serta pegunungan Bukit Barisan yang membujur di bagian barat yang membujur dari utara ke selatan. Kemiringan tanah datar seluas 0,27 km² (6,35 persen) dari luas wilayah, landai seluas 0,49 km² (11,52 persen) dari luas wilayah, berbukit- bukit seluas 0,68 km² (16 persen) dan bergunung seluas 2.797,33 km² (66.13 persen) dari luas wilayah. Wilayah Kabupaten Padang Lawas terbagi atas 2 (dua) bagian yaitu bagian timur dengan keadaan relatif datar sampai dengan bergelombang, bagian barat berbukit sampai bergunung.

Wilayah Bagian Timur Kabupaten Padang Lawas yang merupakan daerah dengan kategori datar sampai dengan landai adalah daerah yang subur, kelembaban tinggi dengan curah hujan relatif tinggi pula. Banjir juga sering melanda wilayah tersebut akibat berkurangnya pelestarian hutan, erosi dan pendangkalan sungai. Pada musim kemarau terjadi pula kekurangan persediaan air disebabkan kondisi hutan yang kritis. Wilayah bagian barat sebagian besar merupakan pegunungan, memiliki variasi dalam tingkat kesuburan tanah, iklim, topografi dan kontur serta daerah yang struktur tanahnya labil. Beberapa sungai dan air terjun dijumpai di wilayah ini serta sebagian wilayahnya merupakan daerah konservasi yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air bagi Daerah Aliran Sungai (DAS) Barumon.

3. Potensi Wilayah Kabupaten Padang Lawas

Kabupaten Padang Lawas memiliki potensi energi berupa panas bumi berdasarkan peta energi Provinsi Sumatera Utara sebagai energi alternatif bersama dengan beberapa wilayah lain di Sumatera Utara, yaitu di Kabupaten Karo, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Mandailing Natal. Sumber panas bumi ini berpotensi sebagai pembangkit energi listrik di Kabupaten Padang Lawas. Kabupaten Padang Lawas juga memiliki potensi minyak bumi dengan cadangan 2000 MSTB yang telah terbukti keberadaannya dan telah mulai diproduksi yang terletak di Kecamatan Barumon Tengah. Kabupaten Padang Lawas juga merupakan salah satu wilayah di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki cadangan batubara yang terdapat di 15 (lima belas) titik. Cadangan batubara di wilayah Kabupaten Padang Lawas terdapat di Kecamatan Sosopan, Kecamatan Ulu Barumon dan Kecamatan Batang Lubu Sutam. Selain itu terdapat juga timah putih yang merupakan bahan galian yang berfungsi sebagai bahan industri dan konstruksi.

Kabupaten Padang Lawas mempunyai berbagai jenis bahan galian mineral yang potensial untuk dimanfaatkan dan dikembangkan, yaitu : mineral logam : emas, timah, dan mineral non logam :

dolomit, bentonit, marmer, pasir kwarsa, kapur tohor serta bahan galian energi : batubara, panas bumi (geothermal) serta minyak dan gas bumi. Secara umum telah diketahui besarnya cadangan geologi (perkiraan) dan mutu sumber daya mineral, namun untuk dapat dimanfaatkan dan dikembangkan masih memerlukan penyelidikan eksplorasi secara detail, guna mengetahui cadangan terukur (pasti).

Selain bahan galian tersebut terdapat pula potensi bahan tambang seperti minyak bumi, namun hingga saat ini baru tahap eksplorasi dan belum dieksploitasi. Hal ini terkait lokasi pertambangan banyak yang berada dikawasan lindung. Untuk masa depan hal ini dapat dipertimbangkan untuk dieksploitasi.

B. Visi dan Misi

Visi

“Meneruskan Pembangunan Padang Lawas yang Beriman, Cerdas, Sehat, Sejahtera dan Berbudaya (Bercahaya) dengan Kerja Keras dan Kerja Cerdas.”

Misi

1. Meningkatkan Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi, dengan Sistem yang Demokrasi dan dengan Membuat Sistem Informasi yang Berbasis Teknologi dapat Membawa Perubahan Radikal dalam Sistem Pemerintahan melalui Proses Menata Ulang, Mengubah, Memperbaiki dan Menyempurnakan agar Menjadi Lebih Bersih, Baik, Efektif, Efisien, dan Produktif serta Berorientasi kepada Publik.
2. Mewujudkan Pelayanan Kebutuhan Dasar Masyarakat yang Terjangkau dan Merata, karena Kedekatan dan Kepercayaan Hubungan Hanya dapat Dibina melalui Kegiatan Pelayanan yang dapat Memenuhi Kebutuhannya. Dengan Melakukan Pelayanan Maksimal terhadap Masyarakat dengan Menetapkan Standar Pelayanan Publik dan Pelayanan Memperhatikan Kebutuhan Masyarakat dan Kondisi Lingkungannya Agar Pelayanan Tepat dan Sesuai.
3. Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Sektor Unggulan Daerah, Karena di Daerahnya Rata-Rata Bermata Pencaharian Bertani dan Berkebun Harus Mendorong Peningkatan Pengembangan dan Nilai Lebih Sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan Juga Produknya dengan Memfokuskan Pembangunan Ekonomi Potensial Masyarakat Daerah sebagai Sumber Pertumbuhan Baru yang Disesuaikan dengan Karakteristik Daerah, Mendorong Berkembangnya Sektor Industri dan Kreatif Lokal Daerah yang Berdaya Saing Tinggi, serta dapat Menunjang Perekonomian Masyarakat Daerah.
4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Guna Menunjang Kegiatan Perekonomian dan Pelayanan Publik dengan Memperhatikan Aspek Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang, Karena Wilayah Memiliki Lahan dan Ruang yang Masih Luas dapat Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Wilayah yang Berwawasan Lingkungan, yang Disesuaikan dengan Pemanfaatan Ruang, Pembangunan Peningkatan dan Pengelolaan Prasarana di Permukiman Termasuk juga Akses Peningkatan Jalan, Pasar, Perumahan yang

Layak, Air Bersih dan Sanitasi serta Transportasi Publik.

5. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Dan Penguatan Budaya Dan Kearifan Lokal, Dengan Melestarikan, Menggali, Memperkenalkan Serta Dengan Meningkatkan Norma Dan Adat Istiadat, Tradisi, Budayadan Kearifan Lokal, Dan Pranata Lokal Dalam Rangka Meningkatkan Potensi Dan Daya Tarik Pariwisata Dalam Upaya Mewujudkan Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Serta Kehidupan Beragama Yang Damai Dan Aman Agar Nantinya Sebagai Serambi Mekah Terwujud.

Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas adalah Bupati dan Wakil Bupati. Namun, Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas saat ini dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati H. Ahmad Zarnawi Pasaribu. Kepala Daerah ini memulai masa jabatan pada bulan Februari 2019 untuk masa jabatan selama 5 tahun (dari tahun 2019 s.d 2024). Sementara Sekretaris Daerah dijabat oleh Arpan Nst, Inspektur dijabat oleh Harjusli Fahri Siregar.

PROFIL KOTA TANJUNGBALAI

Profil dan Kebijakan Teknis

A. Data Umum

1. Sejarah Kota Tanjungbalai

Lambang Kota Tanjungbalai sebagai berikut:



Berdasarkan sejarah, keberadaan Kota Tanjungbalai tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan Asahan yang telah berdiri ± 392 tahun yang lalu. Tepatnya dengan penobatan Sultan Abdul Jalil sebagai raja pertama Kerajaan Asahan di Kampung Tanjung yang merupakan cikal bakal nama Tanjungbalai pada tahun 1620. Asal-usul nama Kota Tanjungbalai menurut cerita rakyat bermula dari sebuah balai yang ada disekitar ujung tanjung di muara sungai Silau dan aliran sungai Asahan. Lama – kelamaan balai tersebut semakin ramai disinggahi karena letaknya yang strategis sebagai bandar kecil tempat melintas bagi orang – orang yang ingin berpergian ke hulu sungai Silau dan sungai Asahan. Tempat itu kemudian dinamai “Kampung Tanjung” dan orang lazim menyebutnya “Balai Di Tanjung”.



Foto udara Tanjungbalai pada tahun 1930-an

Tanggal 27 Desember yang merupakan hari mangkatnya Sultan Kerajaan Aceh Sultan Iskandar Muda yang merupakan ayahanda Sultan Abdul Jalil, telah dijadikan sebagai hari lahir Kota Tanjungbalai yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kotamadya Tanjungbalai Nomor 4 / DPRD / TB / 1986 tanggal 25 Nopember 1986.

Kerajaan Asahan pernah diperintah oleh delapan orang raja sejak raja pertama Sultan Abdul Jalil pada tahun 1620 sampai dengan raja terakhir Sultan Syaibun Abdul Jalil Rahmadsyah pada tahun 1933. Raja terakhir mangkat pada tanggal 17 April 1980 di Medan dan dimakamkan di lingkungan Masjid Raya Tanjungbalai.

Di zaman penjajahan Belanda, pertumbuhan dan perkembangan Kota Tanjungbalai semakin meningkat dan strategis. Kota Tanjungbalai dijadikan sebagai Gementee berdasarkan Besluit G.G. tanggal 27 Juni 1917 dengan Stbl. 1917 Nomor 284. Hal ini sejalan dengan berdirinya perkebunan – perkebunan di daerah Asahan dan Sumatera Timur, seperti H.A.P.M, SIPEF, London Sumatera (Lonsum) dan lain-lain. Pembangunan jalur transportasi seperti jalan, jembatan dan jalur kereta api mempermudah akses ke Kota Tanjungbalai. Sehingga hasil-hasil dari perkebunan dapat dipasarkan dengan lancar ke luar negeri melalui pelabuhan Tanjungbalai. Maka Kota Tanjungbalai berkembang sebagai kota pelabuhan yang diperhitungkan di pantai timur Sumatera Utara.

Pembukaan kantor – kantor dagang berbagai maskapai Belanda di Tanjungbalai pada abad XX, seperti K.P.M., Borsumeij dan lain-lain, maka mulailah bangsa Eropa menetap di Kota Tanjungbalai. Asisten Resident van Asahan berkedudukan di Tanjungbalai yang jabatannya bertindak sebagai Walikota dan Ketua Dewan Kota (Voorzitter van den Gemeenteraad). Maka mulai saat itu Kota Tanjungbalai selain tempat kedudukan Raja, juga merupakan tempat kedudukan Asisten Resident.

Sejak kemerdekaan Republik Indonesia, keberadaan Kota Tanjungbalai sebagai daerah otonom ditetapkan berdasarkan Undang – Undang Nomor 9 Darurat Tahun 1956 (LN Tahun 1956 Nomor 60, TLN Nomor 1092) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota – Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara, nama Gementee Tanjungbalai diganti dengan Kota Kecil Tanjungbalai. Berdasarkan Surat Mendagri Nomor U.P.15/2/3 tanggal 18 September 1956, jabatan Walikota Tanjungbalai terpisah dari Bupati Asahan. Selanjutnya dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1957, nama Kota Kecil Tanjungbalai diganti menjadi Kotapraja Tanjungbalai.

Pada waktu Gementee Tanjungbalai didirikan tahun 1917, luas wilayah Kota Tanjungbalai hanya 106 Ha. Atas persetujuan Bupati Asahan melalui Maklumat Nomor 260 tanggal 11 Januari 1958, daerah – daerah yang dikeluarkan (menurut Stbl. 1917 Nomor 641) dikembalikan pada batas semula, sehingga luasnya menjadi $\pm 190 - 200$ Ha (± 2 km²). Berdasarkan Sensus penduduk tahun 1980, dengan luas wilayah 2 km² dan jumlah penduduk ± 40.000 jiwa (kepadatan penduduk ± 20.000 jiwa per km²), menjadikan Kota Tanjungbalai sebagai Kota terpadat di Asia Tenggara saat itu.

Selanjutnya dengan terbitnya PP Nomor : 11 Tahun 1984 (LN Tahun 1984 Nomor 12) tanggal 29 Maret 1984, maka oleh Gubernur Sumatera Utara atas nama Mendagri, pada tanggal 5 Januari 1985 telah meresmikan terbentuknya 2 (dua) Kecamatan di Kotamadya Dati II Tanjungbalai, yaitu Kecamatan Tanjungbalai Selatan dan Kecamatan Tanjungbalai Utara.

Kemudian berdasarkan PP Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Tanjungbalai dengan Kabupaten Dati II Asahan, serta Inmendagri Nomor 22 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan PP Nomor 20 tahun 1987, maka luas wilayah Kota Tanjungbalai berubah menjadi 6.052 Ha dengan 5 Kecamatan 11 Kelurahan dan 19 Desa. Berdasarkan Perda Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan di Wilayah Kota Tanjungbalai, 19 Desa tersebut telah diubah statusnya menjadi Kelurahan. Semenjak itulah di Kota Tanjungbalai terdapat 5 Kecamatan dengan 30 Kelurahan.

Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 tahun 2005 telah ditetapkan pembentukan Kecamatan Datuk Bandar Timur sebagai hasil pemekaran Kecamatan Datuk Bandar. Selanjutnya berdasarkan Perda Kota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2006 telah ditetapkan pembentukan Kelurahan Pantai Johor di Kecamatan Datuk Bandar. Dengan demikian sampai saat ini, Kota Tanjungbalai terdiri dari 6 Kecamatan dan 31 Kelurahan.

2. **Kondisi Geografis dan Demografis Kota Tanjungbalai**

Kota Tanjungbalai merupakan salah satu dari 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Utara, yang berada di kawasan pesisir pantai timur Sumatera Utara. Secara astronomis Kota Tanjungbalai terletak pada koordinat $2^{\circ}58'15'' - 3^{\circ}01'32''$ LU dan $99^{\circ}48'00'' - 99^{\circ}50'16''$ BT, merupakan daerah pertemuan 2 (dua) sungai besar yaitu Sungai Silau dan Sungai Asahan yang bermuara ke Selat Malaka. Jaraknya relatif dekat dengan negara Malaysia, Singapura dan Thailand. Wilayah Kota Tanjungbalai dikelilingi oleh Kabupaten Asahan dan merupakan *hinterland* dengan Kabupaten Labuhan Batu, Simalungun, Karo dan Kabupaten / Kota lain di Provinsi Sumatera Utara serta Provinsi Kepulauan Riau. Kota Tanjungbalai kini memiliki sebutan baru yakni "*Mutiara Selat Malaka di Hilir Danau Toba*".

Berdasarkan letak geografisnya tersebut Kota Tanjungbalai sangat strategis dan ekonomis. Terlebih lagi didukung oleh tersedianya sarana, prasarana, infrastruktur dan aksesibilitas yang cukup memadai, baik berupa modal transportasi darat, laut, jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah nusantara maupun negara tetangga.

Seperti telah dikemukakan di atas, saat ini Kota Tanjungbalai memiliki luas wilayah $\pm 60,52$ km² atau ± 6.052 Ha. Luas wilayah Kota Tanjungbalai hanya 0,08 % dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Letak wilayah Kota Tanjungbalai secara keseluruhan berbatasan dengan Kabupaten Asahan yang rinciannya seperti tertera pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1. Batas Wilayah Administrasi Kota Tanjungbalai

| No | Uraian | Batas Wilayah |
|----|-----------------|--|
| 1 | Sebelah Utara | Berbatasan dengan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan |
| 2 | Sebelah Selatan | Berbatasan dengan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan |
| 3 | Sebelah Barat | Berbatasan dengan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan |
| 4 | Sebelah Timur | Berbatasan dengan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan |

3. Potensi Wilayah Kota Tanjungbalai

Berdasarkan letak geografis yang sangat strategis, maka potensi Kota Tanjungbalai yang dapat dikembangkan antara lain: Sebagai Pusat Pelayanan Sekunder A yakni Pusat Pembangunan Kawasan Sektor Unggulan meliputi : Perkebunan, Pertanian dan Industri terhadap wilayah hinterlandnya sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara;

- a. Sebagai Pusat Pelayanan Sekunder A yakni Pusat Pembangunan Kawasan Sektor Unggulan meliputi : Perkebunan, Pertanian dan Industri terhadap wilayah hinterlandnya sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara.
- b. Sebagai jalur transit perdagangan internasional dari negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura dan Pelabuhan alternatif bagi daerah hinterland, seperti: Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Riau Kepulauan, Pesisir Provinsi Riau dan kota-kota besar lainnya di Sumatera Utara.
- c. Mempunyai lahan yang cukup luas dan produktif untuk pengembangan sebagai kota industri, perdagangan, pelayanan jasa telekomunikasi yang didukung oleh Pelabuhan Teluk Nibung sebagai andalan keluar masuk barang (ekspor – impor) dan penumpang.
- d. Dapat dilalui dengan sarana transportasi baik darat maupun sungai.
- e. Fasilitas andalan yang tersedia seperti : jaringan air minum, listrik, transportasi darat dan kereta api, sarana pendidikan, sarana kesehatan, serta sarana lainnya.
- f. Mempunyai sumber daya alam yang dapat dikembangkan di sektor perikanan khususnya perikanan tangkap dan budidaya;
- g. Sumber daya manusia yang dapat dikembangkan sebagai modal pembangunan kedepan.
- h. Sumber daya alam yang tersedia seperti : kandungan mineral, galian C Sungai Silau dan Sungai Asahan. Sumber daya alam yang sangat besar dari sungai Asahan adalah pasir sungai. Pasir sungai Asahan ini merupakan bahan alami yang terbentuk dari proses pengikisan tanah disepanjang sungai mulai dari hulu hingga hilir. Pasir sungai Asahan mengandung 70-80%

silica. Dengan kandungan silica yang besar ini pasir sungai Asahan mempunyai karakteristik yang khas dan sangat baik untuk:

- Bahan baku industri kaca
- Bahan baku penyaring dan penjernih air
- Bahan baku pencampur dalam industri keramik dan porselin
- Bahan baku untuk konstruksi
- Sumber : Bagian Pemerintahan

B. Visi dan Misi

Visi

“Mewujudkan Kota Tanjungbalai yang berprestasi, religius, sejahtera, indah dan harmonis”

Misi

1. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik untuk Mencapai Prestasi di Berbagai Bidang Pembangunan dengan Mengedepankan Pelayanan Prima yang Berorientasi pada Pelayanan Publik.
2. Membina dan Memajukan Kehidupan Ummat Beragama Menuju Masyarakat yang Religius dan Berakhlak Mulia.
3. Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan dalam Rangka Mendorong Kemandirian menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera.
4. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia melalui Pembangunan Pendidikan yang Berkualitas Berbasis IPTEK dan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.
5. Mewujudkan Penataan Kota yang Bersih, Indah dan Rapi dengan Dukungan Infrastruktur yang Baik.
6. Membina Kehidupan Sosial Politik Masyarakat dalam Rangka Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Demokratis dan Harmonis dalam Keaneka Ragaman Suku dan Agama yang Berpegang pada Adat dan Budaya.
7. Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat dan Tatanan Khidupan Sosial Masyarakat melalui Peran Keluarga.

Kepala Daerah saat ini dijabat oleh Waris Tholib sebagai Wali Kota untuk periode Tahun 2021 s.d. 2024.

PROFIL KABUPATEN BATU BARA

Profil dan Kebijakan Teknis

A. Data Umum

1. Sejarah Kabupaten Batu Bara

Lambang Kabupaten Batu Bara sebagai berikut:



Sejarah terbentuknya Kabupaten Batu Bara diawali dengan keinginan masyarakat di wilayah eks Kewedanan Batu Bara untuk membentuk sebuah kabupaten Otonom baru. Upaya ini telah dimulai sejak tahun 1957 namun mengalami kendala ketika terjadi dinamika politik nasional hingga akhir tahun 1969. Setelah itu, masyarakat Batu Bara kembali mengaspresiasi supaya 5 kecamatan yang ada di Batu Bara, menjadi sebuah kabupaten baru. Sehingga dibentuk Panitia Pembentukan Otonom Batu Bara (PPOB) yang diprakarsai oleh seorang tokoh masyarakat yang pernah menjadi anggota DPRD Asahan. PPOB ini berkedudukan di jalan Merdeka kecamatan Tanjung Tiram. Namun proses pembentukan kabupaten baru kembali tertunda, karena Undang-undang Otonom belum dikeluarkan oleh Pemerintah.

Upaya membentuk kabupaten baru kembali diupayakan pada 1999, masyarakat Batu Bara menilai bahwa terbentuknya Kabupaten Batu Bara adalah hasil perjuangan masyarakat. Tetapi keinginan masyarakat Batu Bara ini ditolak oleh Pemerintah Kabupaten Asahan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) yang bertentangan dengan aspirasi masyarakat dan peraturan Pemerintah yang lebih tinggi. Isi PROPEDA tersebut tertuang pada angka 2 (dua) pada kegiatan pokok program pembangunan daerah menyebutkan bahwa adanya “Upaya rasional pola berfikir masyarakat melalui pendekatan persuasive”, khususnya terhadap provokasi memisahkan diri dari wilayah Kabupaten Asahan, serta sosialisasi kepada masyarakat bahwa sampai pada tahun 2005 tidak akan pernah ada yaitu apa yang disebut dengan pemekaran.

Meskipun tidak mendapat persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Asahan, masyarakat Batu Bara yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Menuju Kabupaten Batu Bara (LSM-GEMKARA) menginventarisir Sumber Daya Manusia yang berkompeten dan berasal dari putra asli daerah Batu Bara. Atas kesepakatan bersama, OK Arya Zulkarnaen ditunjuk sebagai pemimpin organisasi sekaligus pelaksana perjuangan pemekaran. Adanya pendekatan persuasif kepada pemerintah provinsi Sumatera Utara dan pemerintah pusat, dengan prinsip “Surut Berpantang Batu Bara Harus Menjadi Kabupaten”, akhirnya pemebentukan kabupaten Batu Bara disetujui. Dalam data

Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa Kabupaten Batu Bata dibentuk pada 2 Januari 2007 atas dasar hukum UU Nomor 5 Tahun 2007, dengan ibu kota Lima Puluh.

2. Kondisi Geografi Kabupaten Batu Bara

Kabupaten Batu Bara merupakan pemekaran dari Kabupaten Asahan di mana tujuh kecamatan di Kabupaten Asahan dikurangi dan dipindahkan wilayahnya menjadi wilayah Kabupaten Batu Bara. Kabupaten Batu Bara merupakan satu dari 25 Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten yang berjarak sekitar 175 km dari Kota Medan terletak pada 2°03'00" – 3°26'00" Lintang Utara dan 99°01' – 100°00' Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Batu Bara 909,46 km². Adapun batas wilayah Kabupaten Batu Bara sebagai berikut.

- Sebelah Utara : Bandar Khalipah (Kabupaten Serdang Bedagai) dan Selat Malaka
- Sebelah Selatan : Meranti (Kabupaten Asahan) dan Ujung Padang (Kabupaten Simalungun)
- Sebelah timur : Meranti (Kabupaten Asahan) dan Selat Malaka
- Sebelah barat : Bosar Maligas, Bandar, Bandar Masilam, Dolok Batunanggar (Kabupaten Simalungun) dan Tebingtinggi (Kabupaten Serdang Bedagai)



Kabupaten Batu Bara terletak di dataran rendah Pulau Sumatera dengan ketinggian 1-32,9 m di atas permukaan laut. Selama tahun 2021 Kabupaten Batu Bara mengalami hari hujan sebanyak 154 hari dengan curah hujan berkisar antara 8-312 mm³. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Agustus dengan curah hujan 312 mm³. Hari hujan terbanyak bulan November yaitu selama 22 hari.

Penduduk Kabupaten Batu Bara berjumlah 409.091 jiwa (2022). Berdasarkan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Batu Bara, terdapat 12 kecamatan dan 10 kelurahan dengan luas wilayah 904,96 km² dengan

rincian sebagai berikut.

- a. Kecamatan Air Putih:
 - 1) Kelurahan Indrapura.
 - 2) Kelurahan Indrasakti.
- b. Kecamatan Datuk Lima.
- c. Kecamatan Datuk Tanah Datar.
- d. Kecamatan Laut Tador.
- e. Kecamatan Limapuluh:
 - 1) Kelurahan Lima Puluh Kota.
- f. Kecamatan Lima Puluh Pesisir.
- g. Kecamatan Medang Deras:
 - 1) Kelurahan Pagurawan.
 - 2) Kelurahan Pangkalan Dodek.
 - 3) Kelurahan Pangkalan Dodek Baru.
- h. Kecamatan Nibung Hangus.
- i. Kecamatan Sei Balai.
- j. Kecamatan Sei Suka:
 - 1) Kelurahan Perkebunan Sipare-pare.
- k. Kecamatan Talawi:
 - 1) Kelurahan Labuhan Ruku.
- l. Kecamatan Tanjung Tiram:
 - 1) Kelurahan Bagan Arya.
 - 2) Kelurahan Tanjung Tiram Kota.

Kecamatan Nibung Hangus merupakan kecamatan terluas dengan luas 129,87 km² atau 14,35% dari luas Kabupaten Batu Bara.

3. Potensi Wilayah Kabupaten Batu Bara

Komoditi tanaman bahan makanan yang dihasilkan di Kabupaten Batu Bara meliputi padi sawah dan ubi kayu yang relatif banyak, lainnya adalah jagung, ubi jalar, kacang hijau, kacang tanah, dan kedelai. Sementara itu, komoditi sayur-sayuran yang dipanen di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2021 antara lain bawang merah, bayam, cabe keriting, cabe rawit, jamur, kacang panjang, kangkung, ketimun, melon, petsai/sawi, semangka, terung. Produksi padi dan beras berasal dari 11 Kecamatan di Kabupaten Batu Bara, produksi terbanyak dari Kecamatan Air Putih dan Kecamatan Medang Deras. Sebagian besar (18,28%) lahan di Kabupaten Batu Bara digunakan sebagai lahan pertanian untuk persawahan. Populasi ternak pada tahun 2021 terdiri dari sapi perah, sapi potong, kerbau, kuda, kambing, domba, dan babi. Sementara itu, populasi ayam dan itik mengalami peningkatan di tahun 2021 dibandingkan tahun 2020.

Berdasarkan perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (jika faktor inflasi dihilangkan), kinerja

ekonomi riil Kabupaten Batu Bara tahun 2021 sebesar Rp. 24,486 triliun atau lebih tinggi dari tahun 2020 sebesar Rp. 23,923 triliun. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batu Bara mencapai 2,35% dipengaruhi oleh perbaikan ekonomi setelah pemberian vaksin covid-19 tahun 2020 dan 2021.

Kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Batu Bara adalah Industri Pengolahan yaitu sebesar 45,72%, sedangkan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 20,25%. Sektor lain yang memberikan kontribusi cukup besar lainnya yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran, reperasi mobil dan sepeda motor yakni sebesar 17,89%.

B. Visi dan Misi

Visi

“Menjadikan Masyarakat Kabupaten Batu Bara Masyarakat Industri yang Sejahtera, Mandiri, dan Berbudaya”

Misi

1. Meningkatkan Pelayanan Aparatur Pemerintah atas Pelayanan Publik dan Investasi.
2. Meningkatkan Jumlah dan Kualitas Infrastruktur dan Sarana Prasarana Pendukung Pertumbuhan Industri dan Perekonomian Masyarakat.
3. Mewujudkan Masyarakat yang Produktif, Inovatif, dan Berbudaya.
4. Mewujudkan Industri Berbasis Sumber Daya Unggulan Kabupaten Batu Bara.
5. Meningkatkan Pemasaran Hasil Industri, Pertanian, dan Perikanan secara Meluas Memanfaatkan Teknologi Berkembang.
6. Meningkatkan Kolaborasi Industri, Lembaga Pendidikan, dan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
7. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Spiritual Masyarakat.
8. Meningkatkan Peran serta Seluruh Elemen Masyarakat dalam Pembangunan Kabupaten Batu Bara.

Kabupaten Batu Bara dipimpin oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta dibantu Sekretaris Daerah. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batu Bara saat ini dijabat oleh Ir. H. Zahir dan Oky Iqbal Firma dengan masa jabatan periode 2018 s.d. 2023 serta dibantu Sekretaris Daerah Sakti Alam Siregar.

PROFIL KABUPATEN DAIRI

Profil dan Kebijakan Teknis

A. Data Umum

1. Sejarah Kabupaten Dairi

Lambang Kabupaten Dairi sebagai berikut:



Pemerintahan di Dairi telah ada jauh sebelum kedatangan penjajahan Belanda. Walaupun saat itu belum dikenal sebutan Wilayah/Daerah Otonomi, tetapi kehadiran sebuah pemerintahan pada zaman tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dengan adanya pengakuan terhadap Raja-raja Adat. Pemerintahan masa itu dikendalikan oleh Raja Ekuten/Takal Aur/Kampung/Suak dan Pertaki sebagai raja-raja adat merangkap sebagai Kepala Pemerintahan.

Adapun struktur Pemerintahan masa itu diuraikan sebagai berikut:

- 1) Raja Ekuten, sebagai pemimpin satu wilayah (suak) atau yang terdiri dari beberapa suku/kuta/kampung Raja Ekuten disebut juga Takal Aur, yang merupakan Kepala Negeri.
- 2) Pertaki, sebagai pemimpin satu Kampung, setingkat dibawah Raja Ekuten.
- 3) Sulang Silima, sebagai pembantu pertaki pada setiap kuta (Kampung), yang terdiri dari a) Perisang-isang; b) Perekur-ekur; c) Pertulan tengah; d) Perpunca ndiade; e) Perbetekken.
- 4) Menurut berbagai literatur sejarah bahwa wilayah Dairi sangat luas dan pernah jaya dimasa lalu. Sesuai dengan Struktur Organisasi Pemerintahan tersebut di atas, maka wilayah Dairi dibagi atas 5 (lima) wilayah (suak/aur) yaitu:
 - a) Suak/Aur SIMSIM, meliputi wilayah : Salak, Kerajaan, Siempat Rube, Sitellu Tali Urang Jehe, Sitellu Tali Urang Julu dan Manik.
 - b) Suak/Aur PEGAGAN dan Kampung Karo, meliputi wilayah : Silalahi, Paropo, Tongging, Pegagan Jehe dan Tanah Pinem.
 - c) Suak/Aur KEPPAS, meliputi wilayah : Sitellu Nempu, Silima Pungga-Pungga, Lae Luhung dan Parbuluan.
 - d) Suak/Aur BOANG, meliputi wilayah : Simpang Kanan, Simpang Kiri, Lipat Kajang, Belenggen, Gelombang Runding dan Singkil (saat ini Wilayah Aceh).
 - e) Suak/Aur KLASSEN, meliputi wilayah : Siennem koden, Manduamas dan Barus.

Pada masa perjuangan melawan penjajahan Belanda, sejarah mencatat bahwa Raja Sisingamangaraja XII semasa hidupnya cukup lama berjuang di Daerah Dairi, karena wilayah Bakkara dan wilayah Toba pada umumnya telah dibakar habis dan dikuasai oleh Belanda. Kondisi tersebut tidak memungkinkan lagi untuk bertahan dan meneruskan perjuangannya, sehingga beliau hijrah ke Dairi, beliau wafat pada tanggal 17 Juni 1907 di Ambalo Siennem Koden yang

ditembak atas perintah komandan Batalion Marsuse Belanda, Kapten Cristofel.

Pada masa penjajahan Belanda yang terkenal dengan politik *Devide Et Impera*, maka nilai- nilai, pola dan struktur Pemerintahan di Dairi mengalami perubahan yang sangat cepat dengan mengacu pada system dan pembagian wilayah Kerajaan Belanda, maka Dairi saat ini ditetapkan pada suatu Onder Afdeling yang dipimpin seorang Cotroleur berkebangsaan Belanda dan dibantu oleh seorang Demang dari penduduk Pribumi/Bumi Putra. Kedua pejabat tersebut dinamai Controleur Der Dairi Landen dan Demang Der Dairi Landen.

Pemerintah Dairi landen adalah sebagian dari wilayah Pemerintahan Afdeling Batak Landen yang dipimpin Asisten Residen Batak Landen yang berpusat di Tarutung. Sistem ini berlaku sejak dimulainya perjuangan pahlawan Raja Sisingamangaraja XII dan berlaku juga sampai penyerahan Belanda atas penduduk Nippon (Jepang) pada tahun 1942.

Selama penjajahan Belanda inilah Daerah Dairi mengalami sangat banyak penyusutan wilayah, karena politik penjajahan kolonial Belanda yang membatasi serta menutup hubungan dengan wilayah-wilayah Dairi lainnya yaitu :

- 1) Tongging, menjadi wilayah Tanah Karo;
- 2) Manduamas dan Barus, menjadi wilayah Tapanuli Tengah;
- 3) Sienem Koden (Parlilitan), menjadi wilayah Tapanuli Utara;
- 4) Simpang Kanan, Simpang Kiri, Lipat Kajang, Gelombang, Runding dan Singkil menjadi wilayah Aceh.

Setelah kolonial Belanda menguasai Daerah Dairi, maka untuk kelancaran Pemerintahan Hindia Belanda membagi Onder Afdeling Dairi menjadi 3 (tiga) Onder Districk, yaitu:

- 1) Onder Districk Van Pakpak, meliputi 7 kenegerian yakni :
 - a) Kenegerian Sitellu Nempu;
 - b) Kenegerian Siempat Nempu Hulu;
 - c) Kenegerian Siempat Nempu;
 - d) Kenegerian Silima Pungga-Pungga;
 - e) Kenegerian Pegagan Hulu;
 - f) Kenegerian Parbuluan;
 - g) Kenegerian Silalahi Paropo.
- 2) Onder Districk Van Simsim, meliputi 6 (enam) Kenegerian yakni :
 - a) Kenegerian Kerajaan;
 - b) Kenegerian Siempat Rube;
 - c) Kenegerian Mahala Majanggut;
 - d) Kenegerian Sitellu Tali Urang Jehe;
 - e) Kenegerian Salak;
 - f) Kenegerian Ulu Merah dan Salak Penanggalan.
- 3) Onder Districk Van Karo Kampung, meliputi 5 (lima) Kenegerian, yakni :

- a) Kenegerian Lingga (Tigalingga);
- b) Kenegerian Tanah Pinem;
- c) Kenegerian Pegagan Hilir;
- d) Kenegerian Juhar Kedupan Manik;
- e) Kenegerian Lau Juhar.

Setelah jatuhnya Hindia Belanda atas pendudukan Dai Nippon, maka pemerintahan Belanda digantikan oleh Militerisme Jepang. Secara umum pemerintahan Bala Tentara Jepang membagi wilayah Indonesia dalam 3 bagian yaitu :

- 1) Daerah yang meliputi Jawa, berada di bawah kekuasaan Angkatan Darat yang berkedudukan di Jakarta;
- 2) Daerah yang meliputi pulau Sumatera, berada di bawah kekuasaan Angkatan Darat yang berkedudukan di Tebing Tinggi;
- 3) Daerah - daerah selebihnya berada di bawah kekuasaan Angkatan Laut yang berkedudukan di Makassar.

Pada masa itu pemerintahan Jepang di Dairi memerintah cukup kejam dengan menerapkan kerja paksa membuka jalan Sidikalang sepanjang lebih kurang 65 km, membayar upeti dan para pemuda dipaksa masuk Heiho dan Giugun untuk bertempur melawan Militer Sekutu.

Pada masa Pemerintahan Jepang pada dasarnya tidak terdapat perubahan prinsipil dalam susunan Pemerintahan di Dairi. Karena tidak berubah susunan/struktur Pemerintahan di Dairi, tetapi mengganti jabatan lama, antara lain yaitu :

- Demang diganti menjadi GUNTYO
- Asisten Demang diganti menjadi HUKU GUNTY
- Kepala Negeri diganti menjadi BUN DANYTO
- Kepala Kampung diganti menjadi KUNTYO

Hal yang menarik dalam pengaturan tingkat Pemerintahan pada masa penjajahan Jepang adalah wilayah/Daerah Propinsi dihapus dan wilayah Keresidenan tingkatan yang tertinggi. Nama wilayah juga diganti dengan bahasa Jepang yaitu:

- Keresidenan, diganti menjadi Syuu dan residen disebut Syuu-Co
- Kabupaten, diganti menjadi Ken dan Bupati disebut Ken-Co
- Kewedanaan, diganti menjadi Gun dan Wedana disebut Gun-Co
- Kecamatan, diganti menjadi Son dan Camat disebut Son-Co

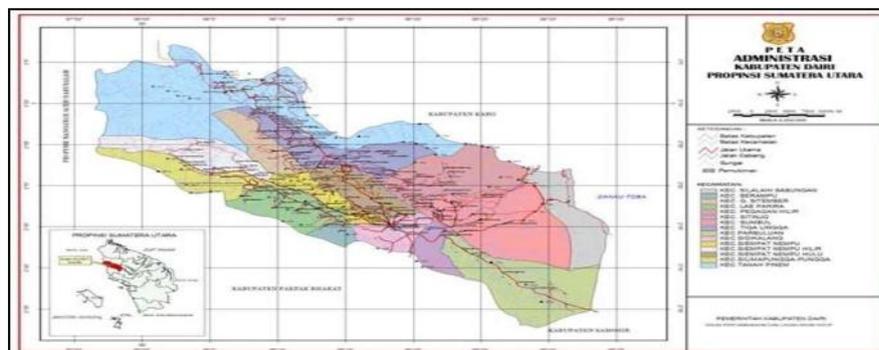
Setelah kemerdekaan diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945, maka pasal 18 UUD 1945 menghendaki dibentuknya Undang-Undang yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah, sehingga sebelum Undang-Undang tersebut dibentuk oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam rapatnya tanggal 19 Agustus 1945 menetapkan Daerah Republik Indonesia untuk sementara dibagi atas 8 (delapan) Propinsi yang masing-masing dikepalai oleh seorang Gubernur. Daerah Propinsi dibagi dalam Keresidenan yang dikepalai seorang Residen. Gubernur dan Residen dibantu oleh Komite Nasional Daerah.

Setelah proklamasi, Kabupaten Dairi beberapa kali mengalami perkembangan wilayah kecamatan, hingga Tanggal 31 Agustus 2005 melalui Sidang Paripurna DPRD Kab. Dairi ditetapkan pada Perda Kab. Dairi No.6 tahun 2005 tentang Pembentukan Kel. Panji Dabutar hasil Pemekaran dari Kel. Batang Beruh, dan Perda No. 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kec. Sitinjo yang merupakan hasil dari Pemekaran dari Kec. Sidikalang. Kecamatan Sitinjo diresmikan pada tanggal 14 September 2005 oleh Bupati Dairi (DR. M.P. Tumanggor). Sampai bulan Desember 2009, wilayah Kabupaten Dairi terbagi atas : 15 Kecamatan, 8 kelurahan dan 161 desa.

2. Kondisi Geografis dan Demografis Kabupaten Dairi

Daerah Kabupaten Dairi mempunyai Luas 1.928 km² (2022) yaitu sekitar 2,68 % dari luas Propinsi Sumatera Utara dimana Kabupaten Dairi terletak sebelah Barat Laut Propinsi Sumatera Utara. Penduduk Kabupaten Dairi pada tahun 2022 berjumlah 322.122 jiwa. Kabupaten Dairi yang terletak disebelah barat laut propinsi Sumatera Utara yang berbatasan dengan:

- Sebelah utara dengan Kabupaten Aceh Tenggara (Propinsi NAD) dan Kabupaten Tanah Karo.
- Sebelah timur dengan kabupaten Toba Samosir.
- Sebelah selatan dengan Kabupaten Pakpak Bharat.
- Sebelah barat dengan Kabupaten Aceh Selatan (Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam).



Kabupaten Dairi sebagian besar terdiri dari dataran tinggi dan berbukit-bukit yang terletak antara 98000' – 98030' dan 2015'-3000'LU. Sebagian besar tanahnya didapati gunung- gunung dan bukit-bukit dengan kemiringan bervariasi sehingga terjadi iklim hujan tropis. Kota Sidikalang adalah ibukota Kabupaten Dairi berada pada ketinggian 1.066 meter diatas permukaan laut.

Pada umumnya Kabupaten Dairi berada pada ketinggian rata-rata 700 s/d 1.250 m di atas permukaan laut. Sedangkan Kecamatan Tigalingga, Kec. Siempat Nempu dan Kecamatan Silima Pungga-Pungga terletak pada ketinggian antara 400 – 1.360 m diatas permukaan laut. Kecamatan Sumbul, Sidikalang , Kerajaan dan Kec.Tanah Pinem berada pada ketinggian 700- 1.600 meter diatas permukaan laut.

Kabupaten Dairi terdiri atas 15 kecamatan yaitu:

- 1) Kecamatan Sidikalang, ibukotanya Sidikalang;
- 2) Kecamatan Sumbul, ibukotanya Sumbul;
- 3) Kecamatan Silima Pungga-Pungga, ibukotanya Parongil;
- 4) Kecamatan Siempat Nempu, ibukotanya Buntu Raja;
- 5) Kecamatan Tigalingga, ibukotanya Tigalingga;
- 6) Kecamatan Tanah Pinem, ibukotanya Kuta Buluh;
- 7) Kecamatan Parbuluan, ibukotanya Sigalingging;
- 8) Kecamatan Pegagan Hilir, ibukotanya Tigabaru;
- 9) Kecamatan Siempat Nempu Hulu, ibukotanya Silumboyah;
- 10) Kecamatan Siempat Nempu Hilir, ibukotanya Sopo Butar;
- 11) Kecamatan Lae Parira, ibukotanya Lae Parira;
- 12) Kecamatan Gunung Sitember, ibukotanya Gunung Sitember;
- 13) Kecamatan Berampu, ibukotanya Berampu;
- 14) Kecamatan Silahisabungan, ibukotanya Silalahi;
- 15) Kecamatan Sitinjo, ibukotanya Sitinjo.

3. Potensi Wilayah Kabupaten Dairi

a. Pertanian

Kabupaten Dairi merupakan salah satu penghasil padi di provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu produktifitas tanaman pangan khususnya padi perlu terus ditingkatkan. Produksi padi pada tahun 2014 sebesar 91 818 ton mengalami peningkatan sebesar 26,43 persen atau menjadi 116 086 ton, sementara luas panen untuk tahun 2014 sebesar 18021 ha dan untuk tahun 2015 seluas 22 323 ha. Selanjutnya peningkatan produksi ini akibat dari semakin baiknya pemanfaatan lahan, pemakaian pupuk, pengolahan dan pembasmian serangga hama. Adapun luas lahan sawah berpengairan dan tadah hujan di Kabupaten Dairi tahun 2015 adalah 10 030 ha, terdiri dari lahan sawah berpengairan seluas 9.997 ha dan lahan sawah tadah hujan seluas 53 ha.

Sementara itu, komoditi tanam palawija yang ada di Kabupaten Dairi adalah jagung dengan produksi pada tahun 2015 sebanyak 259 033 ton, kacang tanah sebanyak 998 ton. Bila dibandingkan dengan tahun 2014 khususnya tanaman komoditi jagung tersebut mengalami penurunan produksi, pada tahun 2014 sebesar 121 647 ton menjadi 259 033 ton yang

disebabkan oleh cuaca hingga tanaman ini banyak mengalami gangguan atau rusak.

b. Kesehatan

Ketersediaan bidan yang cukup di seluruh desa untuk meningkatkan cakupan pertolongan kelahiran/persalinan yang baik sebagai salah satu upaya untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB . Disamping itu, kehadiran bidan ini juga diharapkan akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.

Pada Tahun 2015, jumlah bidan yang bertugas di Kabupaten Dairi adalah 400 orang, terdiri dari 234 orang PNS dan 166 orang berstatus PTT yang tersebar diseluruh kecamatan dengan jumlah yang bervariasi. Bila dibandingkan dengan jumlah desa/kelurahan yang ada, jumlah ini tergolong cukup karena setiap desa/kelurahan yang ada, jumlah ini tergolong cukup karena setiap desa/kelurahan dapat diisi rata-rata 1 hingga 2 orang bidan desa. Kecamatan Sidikalang memiliki jumlah bidan terbanyak rata-rata 10 sampai 11 orang per desa/kelurahan sedangkan Berampu, Sitinjo dan Tigalingga sementara 11 kecamatan yang lain adalah antara 1 hingga 2 orang per desa/kelurahan.

Persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter dan bidan dapat dianggap lebih baik dari pada yang dilakukan oleh dukun ataupun family dan lainnya. Pertolongan kelahiran untuk ibu bersalin yang ditolong oleh bidan sebanyak 75.59 %.

c. Perekonomian

Kabupaten Dairi merupakan salah satu penghasil padi di provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu produktifitas tanaman pangan khususnya padi perlu terus ditingkatkan.

Produksi padi pada tahun 2014 sebesar 91 818 ton mengalami peningkatan sebesar 26,43 persen atau menjadi 116 086 ton, sementara luas panen untuk tahun 2014 sebesar 18021 ha dan untuk tahun 2015 seluas 22 323 ha. Selanjutnya peningkatan produksi ini akibat dari semakin baiknya pemanfaatan lahan, pemakaian pupuk, pengolahan dan pembasmian serangga hama.

Adapun luas lahan sawah berpengairan dan tadah hujan di Kabupaten Dairi tahun 2015 adalah 10 030 ha, terdiri dari lahan sawah berpengairan seluas 9.997 ha dan lahan sawah tadah hujan seluas 53 ha.

Sementara itu, komoditi tanam palawija yang ada di Kabupaten Dairi adalah jagung dengan produksi pada tahun 2015 sebanyak 259 033 ton, kacang tanah sebanyak 998 ton. Bila dibandingkan dengan tahun 2014 khususnya tanaman komoditi jagung tersebut mengalami penurunan produksi, pada tahun 2014 sebesar 121 647 ton menjadi 259 033 ton yang disebabkan oleh cuaca hingga tanaman ini banyak mengalami gangguan atau rusak.

B. Visi dan Misi

Visi

“Mewujudkan Dairi Unggul yang Mensejahterahkan Masyarakat dalam Harmoni Keberagaman.”

Misi

1. Meningkatkan Kesejahteraan Petani dengan Pengolahan Sistem Pertanian yang Cerdas dan Modern.
2. Membangun Karakter Masyarakat Dairi yang Cerdas, Kreatif dan Inovasi Berbasis Lokal.
3. Mempersiapkan dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Terampil, Siap Pakai, Produktif dan Kreatif.
4. Merealisasikan Komitmen Tinggi Prinsip Penyelenggaraan Good Governance.
5. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Mudah Dengan Menjamin Kualitas Pembangunan Infrastruktur.

Kabupaten Dairi dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati dan dibantu Sekretaris Daerah yang merupakan unsur staf. Kabupaten Dairi memiliki 40 Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari: 6 badan, 15 Dinas, 1 Inspektorat, 15 Kecamatan, 1 Satuan, dan 2 sekretariat. Bupati dan Wakil Bupati Dairi yang menjabat saat ini adalah Eddy Keleng Ate Berutu dan Jimmy Andrea Lukita.

PROFIL KABUPATEN DELI SERDANG

Profil dan Kebijakan Teknis

A. Data Umum

1. Sejarah Kabupaten Deli Serdang

Lambang Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut:



Sebelum Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 Kabupaten Deli Serdang yang dikenal sekarang ini dua pemerintahan yang berbentuk kerajaan (Kesultanan) yaitu Kesultanan Deli yang berpusat di Kota Medan dan Kesultanan Serdang berpusat di Perbaungan.

Kabupaten Deli dan Serdang ditetapkan menjadi Daerah Otonom sesuai dengan Undang- Undang Nomor 22 tahun 1984 tentang Undang-Undang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1965. Hari jadi Kabupaten Deli Serdang ditetapkan tanggal 1 Juli 1946.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1984, ibukota Kabupaten Deli Serdang dipindahkan dari Kota Medan ke Lubuk Pakam dengan lokasi perkantoran di Tanjung Garbus yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara tanggal 23 Desember 1986.

Sesuai dengan dikeluarkan UU Nomor 36 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003, Kabupaten Deli Serdang telah dimekarkan menjadi dua wilayah yakni Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai, secara administratif Pemerintah Kabupaten Deli Serdang kini terdiri atas 22 Kecamatan yang di dalamnya terdapat 14 Kelurahan dan 380 Desa.

Tercatat dalam sejarah Bupati pertama Kabupaten Deli Serdang Moenar S.Hamidjojo, dilanjutkan Sampoerna Kolopaking, setelah itu Wan Oemaroeddin Barus (1 April 1951-1 April 1958) Abdullah Eteng (1 April 1958 – 11 Januari 1963) Abdul Kadir Kendal Keliat (11 Januari 1963 – 11 November 1970) H. Baharoeddin Siregar (11 November 1970 – 17 April 1978) Abdul Muis Lubis (17 April 1978 – 3 Maret 1979) H. Tenteng Ginting (3 Maret 1979 – 3 Maret 1984) H. Wasiman (3 Maret 1984 – 3 Maret 1989) H. Ruslan Mansur (3 Maret 1989 – 1994) H. Maymaran NS (3 Maret 1994 – 3 Maret 1999) Drs. H. Abdul Hafid, MBA (3 Maret 1999 – 7 April 2004), tahun 2004 (Periode 2004 – 2009 dan Periode 2009-2014) di jabat oleh Drs. H. Amri Tambunan. Seiring dengan gerak roda pembangunan yang terus melaju diciptakan motto bagi daerah Deli Serdang yaitu : “BHINNEKA PERKASA JAYA” yang tercantum di pita lambang Daerah Kabupaten Deli Serdang, dalam pengertian “ Dengan masyarakatnya yang beraneka ragam suku, Agama, ras, dan golongan bersatu dalam ke Bhinnekaan secara kekeluargaan dan gotong royong membangun semangat kebersamaan, menggali dan mengembangkan potensi sumber daya alam

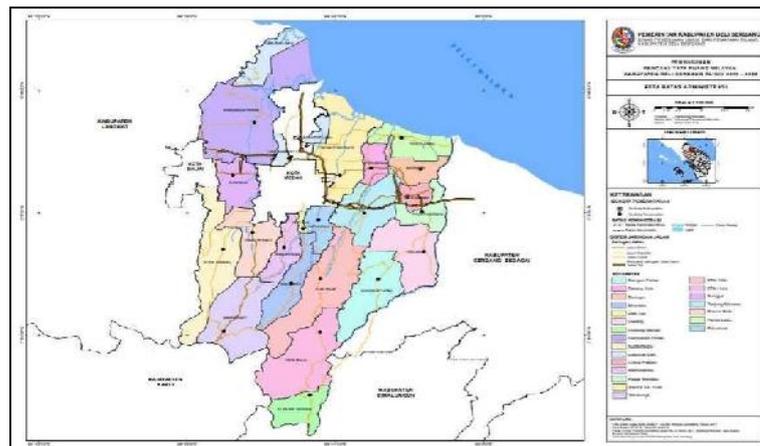
dan sumber daya manusianya sehingga menjadi kekuatan dan keperkasaan untuk mengantarkan masyarakat kepada kesejahteraan, maju, mandiri dan jaya sepanjang masa.

2. Kondisi Geografis dan Demografis Kabupaten Deli Serdang

Kabupaten Deli Serdang secara administratif mengelilingi Ibukota Provinsi Sumatera Utara yaitu Kota Medan. Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Deli Serdang berada pada Kawasan Pantai Timur Sumatera Utara yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Secara geografis Kabupaten Deli Serdang terletak diantara koordinat $2^{\circ}57''$ sampai dengan $3^{\circ}16''$ Lintang Utara, dan $98^{\circ}33''$ sampai dengan $99^{\circ}27''$ Bujur Timur.

Adapun batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Deli Serdang, dapat diuraikan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Selat Malaka.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Langkat, Kota Binjai, dan Kabupaten Karo.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Serdang Bedagai.



Peta Batas Administrasi Kabupaten Deli Serdang

Luas wilayah Kabupaten Deli Serdang sebesar 249.772 Ha (2.497,72 km²) pada tahun 2022, yang terdiri dari 22 Kecamatan, 380 Desa dan 14 Kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Hamparan Perak dengan luas sebesar 23.015 Ha atau 9,21 persen dari luas total luas wilayah Kabupaten Deli Serdang dan untuk kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Deli Tua yaitu 936 Ha atau sebesar 0,37 persen dari luas Kabupaten Deli Serdang.

Kabupaten Deli Serdang terdiri atas atas 22 kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Gunung Meriah
2. Kecamatan STM Hulu;
3. Kecamatan Sibolangit;
4. Kecamatan Kutalimbaru;
5. Kecamatan Pancur Batu;
6. Kecamatan Namorambe;
7. Kecamatan Biru-biru;
12. Kecamatan Sunggal;
13. Kecamatan Hamparan Perak;
14. Kecamatan Labuhan Deli;
15. Kecamatan Percut Sei Tuan
16. Kecamatan Batang Kuis;
17. Kecamatan Pantai Labu;
18. Kecamatan Beringin;

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 8. Kecamatan STM Hilir; | 19. Kecamatan Lubuk Pakam; |
| 9. Kecamatan Bangun Purba; | 20. Kecamatan Pagar Merbau; |
| 10. Kecamatan Galang; | 21. Kecamatan Patumbak; |
| 11. Kecamatan Tanjung Morawa; | 22. Kecamatan Deli Tua. |

Populasi penduduk di Kabupaten Deli Serdang terdiri dari berbagai jenis etnis dan suku bangsa yang tersebar di 22 Kecamatan. Berdasarkan data statistik daerah jumlah penduduk Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2019 mengalami penambahan penduduk sebesar 40.084 jiwa menjadi sebesar 2.195.709 jiwa dimana pada tahun 2018 jumlah penduduk Kabupaten Deli Serdang adalah sebesar 2.155.625 jiwa, sedangkan untuk tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2019 adalah sebesar 879 jiwa per km², dengan jumlah rumah tangga sebanyak 514.344 kepala keluarga yang rata-rata dihuni oleh 4 jiwa dalam setiap keluarga. Untuk komposisi penduduk pada tahun 2018 berdasarkan jenis kelamin laki-laki berjumlah 1.084.679 jiwa dan jenis kelamin perempuan berjumlah 1.070.946 jiwa. Pada tahun 2022, penduduk Kabupaten Deli Serdang berjumlah 1.941.374 jiwa.

Komposisi penduduk berdasarkan etnis di Deli Serdang diisi oleh beberapa etnis yang terbesar adalah etnis Melayu, Karo, Simalungun, Jawa, dan Padang. Mayoritas agama yang dianut adalah agama Islam. selain itu terdapat juga Kristen (protestan dan katolik), Budha, Hindu, dan Konghucu. Empat lapangan usaha terbesar dimana sebagian besar masyarakat Deli Serdang bekerja yaitu industri pengolahan, perdagangan, pertanian/kehutanan/perikanan, dan konstruksi. Terdapat banyak usaha industri pengolahan diantaranya terletak pada Kecamatan Tanjung Morawa.

3. Potensi Wilayah Kabupaten Deli Serdang

Kabupaten Deli Serdang tergolong sebagai salah satu kawasan industri di Sumatera Utara. Terdapat dua kawasan industri yang berada di wilayah Kabupaten Deli Serdang yaitu Medanstar Industrial Estate seluas 105,00 Ha di Kecamatan Tanjung Morawa yang dikelola oleh PT Tamoratama Prakarsa dan Kawasan Industri Medan seluas 960,00 Ha di Kecamatan Percut Sei Tuan yang dikelola oleh PT Kawasan Industri Medan (Persero). Selain kawasan industri, wilayah kabupaten Deli Serdang terdiri dari daerah pantai, dataran rendah dan dataran tinggi pegunungan dengan luas ± 2.497.72 Ha terdiri dari 22 kecamatan, 380 desa dan 14 kelurahan.

Dataran pantai terdiri dari 4 kecamatan (Hampan Perak, Labuhan Deli, Percut Sei Tuan, dan Pantai Labu). Jumlah Desa sebanyak 64 Desa/Kelurahan. Potensi Utama adalah: Pertanian Pangan, Perkebunan Rakyat, Perkebunan Besar, Perikanan Laut, Pertambakan, Peternakan Unggas dan Pariwisata. Dataran Rendah terdiri dari 11 kecamatan (Sunggal, Pancur Batu, Namorambe, Deli Tua, Batang Kuis, Tanjung Morawa, Patumbak, Lubuk Pakam, Beringin, Pagar Merbau, dan Galang) dengan jumlah desa sebanyak 197 desa/kelurahan. Potensi Utama adalah: Pertanian Pangan, Perkebunan Besar, Perkebunan Rakyat, Peternakan, Industri, Perdagangan dan Perikanan Darat. Sedangkan dataran tinggi/pegunungan terdiri dari 7 kecamatan (Kutalimbaru,

Sibolangit, Biru-biru, STM Hilir, STM Hulu, Gunung Meriah, Bangun Purba) dengan jumlah desa sebanyak 133 desa. Potensi Utama adalah: Pertanian Rakyat, Perkebunan dan Peternakan. Secara spesifik, potensi Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut:

1. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Deli Serdang antara lain Sumber Daya kelautan, pertanian, perkebunan, air permukaan (sungai), hutan, pertambangan dan pariwisata.

Di Kabupaten Deli Serdang terdapat 5 (lima) sungai besar, yaitu Sungai Belawan, Deli, Belumai, Percut dan Ular dengan luas DAS 378.841 HA, yang kesemuanya bermuara ke Selat Malaka dengan hulunya berada di Kabupaten Simalungun, dan Karo. Pada umumnya air sungai ini dimanfaatkan untuk mengairi areal persawahan sebagai upaya peningkatan produksi pertanian.

2. Potensi Pertanian

Sektor pertanian yang meliputi sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kehewanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan memberikan kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian daerah Kabupaten Deli Serdang.

3. Potensi Tanaman Pangan dan Holtikultura

Di sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, daerah Kabupaten Deli Serdang hingga saat ini merupakan salah satu lumbung beras dan kontribusi yang tidak sedikit bagi Provinsi Sumatera Utara. Berbagai komoditi terkenal dan menjadi unggulan sebagai penunjang pembangunan pertanian, juga tumbuh dan dikembangkan di daerah ini seperti pisang barangan di kecamatan Biru-biru, STM Hilir dan Namorambe, Belimbing, Jambu ketulak atau jambu biji di Kecamatan Pancur Batu, Durian di Kecamatan Sibolangit, Biru-biru, Namorambe, STM Hilir, jeruk di Kecamatan Gunung Meriah.

B. Visi dan Misi

Visi

“Deli Serdang yang Maju dan Sejahtera dengan Masyarakatnya yang Religius dan Rukun dalam Kebhinekaan.”

Misi

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing yang Mampu Memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Meningkatkan Kesejahteraan dan Kemandirian dalam Memantapkan Struktur Ekonomi yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif.
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana sebagai Pendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berorientasi kepada Kebijakan Tata Ruang serta Berwawasan Lingkungan.
4. Meningkatkan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Berakhlakul

Karimah, Berlandaskan Keimanan Kepada Tuhan yang Maha Esa Serta dapat Memelihara Kerukunan, Ketenteraman dan Ketertiban.

5. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pemerintah untuk Mewujudkan Tata Pemerintah yang Baik, Bersih, Berwibawa, dan Bertanggung Jawab.

Kabupaten Deli Serdang dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati serta dibantu Sekretaris Daerah yang merupakan unsur staf. Kabupaten Deli Serdang memiliki 53 Perangkat Daerah yang terdiri dari: 2 sekretariat, 6 badan, 1 Inspektorat, 1 kantor, 21 Dinas, dan 22 Kecamatan. Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang yang sedang menjabat saat ini adalah Ashari Tambunan dan M. Ali Yusuf Siregar.

PROFIL KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Profil dan Kebijakan Teknis

A. Data Umum

1. Sejarah Kabupaten Aceh Utara

Lambang Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai berikut:



Tapanuli Utara sebagai kabupaten induk dari Humbang Hasundutan terbentuk berdasarkan Undang Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara.

Pada masa pemerintahan penjajahan Belanda, salah satu afdeling di wilayah Keresidenan Tapanuli adalah Afdeling Bataklanden dengan ibukota Tarutung terdiri atas lima onder afdeling. Setelah kemerdekaan tepatnya tahun 1947 Kabupaten Tanah Batak menjadi 4 (empat) kabupaten yaitu :

- a. Kabupaten Tapanuli Utara ibukotanya Tarutung.
- b. Kabupaten Humbang Hasundutan ibukotanya Dolok Sanggul.
- c. Kabupaten Toba Samosir ibukotanya Balige.
- d. Kabupaten Dairi ibukotanya Sidikalang.

Pada Tahun 1950 keempat kabupaten ini dilebur menjadi Kabupaten Tapanuli Utara, seiring dengan terbentuknya Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Kabupaten Nias. Keadaan ini bertahan hingga tahun 1964, karena pada saat itu Tapanuli Utara dimekarkan dengan terpisahnya Dairi menjadi kabupaten berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964, dan selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 terbentuknya Kabupaten Toba Samosir. Kenyataan menunjukkan bahwa kedua daerah tersebut mengalami perkembangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Berdasarkan faktor sejarah dan keinginan untuk semakin cepat pembangunan dengan pelayanan yang semakin dekat kepada masyarakat maka harapan yang terkandung selama ini mengkrystal menjadi usul pembentukan Kabupaten Humbang Hasundutan melalui terbentuknya Panitia Pembentukan Kabupaten Humbang Hasundutan.

Terbitnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, menjadi peluang munculnya wacana perlunya usul pemekaran melalui pembentukan Kabupaten.

Berbekal keinginan untuk mendambakan peningkatan kesejahteraan masyarakat, peluang tersebut dimanfaatkan secara tepat oleh masyarakat di wilayah Humbang Hasundutan melalui Panitia Pembentukan Kabupaten Humbang Hasundutan. Ternyata sejalan dengan tuntutan kemajuan jaman mampu menumbuhkan aspirasi masyarakat untuk mengusulkan Pemekaran Kabupaten Tapanuli Utara, melalui usul pembentukan Kabupaten Humbang Hasundutan.

Aspirasi murni masyarakat tersebut disambut dan difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, serta dukungan DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, yang kemudian memperoleh dukungan Gubernur Sumatera Utara dan DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Berikut ini beberapa langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, dalam menyikapi aspirasi tersebut di atas adalah:

1. Mengikuti perkembangan Deklarasi Pembentukan Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 23 April yang dilaksanakan di Dolok Sanggul.
2. Tanggal 25 Mei 2002 menerima audiensi Panitia Pembentukan Kabupaten Humbang Hasundutan sekaligus menerima berkas pengusulan.
3. Tanggal 26 Mei 2002 Bupati Tapanuli Utara menerbitkan SK Tim Peneliti sekaligus memberi petunjuk dalam memfasilitasi aspirasi masyarakat.
4. Tanggal 27 Mei 2002 berkonsultasi dengan DPRD Kabupaten Tapanuli Utara perihal aspirasi masyarakat tentang usulan pemekaran.
5. Tanggal 3 s/d 5 Juni 2002 menugaskan Tim Peneliti mendampingi DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, turun ke Kecamatan guna mendengar aspirasi dan meneliti usulan dimaksud.
6. Tanggal 5 Juni 2002 menerima berkas pengajuan/penyempurnaan usul pemekaran melalui pembentukan Kabupaten Humbang Hasundutan.
7. Tanggal 5 Juni 2002 melapor ke Bapak Gubernur Sumatera Utara.
8. Tanggal 6 dan 7 Juni 2002 secara langsung turun ke Kecamatan- kecamatan untuk mendengar dan memfasilitasi usul pemekaran Kabupaten, sekaligus mengingatkan masyarakat agar usul pemekaran tidak menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat termasuk para perantau.
9. Tanggal 8 Juni 2002 menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tapanuli Utara dengan hasil penerbitan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 16 Tahun 2002 tentang Persetujuan Pemekaran Kabupaten Tapanuli Utara.

Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, untuk mempercepat proses pemekaran Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu:

- a. Melaksanakan pertemuan dengan segenap komponen masyarakat Tapanuli Utara guna memantapkan pemahaman dan Melaporkan perkembangan terakhir usul pemekaran kepada Gubernur Sumatera Utara dan Bapak Ketua DPRD Sumatera Utara.
- b. Melaksanakan pertemuan dengan segenap komponen masyarakat Tapanuli Utara guna memantapkan pemahaman dan dukungan bagi terwujudnya pemekaran.
- c. Menyampaikan laporan tertulis dan pendapat kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Menteri Dalam Negeri dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

- d. Mengundang Komisi II DPR-RI untuk memantau, mengevaluasi dan berkunjung langsung ke wilayah yang mengusulkan pemekaran.
- e. Konsultasi dengan DPRD Kabupaten Tapanuli Utara dalam rangka dukungan APBD dan pengajuan usul dukungan DPRD Provinsi Sumatera Utara.
- f. Melakukan akurasi data pendukung Pembentukan Kabupaten sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 129 Tahun 2000.
- g. Melakukan Pengkajian dan uji kelayakan pemekaran Kabupaten Tapanuli Utara yakni Kabupaten Humbang Hasundutan dengan memohon kesediaan Bapak Mendagri Cq. Dirjen Otonomi Daerah dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
- h. Perencanaan persiapan sarana/prasarana dan Aparat guna mendukung pemekaran kabupaten.
- i. Menyurati para anak rantau di luar Kabupaten Tapanuli Utara untuk mendukung Usul Pemekaran Kabupaten Tapanuli Utara sesuai fungsi dan tugas masing-masing.

Pemerintah Pusat sangat responsif terhadap aspirasi ini karena dalam waktu relatif singkat Tim Terpadu Depdagri, DPRD dan Komisi II DPR-RI melakukan kunjungan dan pertemuan dengan masyarakat se-wilayah Humbang Hasundutan tanggal 5 September 2002 sebagai lanjutan kunjungan Komisi II DPR-RI tanggal 29 Juli 2002.

Sebagai tindak lanjutnya maka usul pemekaran ini mendapat pembahasan pada Sidang Paripurna DPR-RI yang pada puncaknya melahirkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara.

Pada hari Senin tanggal 28 Juli 2003 Kabupaten Humbang Hasundutan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri RI sekaligus melantik Penjabat Bupati Drs. Manatap Simanungkalit di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan.

Mengawali tugas sebagai Bupati Humbang Hasundutan telah membuat pertemuan dengan para Tokoh Masyarakat, adat dan Tokoh Pendidikan serta Tokoh Agama di Daerah ini antara lain guna membicarakan pembuatan Logo Kabupaten Humbang Hasundutan yang disahkan oleh DPRD.

2. Kondisi Geografis dan Demografis Kabupaten Humbang Hasundutan

Secara astronomis Humbang Hasundutan terletak pada garis $2^{\circ}1'-2^{\circ}28'$ Lintang Utara dan $98^{\circ}10'-98^{\circ}58'$ Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Humbang Hasundutan memiliki batas-batas, sebagai berikut.

- Sebelah Utara : Kabupaten Samosir
- Sebelah Timur : Kabupaten Tapanuli Utara
- Sebelah Selatan : Kabupaten Tapanuli Tengah
- Sebelah Barat : Kabupaten Pakpak Bharat



Peta Kabupaten Humbang Hasundutan

Luas wilayah Humbang Hasundutan adalah sebesar 251.765,93 Ha, dengan luas daratan sebesar 250.271,02 Ha dan 1.494,91 Ha Luas Danau. Penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan berjumlah 202.299 jiwa (2022).

Kabupaten Humbang Hasundutan terdiri atas atas 10 kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Doloksanggul.
2. Kecamatan Pollung.
3. Kecamatan Baktiraja.
4. Kecamatan Lintongnihuta.
5. Kecamatan Paranginan.
6. Kecamatan Sijamapolang.
7. Kecamatan Onan Ganjang.
8. Kecamatan Pakkat.
9. Kecamatan Parlilitan.
10. Kecamatan Tarabintang.

Mayoritas penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan suku Batak Toba, sama halnya dengan kabupaten pemekaran Tapanuli Utara, yaitu Kabupaten Samosir dan Kabupaten Toba. Selain itu, terdapat sebagian kecil yang merupakan suku terdekat Batak toba, yakni Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Angkola, dan Batak Pakpak. Ada pula sebagian kecil suku Aceh, Jawa, dan Minangkabau yang banyak terdapat di Doloksanggul, Tarabintang, dan Pakkat.

Mayoritas penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan memeluk agama Kristen, sebagian besar beragama Islam, sebagian kecil Parmalim dan Buddha. Suku asli di Kabupaten Humbang Hasundutan, yakni Batak Toba umumnya memeluk agama Kristen Protestan dan sebagian memeluk Katolik, Islam, dan kepercayaan asli suku Batak, yaitu Parmalim. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021 mencatat bahwa pemeluk agama Kekristenan sebanyak 96,88%, dengan rincian Protestan 84,00% dan Katolik 12,88%. Sebagian lagi menganut Islam,

yakni 3,07%, kemudian kepercayaan Parmalim 0,04%, dan Buddha 0,01%.

Penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 sebanyak 197.751 jiwa, terdiri atas 98.958 jiwa penduduk laki-laki dan 98.793 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan hasil Sensus Penduduk 2010, penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan mengalami pertumbuhan sebesar 1,38 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin Tahun 2020, penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 100,17. Artinya jumlah penduduk laki-laki hampir sama banyak dengan jumlah penduduk perempuan.

Berdasarkan mata pencaharian Tahun 2016-2020, mayoritas penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan adalah petani. Komoditas pertanian terbesar adalah kopi dengan luas panen 9.246 Ha dan produksi 6.461 ton. Perkebunan kopi terdiri dari 48,45% luas lahan pertanian dan perkebunan. Selain kopi, kabupaten ini juga kaya dengan kemenyan. Dengan luas panen 5.235 Ha menghasilkan

1.278 ton. Luas lahan kemenyan mencapai 23,16%. Komoditas lainnya adalah karet, kulit manis, kemikir, coklat, kelapa sawit, aren, kelapa, tebu, jahe, cengkih, dan andaliman.

3. Potensi Wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan

Potensi pengembangan wilayah dilihat dari unsur-unsur potensi geografis, penduduk, ekonomi wilayah, sektor andalan, sektor pendukung, sektor investasi, keuangan dan pembiayaan serta sektor transportasi didekati dengan kebijakan perwilayahan. Kebijakan perwilayahan didasarkan atas efektivitas pembangunan di seluruh daerah ini dan untuk menyelaraskan pembangunan berbagai sektor andalan yang akan dikembangkan di masing-masing wilayah kecamatan agar pengembangannya tidak tumpang tindih satu dengan yang lain, sehingga potensi yang dimiliki masing-masing kecamatan dapat dikembangkan secara optimal dan terintegrasi. Pengembangan potensi secara spasial dilakukan melalui kebijakan pengembangan kawasan strategis kabupaten yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Humbang Hasundutan, di mana kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan secara kewilayahan diarahkan menjadi 4 (empat) pusat pelayanan, yaitu:

- a. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLP), mencakup kawasan yang berada di Kecamatan Lintongnihuta;
- b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL), mencakup Kecamatan Doloksanggul;
- c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), mencakup Kecamatan Lintongnihuta, Pakkat, Parlilitan dan Baktiraja;
- d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), mencakup pusat permukiman Kecamatan Paranginan, Pollung, Onanganjang, Sijampolang dan Tarabintang.

Selain pusat-pusat pelayanan tersebut, di daerah ini dikembangkan pola pemanfaatan ruang yang disusun berdasarkan hasil analisis kesesuaian lahan untuk kawasan lindung dan budi daya serta pengembangan kawasan strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan wilayah dan memiliki pengaruh yang sangat penting dan strategis terhadap pertumbuhan dan perkembangan wilayah.

Kawasan strategis di Kabupaten Humbang Hasundutan dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Kawasan Strategis Nasional, meliputi Kecamatan Paranginan, Lintongnihuta, Doloksanggul, Baktiraja dan Pollung (Kawasan di sekitar Danau Toba);
- b. Kawasan Strategis Provinsi, yang diperuntukkan kepada pengembangan kawasan agropolitan dataran tinggi, pelestarian lingkungan dan pengembangan ekonomi;
- c. Kawasan Strategis Kabupaten, yang difokuskan kepada pengembangan aspek ekonomi, sosial dan budaya dengan pusat pengembangan di Kecamatan Doloksanggul, Baktiraja, Lintongnihuta, Paranginan, Pollung dan Parlilitan.

Kabupaten Humbang Hasundutan juga telah merencanakan peruntukan kawasan strategis cepat tumbuh pada sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, peternakan dan perikanan. Rencana lokasi pertanian lahan kering berada di Kecamatan Lintongnihuta, Paranginan, Doloksanggul, Pollung, Onanganjang dan Sijamapolang. Sedangkan, untuk pertanian tanaman pangan lahan basah direncanakan di Kecamatan Doloksanggul, Parlilitan, Pakkat dan Baktiraja. Sementara itu, untuk kawasan perkebunan dengan komoditas kakao, sawit dan karet berada di Kecamatan Pakkat, Parlilitan dan Tarabintang. Kemudian untuk kawasan pariwisata direncanakan di Kecamatan Baktiraja, Parlilitan, Paranginan, Pakkat dan Lintongnihuta. Sedangkan, untuk kawasan peternakan direncanakan di Kecamatan Sijamapolang dan kawasan perikanan di Kecamatan Baktiraja.

B. Visi dan Misi

Visi

“Mewujudkan Humbang Hasundutan yang Hebat dan Bermentalitas Unggul.”

Misi

1. Mewujudkan SDM Berkualitas Melalui Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan dan Kesehatan.
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih.
3. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertanian Berkelanjutan, Ekonomi Kreatif dengan Memanfaatkan Potensi Daerah dan Kearifan Lokal.
4. Mewujudkan Infrastruktur yang Berasaskan Kebermanfaatn dan Pemerataan.

Kabupaten Humbang Hasundutan dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati dan dibantu Sekretaris Daerah yang merupakan unsur staf. Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki 34 organisasi perangkat daerah. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan yang menjabat saat ini adalah Dosmar Banjarnahor dan Oloan Paniaran Nabana.

PROFIL KABUPATEN NIAS BARAT

Profil dan Kebijakan Teknis

A. Data Umum

1. Sejarah Kabupaten Nias Barat

Lambang Kabupaten Nias Barat sebagai berikut:



Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara yang diresmikan pada tanggal 28 November 2008 oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Tujuan pembentukan Kabupaten ini adalah untuk mengembangkan potensi daerah, memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru guna mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat agar mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Nias Barat beribu kota di Kecamatan Lahomi dipimpin oleh Bupati Khenoki Waruwu menjabat dari bulan April tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Dari hasil pemilu legislatif tahun 2019, terpilih 20 orang wakil rakyat yang duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Nias Barat berasal dari delapan partai Politik.

2. Kondisi Geografis dan Demografis Kabupaten Nias Barat

Kabupaten Nias Barat memiliki luas wilayah keseluruhan $\pm 520,34 \text{ km}^2$ (2022) yang secara geografis berada pada $0^{\circ}12' - 0^{\circ}32' \text{ LU}$ dan $97^{\circ} - 98^{\circ} \text{ BT}$ dengan ketinggian 0-800 m di atas permukaan laut dengan penduduk pada tahun 2022 (BPS Kabupaten Nias Tahun 2022) berjumlah ± 91.346 jiwa dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Nias Utara.
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Nias.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Nias Selatan.
- Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Indonesia (Samudra Hindia).

Kabupaten Nias Barat terdiri atas 8 (delapan) kecamatan, 105 (seratus lima) Desa. Adapun 8 (delapan) kecamatan adalah:

- Kecamatan Mandrehe, terdiri dari dan 20 Desa.
- Kecamatan Sirombu, terdiri dari 25 Desa.
- Kecamatan Lolofitu Moi, terdiri dari dan 8 Desa.
- Kecamatan Mandrehe Utara, terdiri dari 12 Desa.
- Kecamatan Mandrehe Barat, terdiri dari 14 Desa.

- f. Kecamatan Ulu Moro'o, terdiri dari 5 Desa.
- g. Kecamatan Moro'o, terdiri dari 10 Desa.
- h. Kecamatan Lahomi, terdiri dari 11 Desa.

3. Potensi Wilayah Kabupaten Nias Barat

Potensi pariwisata di Kabupaten Nias Barat sangat besar terutama karena langsung berbatasan dengan Samudera Hindia di sebelah barat. Nias Barat memiliki andalan pariwisata kepulauan yakni kepulauan Hinako yang terdiri atas delapan pulau-pulau kecil yang indah antara lain:

1. Pulau Hinako.
2. Pulau Bögi.
3. Pulau Bawa.
4. Pulau Asu.
5. Pulau Imana.
6. Pulau Heruanga.
7. Pulau Hamutala.
8. Pulau Langu.

Delapan pulau ini terletak di Kecamatan Sirombu. Pulau-pulau kecil ini memiliki pantai berpasir putih, terumbu karang, dan perkebunan kelapa masyarakat. Pulau Asu dan Pulau Bawa sering dikunjungi oleh wisatawan mancanegara untuk kegiatan *surfing* (berselancar) dan *diving* (penyelaman) karena memiliki ombak yang tinggi dan terumbu karang yang banyak. Pulau-pulau ini masih terjaga karena pada umumnya sangat minim penghuni bahkan ada yang tidak berpenghuni sama sekali seperti Pulau Hamutala, Pulau Heruanga dan Pulau Langu.

Selain di kepulauan, kini Destinasi Wisata di Nias Barat sudah bertambah dengan Desa Wisata Tetelesi "**Kamadu Beach**" yang *dilaunching* pada tanggal 7 April 2021.

B. Visi dan Misi

Visi

“Terwujudnya Nias Barat yang Bersih, Unggul dan Maju.”

Misi

1. Membangun Sistem Manajemen Pemerintahan Daerah yang Baik, Transparan, Professional, dan Bersih dari Suap/Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Seluruh Aspek Kehidupan Masyarakat.
4. Mengembangkan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Agrominawisata (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Pariwisata) dan Ekonomi Kreatif.
5. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar (Jalan, Jembatan, Gedung Sekolah, Puskesmas, Rumah Sakit, Instalasi Air Bersih).
6. Mengembangkan Inovasi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Daya Saing Daerah,

Masyarakat dan Pelaku Pembangunan Lainnya.

7. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur dan Masyarakat yang Lebih Maju.

Kabupaten Nias Barat dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati dan dibantu Sekretaris Daerah yang merupakan unsur staf. Kabupaten Nias Barat memiliki 35 Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari: 3 sekretariat, 5 badan, 1 Inspektorat, 18 Dinas, dan 8 Kecamatan. Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat yang menjabat saat ini adalah Khenoki Waruwu dan Era Era Hia.

PROFIL KABUPATEN NIAS UTARA

Profil dan Kebijakan Teknis

A. Data Umum

1. Sejarah Kabupaten Nias Utara

Lambang Kabupaten Nias Utara sebagai berikut:



Secara singkat dapat dikatakan bahwa perubahan-perubahan pemerintahan di Kabupaten Nias, mengikuti perubahan-perubahan tentang Pemerintahan di daerah yang berlaku secara nasional. Desa/Kelurahan sebagai tingkat pemerintahan yang paling bawah, di Kabupaten Nias terdapat sebanyak 657 buah. Desa/Kelurahan tersebut karena persekutuan masyarakat menurut hukum setempat, yang dahulunya masing- masing berdiri sendiri-sendiri tanpa ada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi yang mencakup beberapa atau keseluruhan desa/kelurahan itu. Sejak awal kemerdekaan sampai tahun 1967 terdapat satu tingkat pemerintahan lagi diantara Kecamatan dengan Desa/kelurahan yang disebut " Ö R I " yang meliputi beberapa desa. Memang ÖRI ini sejak dahulu telah ada yang dibentuk karena perserikatan beberapa desa yang menyangkut Pesta, sedang masalah-masalah pemerintahan desa langsung diatur oleh masing-masing desa. ÖRI sebagai salah satu tingkat pemerintahan di Daerah Tingkat II Nias dihapuskan pada tahun 1965 dengan surat Keputusan Gubernur pada tanggal 26 Juli 1965 Nomor : 222/V/GSU dengan tidak menyebutkan alasan-alasan yang jelas.

Selanjutnya berdasarkan keputusan DPRD Kabupaten Nias Nomor: 02/KPTS/2000 tanggal 1 Mei 2000 tentang persetujuan pemekaran Kabupaten Nias menjadi dua kabupaten, Keputusan DPRD Propinsi Sumatera Utara Nomor : 19/K/2002 tanggal 25 Agustus 2002, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2002 tanggal 25 Februari 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Barat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2002 dan tanggal 28 Juli 2003, maka Kabupaten Nias resmi dimekarkan menjadi dua Kabupaten yaitu Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias adalah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten di Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092), yang merupakan kabupaten asal Kabupaten Nias Utara. Dengan terbentuknya Kabupaten Nias Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang- Undang Republik

Indonesia Nomor 45 Tahun 2008, wilayah Kabupaten Nias dikurangi dengan wilayah Kabupaten Nias Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2008. Kecamatan yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Nias Utara, sebagai berikut: Kecamatan Lotu, Kecamatan Sawo, Kecamatan Tuhemberua, Kecamatan Sitolu Ori, Kecamatan Namohalu Esiwa, Kecamatan Alasa Talu Muzoi, Kecamatan Alasa, Kecamatan Tugala Oyo, Kecamatan Afulu, Kecamatan Lahewa, Kecamatan Lahewa Timur.

2. Kondisi Geografis dan Demografis Kabupaten Nias Utara

Kabupaten Nias Utara merupakan pemekaran dari Kabupaten Nias berdasarkan UU No. 45 Tahun 2008, yang terletak di sebelah utara Kabupaten Nias. Adapun letak geografis berada pada 1003'00'' – 1033'00'' LU dan 97000' 00'' – 99000'00'' LS. Secara administratif Kabupaten Nias Utara berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Samudera Indonesia.
- Sebelah Timur : Samudera Indonesia dan Kota Gunungsitoli.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Nias Barat dan Kabupaten Nias.
- Sebelah Barat : Samudera Indonesia.

Kabupaten Nias Utara memiliki wilayah seluas ± 1.242,12 km² (berdasarkan data BPS), terdiri dari 11 kecamatan, yaitu:

1. Lahewa.
2. Lahewa Timur.
3. Lotu.
4. Sawö.
5. Tuhemberua.
6. Sitölu Öri.
7. Namöhalu Esiwa.
8. Alasa Talu Muzöi.
9. Afulu.
10. Alasa.
11. Tugala Oyo.

Wilayah yang terluas adalah Kecamatan Lahewa yakni seluas 172,54 km² dan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Tuhemberua seluas 50,18 km². Penduduk Kabupaten Nias Utara pada tahun 2022 berjumlah 150.780 jiwa.

3. Potensi Wilayah Kabupaten Nias Utara

Potensi pariwisata di Kabupaten Nias Utara sangat besar. Salah satu tempat wisata di Nias Utara yang unik adalah Danau Megötö, satu-satunya danau yang ada di Pulau Nias. Juga ada Pantai pasir berbisik (Gawu Sifakiki), air terjun Luaha Ndroi. Juga ada Pantai Tureloto, Pantai Lafau, Pantai Pasir Merah, Pantai Walo, Wisata Mangrove Teluk bengkuang, Walo Afulu, Pulau Makora, Pulau Wunga, Pulau Panjang, Pulau Lafau, dan lainnya.

a. Pantai Tureloto

Pantai Tureloto, (Foto: IG @discovernias)
Pantai Tureloto memiliki hamparan pasir putih yang indah. Asyiknya disini, kamu bisa berenang dan snorkeling di beberapa spot. Gelombang laut dan ombaknya cukup tenang, sehingga kamu bisa berenang dan melihat-lihat berbagai biota laut yang ada.



Keunikan dan daya tarik Pantai Tureloto adalah kita bisa berenang mengapung tanpa takut tenggelam. Kandungan garamnya tinggi, mirip Laut Mati di Yordania.

b. Pantai Pasir Merah Gawu Soyo

Pantai Gawu Soyo memiliki daya tarik berupa pasirnya yang bewarna kemerahan. Terlihat kontras dengan warna biru laut. Hamparan pasirnya luas dengan pepohonan yang masih rimbun Pantai ini adalah salah satu spot surfing yang ada di Pulau Nias. Pantai Pasir Merah Gawu Soyo berada di Harewakhe, Afulu, Nias Utara.



c. Pantai Toyolawa

Pantai Toyolawa. (Foto: nortniastourism.com) Pantai Toyolawa berada di paling ujung Barat Laut Pulau Nias. Yang menarik di Pantai Toyolawa selain pasirnya yang juga bewarna kemerahan adalah adanya mercusuar. Mercusuar di Pantai Toyolawa menjadi ikon tempat ini. Dan menjadi salah satu spot foto yang cantik.



d. Pantai Sifahandro

Pantai Sifahandro dikenal juga dengan sebutan Pantai Pasir Berbisik Nias. Saat kamu berjalan di pasir pantainya, akan terdengar suara angin yang seolah berbisik-bisik. Pantai Sifahandro berada di Desa Sifahandro, Sawo, Nias Utara.



e. Pulau Wunga

Pulau Wunga berada di bagian Barat Pulau Nias dan berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia. Namun demikian ternyata ada bagian lautnya yang tenang, yaitu di bagian Barat pulau. Sehingga wisatawan bisa berenang dan snorkeling di beberapa spot.



Pulau Wunga berjarak sekitar 7,5 mil laut di sebelah barat dari pulau Nias dan termasuk pulau terluar Indonesia. Pulau Wunga juga dikenal sebagai Pusat Pembibitan Budidaya Rumput Laut di Kepulauan Nias.

Hanya dihuni beberapa keluarga saja, sehingga menjadikan pulau ini sepi dan cocok bagi kamu yang mencari ketenangan. Bermain atau berjalan di pantainya yang berpasir putih, duduk-duduk, berendam di laut, dan snorkeling disini, berasa seperti berada di pulau pribadi.

B. Visi dan Misi

Visi

1. Maju : Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah Pembangunan Daerah dan Sosial Kemasyarakatan Saat Ini Menuju Perubahan yang Lebih Baik.
2. Sejahtera : Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat (Sandang, Papan, Pangan) Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan yang Lebih Baik.
3. Berkeadilan : Penyelenggaraan Roda Pemerintahan yang Mampu Mendistribusikan Kegiatan dan Pembangunan Prioritas secara Merata, Menghilangkan Kesenjangan dan Diskriminasi Antar Wilayah.

Misi

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Beriman, Sehat dan Produktif.
2. Meningkatkan Kompetensi dan Etos Kerja Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Pemerintahan Desa.
3. Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasaran Prioritas yang Berkualitas.
4. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berbasis Keunggulan Sumber Daya Lokal.
5. Menciptakan Kondisi Kehidupan Sosial Masyarakat yang Harmoni dan Berbudaya.

Kabupaten Nias Utara memiliki 35 Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 5 badan, 1 Inspektorat, 18 Dinas, dan 11 Kecamatan. Kabupaten Nias Utara dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati dan dibantu Sekretaris Daerah yang merupakan unsur staf. Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara yang menjabat saat ini adalah Amizaro Waruwu dan Yusman Zega.

PROFIL KABUPATEN TOBA

Profil dan Kebijakan Teknis

A. Data Umum

1. Sejarah Kabupaten Toba

Lambang Pemerintah Kabupaten Toba sebagai berikut:



Sejarah Kabupaten Toba bermula dari era pra-kolonial hingga sekarang. Kabupaten Toba adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia yang dibentuk pada tahun 1998 atas pemekaran daerah dari Kabupaten Tapanuli Utara. Kabupaten Toba yang dihuni oleh Suku Batak Toba telah melalui banyak perubahan dan perkembangan dalam sejarahnya.

Menurut sejarah leluhur serta mitologi penciptaan dan penyebaran orang Batak Toba di Tano Batak, Kabupaten Toba adalah salah satu wilayah perkembangan Suku Batak Toba. Dalam perkembangannya Suku Batak Toba dapat dikategorikan sebagai empat sub-suku yang memiliki wilayah masing-masing; dan dewasa ini status tiap wilayah sub-suku telah angkat menjadi kabupaten. Adapun keempat sub suku Batak Toba adalah:

- Humbang, saat ini bagian dari Kabupaten Humbang Hasundutan.
- Samosir, saat ini bagian dari Kabupaten Samosir.
- Silindung, saat ini bagian dari Kabupaten Tapanuli Utara.
- Toba Holbung, saat ini bagian dari Kabupaten Toba Kawasan Toba Holbung (atau sering disebut Toba saja) menjadi tanah ulayat para leluhur Suku Batak Toba ratusan tahun yang lalu, adapun Marga Batak yang bermukim di Toba Holbung dapat digolongkan kedalam empat kelompok, yaitu:
 - a. Marga keturunan Nai Rasaon (Butarbutar, Manurung, Sirait, dan Sitorus) menduduki wilayah utara (Kecamatan Ajibata, Lumban Julu, Porsea, Parmaksian, dan Uluan).
 - b. Marga keturunan Sibagot Ni Pohan (Tampubolon, Barimbing, Silaen, Siahaan, Simanjuntak, Hutagaol, Panjaitan, Siagian, Pardosi, Sianipar, Simangunsong, Marpaung, Napitupulu, dan Pardede) menduduki wilayah selatan (Kecamatan Balige, Habinsaran, Siantar Narumonda, Sigumpar, Silaen, Tampahan).
 - c. Marga keturunan Sipaet Tua (Aruan, Hutahaean, Hutajulu, Hutapea, Pangaribuan, Sibarani, Sibuea) menduduki wilayah selatan (Kecamatan Laguboti dan Silaen).
 - d. Marga keturunan Borbor (Lubis, Pasaribu, Sipahutar, Tanjung) menduduki wilayah timur (Kecamatan Borbor, Laguboti, Habinsaran, dan Nassau).

Hingga saat ini Kabupaten Toba masih didominasi oleh marga-marga tersebut.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Kabupaten Toba termasuk dalam Karesidenan Tapanuli

yang dipimpin seorang residen berkebangsaan Belanda yang berkedudukan di Sibolga. Keresidenan Tapanuli yang dulu disebut Residentie Tapanuli terdiri dari empat *Afdeling* (kabupaten) yaitu:

1. *Afdeling* Batak Landen.
2. *Afdeling* Mandailing Angkola.
3. *Afdeling* Sibolga en Omstreken.
4. *Afdeling* Nias.

Afdeling Batak Landen dipimpin seorang Asisten Residen yang beribukotakan Tarutung yang terdiri lima *Onderafdeling* (wilayah) yaitu:

1. *Onderafdeling* Silindung (Kabupaten Tapanuli Utara sekarang) dengan ibu kota Tarutung.
2. *Onderafdeling* Hoovlakte Van Toba (Kabupaten Tapanuli Utara sekarang) dengan ibu kota Siborongborong.
3. *Onderafdeling* Toba (Kabupaten Toba sekarang) dengan ibu kota Balige.
4. *Onderafdeling* Samosir (Kabupaten Samosir sekarang) dengan ibu kota Pangururan.
5. *Onderafdeling* Dairi Landen (Kabupaten Dairi sekarang) dengan ibu kota Sidikalang.

Tiap-tiap *Onderafdeling* mempunyai satu distrik (kewedanaan) dipimpin seorang *Distrikchoofd* bangsa Indonesia yang disebut Demang dan membawahi beberapa *Onderdistrikten* (kecamatan) yang dipimpin oleh seorang Asisten Demang.

Menjelang Perang Dunia II, distrik-distrik di seluruh keresidenan Tapanuli dihapuskan dan beberapa Demang yang mengepalai distrik-distrik sebelumnya diperbantukan ke kantor *Controleur* masing-masing dan disebut namanya Demang *Terbeschinking*. Dengan penghapusan ini para Asisten Demang yang ada di kantor Demang itu ditetapkan menjadi Asisten Demang di *Onderdistrik* bersangkutan.

Kemudian tiap *Onderdistrik* membawahi beberapa negeri yang dipimpin oleh seorang kepala Negeri yang disebut Negeri *Hoofd*. Pada waktu berikutnya diubah dan dilaksanakan pemilihan, tetapi tetap memperhatikan asal usulnya. Negeri-negeri ini terdiri dari beberapa kampung, yang dipimpin seorang kepala kampung yang disebut Kampung *Hoofd* dan juga diangkat serupa dengan pengangkatan Negeri *Hoofd*. Negeri dan Kampung *Hoofd* statusnya bukan pegawai negeri, tetapi pejabat-pejabat yang berdiri sendiri di negeri/kampungnya. Mereka tidak menerima gaji dari pemerintah tetapi dari upah pungut pajak dan khusus Negeri *Hoofd* menerima tiap-tiap tahun upah yang disebut *Yoarlijkse Begroting*. Tugas utama Negeri dan Kampung *Hoofd* ialah memelihara keamanan dan ketertiban, memungut pajak/*blasting*/rodi dari penduduk Negeri/Kampung masing-masing. *Blasting*/rodi ditetapkan tiap-tiap tahun oleh Kontraleur sesudah panen padi.

Pada waktu pendudukan tentara Jepang Tahun 1942-1945 struktur pemerintahan di Tapanuli Utara hampir tidak berubah, hanya namanya yang berubah seperti:

- *Asistent Resident* diganti dengan nama *Gunseibudan* menguasai seluruh Tanah Batak dan disebut Tanah Batak Sityotyö.

- Demang-demang *Terbeschiking* menjadi *Guntyome* memimpin masing-masing wilayah yang disebut Gunyakusyo.
- Asisten Demang tetap berada di posnya masing-masing dengan nama Huku Guntyodan kecamatannya diganti dengan nama Huku Gunyakusyo.
- Negeri dan Kampung *Hoofd* tetap memimpin Negeri/Kampungnya masing-masing dengan mengubah namanya menjadi Kepala Negeri dan Kepala kampung.

Sesudah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah mulai membentuk struktur pemerintahan baik di pusat dan di daerah. Dengan diangkatnya Dr. Ferdinand Lumbantobing sebagai Residen Tapanuli, disusunlah struktur pemerintahan dalam negeri di Tapanuli khususnya di Tapanuli Utara sebagai berikut:

- Nama *Afdeling* Batak Landen diganti menjadi Luhak Tanah batak dan sebagai luhak pertama diangkat Cornelis Sihombing.
- Nama *Budrafdeling* diganti menjadi Urung dipimpin Kepala Urung, Para Demang memimpin *Onderafdeling* sebagai Kepala Urung.
- Nama *Onderdistrik* diganti menjadi Urung kecil dan dipimpin Kepala Urung Kecil yang dulu disebut Asisten Demang.

Selanjutnya dalam waktu tidak begitu lama terjadi perubahan, nama Luhak diganti menjadi kabupaten yang dipimpin bupati, Urung menjadi wilayah yang dipimpin Demang, serta Urung Kecil menjadi kecamatan yang dipimpin oleh Asisten Demang.

Pada tahun 1946 Kabupaten Tanah Batak terdiri dari 5 (lima) wilayah yaitu Wilayah Silindung, Wilayah Humbang, Wilayah Toba, Wilayah Samosir dan Wilayah Dairi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Demang. Kecamatan-kecamatan tetap seperti yang ditinggalkan Jepang. Pada Tahun 1947 terjadi Agresi I oleh Belanda di mana Belanda mulai menduduki daerah Sumatera Timur maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan strategis dan untuk memperkuat pemerintahan dan pertahanan, Kabupaten Tanah Batak dibagi menjadi 4 (empat) kabupaten. Wilayah menjadi kabupaten dan memperbanyak kecamatan. Pada tahun 1948 terjadi Agresi II oleh Belanda, untuk mempermudah hubungan sipil dan Tentara Republik, maka pejabat-pejabat Pemerintahan Sipil dimiliterkan dengan jabatan Bupati Militer, Wedana Militer dan Camat Militer. Untuk mempercepat hubungan dengan rakyat, kewedanaan dihapuskan dan para camat langsung secara administratif ke Bupati.

Setelah Belanda meninggalkan Indonesia pada pengesahan kedaulatan, pada permulaan tahun 1950 di Tapanuli dibentuk kabupaten baru yaitu Kabupaten Tapanuli Utara (dulu Kabupaten Batak), Kabupaten Tapanuli Selatan (dulu Kabupaten Padang Sidempuan), Kabupaten Tapanuli Tengah (dulu Kabupaten Sibolga) dan Kabupaten Nias. Dengan terbentuknya kabupaten ini, maka kabupaten-kabupaten yang dibentuk pada tahun 1947 dibubarkan. Di samping itu di setiap kabupaten dibentuk badan legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Sementara yang anggotanya dari anggota partai politik setempat. Mengingat luasnya wilayah Kabupaten Tapanuli Utara meliputi Dairi pada waktu itu, maka untuk meningkatkan daya guna pemerintahan, pada tahun 1956

dibentuk Kabupaten Dairi yang terpisah dari Kabupaten Tapanuli Utara.

Kabupaten Toba dimekarkan dari Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara setelah menjalani waktu yang cukup lama dan melewati berbagai proses, pada akhirnya terwujud menjadi kabupaten baru dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten DATI II Toba dan Kabupaten DATI II Mandailing Natal di Daerah Tingkat I Sumatera Utara. Kabupaten Toba diresmikan pada tanggal 9 Maret 1999 bertempat di Kantor Gubernur Sumatera Utara oleh Menteri Dalam Negeri Syarwan Hamid atas nama Presiden Republik Indonesia sekaligus melantik Drs. Sahala Tampubolon selaku Penjabat Bupati Toba. Pada saat itu, sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Drs. Parlindungan Simbolon.

Setelah Kabupaten Toba diresmikan, diangkat Ketua DPRD Sementara adalah M.P. Situmorang, selanjutnya dilakukan pemilihan yang hasilnya adalah Ketua Drh. Unggul Siahaan dan Wakil Ketua M.A. Simanjuntak dan Wakil Ketua Drs. L.P. Sitanggang. Pada tahun 1999, dilaksanakan pemilihan umum di Indonesia, dengan hasil menetapkan 35 anggota DPRD Kabupaten Toba, serta menetapkan pimpinan DPRD Kabupaten Toba masa bakti 1999 – 2004 yaitu: Ketua Ir. Bona Tua Sinaga dan Wakil Ketua masing – masing adalah Sabam Simanjuntak, Drs. Vespasianus Panjaitan dan Letkol W. Nainggolan. Pada tahun 2000 diadakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toba, dengan hasil pemilihan, menetapkan Drs. Sahala Tampubolon sebagai Bupati dan Maripul S. Manurung, SH., sebagai wakil Bupati Toba, masa bakti 2000 – 2005, pelantikan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2000 di Balige.

Pada awal pembentukannya, kabupaten ini terdiri atas 13 (tiga belas) kecamatan, 5 (lima) kecamatan pembantu, 281 desa dan 19 kelurahan. Seiring dengan perjalanan pemerintahan di kabupaten ini jumlah kecamatan mengalami perubahan secara bertahap. Pada awal tahun 2002 dibentuk 5 kecamatan baru yakni pendefinitifan 4 (empat) kecamatan pembantu mejadi 4 (empat) kecamatan defenitif dan pembentukan 1 (satu) kecamatan baru. Kelima kecamatan tersebut adalah Kecamatan Ajibata, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kecamatan Uluan, Kecamatan Ronggur Nihuta dan Kecamatan Borbor.

Kondisi pemekaran kecamatan berlanjut hingga pada akhir tahun 2002, di mana adanya aspirasi masyarakat yang cukup kuat dalam menyuarakan pemekaran Kecamatan Harian menjadi dua kecamatan yakni Kecamatan Harian dan Kecamatan Siotio sebagai kecamatan pemekaran baru. Kuatnya aspirasi pembentukan kecamatan ini disikapi dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Toba karena didukung fakta – fakta permasalahan di masyarakat baik kondisi geografis wilayah dan lain sebagainya, hingga akhirnya Pemerintah Kabupaten Toba menetapkan Keputusan Bupati Toba tentang Pembentukan Kecamatan Siotio mendahului Peraturan Daerah, setelah mendapatkan izin prinsip dari DPRD Kabupaten Toba pada tahun 2002. Keputusan Bupati ini dikuatkan dengan penetapan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Siotio di Kabupaten Toba.

Perkembangan dan pembentukan wilayah tidak sampai di sini saja, perubahan – perubahan lain semakin banyak terjadi seperti isu pemekaran kembali Kabupaten Toba menjadi 2 (dua)

kabupaten. Isu ini berkembang seiring dengan situasi dan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang berkembang pada saat itu. Perkembangan kondisi sosial, ekonomi, dan politik dimasyarakat menginginkan Kabupaten Toba dimekarkan kembali menjadi Kabupaten Toba dan Kabupaten Samosir (meliputi seluruh kecamatan yang ada di Pulau Samosir dan sebagian pinggiran Danau Toba di Daratan Pulau Sumatera) dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan guna mengejar ketertinggalan dari daerah lain. Aspirasi yang berkembang di masyarakat ini tidak menunggu waktu yang begitu lama, hingga pada tahun 2003 Kabupaten Toba dimekarkan menjadi Kabupaten Toba dan Kabupaten Samosir yang ditetapkan dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara dan diresmikan pada tanggal 7 Januari 2004.

Sejak peresmian ini, wilayah Kabupaten Toba berkurang karena seluruh wilayah kecamatan yang ada di Pulau Samosir dan sekitarnya sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2003 tersebut masuk menjadi Kabupaten Samosir. Dan sejak tanggal 7 Januari 2004, Kabupaten Toba dari 20 Kecamatan, 281 Desa dan 19 Kelurahan mengalami perubahan baik jumlah kecamatan, desa dan kelurahan, jumlah penduduk, luas wilayah, dan batas – batas wilayah secara signifikan yakni menjadi 11 Kecamatan 179 Desa dan 13 Kelurahan. Sedangkan Kabupaten Samosir terdiri dari 9 Kecamatan, 102 Desa dan 6 Kelurahan.

Pemekaran wilayah selanjutnya terjadi pada Kecamatan Silaen dengan melahirkan Kecamatan Sigumpar sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004. Banyak alasan yang mempengaruhi terjadinya pemekaran wilayah kecamatan di Kabupaten Toba, antara lain: kondisi luas wilayah, jarak ke ibu kota kabupaten, letak geografis, dikaitkan juga dengan kondisi ketertinggalan dan dorongan keinginan serta tuntutan masyarakat itu sendiri. Ada beberapa hal yang memperlihatkan kuatnya keinginan dan aspirasi masyarakat untuk maju, antara lain terlihat pada masyarakat Kecamatan Borbor dimana permintaan pemekaran diikuti dengan penyerahan lahan lokasi perkantoran dan penyediaan sarana gedung kantor kecamatan baru secara swadaya oleh masyarakat. Kondisi ini dinilai pemerintah sebagai bukti kesungguhan masyarakat yang mendambakan wilayahnya dimekarkan menjadi kecamatan baru.

Pada tahun 2004 dilaksanakan Pemilihan umum Legislatif yang menetapkan 25 anggota DPRD Kabupaten Toba. DPRD kemudian memilih pimpinan masa bakti 2004 – 2009 yaitu: Ketua Tumpal Sitorus, Wakil Ketua masing – masing adalah: Ir. Firman Pasaribu, dan Bachtiar Tampubolon, MBA. Pada tanggal 27 Juni 2005 KPUD Kabupaten Toba menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung sesuai dengan Undang – Undang Nomor: 32 Tahun 2004, namun untuk kelancaran pelaksanaan tugas – tugas pemerintahan di Kabupaten Toba sebelum terpilihnya Kepala Daerah, melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.22-463 Tahun 2005 tanggal 30 Juni 2005 diangkat Drs. Mangasi Lumbanraja sebagai Penjabat Bupati Toba yang pelantikannya dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2005. Dengan terpilihnya Bupati/Wakil Bupati melalui pemilihan kepala daerah maka pada tanggal 12 Agustus 2005 jabatan kepala daerah diserahkan kepada Bupati terpilih.

Dari hasil pemungutan suara yang diperoleh, KPUD Toba menetapkan pemenang Drs. Monang Sitorus, SH., MBA dan Ir. Mindo Tua Siagian, M.Sc sebagai Bupati dan Wakil Bupati Toba masa bakti 2005 – 2010. Pelantikan dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2005 di Gedung DPRD Kabupaten Toba oleh Gubernur Sumatera Utara T. Rizal Nurdin (Alm). Sebagai Sekretaris Daerah pada waktu itu dijabat Drs. Tonggo Napitupulu, M.Si dan pada akhir tahun 2005 sampai dengan Agustus 2009 dijabat oleh Liberty Pasaribu, SH, M.Si. Sejalan dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Toba periode 2005 – 2010, maka ditetapkan Visi Kabupaten Toba: “Menjadi Kabupaten Terdepan, Makmur, Adil dan Sejahtera di Sumatera Utara Tahun 2010 (TOBAMAS 2010)”.

Pada tahun 2006 Pemerintah Kabupaten Toba melaksanakan pemekaran kecamatan. Dari 11 kecamatan, dimekarkan kecamatan baru yakni Kecamatan Tampahan pemekaran dari Kecamatan Balige, Kecamatan Siantar Narumonda pemekaran dari Kecamatan Porsea, dan Kecamatan Nassau pemekaran dari Kecamatan Habinsaran. Pemekaran ketiga kecamatan baru tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Siantar Narumonda, Kecamatan Nassau, Kecamatan Tampahan.

Pada tahun 2008 juga terjadi pemekaran kecamatan karena tingginya aspirasi masyarakat dalam pemerataan pembangunan. Adapun kecamatan yang dimekarkan adalah Kecamatan Parmaksian pemekaran dari Kecamatan Porsea dan Kecamatan Bonatua Lunasi pemekaran dari Kecamatan Lumban Julu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor: 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Parmaksian dan Kecamatan Bonatua Lunasi Kabupaten Toba. Pada tahun 2008 juga telah dilakukan pemekaran desa sebanyak dua puluh empat desa.

Kemudian pada tahun 2008 terjadi PAW DPRD untuk mengganti Ketua DPRD Kabupaten Toba pada tanggal 15 Desember 2008, terpilih Mangatas Silaen sebagai Ketua DPRD Kabupaten Toba yang baru sisa masa bakti 2004 – 2009. Pada tahun 2009 telah ditetapkan pembentukan duapuluh delapan desa, sehingga pada saat ini wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Toba terdiri dari enam belas kecamatan, tiga belas kelurahan dan dua ratus tiga puluh satu desa. Pada tanggal 9 April 2009 telah dilaksanakan Pemilu Legislatif dan di Kabupaten Toba menghasilkan 25 Anggota DPRD Kabupaten Toba yang dilantik pada tanggal 15 Desember 2009 dengan menetapkan pimpinan DPRD sementara yakni Sahat Panjaitan sebagai Ketua, Djojor Tambunan dan Rahmat Kurniawan Manullang sebagai Wakil Ketua dan pada tanggal 3 Maret 2010 yang lalu telah ditetapkan menjadi Pimpinan DPRD Kabupaten Toba defenitif untuk Periode Masa Jabatan 2009 – 2014 dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/93/KPTS/2010 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Toba Masa Jabatan 2009 – 2014.

Pada tanggal 12 Mei 2010 Kabupaten Toba melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toba untuk masa jabatan 2010 – 2015. Dalam Pemilukada yang dilaksanakan secara demokratis tersebut pasangan Pandapotan Kasmin Simanjuntak dan Liberty Pasaribu, SH., M.Si., berhasil meraih suara terbanyak dan memenangkan Pemilukada tersebut. Selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 2010, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 131.12.278 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Toba Provinsi Sumatera Utara dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.12.278 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Toba Provinsi Sumatera Utara yaitu pasangan Bupati dan Wakil Bupati Toba Bapak Pandapotan Kasmin Simanjuntak dan Liberty Pasaribu, SH., M.Si., dilantik oleh Gubernur Sumatera Utara Bapak H. Syamsul Arifin, SE melalui Rapat Paripurna Istimewa DPRD yang bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Toba – Balige.

Sejalan dengan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Toba, Bapak Pandapotan Kasmin Simanjuntak dan Liberty Pasaribu, SH., M.Si., untuk melaksanakan Visi Pemerintah Kabupaten Toba lima tahun ke depan yaitu: “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Toba yang memiliki rasa Kasih, Peduli, dan Bermartabat” sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba Tahun 2011 – 2015.

2. Kondisi Geografis dan Demografis Kabupaten Toba

Kondisi Geografis Kabupaten Toba dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Luas Wilayah dan Kondisi Geografis Kabupaten Toba

| | | | |
|----------------------|------------------------------|---|---|
| 1. | Letak Kabupaten Toba | : | 2° 03' - 2° 40' Lintang Utara |
| | | : | 98° 56' - 99° 40' Bujur Timur |
| 2. | Luas Wilayah/ Area Width | : | 202 180 Ha |
| 3. | Letak di atas Permukaan Laut | : | 900 - 2.200 m |
| 4. | Luas Hutan | : | 109 626 Ha |
| Wilayah Administrasi | | | |
| 5. | a. Jumlah Kecamatan | : | 16 Kecamatan |
| | b. Jumlah Desa | : | 231 Desa |
| | c. Jumlah Kelurahan | : | 13 Kelurahan |
| Batas Wilayah | | | |
| 6. | a. Sebelah Utara | : | Kabupaten Simalungun |
| | b. Sebelah Selatan | : | Kabupaten Tapanuli Utara |
| | c. Sebelah Barat | : | Danau Toba dan Kabupaten Samosir |
| | d. Sebelah Timur | : | Kabupaten Labuhan Batu dan Kabupaten Asahan |

Kabupaten Toba memiliki luas wilayah 2.021.80 km² atau 3,19% dari total luas Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Toba berada pada 2°03'–2°40' Lintang Utara dan 98°56'–99°40' Bujur Timur. Kabupaten Toba terletak pada wilayah dataran tinggi dengan ketinggian antara 900–2.200 meter di atas permukaan laut, dengan topografi dan kontur tanah yang beraneka ragam, yaitu datar, landai, miring dan terjal. Struktur tanahnya labil dan terletak pada wilayah gempa tektonik dan vulkanik. Penduduk Kabupaten Toba pada tahun 2022 berjumlah 212.133 jiwa.

Karena terletak dekat Garis Khatulistiwa, Kabupaten Toba tergolong ke dalam daerah beriklim tropis. Sebagaimana kabupaten lainnya di Indonesia, Kabupaten Toba mempunyai musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Januari sampai dengan Juli dan musim penghujan biasanya terjadi pada bulan Agustus sampai dengan bulan Desember, di antara kedua musim itu terdapat musim pancaroba.

3. Potensi Wilayah Kabupaten Toba

Kabupaten Toba merupakan salah satu kabupaten yang terkenal di kawasan nusantara, terutama karena keindahan alam Danau Toba. Beberapa potensi alam yang terkenal dari Kabupaten Toba antara lain areal persawahan yang menyebar di seluruh kecamatan dengan produktivitas yang tinggi, sungai yang dimanfaatkan untuk irigasi di Kecamatan Porsea dan Kecamatan Pintu Pohan Meranti, serta sungai yang menjadi pembangkit tenaga listrik yang juga berada di Kecamatan Pintu Pohan Meranti. Dalam struktur perekonomian Kabupaten Toba, kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan menempati peringkat pertama dalam penyusunan PDRB. Selama tiga tahun terakhir, sektor ini menyumbang di atas 30 persen terhadap total PDRB Kabupaten Toba. Selain itu, pada tahun 2019, mayoritas penduduk yakni sebanyak 55.064 penduduk atau sekitar 55 persen dari total penduduk yang bekerja, bergantung pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Tingginya penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian didukung oleh luasnya areal persawahan yang merupakan potensi alam unggulan Kabupaten Toba.

Struktur perekonomian Kabupaten Toba pada tahun 2019 masih didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: Pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 30,85 persen; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,16 persen; serta Konstruksi sebesar 13,89 persen. Peranan ke tiga lapangan usaha tersebut mencapai 62,91 persen. Jika melihat dari potensi sumber daya manusianya, penyerapan tenaga kerja tahun 2019 di Kabupaten Toba di dominasi oleh sektor pertanian (55,36 persen), sektor perdagangan (8,91 persen), sektor industri (6,49 persen), sektor konstruksi (6,03 persen), dan sektor pendidikan (5,77 persen).

B. Visi dan Misi

Visi

“Toba Unggul dan Bersinar.”

Misi

1. Infrastruktur yang Bagus dan Merata.
2. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Andal.
3. Membangun Pertanian dan Peternakan Makmur dan Sejahtera.
4. Kesehatan yang Prima dan Terjangkau.
5. Pariwisata Berkat dan Meriah.
6. Membangun Iman yang Terpelihara.
7. Menciptakan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban.

Kabupaten Toba memiliki 44 Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari dinas, kantor, badan, sekretariat, inspektorat, dan kecamatan. Kabupaten Toba dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati dan dibantu Sekretaris Daerah yang merupakan unsur staf. Bupati dan Wakil Bupati Toba yang menjabat saat ini adalah Poltak Sitorus dan Tonny M. Simanjuntak.

PROFIL KOTA TEBING TINGGI

Profil dan Kebijakan Teknis

A. Data Umum

1. Sejarah Kota Tebing Tinggi

Lambang Kota Tebing Tinggi sebagai berikut:



Pada tahun 1887, Pemerintah Hindia Belanda menetapkan Tebing Tinggi sebagai kota pemerintahan dimana pada tahun tersebut juga dibangun perkebunan besar yang berlokasi di sekitar Kota Tebing Tinggi (*hinterland*). Menjelang persiapan Tebing Tinggi menjadi kota otonom, maka untuk melaksanakan roda pemerintahan pada tahun 1904 didirikan sebuah badan pemerintahan yang bernama *Plaatselijke Fonds* oleh *Cultuur Paad Soematera Timoer*. Pada tanggal 23 Juli 1903 Pemerintah Hindia Belanda menetapkan daerah otonom kota kecil Tebing Tinggi menjadi pemerintahan Kota Tebing Tinggi sebagai daerah otonom dengan sistem desentralisasi. Untuk melaksanakan pemerintahan kota otonom, dibentuklah Badan *Gementeraad* Tebing Tinggi yang beranggotakan 9 orang dengan komposisi 5 orang bangsa Eropa, 3 orang Bumiputera, dan 1 orang bangsa Timur Asing sesuai dengan akte perjanjian Pemerintah Belanda dengan Sultan Deli. Berdasarkan *Desentralisiewet*, pada tanggal **1 Juli 1917** berdirilah *Gementee* Tebing Tinggi dengan *Stelings Ordonantie Van Statblaad* 1917 dan menjadi **hari jadi Kota Tebing Tinggi**.

Pada masa pendudukan Jepang, pelaksanaan pemerintah Kota Tebing Tinggi digantikan dengan nama Dewan *Gementee* Tebing Tinggi. Pada tanggal 20 November 1945 dewan kota disusun kembali dengan formasi keanggotaan terdiri dari pemuka masyarakat dan anggota Komite Nasional Daerah. Dewan Kota tidak berjalan lama karena terjadinya pertempuran dengan Militer Jepang pada tanggal 13 Desember 1945 yang diperingati setiap tahun sebagai Peristiwa Berdarah 13 Desember 1945.

Pada tanggal 17 Mei 1946, Gubernur Sumatera Utara menerbitkan keputusan No.103 tentang pembentukan Dewan Kota Tebing Tinggi, yang selanjutnya disempurnakan dengan nama Dewan Perwakilan Rakyat dengan ketua Dewan dirangkap oleh Bupati Deli Serdang.

2. Kondisi Geografi Kota Tebing Tinggi

Kota Tebing Tinggi adalah satu dari tujuh kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Kota yang berjarak sekitar 78 km dari Kota Medan terletak pada 3°19'00" – 3°21'00" Lintang Utara dan 98°11' – 98°21' Bujur Timur. Berada di bagian tengah Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai dengan batas wilayah sebagai berikut.

- Sebelah utara : PTPN III Kebun Rambutan.
- Sebelah selatan : PTPN III Kebun Pabatu.
- Sebelah timur : PT Socfindo Kebun Tanah Besih.
- Sebelah barat : PTPN III Kebun Gunung Pamela Bandar Bejambu.

Kota Tebing Tinggi terletak di dataran rendah Pulau Sumatera dengan ketinggian 18-34 m di atas permukaan laut. Selama tahun 2021 Kota Tebing Tinggi mengalami hari hujan sebanyak 168 hari dengan curah hujan berkisar antara 2-335 mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Juni dengan curah hujan 335 mm. Hari hujan terbanyak bulan November yaitu selama 17 hari.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2006 tanggal 31 November 2006, Kota Tebing Tinggi terdiri dari 5 kecamatan dan 35 kelurahan dengan luas wilayah 38.438 km² dengan rincian sebagai berikut.

a. Kecamatan Bajenis:

- 1) Kelurahan Teluk Karang.
- 2) Kelurahan Bulian.
- 3) Kelurahan Pinang Mancung.
- 4) Kelurahan Berohol.
- 5) Kelurahan Bandar Sakti.
- 6) Kelurahan Durian.
- 7) Kelurahan Pelita.

b. Kecamatan Padang Hilir:

- 1) Kelurahan Tebing Tinggi.
- 2) Kelurahan Tambangan.
- 3) Kelurahan Bagelen.
- 4) Kelurahan Damar Sari.
- 5) Kelurahan Deblod Sundoro.
- 6) Kelurahan Satria.
- 7) Kelurahan Tambangan Hulu.

c. Kecamatan Padang Hulu:

- 1) Kelurahan Pabatu.
- 2) Kelurahan Lubuk Baru.
- 3) Kelurahan Lubuk Raya.
- 4) Kelurahan Padang Merbau.
- 5) Kelurahan Persiakan.
- 6) Kelurahan Tualang.
- 7) Kelurahan Bandarsono.

d. Kecamatan Rambutan:

- 1) Kelurahan Tanjung Marulak.
- 2) Kelurahan Lalang.

- 3) Kelurahan Rantau Laban.
 - 4) Kelurahan Mekar Sentosa.
 - 5) Kelurahan Sri Padang.
 - 6) Kelurahan Karya Jaya.
 - 7) Kelurahan Tanjung Marulak Hilir.
- e. Kecamatan Tebing Tinggi Kota:

- 1) Kelurahan Mandailing.
- 2) Kelurahan Badak Bejuang.
- 3) Kelurahan Bandar Utama.
- 4) Kelurahan Pasar Baru.
- 5) Kelurahan Pasar Gambir.
- 6) Kelurahan Tebing Tinggi Lama.
- 7) Kelurahan Rambung.

Kecamatan Padang Hilir merupakan kecamatan terluas dengan luas 11.441 km² atau 29,76% dari luas Kota Tebing Tinggi. Luas Wilayah Kota Tebing Tinggi 39,17 km². Penduduk Kota Tebing Tinggi pada tahun 2022 berjumlah 177.785 jiwa.

3. Potensi Wilayah Kota Tebing Tinggi

Komoditi tanaman bahan makanan yang dihasilkan di Kota Tebing Tinggi meliputi padi sawah dan ubi kayu yang relatif banyak, lainnya adalah jagung, kacang tanah, kedelai, kacang hijau, dan ubi jalar. Sementara itu, komoditi sayur-sayuran yang dipanen di Kota Tebing Tinggi pada tahun 2021 antara lain bawang merah, cabai, petsai, dan tomat. Produksi padi dan beras berasal dari Kecamatan Bajenis, Kecamatan Padang Hulu, dan Kecamatan Rambutan. Sebagian besar (45,55%) lahan di Kota Tebing Tinggi digunakan sebagai lahan pertanian.

Populasi ternak pada tahun 2021 terdiri dari sapi perah, sapi potong, kambing, domba, dan babi. Sementara itu, populasi ayam dan itik mengalami peningkatan di tahun 2021 dibandingkan tahun 2020.

Berdasarkan perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (jika faktor inflasi dihilangkan), kinerja ekonomi riil Kota Tebing Tinggi tahun 2021 sebesar Rp4,02 triliun atau lebih tinggi dari tahun 2020 sebesar Rp3,93 triliun. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kota Tebing Tinggi mencapai 2,51% dipengaruhi oleh perbaikan ekonomi setelah pemberian vaksin covid-19 tahun 2020 dan 2021.

Kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Tebing Tinggi adalah perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor yaitu sebesar 24,45%, sedangkan sektor konstruksi memberikan kontribusi sebesar 14,49%. Sektor lain yang memberikan kontribusi cukup besar lainnya adalah sektor industri pengolahan yakni sebesar 12,22%.

B. Visi dan Misi

Visi

“Menjadikan Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa dan Perdagangan yang Cerdas, Layak, Mandiri dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Beriman dan Berkualitas”

Misi

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Kota Tebing Tinggi yang Baik.
2. Mewujudkan Kota Tebing Tinggi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah dan Perdagangan.
3. Mewujudkan Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa.
4. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Perkotaan.

Kota Tebing Tinggi dipimpin oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta dibantu Sekretaris Daerah. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi sebelumnya dijabat oleh Umar Zunaidi Hasibuan MM dan Oki Doni Siregar, namun, masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sudah selesai, Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi saat ini dijabat oleh Pj.Wali Kota, Syarmadani.

**DATA PROFIL BUMD
DI WILAYAH PROVINSI
SUMATERA UTARA**

| Nama Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang membawahi BUMD | No | Nama BUMD | Nilai Aset Tahun 2022 (dalam rupiah) | Nilai Ekuitas Tahun 2022 (dalam rupiah) | Nilai Pendapatan Tahun 2022 (dalam rupiah) | Nilai Beban/Biaya Tahun 2022 (dalam rupiah) | Nilai Laba/(Rugi) Setelah Pajak Tahun 2022 (dalam rupiah), tambahkan tanda kurang buka dan kurung tutup (..) untuk nilai rugi | Nilai Kontribusi Pemda kepada BUMD Tahun 2022 (dalam rupiah) | Nilai Kontribusi BUMD kepada PAD Pemda Tahun 2022 (dalam rupiah) | Status BUMD | Bentuk BUMD | Jenis BUMD | Laporan Keuangan BUMD Tahun 2022 |
|---|----|---|--------------------------------------|---|--|---|---|--|--|------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|
| Kabupaten Asahan | 1 | PERUMDA TIRTA SILAUIPIASA KAB. ASAHAN | 58.912.298.341 | 38.722.219.827 | 26.174.460.225 | 30.738.482.378 | 4.564.022.153 | 0 | 0 | Beroperasi | Perumda | PDAM | Audited |
| Kabupaten Batubara | 2 | PDAM TIRTA TANJUNG KABUPATEN BATU BARA | 103.149.507.584 | 101.767.675.920 | 3.550.351.048 | 7.382.102.485 | 3.831.660.508 | 1.341.891.891 | 0 | Beroperasi | Perumda | PDAM | Audited |
| Kabupaten Dairi | 3 | Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lae Nciho Kab. Dairi | 24.380.116.974 | 23.816.823.013 | 14.298.546.754 | 8.060.672.046 | 6.237.874.708 | 2.275.000.000 | 0 | Beroperasi | Perumda | PDAM | Audited |
| | 4 | Perusahaan Daerah Pasar Kab. Dairi | 33.993.345.413 | 32.206.203.597 | 2.589.813.623 | 5.039.208.218 | 2.449.394.595 | 0 | 0 | Beroperasi | Perusda | Pasar | Audited |
| Kabupaten Deli Serdang | 5 | PDAM Tirta Deli | 70.528.182.677 | 61.558.600.493 | 24.960.647.960 | 33.280.841.587 | 8.320.193.627 | 2.500.000.000 | 0 | Beroperasi | Perusahaan Daerah Air Minum | PDAM | Audited |
| | 6 | PT. BHINEKA PERKASA JAYA | 1.408.089.212 | 1.395.162.860 | 2.863.228.049 | 1.558.551.541 | 20.782.863 | 0 | 0 | Beroperasi | Perseroan Terbatas | Perseroan Terbatas | Audited |
| Kabupaten Karo | 7 | PDAM TIRTA MALEM | 19.195.510.181 | 7.474.357.166 | 6.507.642.927 | 9.404.171.541 | 2.896.528.614 | 0 | 0 | Beroperasi | PDAM | PDAM | Audited |
| Kabupaten Labuhanbatu | 8 | PUDAM TIRTA BINA | 44.325.827.163 | 41.756.698.500 | 16.170.219.736 | 17.522.005.883 | 1.351.786.147 | 0 | 0 | Beroperasi | Perusda | PDAM | Audited |
| Kabupaten Langkat | 9 | PERUMDA AIR MINUM TIRTA WAMPU LANGKAT | 53.774.615.378 | 52.194.027.807 | 18.422.365.396 | 18.151.756.066 | 270.609.330 | 2.259.605.000 | 0 | Beroperasi | PERUMDA | PDAM | Audited |
| Kabupaten Mandailing Natal | 10 | PDAM TIRTA MADINA | 6.126.974.846 | 5.797.103.691 | 2.936.520.325 | 2.999.028.087 | 62.450.649 | 0 | 0 | Beroperasi | Perusda | PDAM | Unaudited |
| Kabupaten Nias | 11 | PERUMDA Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias | 11.570.742.715 | 7.301.102.103 | 8.102.985.530 | 7.654.300.616 | 448.684.914 | | | Beroperasi | PERUMDA | PDAM | Audited |
| Kabupaten Nias Barat | 12 | Perumda Aneka Usaha dan Jasa Tanomo | | | | | | | | Tidak Beroperasi | Perumda | Usaha dan Jasa | Unaudited |
| Kabupaten Nias Selatan | 13 | PT. BUMI NISEL CERLANG | 43.862.476.483 | 43.463.213.150 | 17.022.899 | 54.089.691 | 37.066.792 | | | Tidak Beroperasi | Perseroan Terbatas | Pembangunan, Perdagangan, Pertanian, Perindustrian, Pengangkutan Darat, Jasa Percetakan dan Perbengkelan | Unaudited |
| Kabupaten Pakpak Bharat | 14 | PERUMDA PAKPAK AGRO LESTARI | 15.631.474.059 | 15.607.994.059 | 91.456.850 | 778.375.585 | 408.376.429 | 0 | 0 | Beroperasi | Perusda | Perdagangan | Audited |
| Kabupaten Simalungun | 15 | PDAM TIRTA LIHOU KAB. SIMALUNGUN | 56.281.188.740 | 50.888.390.784 | 26.949.350.028 | 20.623.347.949 | 317.197.890 | | | Beroperasi | Perusahaan Daerah | PDAM | Audited |
| Kabupaten Tapanuli Selatan | 16 | PT. Tapanuli Selatan Membangun | 32.486.674.457 | 32.365.180.461 | 36.592.534.077 | 2.874.656.779 | 33.717.877.298 | 0 | 19.527.500.000 | Beroperasi | Perseroan Terbatas | Aneka Usaha | Audited |
| Kabupaten Tapanuli Tengah | 17 | PDAM MUAL NAULI KABUPATEN TAPANULI TENGAH | 22.566.166.017 | 21.694.436.067 | 5.357.951.206 | 5.550.865.470 | 191.834.403 | 0 | 150.000.000 | Beroperasi | Perusda | PDAM | Audited |
| | 18 | PT. MANSALAR TAPIAN NAULI KABUPATEN TAPANULI TENGAH | 476.198.663 | 329.198.663 | 470.068.150 | 485.514.555 | 15.446.405 | 0 | 0 | Beroperasi | Perusahaan Terbatas | Bidang Jasa Kepariwisata | Unaudited |
| | 19 | PT. Sarana Pembangunan Tapanuli Tengah | 3.178.497.891 | 2.003.002.891 | 2.743.153.415 | 2.482.385.608 | 13.248.963 | 0 | 0 | Beroperasi | Perseroan Terbatas | Perseroan Terbatas | Audited |
| Kabupaten Tapanuli Utara | 20 | PERUMDA MUAL NA TIO | 33.050.272.996 | 32.812.801.652 | 9.314.610.481 | 10.456.140.910 | 1.141.530.429 | 3.000.000.000 | 0 | Beroperasi | Perusda | PDAM | Audited |
| | 21 | PERUSAHAAN DAERAH PERTANIAN KABUPATEN TAPANULI UTARA | 13.111.773.779 | 12.864.034.779 | 384.103.622 | 1.664.252.323 | 1.921.261.645 | 0 | 0 | Beroperasi | Perseroan Terbatas | PERUSAHAAN DAERAH PERTANIAN | Audited |

| Nama Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang membawahi BUMD | No | Nama BUMD | Nilai Aset Tahun 2022 (dalam rupiah) | Nilai Ekuitas Tahun 2022 (dalam rupiah) | Nilai Pendapatan Tahun 2022 (dalam rupiah) | Nilai Beban/Biaya Tahun 2022 (dalam rupiah) | Nilai Laba/(Rugi) Setelah Pajak Tahun 2022 (dalam rupiah), tambahkan tanda kurung buka dan kurung tutup (..) untuk nilai rugi | Nilai Kontribusi Pemda kepada BUMD Tahun 2022 (dalam rupiah) | Nilai Kontribusi BUMD kepada PAD Pemda Tahun 2022 (dalam rupiah) | Status BUMD | Bentuk BUMD | Jenis BUMD | Laporan Keuangan BUMD Tahun 2022 |
|---|----|---|--------------------------------------|---|--|---|---|--|--|-------------|--|--|----------------------------------|
| Kota Binjai | 22 | PD Pembangunan Kota Binjai | 6.172.571.638 | 5.920.694.638 | 25.250.000 | 1.117.376.507 | -1.099.444.746 | 0 | 0 | Beroperasi | Perusahaan Daerah (proses perubahan menjadi Perseroda) | Dagang umum | Unaudited |
| | 23 | PDAM TIRTASARI | 13.161.714.916 | 10.810.209.034 | 15.100.676.848 | 15.842.214.193 | 741.537.345 | 0 | 0 | Beroperasi | Perusda | PDAM | Unaudited |
| Kota Medan | 24 | Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Kota Medan | 173.716.908.909 | 149.378.213.929 | 7.261.353.657 | 13.027.427.547 | 5.766.073.890 | 187.924.708.383 | 363.586.543 | Beroperasi | Perusahaan Umum Daerah | Jasa, hiburan, pariwisata, & konservasi | Audited |
| | 25 | PUD Rumah Potong Hewan Kota Medan | 8.567.815.833 | 18.862.573.105 | 1.407.516.000 | 1.711.119.224 | 789.861.689 | 0 | 0 | Beroperasi | PERUMDA | Pemotongan Hewan | Audited |
| Kota Padangsidimpuan | 26 | PDAM TIRTA AYUMI | 7.619.030.011 | 6.937.609.083 | 910.521.505 | 1.600.254.213 | -689.732.708 | 914.000.000 | 0 | Beroperasi | Perusda | PDAM | Unaudited |
| Kota Pematangsiantar | 27 | Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematang Siantar | 57.713.651.334 | 44.443.185.989 | 782.612.354 | 771.245.614 | 11.366.740 | 0 | 0 | Beroperasi | Perusda | Perumahan dan pemukiman, transportasi dan pariwisata, parkir, konstruksi, kesehatan dan farmasi, pendidikan dan pelatihan, perkantoran dan pertokoan, pertanian, perkebunan, pertambangan dan energi, kebersihan dan pertamanan, perbankan dan asuransi, percetakan, informasi dan telekomunikasi, perbengkelan, olahbaga, perdagangan dan industri manufaktur, makan dan minum. | Audited |
| | 28 | Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Uli | 97.772.925.442 | 91.547.627.226 | 70.492.529.642 | 67.882.082.405 | 1.778.598.196 | 1.500.000.000 | 700.000.000 | Beroperasi | Perumda | PDAM | Audited |
| Kota Sibolga | 29 | Perusahaan Daerah Sibolga Nauli (PD.SINA) | 223.950.475 | 128.337.055 | 370.134.074 | 476.475.211 | 105.595.244 | 0 | 0 | Beroperasi | Perusda | Perikanan, Perdagangan dan jasa, Pariwisata | Unaudited |
| | 30 | Perumda Air Minum Tirta Nauli | 37.150.599.422 | 36.933.838.347 | 19.983.828.284 | 19.709.219.695 | 213.061.770 | 0 | 117.183.973 | Beroperasi | Perumda | PDAM | Audited |
| Kota Tanjungbalai | 31 | PDAM TIRTA KUALO KOTA TANJUNGBALAI | 32.577.021.260 | 20.033.247.518 | 24.540.112.511 | 26.236.443.334 | 1.608.709.893 | | | Beroperasi | Perusda | PDAM | Audited |
| Kota Tebing Tinggi | 32 | PERUMDA Air Minum Tirta Bulian | 50.113.260.712 | 48.772.378.309 | 11.174.666.809 | 12.807.151.573 | 1.632.484.764 | 4.544.680.000 | 0 | Beroperasi | Perusda | PDAM | Audited |
| Pemerintah Provinsi Sumatera Utara | 33 | PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara | 40.619.103.000.000 | 4.545.406.000.000 | 367.872.000.000 | 1.896.145.000.000 | 700.718.000.000 | 100.000.000.000 | 265.798.000.000 | Beroperasi | PT | Perbankan | Audited |
| | 34 | PD. Aneka Industri dan Jasa Provsu | 13.266.566.974 | 12.562.337.580 | 6.340.512.381 | 2.974.147.223 | 58.750.920 | | 106.481.456 | Beroperasi | Perusda | Aneka Usaha | Audited |
| | 35 | PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara | 55.334.577.373 | 51.755.828.552 | 15.766.648.405 | 12.876.822.203 | 11.384.328.773 | | 2.008.999.195 | Beroperasi | Perseroda | Aneka Usaha | Audited |
| | 36 | PT. Dhirga Surya Sumatera Utara | 255.962.905.059 | 252.088.988.343 | 1.580.618.400 | 667.544.083 | 2.003.495.047 | | | Beroperasi | Perseroda | Aneka Usaha | Audited |
| | 37 | Perumda Tirtanadi | 1.095.883.028.545 | 1.048.319.829.094 | 763.470.241.831 | 676.579.361.616 | 66.064.456.355 | 6.682.775.231 | 315.000.000.000 | Beroperasi | Perumda | PDAM | Audited |



BPK SUMUT

BERKARISMA

- **B**ermanfaat
- **K**ompeten
- **A**kurat
- **R**esponsif
- Anti **S**uap
- **M**anajemen Waktu yang Baik

 @bpkrisumut

 humastu.sumaterautara@bpk.go.id

 0813 60000 422

 sumut.bpk.go.id

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jl. Imam Bonjol Nomor 22, Kelurahan Madras Hulu,
Kecamatan Medan Polonia
Kota Medan, Sumatera Utara, 20152